



Pemerintah  
Kabupaten Ngada



# Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngada

---

Tahun 2025 – 2045





**Pemerintah Kabupaten Ngada**  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

**Rancangan Akhir**  
**Rencana Pembangunan Jangka**  
**Panjang Daerah (RPJPD)**  
**Kabupaten Ngada**  
Tahun 2025-2045



BUPATI NGADA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Mendukung, - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 204 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Jawa, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 1653);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Uptan Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836).

Dinyatakan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA**

dan

**BUPATI NGADA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045**

**HAB I**

**RETENTJAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun

2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
4. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
5. Isi Strategis adalah kondisi atau hal yang harus dipertahankan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi.
8. Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
9. Sasaran adalah rumusan kondisi yang mengimplikasikan pencapaian tujuan pembangunan daerah atau pencapaian hasil program program daerah.
10. Area Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelenggaraan permasalahan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Strategis adalah langkah-langkah berbasis program-program unggulan untuk mewujudkan visi dan misi.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikuatkan/dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
14. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan.

- pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk mencapai capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.
15. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
  16. Bupati adalah Bupati Ngada.
  17. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

## Paragraf 2

- (1) Maksud dan Tujuan dari penyusunan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 adalah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional serta dalam rangka mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yang dilaksanakan dengan kondisi, karakteristik dan kewenangan daerah.
- (2) Tujuan dari RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menjadi pedoman bagi arah pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang akan datang;
  - b. menjadi pedoman bagi perencanaan 4 (empat) kali RPJMD sehingga dapat terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan kepada daerah.

## BAB II SISTEMATIKA DAN ISI RPJPD

### Paragraf 3

- (1) Sistematika RPJPD meliputi:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis;
  - d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah;

e. BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan

f. BAB VI : Penutup.

[2] Ketentuan mengenai isi dan tujuan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 4

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJPD mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan RPJPD telah berpedoman pada RPJPD provinsi dan RIRW Daerah.

#### Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi RPJPD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV  
KEJENTUAN PENUTUP**

**Paragraf 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditandatangani di Bajawa  
pada tanggal 11 Desember 2024

DUPATI NGADA

PARI ANTERAS

Diundangkan di Bajawa  
pada tanggal 11 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

THEODORUS YOSEPUS NONGU

LEMbaran DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2024 NOMOR 9,  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA PROVINSI  
NUSA TENGARA TIMUR NOMOR : NG.REG.09/2024.

**PARAF KOORDINASI**

SEKRETARIS DAERAH	
PI. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PENGURUSAN	
PI. BAHAN BP LINDUNG	
KABANG HUKUM	

PEMBELAHAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

**I. UMUM**

Perencanaan pembangunan Kabupaten Ngada telah banyak mengalami perubahan sejalan dengan perubahan lingkungan strategis dan peraturan perundangan. Tahapan pembangunan yang disusun dalam masa lalu telah menetapkan dasar-dasar bagi suatu proses pembangunan berkelanjutan dan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti tercermin dalam berbagai indikator ekonomi dan sosial.

Perubahan sistem tata kelola pemerintahan dan pola penyelenggaraan negara serta amandemen UUD 1945 tersebut berimplikasi pada munculnya paradigma dan perubahan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut ditandai dengan ditempuhnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan perlunya disusun perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Selain itu, juga ditandai dengan diundungkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua Undang-Undang ini mengamanatkan pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah 20 tahunan.

Perubahan dan perkembangan Kabupaten Ngada sangat pesat sehingga berdampak pada perubahan di berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, maupun aspek keamanan. Dengan keadaan tri aksa Kabupaten Ngada mempunyai tantangan dan permasalahan yang unik yang harus diselesaikan dengan penyusunan perencanaan pembangunan yang komprehensif, integratif, dan holistik.

Sebagai langkah untuk mengembangkan potensi-potensi, tantangan dan permasalahan yang ada, diperlukan suatu perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Oleh karena itu, untuk ketahanan perubahan-perubahan mengenai perencanaan pembangunan daerah serta penyusunan arah pembangunan jangka panjang daerah, pemerintah daerah Kabupaten Ngada menyusun Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045 dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, volitik, atas bawah (top down) dan bawah atas (bottom up). Pendekatan teknokratik sendiri dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang didasarkan oleh para pakar dan tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan substansi yang dibutuhkan RPJPD termasuk memperhatikan struktur dan pola ruang wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngada.

Pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan untuk mendapatkan aspirasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mewujudkan rasa memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang. Sedangkan pendekatan politik dilakukan dengan proses konsultasi dan pembahasan dengan anggota dewan mulai dari penyusunan rancangan awal serta mengidentifikasi dan mengkomunikasikan perubahan dari agenda-agenda pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Selanjutnya, pendekatan atas bawah (top down) dan bawah atas (bottom up) dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan di Kabupaten Ngada, yaitu dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. Hasil dari proses ini selanjutnya disampaikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh perangkat daerah baik dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi maupun dari seluruh Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada.

Berdasarkan rumusan visi RPJPN, RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, nilai dan budaya masyarakat Ngada serta respon atas berbagai isu strategis, maka rumusan visi RPJPD Kabupaten Ngada tahun 2025-2045, yaitu *"Ngada Se-Maju-Maka yang Maju, Bertalenta, Berkeadilan dan Berkelanjutan"*. Hal ini menjadi dasar pemertanian kebijakan pembangunan selama 20 tahun ke depan di Kabupaten Ngada.

Secara keseluruhan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 tahun dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan daerah yang memuat visi, misi, sasaran pokok, dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Selain itu, RPJPD juga menjadi pedoman dalam penyusunan visi misi dan program calon Bupati dan wakil Bupati dalam rencana pembangunan.

## II. DASAR DEMI PASAL

Pasal 1

Cakupan Jalan

Pasal 2

Cakupan Desa

Pasal 3

Cukup Jelas  
Pasal 4  
Cukup Jelas  
Pasal 5  
Cukup Jelas  
Pasal 6  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 9

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Dasar Hukum.....	3
1.3    Hubungan Antar Dokumen.....	7
1.3.1    Keterkaitan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045 .....	8
1.3.2    Keterkaitan RPJPD dengan RTRW Kabupaten Ngada .....	10
1.3.3    Keterkaitan RPJPD dengan KLHS RPJPD Tahun 2025-2045.....	10
1.4    Maksud dan Tujuan.....	11
1.5    Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b> .....	<b>14</b>
2.1    Aspek Geografi dan Demografi .....	14
2.1.1    Aspek Geografi.....	14
2.1.2    Aspek Demografi.....	97
2.2    Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	105
2.2.1    Kesejahteraan Ekonomi.....	105
2.2.2    Kesejahteraan Sosial Budaya.....	113
2.3    Aspek Daya Saing.....	125
2.3.1    Daya Saing Ekonomi Daerah.....	125
2.3.2    Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	132
2.3.3    Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah.....	136
2.3.4    Daya Saing Iklim Investasi.....	140
2.4    Aspek Pelayanan Umum .....	144

2.4.1	Indeks Reformasi Birokrasi .....	144
2.4.2	Opini BPK .....	146
2.4.3	Nilai SAKIP .....	146
2.4.4	Indeks Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) .....	148
2.5	Evaluasi Hasil RPJPD .....	149
2.6	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik .....	154
2.6.1	Proyeksi Demografi .....	156
2.6.2	Analisis Kebutuhan Sarana Prasarana .....	168
2.6.3	Proyeksi Kebutuhan Guru dan Fasilitas Pendidikan .....	178
2.6.4	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan.....	180
2.7	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.....	183
2.7.1	Pengembangan Produk Unggulan Pertanian.....	183
2.7.2	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah dalam Mendukung NTT sebagai “Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara” .....	185
2.7.3	Pengembangan Kawasan Strategis Berdasarkan RTRW Kabupaten Ngada.....	187
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....</b>		<b>191</b>
3.1	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	191
3.1.1	Permasalahan Ekonomi .....	191
3.1.2	Permasalahan Sosial dan SDM .....	192
3.1.3	Permasalahan Lingkungan Hidup .....	193
3.1.4	Permasalahan Infrastruktur.....	194
3.1.5	Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan .....	195
3.2	Isu Strategis Daerah .....	196
3.2.1	Isu Strategis Global.....	196
3.2.2	Isu Strategis Nasional.....	197
3.2.3	Isu Strategis Regional .....	198
3.2.4	Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan .....	203
3.2.5	Isu Strategis Kabupaten Ngada.....	203

<b>BAB IV VISI DAN MISI DAERAH.....</b>	<b>209</b>
4.1	Visi Daerah..... 209
4.2	Misi Daerah ..... 213
4.2.1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing ..... 215
4.2.2	Mewujudkan Perekonomian yang Inklusif dan Menyejahterakan ..... 216
4.2.3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif..... 217
4.2.4	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan ..... 219
4.2.5	Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Merata, Berkeadilan, dan Berkesinambungan..... 221
<b>BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK .....</b>	<b>223</b>
5.1	Arah Kebijakan Daerah..... 223
5.2	Sasaran Pokok..... 227
5.2.1	Arah Pembangunan RPJPN dan Sasaran Pokok Kabupaten Ngada ..... 255
5.2.2	Arah Kebijakan Transformasi..... 258
5.2.3	<i>Game Changers</i> (Upaya Transformasi Super Prioritas) ..... 291
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>299</b>

# DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kondisi Topografi Kabupaten Ngada.....	17
Tabel 2. 2 Kondisi Morfologi Kabupaten Ngada .....	20
Tabel 2. 3 Kondisi Lereng Kabupaten Ngada .....	20
Tabel 2. 4 Jenis Tanah Kabupaten Ngada.....	22
Tabel 2. 5 Curah Hujan Kabupaten Ngada .....	23
Tabel 2. 6 Formasi Geologi Kabupaten Ngada .....	25
Tabel 2. 7 Inventaris Mata Air Kabupaten Ngada .....	27
Tabel 2. 8 Inventaris Sungai Kabupaten Ngada .....	34
Tabel 2. 9 Sebaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Ngada.....	35
Tabel 2. 10 Inventaris Danau Kabupaten Ngada.....	36
Tabel 2. 11 Penggunaan Lahan Kabupaten Ngada Tahun 2023.....	36
Tabel 2. 12. Kawasan Perkotaan di Kabupaten Ngada .....	39
Tabel 2. 13. Sistem Pusat Perkotaan di Kabupaten Ngada.....	41
Tabel 2. 14. Potensi Bahaya di Kabupaten Ngada.....	47
Tabel 2. 15. Potensi Bahaya Banjir Per Kecamatan di Kabupaten Ngada .....	48
Tabel 2. 16. Potensi Bahaya Banjir Bandang Per Kecamatan di Kabupaten Ngada.....	49
Tabel 2. 17. Potensi Bahaya Gempabumi Per Kecamatan di Kabupaten Ngada .....	50
Tabel 2. 18. Potensi Bahaya Kekeringan PerKecamatan di Kabupaten Ngada .....	51
Tabel 2. 19. Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim Per Kecamatan di Kabupaten Ngada .....	52
Tabel 2. 20. Potensi Bahaya Tanah Longsor Per Kecamatan di Kabupaten Ngada.....	53
Tabel 2. 21. Potensi Bahaya Letusan Gunung Api Ebulobo .....	53
Tabel 2. 22. Potensi Bahaya Letusan Gunung Api Inelika.....	54
Tabel 2. 23. Potensi Bahaya Letusan Gunung Api Inerie .....	54
Tabel 2. 24. Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan.....	55
Tabel 2. 25. Bahaya Tsunami Per Kecamatan di Kabupaten Ngada.....	56
Tabel 2. 26. Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi.....	57
Tabel 2. 27 Tingkat Adaptif dan Perubahan Iklim Kabupaten Ngada .....	59
Tabel 2. 28 Kerentanan Iklim Kabupaten Ngada .....	61
Tabel 2. 29 Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi Rencana Kerja Indonesia’s Folu Netsink 2030 Kabupaten Ngada .....	63
Tabel 2. 30 Indeks Kualitas Air Kabupaten Ngada Tahun 2021-2022 .....	65
Tabel 2. 31 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Ngada Tahun 2021-2022.....	66
Tabel 2. 32 Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Ngada Tahun 2021-2022.....	66
Tabel 2. 33 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada Tahun 2021-2022.....	66
Tabel 2. 34 Capaian Kinerja Penanganan Persampahan Tahun 2019-2022.....	67
Tabel 2. 35 Daya Dukung Lahan Kabupaten Ngada .....	72

Tabel 2. 36 Proyeksi Daya Dukung Lahan Kabupaten Ngada Tahun 2023-2045 .....	74
Tabel 2. 37 Luas Panen Tanaman Pangan per kapita Kabupaten Ngada .....	76
Tabel 2. 38 Luas Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Ngada .....	77
Tabel 2. 39 Klasifikasi Kelas Ketersediaan Kebutuhan Beras .....	78
Tabel 2. 40 Rasio Kemampuan Daya Dukung (CCR) Kabupaten Ngada Tahun 2023.....	78
Tabel 2. 41 Proyeksi Rasio Kemampuan Daya Dukung (CCR) Kabupaten Ngada Tahun 2023-2045.....	79
Tabel 2. 42 Perhitungan Daya Dukung Air Kabupaten Ngada Tahun 2023-2045.....	84
Tabel 2. 43 Perhitungan Daya Dukung Air Berdasarkan Sistem Grid Kabupaten Ngada.....	87
Tabel 2. 44 Klasifikasi Kelas Ketersediaan Daya Dukung Lindung.....	90
Tabel 2. 45 Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Ngada 2023 .....	91
Tabel 2. 46 Daya Tampung Pemukiman Kabupaten Ngada 2045 .....	94
Tabel 2. 47 Capaian Kinerja Urusan Pangan Nabati Tahun 2018-2022 .....	96
Tabel 2. 48 Produksi Komoditas Pangan Hewani Tahun 2018-2022 .....	97
Tabel 2. 49 Angka Ketergantungan Kabupaten Ngada, 2018 – 2022.....	105
Tabel 2. 50 Capaian Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngada.....	139
Tabel 2. 51 Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ngada Tahun 2018-2022.....	141
Tabel 2. 52 Opini BPK Kabupaten Ngada tahun 2018-2022 .....	146
Tabel 2. 53 Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Makro Kabupaten Ngada Tahun 2006-2026.....	150
Tabel 2. 54 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal di Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045 .....	169
Tabel 2. 55 Standar Acuan Timbulan Sampah.....	170
Tabel 2. 56 Proyeksi Volume Timbulan Sampah Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045.....	171
Tabel 2. 57 Standar Kebutuhan Prasarana Persampahan .....	172
Tabel 2. 58 Standar Kebutuhan Air Bersih .....	173
Tabel 2. 59 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Ngada Tahun 2025 s/d 2045 .....	174
Tabel 2. 60 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Ngada Tahun 2025 s/d 2045 .....	176
Tabel 2. 61 Proyeksi Kebutuhan Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga di Kabupaten Ngada Tahun 2025 - 2045 .....	177
Tabel 2. 62 Proyeksi Kebutuhan Guru dan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045 .....	179
Tabel 2. 63 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Ngada Tahun 2025- 2045.....	180
Tabel 2. 64 Rencana Desa Wisata Industri Pengolahan Kabupaten Ngada.....	184
Tabel 3. 1 Permasalahan Ekonomi di Kabupaten Ngada .....	192
Tabel 3. 2 Permasalahan Sosial dan SDM di Kabupaten Ngada .....	192
Tabel 3. 3 Permasalahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Ngada .....	194
Tabel 3. 4 Permasalahan Infrastruktur di Kabupaten Ngada .....	194
Tabel 3. 5 Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Ngada .....	195

Tabel 4. 1 Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Ngada.....	212
Tabel 4. 2 Keterkaitan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan RPJPD Kabupaten Ngada .....	213
Tabel 4. 3 Keterkaitan Isu Strategis dengan Misi RPJPD Kabupaten Ngada.....	214
Tabel 5. 1 Arah Kebijakan Berdasarkan Misi .....	224
Tabel 5. 2 Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok.....	228
Tabel 5. 3 Keselarasan Sasaran Pokok Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045 dengan Arah Pembangunan RPJPN dan Program RTRW Kabupaten Ngada.....	255
Tabel 5. 4 Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045 serta Penyelarasan terhadap Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang .....	260
Tabel 5. 5 Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045.....	288

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Peta Administrasi Kabupaten Ngada .....	16
Gambar 2. 2	Peta Topografi Kabupaten Ngada.....	19
Gambar 2. 3	Diagram Kondisi Lereng Kabupaten Ngada .....	21
Gambar 2. 4	Diagram Jenis Tanah Kabupaten Ngada .....	23
Gambar 2. 5	Diagram Curah Hujan Kabupaten Ngada.....	24
Gambar 2. 6	Diagram Formasi Geologi Kabupaten Ngada.....	26
Gambar 2. 7	Diagram Daerah Aliran Sungai Kabupaten Ngada .....	35
Gambar 2. 8	Diagram Penggunaan Lahan Kabupaten Ngada Tahun 2023 .....	37
Gambar 2. 9	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Ngada.....	38
Gambar 2. 10	Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Ngada Tahun 2015-2022.....	46
Gambar 2. 11	Diagram Tingkat Adaptif dan Perubahan Iklim Kabupaten Ngada .....	60
Gambar 2. 12	Diagram Kerentanan Iklim Kabupaten Ngada.....	61
Gambar 2. 13	Diagram Daya Dukung Lahan.....	69
Gambar 2. 14	Peta Daya Dukung Lahan.....	75
Gambar 2. 15	Peta Daya Dukung Pertanian.....	81
Gambar 2. 16	Penentuan Daya Dukung Air.....	82
Gambar 2. 17	Peta Daya Dukung Air .....	85
Gambar 2. 18	Peta Daya Dukung dan Tampung Air Berdasarkan Sistem Grid .....	89
Gambar 2. 19	Peta Daya Dukung Fungsi Lindung.....	92
Gambar 2. 20	Peta Daya Tampung Penduduk.....	95
Gambar 2. 21	Jumlah Penduduk Kabupaten Ngada Tahun 2013-2022 (Jiwa).....	98
Gambar 2. 22	Jumlah Penduduk Kabupaten Ngada berdasarkan jenis kelamin .....	99
Gambar 2. 23	Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Ngada 2013-2022 .....	100
Gambar 2. 24	Kepadatan Penduduk Kabupaten Ngada tahun 2013-2022 .....	101
Gambar 2. 25	Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Ngada tahun 2013-2022.....	102
Gambar 2. 26	Piramida Penduduk Kabupaten Ngada 2022 .....	103
Gambar 2. 27	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia Tahun 2011-2023 (%) .....	107
Gambar 2. 28	Laju Pertumbuhan PDRB Sejumlah Lapangan Usaha di Kabupaten Ngada Tahun 2011-2023 (%).....	108
Gambar 2. 29	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Ngada, Provinsi NTT, dan Indonesia Tahun 2018-2020 .....	109
Gambar 2. 30	Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia Tahun 2013-2023 .....	111
Gambar 2. 31	Perbandingan TPT Kabupaten Ngada, Provinsi NTT, dan Indonesia Tahun 2017-2023 .....	112

Gambar 2. 32 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ngada Tahun 2014-2023 .....	114
Gambar 2. 33 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ngada Tahun 2020-2023 Berdasarkan Hasil Survei Penduduk Tahun 2020 .....	115
Gambar 2. 34 Angka Harapan Hidup Kabupaten Ngada Tahun 2014-2023 .....	116
Gambar 2. 35 Angka Harapan Hidup Kabupaten Ngada Tahun 2020-2023 Berdasarkan Basis Data Survei Penduduk 2020.....	117
Gambar 2. 36 Harapan Lama Sekolah .....	118
Gambar 2. 37 Rata-rata Lama Sekolah .....	119
Gambar 2. 38 Pengeluaran per Kapita (dalam Ribuan) .....	121
Gambar 2. 39 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Ngada dan Provinsi NTT Tahun 2018-2022 .....	122
Gambar 2. 40 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2022.....	123
Gambar 2. 41 Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2022 .....	124
Gambar 2. 42 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Ngada Tahun 2010-2023 (Miliar Rupiah) .....	126
Gambar 2. 43 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ngada Tahun 2010 dan 2023 (%) .....	127
Gambar 2. 44 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2010-2023 (%).....	128
Gambar 2. 45 PDRB (ADHB) per Kapita Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan PDB (ADHB) per Kapita Indonesia Tahun 2019-2023 (Ribu Rupiah) .....	130
Gambar 2. 46 PDRB ADHB dan ADHK per Kapita Kabupaten Ngada Tahun 2019-2023 (Ribu Rupiah) .....	131
Gambar 2. 47 Harapan Lama Sekolah .....	132
Gambar 2. 48 Rata-rata Lama Sekolah .....	133
Gambar 2. 49 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Ngada dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2022 .....	135
Gambar 2. 50 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Ngada dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2022 .....	136
Gambar 2. 51 Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi.....	137
Gambar 2. 52 Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Material .....	138
Gambar 2. 53 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia Tahun 2023 .....	142
Gambar 2. 54 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2022 dan 2023 .....	143
Gambar 2. 55 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Ngada tahun 2018-2022 .....	145
Gambar 2. 56 Nilai SAKIP Kabupaten Ngada tahun 2018-2022 .....	147
Gambar 2. 57 Indeks SPBE Kabupaten Ngada tahun 2018-2022.....	148
Gambar 2. 58 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Ngada (Ribu Jiwa) Tahun 2025-2045.....	158
Gambar 2. 59 Proyeksi Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045 .....	160
Gambar 2. 60 Piramida Penduduk Kabupaten Ngada Tahun 2020.....	161

Gambar 2. 61 Piramida Penduduk Kabupaten Ngada Tahun 2025.....	162
Gambar 2. 62 Piramida Penduduk Kabupaten Ngada Tahun 2030.....	162
Gambar 2. 63 Piramida Penduduk Kabupaten Ngada Tahun 2035.....	163
Gambar 2. 64 Piramida Penduduk Kabupaten Ngada tahun 2040.....	163
Gambar 2. 65 Piramida Penduudk Kabupaten Ngada Tahun 2045.....	164
Gambar 2. 66 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Produktif dan Non Produktif (ribu jiwa) Kabupaten Ngada .....	165
Gambar 2. 67 Tabel Jumlah Proyeksi Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045 .....	166
Gambar 2. 68 Rasio Ketergantungan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2045.....	167
Gambar 2. 69 Peta Destinasi Pariwisata Nasional Kelimutu-Maumere.....	186
Gambar 2. 70 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Ngada.....	190
Gambar 3. 1 Megatren Global.....	196
Gambar 4. 1 Visi dan Penjelasan Pokok Visi RPJPD Kabupaten Ngada.....	210
Gambar 4. 2 Keterkaitan Pokok Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan RPJPD Kabupaten Ngada .....	212
Gambar 5. 1 Penahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045.....	223



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan pembangunan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan sekaligus pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu. Perencanaan menjadi tahapan penting dalam pembangunan daerah, sebab perencanaan pembangunan yang baik dapat menjadi awal kegiatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Proses pembangunan Kabupaten Ngada berjalan dinamis yang ditandai dengan berbagai keberhasilan yang telah diraih di tengah berbagai tantangan yang harus direspon dengan baik. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2006-2026 menunjukkan proses pembangunan yang selama ini dilaksanakan telah memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan kualitas SDM yang ditandai dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat, yaitu sebesar 0,75 persen per tahun dengan capaian IPM sebesar 69,14 pada tahun 2023. Pada aspek perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada mengalami tren positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,24 persen per tahun. Namun demikian, seiring dengan dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, tantangan pembangunan daerah akan semakin kompleks di masa mendatang sehingga diperlukan dokumen perencanaan jangka panjang daerah. Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngada tahun 2025-2045 menjadi

instrumen kebijakan jangka panjang agar pembangunan daerah tetap berkesinambungan terutama memastikan keberhasilan pembangunan yang telah diraih tetap dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan berbagai permasalahan atau tantangan dapat diminimalisir atau diselesaikan.

Selain merespon berbagai keberhasilan dan tantangan pembangunan periode sebelumnya, penyusunan RPJPD Kabupaten Ngada tahun 2025-2045 penting dilakukan dalam rangka merespon kebijakan nasional dan provinsi. Kebijakan nasional dalam hal ini adalah RPJPN tahun 2025-2045 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJPD Kabupaten Ngada tahun 2025-2045. RPJPD Kabupaten Ngada memiliki peran penting dalam mewujudkan visi RPJPN “Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. RPJPD Kabupaten Ngada juga merespon dan mendukung visi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yaitu Nusa Tenggara Timur Mandiri, Maju, Berkelanjutan guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Visi ini memuat arah transformasi NTT ke depan. Di samping itu, dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Ngada juga menjadikan kedua dokumen tersebut sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan transformasi jangka panjang Kabupaten Ngada. Oleh karena itu, antara RPJPD Kabupaten Ngada dengan RPJPD Provinsi NTT dan RPJPN harus memiliki sinergitas yang kuat dalam rangka mewujudkan kesinambungan pembangunan.

RPJPD Kabupaten Ngada juga diposisikan sebagai pedoman untuk dokumen perencanaan jangka menengah, tahunan, dan bahkan bagi seluruh perumusan kebijakan daerah lainnya. Upaya transformasi pembangunan telah tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045 sebagai salah satu upaya untuk menjalankan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Ngada yang memiliki potensi sangat besar berupa sumber daya manusia, ekonomi dan lingkungan dengan dukungan tata kelola pemerintahan dan infrastruktur daerah yang ada demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dengan kata lain, dokumen ini menjadi rujukan bagi seluruh kebijakan daerah untuk 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, muatan RPJPD Kabupaten Ngada harus berkualitas dan sesuai regulasi sehingga dapat dijabarkan ke dalam dokumen turunannya.

Untuk memastikan kualitas dokumen RPJPD, maka proses perumusannya harus menggunakan berbagai pendekatan. Dalam Inmendagri nomor 1 tahun 2024 tentang pendoman penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 menyatakan pendekatan penyusunan RPJPD terdiri dari pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, *bottom-up*, *top down*, holistik, tematik, dan spasial. Seluruh pendekatan tersebut wajib digunakan dalam proses penyusunan RPJPD Kabupaten Ngada, sehingga RPJPD Kabupaten Ngada tahun 2025-2045 yang dihasilkan memiliki muatan substansi yang memadai, berkualitas, kontekstual, dan sesuai regulasi sehingga dapat menjadi pedoman bagi seluruh *stakeholders* dalam perumusan kebijakan daerah ke depan.

## **1.2 Dasar Hukum**

Penyusunan dokumen RPJPD Ngada 2025-2045 mengacu pada berbagai dasar hukum, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
21. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9).

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

RPJPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat rencana makro pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun yang akan datang. RPJPD berposisi sebagai dokumen induk perencanaan yang digunakan

untuk menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan. Dokumen RPJPD secara substansi memuat rumusan visi, misi daerah dan rumusan arah kebijakan, serta sasaran pokok yang disertai dengan indikator utama pembangunan. Rumusan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok yang tertuang dalam dokumen RPJPD akan memberikan panduan dalam merumuskan kebijakan dalam empat periode pembangunan jangka menengah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat berkesinambungan meskipun mengalami pergantian kepala daerah.

RPJPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang di daerah harus disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan lain di level provinsi yaitu RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dokumen perencanaan nasional yaitu RPJPN 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional. Selain itu, penyusunan dokumen RPJPD juga harus memperhatikan dokumen perencanaan lain di level daerah seperti RTRW Kabupaten Ngada dan KLHS Kabupaten Ngada serta dokumen perencanaan sektoral lain yang relevan. Sinkronasi antara dokumen RPJPD Kabupaten Ngada dengan RPJPN perlu untuk dilakukan karena dokumen perencanaan daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Keselarasan antara dokumen rencana pembangunan dengan rencana tata ruang juga perlu diperhatikan guna menjaga prinsip pembangunan berkelanjutan.

### **1.3.1 Keterkaitan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045**

Dokumen RPJPN memuat rencana pembangunan jangka panjang nasional yang berakhir pada tahun 2045 yakni bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka. Indonesia memiliki visi besar untuk mewujudkan Indonesia emas. Visi Indonesia yang dirumuskan dalam dokumen RPJPN adalah "Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan". Visi tersebut memiliki lima sasaran utama yaitu 1) Pendapatan per

kapita setara dengan negara maju; 2) Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; 3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; 4) Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan 5) Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*. Keselarasan RPJPD dengan RPJPN menjadi sangat penting guna memastikan substansi yang diatur sejak Rancangan Awal RPJPD hingga dokumen RPJPD mengacu dan selaras dengan RPJPN.

Visi dan sasaran utama dalam dokumen RPJPN akan dicapai melalui pelaksanaan 8 misi atau agenda pembangunan yang memiliki gagasan besar untuk mewujudkan transformasi Indonesia. Delapan misi tersebut antara lain adalah:



*Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2023 (diolah)*

Kabupaten Ngada memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan transformasi Indonesia. RPJPD Kabupaten Ngada harus mampu menjabarkan dan mendukung keberhasilan transformasi Indonesia emas 2045 melalui transformasi

ekonomi, yang inklusif dan berkelanjutan didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan tata kelola yang inovatif serta kualitas infrastruktur yang memadai.

### **1.3.2 Keterkaitan RPJPD dengan RTRW Kabupaten Ngada**

Penyusunan RPJPD Kabupaten Ngada tahun 2025-2045 mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngada tahun 2024-2044. Periode RTRW Kabupaten Ngada memiliki irisan yang cukup panjang dengan periode RPJPD. Kesesuaian RPJPD dengan RTRW menjadi bagian yang cukup vital mengingat Kabupaten Ngada memiliki potensi pengembangan wilayah yang cukup dinamis.

Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Ngada tahun 2024-2044, tujuan penataan ruang Kabupaten Ngada adalah **“Mewujudkan Kabupaten Ngada sebagai pusat pengembangan pertanian yang tangguh dan berdaya saing, secara berkelanjutan”**. Wujud ruang wilayah yang mendukung pariwisata dan pertanian diharapkan dapat meningkatkan minat investasi, yang didukung oleh sektor agroindustri, agrowisata, dan agribisnis. Hal tersebut diharapkan mampu memicu perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat. Hal ini perlu ditopang dengan pengaturan ruang serta aspek pendukung lainnya, terutama aspek sarana prasarana serta manajerialnya. Guna menjamin terwujudnya tujuan tersebut, maka berbagai kebijakan dan strategi penataan ruang perlu diintegrasikan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045.

### **1.3.3 Keterkaitan RPJPD dengan KLHS RPJPD Tahun 2025-2045**

Penyusunan KLHS yang menyertai penyusunan RPJPD memiliki mekanisme sebagai pengkajian teknis dan pengkajian pembangunan berkelanjutan terhadap perumusan arah kebijakan pembangunan daerah. Penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045 juga turut memperhatikan skenario rekomendasi penyempurnaan yang termuat dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045.

Arah kebijakan pembangunan yang termuat dalam dokumen RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045 dirumuskan dalam rangka mengakselerasi pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan. Secara lebih rinci arah pembangunan RPJPD mengacu pada alternatif skenario yang dirumuskan di dalam rekomendasi KLHS RPJPD sebagai bahan pertimbangan untuk lebih mempertajam arah pembangunan transformasi Kabupaten Ngada.

## **1.4 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045 adalah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional serta dalam rangka mendukung pencapaian visi Indonesia emas 2045 yang disesuaikan dengan kondisi, karakteristik serta kewenangan daerah. Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045 adalah:

1. Menjadi pedoman bagi arah pembangunan Kabupaten Ngada untuk periode 20 tahun yang akan datang;
2. Menjadi pedoman bagi perumusan 4 (empat) kali periode RPJMD sehingga dapat terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan antar masa kepemimpinan kepala daerah.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **Bab I: Pendahuluan**

Bab ini memuat tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan.

### **Bab II: Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Bab ini memuat tentang kondisi umum yang menjelaskan gambaran umum mengenai aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing, pelayanan umum, evaluasi hasil RPJPD tahun 2005-2025, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah. Aspek demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik memuat tentang proyeksi pertumbuhan penduduk dan prediksi kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dalam jangka waktu 20 tahun di Kabupaten Ngada. Bagian pengembangan pusat pertumbuhan wilayah memuat tentang pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang berpengaruh terhadap perkembangan wilayah.

### **BAB III: Permasalahan dan Isu Strategis Daerah**

Bab ini memuat tentang permasalahan-permasalahan dan isu-isu strategis di Kabupaten Ngada yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun, juga sebagai dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah.

### **BAB IV: Visi dan Misi Daerah**

Bab ini memuat tentang Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 yang memuat visi pembangunan Kabupaten Ngada dan misi pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut.

### **Bab V: Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah**

Bab ini memuat arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang merupakan pentahapan pembangunan yang akan dilakukan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok menggambarkan kinerja yang ingin dicapai selama 20 tahun yang dilengkapi dengan indikator sasaran pokok beserta target kinerja.

## **Bab VI : Penutup**

Bab ini memuat salah satunya tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

# BAB II

## GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

#### 2.1.1 Aspek Geografi

Aspek geografi memberikan gambaran karakteristik geografis dan posisi strategis wilayah di Kabupaten Ngada. Aspek geografi menjelaskan tentang peran strategis daerah, potensi sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan KLHS serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.

##### 2.1.1.1 Karakteristik Geografis

Luas wilayah daratan Kabupaten Ngada adalah seluas 173.683,29 Ha. Wilayah administrasi di Kabupaten Ngada terdiri atas 12 kecamatan, 16 Kelurahan dan 206 Desa. Wilayah terluas adalah Kecamatan Riung dengan luas 35.190,31 Ha (20%). Wilayah terkecil adalah Kecamatan Jerebuu dengan luas 4.849,76 Ha (4%). Berikut tabel luas wilayah menurut kecamatan, diagram, dan peta administrasi Kabupaten Ngada.

**Tabel 2.1. Luasan Kabupaten Ngada Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase
1	Aimere	15.324,07	6
2	Bajawa	10.781,95	8
3	Bajawa Utara	15.429,73	10
4	Golewa	10.276,18	5
5	Golewa Barat	6.853,78	5
6	Golewa Selatan	8.056,82	6

7	Inerie	6.571,62	5
8	Jerebuu	4.849,76	4
9	Riung	35.190,31	20
10	Riung Barat	28.672,23	19
11	Soa	8.735,06	6
12	Wolomeze	22.941,78	6
<b>Total</b>		<b>173.683,29</b>	<b>100</b>

Sumber: Permendagri No.44 tahun 2019 dan Permendagri No.55 tahun 2020

Kabupaten Ngada merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pulau Flores Provinsi NTT. Secara astronomis Kabupaten Ngada terletak antara 8° 20' 24.28"-8° 57' 28.39" Lintang Selatan dan 120° 48' 29.26"-121° 11' 8.57" Bujur Timur.

Batas-batas wilayah administratif adalah

1. Sebelah Selatan : Laut Sawu
2. Sebelah Utara : Laut Flores
3. Sebelah Barat : Kabupaten Manggarai Timur
4. Sebelah Timur : Kabupaten Nagekeo



### 2.1.1.2 Topografi

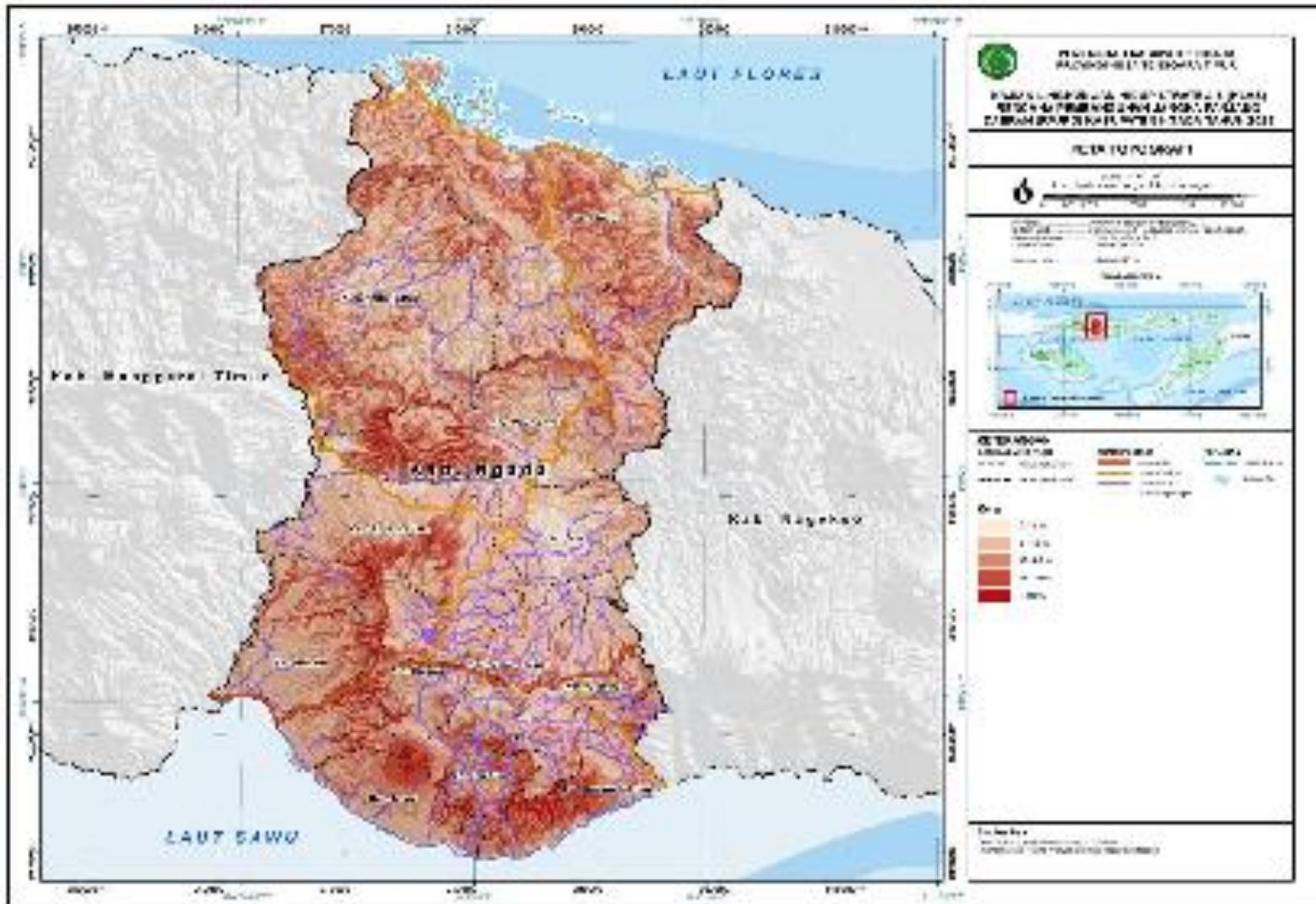
Sebagian besar wilayah Kabupaten Ngada berada di pegunungan dan perbukitan dengan tingkat kemiringan lahan yang relatif tinggi. Secara umum topografi di Kabupaten Ngada terdiri atas 0-250 m, 250-500 m, 500-750 m, 750-1.000 m, dan 1.000-2.184 m. Kabupaten Ngada didominasi oleh kondisi topografi 500-750 m seluas 42095,76 Ha. Berikut tabel, diagram, dan peta topografi Kabupaten Ngada.

**Tabel 2. 1 Kondisi Topografi Kabupaten Ngada**

No.	Kecamatan	Klasifikasi Topografi	Luas (Ha)
1	Aimere	0-250 m	4.390,81
		250-500 m	4.386,11
		500-750 m	3.579,29
		750-1.000 m	1.986,28
		1.000-2.184 m	1.005,34
<b>Jumlah</b>			15.347,83
2	Bajawa	250-500 m	5,05
		500-750 m	300,09
		750-1.000 m	1.681,89
		1.000-2.184 m	8.799,65
<b>Jumlah</b>			10.786,68
3	Bajawa Utara	0-250 m	58,09
		250-500 m	2.526,08
		500-750 m	6.296,94
		750-1.000 m	2.962,64
		1.000-2.184 m	3.592,79
<b>Jumlah</b>			15.436,54
4	Golewa	0-250 m	4,37
		250-500 m	823,13
		500-750 m	2.090,47
		750-1.000 m	3.623,39
		1.000-2.184 m	3.670,41
<b>Jumlah</b>			10.211,77
5	Golewa Barat	250-500 m	701,07
		500-750 m	1.334,53
		750-1.000 m	1.114
		1.000-2.184 m	3.706,66
<b>Jumlah</b>			6.856,26
6	Golewa Selatan	0-250 m	2.296,86
		250-500 m	2.181,99
		500-750 m	2.253,95
		750-1.000 m	1.040,12

No.	Kecamatan	Klasifikasi Topografi	Luas (Ha)
		1.000-2.184 m	449,82
<b>Jumlah</b>			8.055
7	Inerie	0-250 m	2.296,86
		250-500 m	2.043,1
		500-750 m	1.094,41
		750-1.000 m	523,78
		1.000-2.184 m	625,64
<b>Jumlah</b>			6.583,79
8	Jerebuu	0-250 m	38,24
		250-500 m	964,41
		500-750 m	1.638,6
		750-1.000 m	966,76
		1.000-2.184 m	1.315,71
<b>Jumlah</b>			4.923,72
9	Riung	0-250 m	14.127,9
		250-500 m	9.196,33
		500-750 m	5.493,54
		750-1.000 m	5.878,51
		1.000-2.184 m	360,45
<b>Jumlah</b>			35.056,73
10	Riung Barat	0-250 m	274,67
		250-500 m	2.620,7
		500-750 m	8.015,1
		750-1.000 m	14.904,1
		1.000-2.184 m	2.875,2
<b>Jumlah</b>			28.689,77
11	Soa	0-250 m	378,60
		250-500 m	6.786,31
		500-750 m	1.570,53
<b>Jumlah</b>			8.735,45
12	Wolomeze	0-250 m	6,10
		250-500 m	7.799,15
		500-750 m	8.428,31
		750-1.000 m	4.680,03
		1.000-2.184 m	2.036,16
<b>Jumlah</b>			22.949,75
<b>Kabupaten Ngada</b>			173.683,29

Sumber: Hasil Perhitungan GIS dan BIG, 2023 dalam KLHS RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045



Gambar 2. 2 Peta Topografi Kabupaten Ngada

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

### 2.1.1.3 Morfologi dan Kelerengan

Kondisi morfologi di Kabupaten Ngada terdiri atas bentang alam pegunungan vulkanis kwarter, bentang alam dataran alluvial, bentang alam perbukitan sedimen tersier. Kabupaten Ngada didominasi kondisi morfologi berombak dengan luas 101.515,70 Ha. Berikut tabel, diagram dan peta morfologi Kabupaten Ngada.

**Tabel 2. 2 Kondisi Morfologi Kabupaten Ngada**

No.	Kecamatan	Morfologi (Ha)				
		Berbukit, Bergelombang	Bergunung	Berombak	Datar	Landai
1	Aimere	2.129,68	67,19	6.168,71	213,80	6.750,45
2	Bajawa	1.436,78	85,37	8.801,71		462,81
3	Bajawa Utara	1.756,49	51,37	10.505,29	6,72	3.116,96
4	Golewa	606,42		8.314,50		1.358,41
5	Golewa Barat	433,80		5.322,89		1.099,56
6	Golewa Selatan	1.708,34		3.585,38	12,77	2.749,58
7	Inerie	907,99	71,37	2.610,88	2,35	2.981,91
8	Jerebuu	1.349,33	34,48	3.030,58	0,64	436,63
9	Riung	1.060,02		1.7035,63	2.751,18	14.199,62
10	Riung Barat	2.524,60		2.2351,17	6,78	3.803,25
11	Soa			1.741,19	41,60	6.955,03
12	Wolomeze	3.913,49		12.047,71	0,26	6.988,22
<b>Jumlah</b>		<b>17.826,99</b>	<b>309,81</b>	<b>101.515,70</b>	<b>3.036,13</b>	<b>50.902,47</b>

Sumber: Hasil Perhitungan GIS dan BIG, 2023

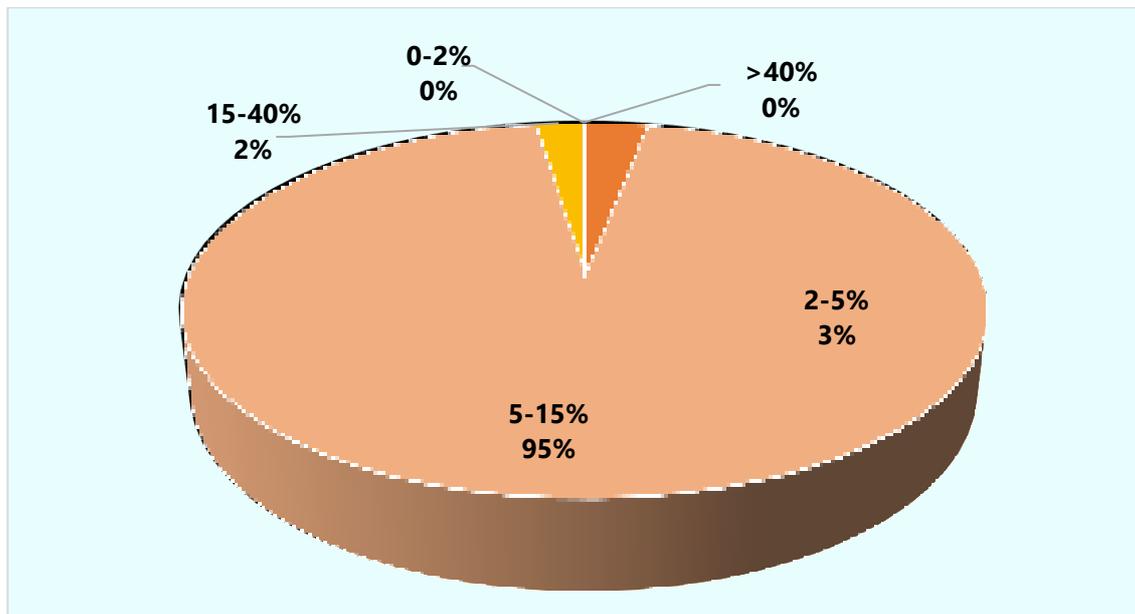
Kelerengan di Kabupaten Ngada terdiri atas 0-2%, 2-5%, 5-15%, 15-40%, dan >40%. Kabupaten Ngada didominasi kelerengan 5-15% seluas 110.507,51 Ha. Berikut tabel, diagram, dan peta kelerengan Kabupaten Ngada.

**Tabel 2. 3 Kondisi Lereng Kabupaten Ngada**

No.	Kecamatan	Kelerengan (Ha)				
		0 - 2 %	2 - 5 %	5 - 15 %	15 - 40 %	> 40 %
1	Aimere	-	1.272,51	10.002,92	4.048,64	-
2	Bajawa	-	1.838,72	7.036,58	1.910,29	9,40
3	Bajawa Utara	-	4.774,68	8.609,73	2.032,27	-
4	Golewa	-	2.610,29	6.964,29	701,60	-
5	Golewa Barat	-	2.244,41	4.124,51	484,86	-
6	Golewa Selatan	-	526,75	4.788,09	2.741,99	-

No.	Kecamatan	Kelerengan (Ha)				
		0 - 2 %	2 - 5 %	5 - 15 %	15 - 40 %	> 40 %
7	Inerie	-	347,12	4.543,11	1.681,38	-
8	Jerebuu	-	73,95	3.021,06	1.754,76	-
9	Riung	4,22	6.756,69	23.271,81	5.157,59	-
10	Riung Barat	-	5.647,17	19.835,93	3.189,13	-
11	Soa	-	5.633,25	2.970,14	131,68	-
12	Wolomeze	-	3.534,43	15.339,34	4.068,01	-
<b>Jumlah</b>		<b>4,22</b>	<b>35.259,97</b>	<b>110.507,51</b>	<b>27.902,20</b>	<b>9,40</b>

Sumber: Hasil Perhitungan GIS dan BIG dalam KLHS RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045



Gambar 2.3 Diagram Kondisi Lereng Kabupaten Ngada

Sumber: Hasil Perhitungan GIS dan BIG dalam KLHS RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045

#### 2.1.1.4 Jenis Tanah

Jenis tanah yang tersebar di Kabupaten Ngada terdiri atas grumosol, latosol, dan mediteran. Tanah grumosol terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tufa vulkanik. Kandungan organik di dalamnya rendah karena terbuat dari batuan kapur, sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah ini tidak subur dan tidak cocok untuk ditanami tanaman. Tekstur tanahnya kering dan mudah pecah terutama pada musim kemarau serta berwarna hitam. Lahan ini biasanya terletak pada permukaan tidak lebih dari 300 meter di atas permukaan laut dan mempunyai topografi datar hingga bergelombang. Tanah grumosol seluas 49.836,01 Ha dan

tersebar di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Soa, dan Kecamatan Wolomeze.

Tanah Latosol terbentuk dari hasil pelapukan batuan sedimen dan metamorf. Tanah latosol berwarna merah sampai kuning, teksturnya liat dan horizon solumnya. Sebaran tanah lithosol berada pada daerah yang mempunyai curah hujan tinggi dan kelembaban tinggi serta pada ketinggian berkisar antara 300-1000 meter diatas permukaan laut. Tanah latosol tidak terlalu subur karena mengandung zat besi dan alumunium. Tanah Latosol seluas 45.672,82 Ha dan tersebar di Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, dan Kecamatan Wolomeze.

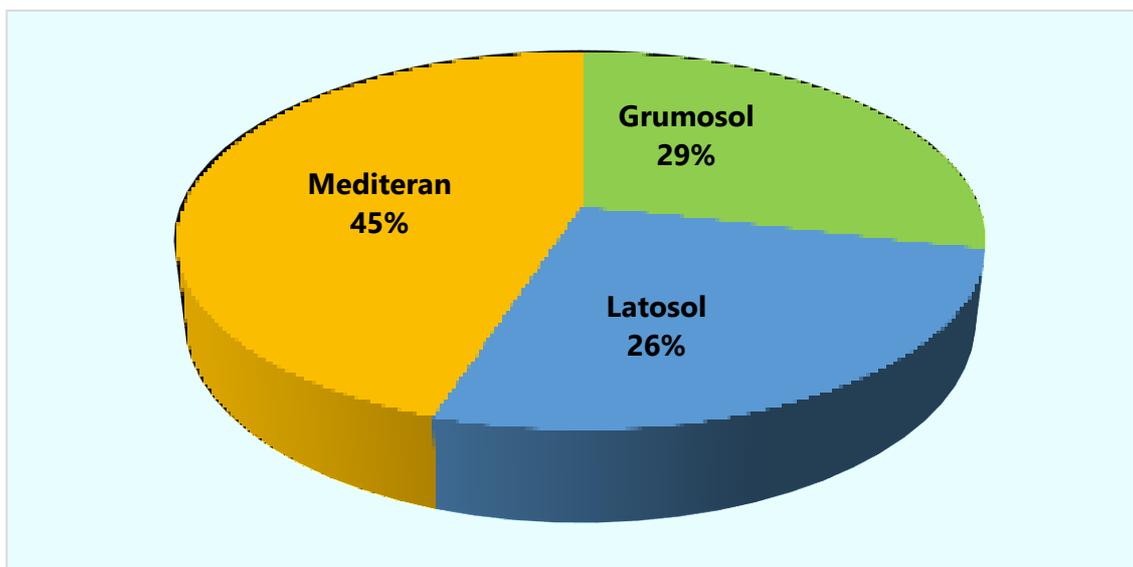
Tanah mediteran adalah tanah yang sifatnya tidak subur yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur. Tanah mediteran berwarna abu-abu. Tanah mediteran banyak mengandung alumunium, besi, air, dan bahan organik sehingga termasuk tanah yang subur. Tanah mediteran seluas 78.174,47 Ha tersebar di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Inerie, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, dan Kecamatan Wolomeze. Berikut tabel, diagram, dan peta jenis tanah Kabupaten Ngada.

**Tabel 2. 4 Jenis Tanah Kabupaten Ngada**

No.	Kecamatan	Jenis Tanah (Ha)		
		Grumosol	Latosol	Mediteran
1	Aimere	6.338,02	-	8.986,05
2	Bajawa	4.680,85	-	6.101,09
3	Bajawa Utara	15.429,73	-	-
4	Golewa	3.387,48	-	6.816,70
5	Golewa Barat	2.753,19	-	4.100,59
6	Golewa Selatan	-	-	8.056,82
7	Inerie	-	-	6.571,62
8	Jerebuu	-	-	4.921,77
9	Riung	-	32.473,55	2.716,76
10	Riung Barat	1.163,38	11.089,41	16.419,44

No.	Kecamatan	Jenis Tanah (Ha)		
		Grumosol	Latosol	Mediteran
11	Soa	8.735,06	-	-
12	Wolomeze	7.348,29	2.109,86	13.483,63
<b>Jumlah</b>		49.836,01	45.672,82	78.174,47

Sumber: Hasil Perhitungan GIS dan BIG dalam KLHS RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045



Gambar 2. 4 Diagram Jenis Tanah Kabupaten Ngada

Sumber: Hasil Perhitungan GIS dan BIG dalam KLHS RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045

#### 2.1.1.5 Klimatologi

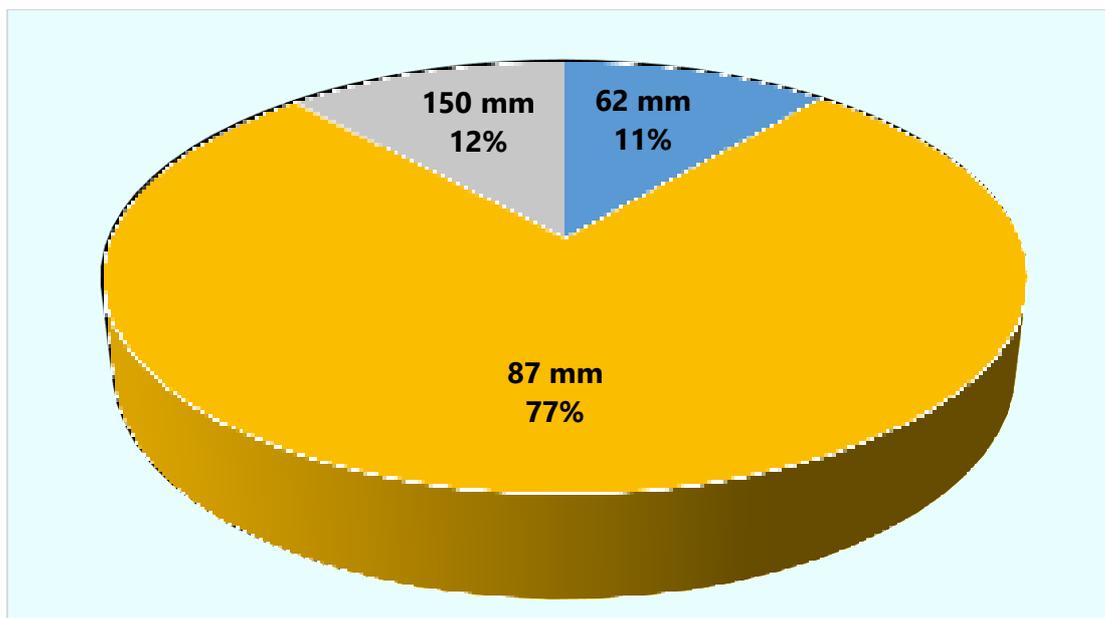
Kabupaten Ngada memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sekitar bulan Juni - September terjadi musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember – Maret terjadi musim hujan. Curah hujan di Kabupaten Ngada berkisar 62 mm, 87 mm serta 150 mm. Secara umum didominasi oleh curah hujan 87 mm yang terjadi di area seluas 133.753,81 Ha. Berikut tabel, diagram, dan peta curah hujan Kabupaten Ngada.

Tabel 2. 5 Curah Hujan Kabupaten Ngada

No.	Kecamatan	Curah Hujan (Ha)		
		62 mm	87 mm	150 mm
1	Aimere	14.964,45	360,72	-
2	Bajawa	2.227,19	8.553,66	-
3	Bajawa Utara	1.274,47	14.155,26	-
4	Golewa	-	10.276,18	-
5	Golewa Barat	-	6.633,41	-

No.	Kecamatan	Curah Hujan (Ha)		
		62 mm	87 mm	150 mm
6	Golewa Selatan	-	4.723,38	3.333,45
7	Inerie	890,93	5.193,42	-
8	Jerebuu	-	5.557,41	-
9	Riung	-	26.130,13	9.060,18
10	Riung Barat	-	20.493,40	8.178,83
11	Soa	-	8.735,06	-
12	Wolomeze	-	22.941,78	-
<b>Jumlah</b>		19.357,04	133.753,81	20.572,46

Sumber: Hasil Perhitungan GIS dan BIG dalam KLHS RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045



Gambar 2. 5 Diagram Curah Hujan Kabupaten Ngada

Sumber: Hasil Perhitungan GIS dan BIG dalam KLHS RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045

### 2.1.1.6 Geologi

Formasi geologi yang terdapat di Kabupaten Ngada terdiri atas Batuan gunung api muda, Endapan pantai, Formasi kiro, Formasi noil toko, Alluvial dan endapan koastal, Produk batuan gunung api tua, Diorit kuarsa, Formasi bari (atambua), Formasi laka, Formasi waihe kang, dan Tanahau.

Kabupaten Ngada didominasi oleh produk batuan gunung api tua seluas 10.276,35 Ha. Kecamatan dengan komposisi formasi geologi terbanyak yaitu Kecamatan Riung meliputi Diorit kuarsa, Aluvial dan endapan koastal, Formasi

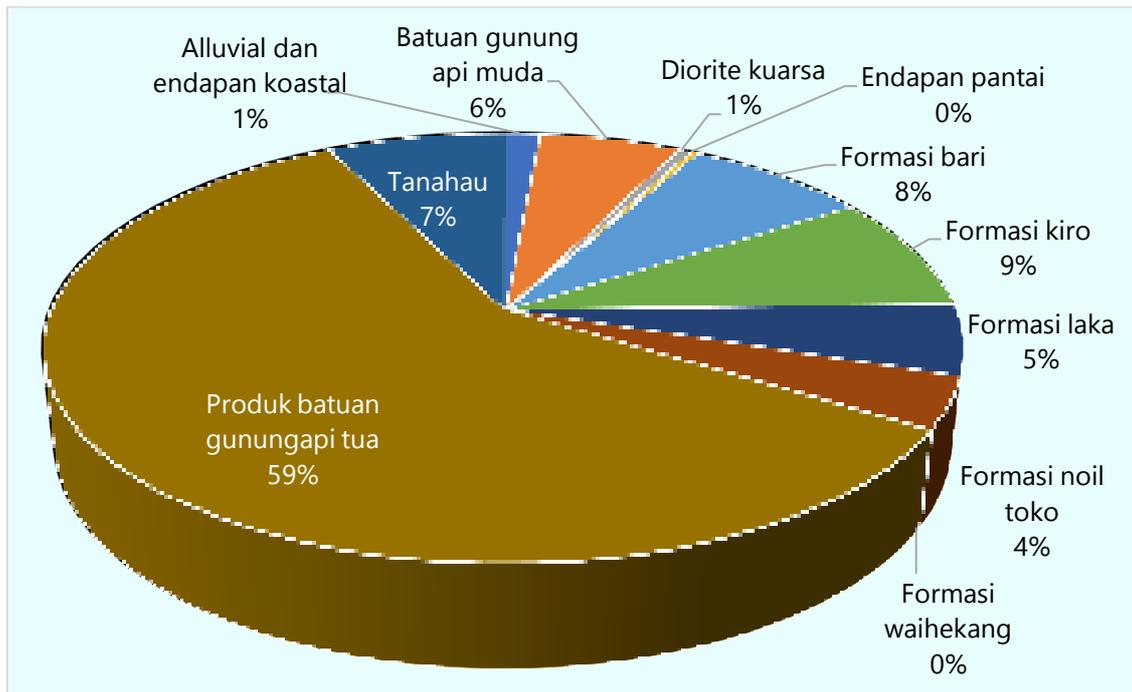
Bari (atambua), Formasi Kiro, Formasi Laka, Formasi Noil Toko, Formasi Waihekang, dan Tanahau. Berikut tabel formasi geologi, diagram, dan peta geologi Kabupaten Ngada.

**Tabel 2. 6 Formasi Geologi Kabupaten Ngada**

No.	Kecamatan	Formasi Geologi	Luas (Ha)
1	Aimere	Endapan Pantai	485,05
		Batuan Gunungapi Muda	737,82
		Produk Batuan Gunungapi Tua	14.101,20
		Jumlah	15.324,07
2	Bajawa	Batuan Gunungapi Muda	793,49
		Produk Batuan Gunungapi Tua	10.007,78
		Jumlah	10.801,28
3	Bajawa Utara	Bantuan Gunungapi Muda	3.224,82
		Produk Batuan Gunungapi Tua	12.204,91
		Jumlah	15.429,73
4	Golewa	Batuan Gunungapi Muda	2.296,44
		Produk Batuan Gunungapi Tua	7.979,74
		Jumlah	10.276,18
5	Golewa Barat	Produk Batuan Gunungapi Tua	6.853,78
		Jumlah	6.853,78
6	Golewa Selatan	Batuan Gunungapi Muda	475,35
		Produk Batuan Gunungapi Tua	7.581,47
		Jumlah	8.056,82
7	Inerie	Batuan Gunungapi Muda	2.748,42
		Produk Batuan Gunungapi Tua	3.839,44
		Jumlah	6.587,86
8	Jerebuu	Produk Batuan Gunungapi Tua	4.814,19
		Jumlah	4.814,19
9	Riung	Aluvial dan Endapan Koastal	2.490,06
		Diorit Kuarsa	946,50
		Formasi Bari (atambua)	7.502,87
		Formasi Kiro	13.914,59
		Formasi Laka	917,53
		Formasi Noil Toko	6.496,35
		Formasi Waihekang	122,89
		Tanahau	2.820,25
		Jumlah	35.211,04
10	Riung Barat	Formasi Bari (atambua)	5.801,61
		Formasi Laka	1.246,04
		Formasi Noil Toko	179,89
		Produk Bantuan Gunungapi Tua	11.362,77
		Tanahau	10.135,02

No.	Kecamatan	Formasi Geologi	Luas (Ha)
		Jumlah	28.725,34
11	Soa	Produk Batuan Gunungapi Tua	8.735,06
		Jumlah	8.735,06
12	Wolomeze	Formasi Kiro	1.160,93
		Formasi Laka	7.206,62
		Produk Batuan Gunungapi Tua	14.500,40
		Jumlah	22.867,94
<b>Jumlah Keseluruhan</b>			<b>173.683,29</b>

Sumber: Hasil Perhitungan GIS dan BIG dalam KLHS RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045



Gambar 2. 6 Diagram Formasi Geologi Kabupaten Ngada

Sumber: Hasil Perhitungan GIS dan BIG dalam KLHS RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045

### 2.1.1.7 Hidrologi

Mata air adalah sebuah keadaan alami yaitu air tanah mengalir keluar dari akuifer menuju permukaan tanah yang menjadi sumber air bersih yang berguna untuk keperluan kehidupan manusia. Sumber Air yang berasal dari mata air tersebut merupakan air yang sudah layak untuk dikonsumsi karena mengalami purifikasi secara alami (self purification). Mata air di Kabupaten Ngada berjumlah 255 dan tersebar di seluruh kecamatan. Berikut tabel inventaris mata air di Kabupaten Ngada.

**Tabel 2. 7 Inventaris Mata Air Kabupaten Ngada**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Nama Mata Air	Jumlah
1	Bajawa Utara	Nabelena	Wae Lagu I	16
			Wae Lagu II	
		Uluwae	Matamua	
			Ulumbola	
		Wololika	Wae Mega	
		Uluwae I	Zeozaa	
			Waemanuk	
			Turekaro	
		Waewea	Mataradhi	
			Waeviso	
			Waewea	
		Turamuri	Waemuri	
		Inelika	Wae Jawa	
		Uluwae II	Waeviso	
Inegenaa	Waeteo			
Genamere	Waerawa			
2	Golewa	Sangadeto	Bobalonga	17
			Labo Ba'i	
			Mata Toda	
		Sarasedu	Labodoza	
			Aebhugha	
			Labotelu	
		Were I	Uluwae	
			Ngorafole	
		Radabata	Waehepa	
			Waedhoa	
		Malanuza I	Waeribi	
		Were	Uluwae I	
			Waebhoto	
		Malanuza	Waeara	
Were IV	Waebhoto			
Sarasedu I	Matanaba			
Dadawea	Liameo			
3	Riung Barat	Wolomeze I	Kedeng	20
			Trot	
		Lananai	Wai Sai	
			Lomak	
			Rawuk	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Nama Mata Air	Jumlah	
		Lanamai 1	Wai Wangkat Bongkel Belo Nepang		
		Benteng Tawa 1	Tepo Mera Bakit		
		Benteng Tawa	Watu Papa		
		Wolomeze II	Rio Taka Pau Monggo		
		Ngara	Mbonggaong		
		Ria	Loga Gakek Bintang		
		Ria I	Alar Wae Zea		
		Wolomeze	Bubok		
<b>4</b>	Aimere	Binawali	Waelako	4	
		Waesae	Kali 2		
		Keligejo	Bhagajae		
		Legelapu	Waepubu		
<b>5</b>	Bajawa	Bela	Mata Air Wae Diti	19	
		Bomari	Wae Tudharaja Wae Bogometu Wae Ngoe Wae Rawu		
		Ubedolumolo	Wae Jawa Wae Kogo		
		Borani	Wae Poa		
		Wawowae	Wae Muku Foka Wae Naru		
		Naru	Wae Iku Lewa		
		Langagedha	Wae Leko Oja Wae Lagu NgoeWae		
		Ngoranale	Wae Witu Wae Rato Kepo		
		Bowali	Wae Betu		
		Pape	Wae Bewa Wae Wio		
<b>6</b>	Golewa Barat	Rakateda II	Wae Roa		8

No.	Kecamatan	Nama Desa	Nama Mata Air	Jumlah
		Watunay	Wae Naidewa	
		Bea Pawe	Wae Suru	
			Wae Muku	
		Mangulewa	Wae Rea	
		Turekisa	Wae Bere	
		Rakalaba	Wae Rea	
		Sobo I	Wae Pazo	
7	Golewa Selatan	Radamasa	Jata Ne Wunga	50
		Sadha	Wae Moka*	
			Koba Neta*	
			Wae Kusi	
			Wae Lebo	
			Were Weke	
			Wae bae	
		Watusipi	Wae Labho	
			Wae Deti	
			Tiba	
		Takatunga	Ae Agi	
			Ae Aborewe	
			Ae Dori	
			Ae Muku	
			Mata Nao	
			Ae Ghaja	
		Kezewea	Wae Labho	
			Lia Rea	
			Taranage	
			Wae Luja	
		Were II	Labho Me Loke	
			Wae Nege	
			Wae Wira	
			Wae Biru	
		Nirmala	Wae Dika	
			Wae Sere	
			Wae Moka	
Boba Lelu				
Lia Rea				
Taranage				
Bawarani	Pada Sule 1			
	Wae Labho			

No.	Kecamatan	Nama Desa	Nama Mata Air	Jumlah
		Wogowela	Lega Leo	
			Lia Langa	
			Oka Sapi	
			Wae Deti	
		Boba	Wae Hadora	
			Pu'u Mo	
			Bo Ke'u	
		Boba I	Wae feni	
			Wae Puti	
			Watu Reka	
			Wae Roro	
			Wae Wera	
		Were III	wae alo laja	
			wae keke	
			Kodhi koki	
			Boba lelu	
			Tara nage	
			Wae Ho'o	
8	Inerie	Manubhara	Wae Waku	13
			Wae Lengi	
			Wae Gio	
		Legeriwu	Keiloga	
			Wae Ha	
			Alo Labo	
		Waebela	Muku Ulu	
		Tiwurana	Nuza	
		Inerie	Wae Tena	
		Sebowuli	Wae Seku	
Wae Bhogi				
Paupaga	Wae Meku			
	Wae Wae			
9	Jerebuu	Watumanu	Suza Meze	25
			Suza Kedhi	
			Bolenawa	
		Tiworiwu I	Wae Muku	
		Tiworiwu	Wae Roa	
		Dariwali	Wae Raghi	
			Wae Me Rengo	
Dariwali I	Wae Raghi			

No.	Kecamatan	Nama Desa	Nama Mata Air	Jumlah
			Wae Me Rengo	
			Wae Roa	
		Naruwolo I	Wae Me Rengo	
			Wae Ha	
		Naruwolo	Lia Gara	
			Roga	
			Dhoki Gara	
			Lia Pao	
		Naruwolo II	Tiwu Hea	
		Nio Lewa	Wae Raghi	
			Wae Merengo	
		Batajawa	Lia Gara	
			Boa Moa	
			Wolo Dhobo	
		Nenowea	Kato Deghi	
			Lia Gara	
			Dhoki Gara	
<b>10</b>	Riung	Tadho	Langsang	23
			Wae wita	
			Wae lus	
		Lengkosambi Utara	Tiwu waso	
		Latung	Sudok	
		Sambinasi	Bintang Ireng	
		Sambinasi Barat	Wae Ume	
		Rawangkalo	Koto	
			Gonggong	
			wae wene	
			Wae Sari	
			Wae Mbage	
			Kazu Ata	
			Bulbuti	
		Winden		
			Wae Wuring	
		Taen Terong	Wae Nio	
		Taen Terong I	Wae Koza	
			Gonggong	
		Taen Terong II	Sumpa Nitu	
		Wangka	Matalee	
		Wangka Selatan	Bonedima	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Nama Mata Air	Jumlah
11	Soa	Waepana	Lunda	37
			Mata Tibu	
			Mata Mude	
		Seso	Mata Wae Hoo	
			Wae Mia	
			Wae Buzu	
			Wae Hoba	
			Wae Loleko	
			Wae Puni	
		Masu	Wae Furafugha	
			Labudolo	
			Toko	
			Muku Dhiu	
			Muku Tabi	
		Mengeruda	Belaroro	
			Wae Meo	
			Bana Meze	
			Bana Sale	
			Sara Kolo	
			Wae Wutu	
		Piga	Wae Bhia	
			Wae Deho	
			Wae Toto	
			Wae Rate Ngee	
			Wae Bula	
			Wae Ngelu Ngai	
		Loa	Wae Pae Logo	
			Wae Na	
			Rita Bhara	
			Labu Dingo	
			Wae Lelu	
			Wae Bulu	
		Tarawaja	Wae Deti	
			Wae Wio	
			Wae Ro	
			Wae Bheku	
			Wae Bo Ghae	
		Wadawea		
12	Wolomeze	Mainai	Mata Wae Lawu	23

No.	Kecamatan	Nama Desa	Nama Mata Air	Jumlah	
			Mata Wae Mbazer		
			Hama Romo		
			Lumak		
		Denatana	Mata Ia		
			Wango Welu		
			Bhunting		
			Molo		
			Bola		
			Bhubung		
			Panas		
			Bhanggo		
			Nginamanu		Mbo
					Nangge
		Mata			
		Kolopenu			
		Kusi			
		Wae Waki			
		Kama			
		Wira			
		Ria Zae			
		Weke Seki			
		Bhoto			
<b>Jumlah</b>				255	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada, 2023

Sungai adalah aliran terbuka dengan ukuran geometrik yaitu penampang melintang, profil memanjang, dan kemiringan lembah yang berubah seiring waktu, tergantung pada debit, material dasar dan tebing. Sungai menjadi sumber air baku utama untuk kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Ngada. Sungai di Kabupaten Ngada berjumlah 13 dan tersebar di semua kecamatan. Berikut tabel inventaris sungai di Kabupaten Ngada.

**Tabel 2. 8 Inventaris Sungai Kabupaten Ngada**

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar (m)		Kedalaman (m)	Debit (m <sup>3</sup> /detik)	
			Permukaan	Dasar		Min	Maks
1	Waewoki	246,1	2,75	-	0,3	0,22	0,25
2	Waewira	-	16,1		0,29	0,45	0,73
3	Wirase	-	1,3	-	1	0,41	0,55
4	Mataloko	-	1,6	-	0,19	0,29	0,63
5	Waeroa Jerebuu	-	2,7		0,11	0,28	0,60
6	Waebela	-	8,8	-	0,15	1,32	2,26
7	Waemokel	-	38		2	2,60	2,90
8	Waebua	-	5		0,12	0,23	0,26
9	Tiwubala	-	6,9	-	0,49	1,87	1,99
10	Waeroa Golewa Barat	-	12,7	-	0,2	0,52	1,78
11	Sangankongkong	-	5,5		0,04	0,40	0,52
12	Alolasi	-	3,5		0,23	0,44	0,49
13	Wulabhara	249,5	19,5	-	2,6	1,35	1,55

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada, 2016

Sungai dengan debit terbesar adalah Sungai Waemokel yang terletak di Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada dengan debit rata-ratanya 2,90 m<sup>3</sup>/detik, sedangkan untuk sungai dengan debit terkecil adalah Waewoki yang terletak di Kecamatan Bajawa.

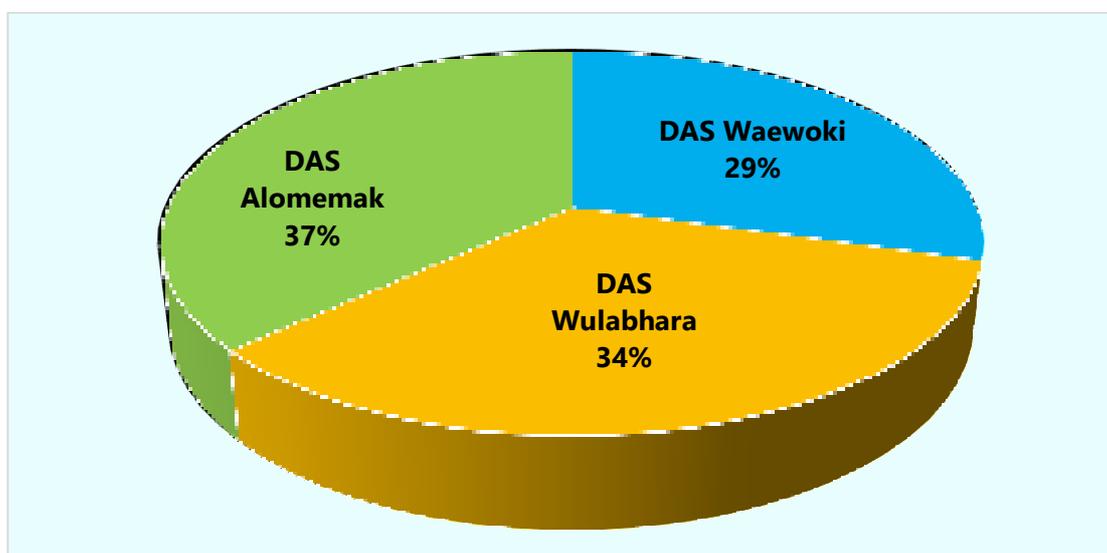
Selain sungai, kita juga mengenal daerah aliran sungai (DAS). Daerah aliran sungai adalah wilayah yang dikelilingi dan dibatasi oleh topografi berupa punggung bukit atau pegunungan. DAS tak hanya meliputi aliran airnya, namun juga bentang alam di sekitar aliran sungai. DAS juga dikenal dengan sebutan watershed atau daerah tangkapan (catchment area). Ada garis batas yang tak terlihat untuk membatasi DAS dan daerah lain. Batas itu biasanya berupa punggung bukit atau pegunungan. Batas DAS biasanya tak sama dengan batas administrasi wilayah. Suatu DAS bisa berada pada satu wilayah maupun beberapa wilayah. Ada DAS yang meliputi beberapa wilayah kota, kabupaten, provinsi, bahkan negara. Kabupaten Ngada terdapat 3 DAS yaitu Waewoki, Wulabhara, dan Alomemak. DAS tersebar di semua kecamatan. DAS dengan luasan terbesar

yaitu DAS Alomemak seluas 25.931,69 Ha. DAS dengan luasan terendah yaitu DAS Waewoki seluas 20.717,55 Ha. Berikut Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Ngada.

**Tabel 2. 9 Sebaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Ngada**

No.	Nama DAS	Luas (Ha)
1	DAS Waewoki	20.717,55
2	DAS Wulabhara	23.866,97
3	DAS Alomemak	25.931,69
<b>Jumlah</b>		70.516,20

Sumber: Hasil Perhitungan GIS dan BIG dalam KLHS RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045



**Gambar 2. 7 Diagram Daerah Aliran Sungai Kabupaten Ngada**

Sumber: Hasil Perhitungan GIS dan BIG dalam KLHS RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045

Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alami jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan. Danau memiliki fungsi utama sebagai wadah penampung air dan pendukung ekosistem perairan darat. Kabupaten Ngada memiliki 9 danau. Danau dengan luasan terbesar diantaranya Danau Waelawa-Uluwae, Terong-Taen Terong, Mulu-Mainai, Kajudulu-Aimere, Marunggela-Riung Barat. Berikut tabel inventaris danau di Kabupaten Ngada.

**Tabel 2. 10 Inventaris Danau Kabupaten Ngada**

No.	Nama Danau	Luas (Ha)	Volume (m <sup>3</sup> )
1	Flobamora – Benteng Tawa	300	750
2	Radang - Ria	300	750
3	Maupulur - Lanamai	300	750
4	Sanai - Wolomeze	300	750
5	Waelawa – Uluwae	400	800
6	Terong – Taen Terong	400	800
7	Mulu - Mainai	400	800
8	Kajudulu - Aimere	400	800
9	Marunggela – Riung Barat	400	800
<b>Jumlah</b>		3.200	7.000

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada, 2016

### 2.1.1.8 Penggunaan Lahan

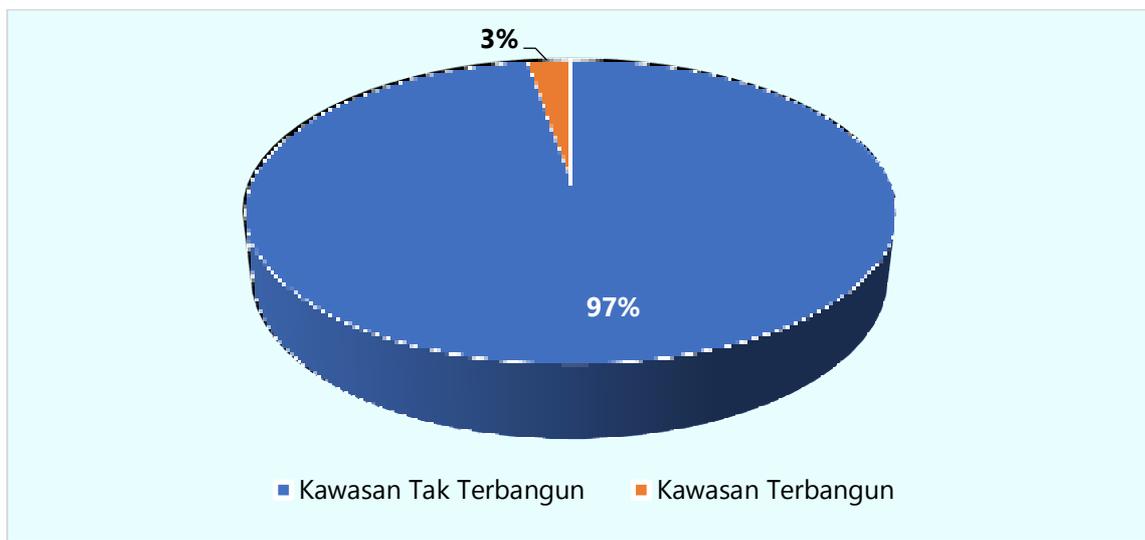
Penggunaan lahan terdiri dari kawasan terbangun dan kawasan tak terbangun. Kawasan terbangun terdiri dari perumahan, industri, perdagangan, jasa dan perkantoran. Kawasan tak terbangun terbagi menjadi kawasan tak terbangun yang digunakan untuk aktivitas (kuburan, rekreasi, transportasi, ruang terbuka) dan kawasan tak terbangun non aktivitas (pertanian, perkebunan, area perairan, produksi dan penambangan sumber daya alam). Berikut tabel, diagram, dan peta penggunaan lahan Kabupaten Ngada tahun 2023.

**Tabel 2. 11 Penggunaan Lahan Kabupaten Ngada Tahun 2023**

No.	Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Prosentase
<b>A</b>	<b>Kawasan Tak Terbangun</b>		
1	Embung	30,60	0,02
2	Hamparan Pasir	917,67	0,53
3	Hutan	42.226,14	24,31
4	Hutan Bakau	356,62	0,20
5	Kebun Campuran	20.507,31	11,81
6	Ladang/Tegalan	13.007,15	7,49
7	Padang Rumput	26.328,75	15,16
8	Perkebunan	14.278,99	8,22
9	Permukaan Lapangan Diperkeras	5,83	0,00
10	Pertambangan	69,23	0,04
11	Rawa	20,94	0,01
12	Ruang Terbuka Hijau	23,62	0,01
13	Sawah	8.248,65	4,75

No.	Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Prosentase
14	Semak Belukar	42.813,79	24,65
15	Sungai	184,36	0,11
16	Tanah Terbuka	81.70	0,05
<b>Jumlah</b>		169.101,35	97,36
<b>B</b>	<b>Kawasan Terbangun</b>		
1	Permukiman dan Tempat Kegiatan	4.581,94	2,64
<b>Jumlah</b>		4.581,94	2,64
<b>Jumlah A dan B</b>		173.683,29	100

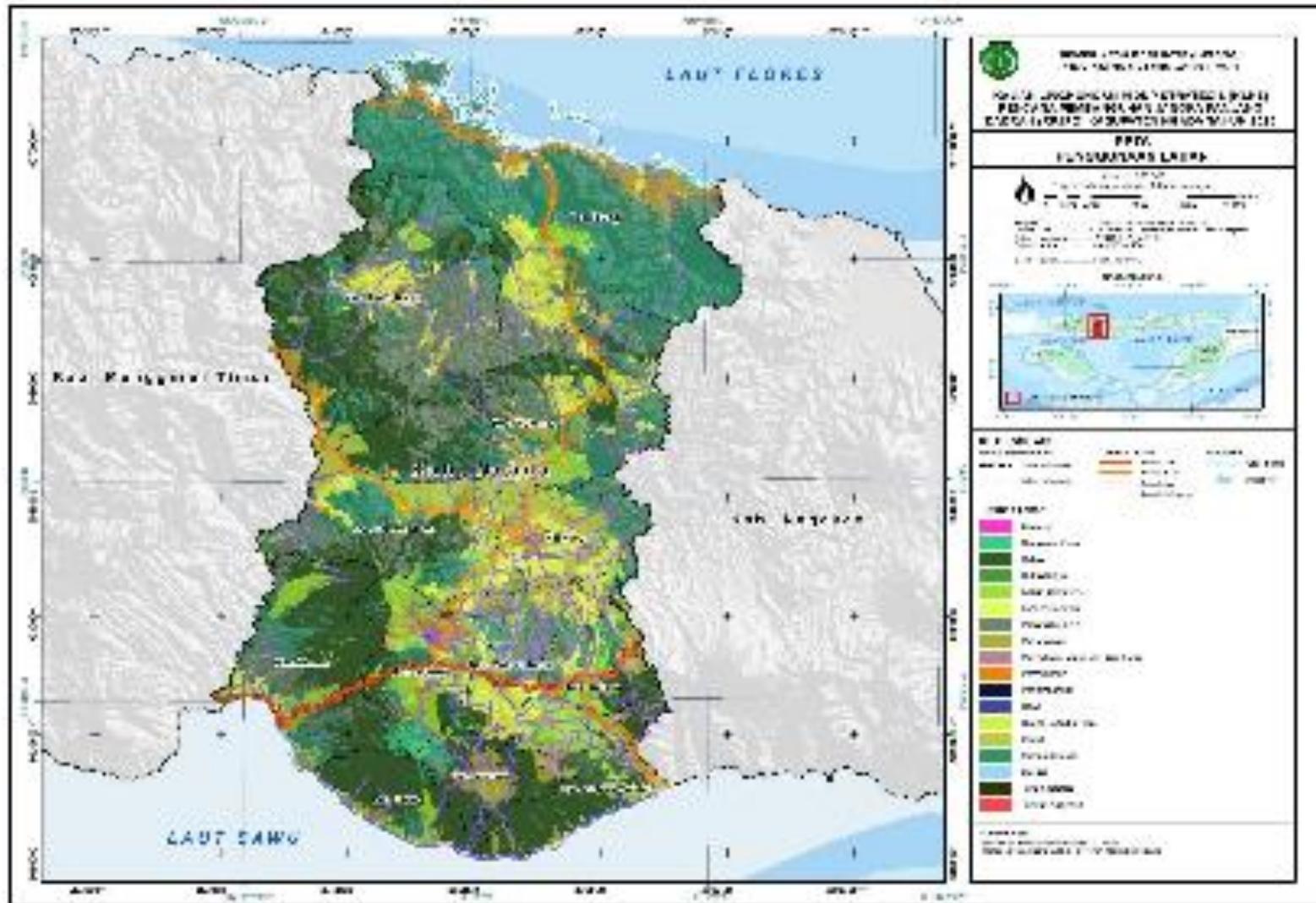
Sumber: Hasil Perhitungan GIS dan BIG dalam KLHS RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045



**Gambar 2. 8 Diagram Penggunaan Lahan Kabupaten Ngada Tahun 2023**

Sumber: Hasil Perhitungan GIS dan BIG dalam KLHS RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045

Kawasan tak terbangun di Kabupaten Ngada terdiri dari Embung, Hamparan Pasir, Hutan, Hutan Bakau, Kebun Campuran, Ladang/Tegalan, Padang Rumput, Perkebunan, Permukaan Lapangan Diperkeras, Rawa, Ruang Terbuka Hijau, Sawah, Semak Belukar, Sungai, dan Tanah Terbuka. Kawasan terbangun di Kabupaten Ngada yaitu permukiman dan tempat kegiatan. Penggunaan lahan di Kabupaten Ngada didominasi Semak Belukar seluas 42.813 Ha atau sekitar 24,64% dari luas Kabupaten Ngada. Kawasan terbangun di Kabupaten Ngada seluas 4.581,94 Ha atau sekitar 2,64% dari luas Kabupaten Ngada.



Gambar 2. 9 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Ngada

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045

### 2.1.1.9 Potensi Pengembangan Wilayah

Struktur pemanfaatan ruang wilayah memberi gambaran mengenai rencana sistem pusat pelayanan permukiman perdesaan dan perkotaan serta sistem perwilayahan di Kabupaten Ngada. Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah membentuk sistem pelayanan yang berhirarki di seluruh wilayah Kabupaten Ngada, sehingga terjadi pemerataan pelayanan, mendorong pertumbuhan wilayah di perdesaan maupun perkotaan. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten, terutama jaringan transportasi.

Pada dasarnya, fungsi kawasan dapat dibagi menjadi dua, yakni kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Rencana kawasan perkotaan dan perdesaan bertujuan untuk mengetahui dan menentukan jenis kegiatan yang sesuai dengan karakter kawasan fungsi yang harus diperankan. Pengembangan sistem perkotaan dan perdesaan didasari untuk menentukan secara administrasi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Adapun administrasi kawasan perkotaan ditetapkan untuk pengembangan sistem perdesaan dan perkotaan di wilayah Kabupaten Ngada.

**Tabel 2. 12. Kawasan Perkotaan di Kabupaten Ngada**

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan
1.	Bajawa	Bajawa
		Faobata
		Susu
		Beja
		Bomari
		Ubedolumolo
		Beiwali
		Wawowae
		Naru
		Borani

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan
		Langagedha
		Tanalodu
		Kisanata
		Jawameze
		Trikora
		Lebijaga
		Pape
		Bowali
		Ngoranale
		Bela
		Ubedolumolo I
2.	Soa	Loa
		Masumeli
		Mageruda
		Piga
		Seso
		Tarawaja
		Waepena
3.	Riung	Latung
		Lengkosambi
		Lengkosambi Barat
		Lengkosambi Timur
		Rawangkalo
		Sambinasi
		Tadho
		Taen Terong
		Wangka
		Wangka Selatan
		Benteng Tengah
Nangamese		
4.	Golewa	Dadawea
		Ekoroka
		Malanuza
		Mataloko
		Radabata
		Ratogesa
		Sangadeto
		Sarasedu
		Sarasedu I

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan
		Todabelu
		Ulu Belu
		Wae La
		Were
		Were I
		Were IV

Sumber: RTRW Kabupaten Ngada 2024 -2044

Setiap kawasan perkotaan memiliki jangkauan pelayanan tertentu sesuai dengan fungsi pelayanan kawasan perkotaan masing-masing. Penentuan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), dan Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) ini dibuat sesuai dengan tingkat pelayanan perkotaan masing-masing dan fungsi yang harus diemban bagi setiap kawasan perkotaan secara hirarki dibawahnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut rencana pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Ngada antara lain meliputi:

- 1) Terdapat 1 (satu) PKWp (Pusat Kegiatan Wilayah Promosi) yaitu Kecamatan Bajawa yang merupakan ibukota Kabupaten Ngada;
- 2) Terdapat 3 (tiga) PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi) yaitu Kecamatan Soa, Kecamatan Riung, dan Kecamatan Golewa;
- 3) Terdapat 8 (delapan) PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) yang bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2. 13. Sistem Pusat Perkotaan di Kabupaten Ngada**

Sistem Pusat Perkotaan	Kecamatan	Lokasi
<b>PKWp</b>	Perkotaan Bajawa	Perkotaan Bajawa
<b>PKLp</b>	Riung	Perkotaan Riung
	Soa	Perkotaan Soa
	Golewa	Perkotaan Golewa Selatan
<b>PPK</b>	Aimere	Aimere
	Jerebuu	Watumanu
	Inerie	Waebela
	Bajawa	Surusina

Sistem Pusat Perkotaan	Kecamatan	Lokasi
	Golewa	Mataloko
	Golewa Selatan	Waturoka
	Golewa Barat	Rakalaba
	Bajawa Utara	Watukapu
	Soa	Warpana
	Riung	Riung
	Riung Barat	Maranggela
	Wolomeze	Wangawelu

Sumber: RTRW Ngada Tahun 2024 - 2044

Wilayah Sungai (WS) merupakan kawasan yang perlu dikelola sebagai sumber daya air yang dapat bermanfaat untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, perlu perencanaan jaringan prasarana sumber daya Wilayah Sungai yang meliputi:

- a) Wilayah sungai Flores yang melintasi Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka dan Flores Timur.
- b) Wilayah sungai dalam Kabupaten yang meliputi Waewaru, Waepua, Aesemi, Bozoa, Leko Boba, Waebela, Lekoena, Waebua, Waemokel, Kali Mbuntal, Alolonggo, Alolasi, Toring, Mulabhara, Kolopenu, Waewoki, Dorarapu, Waebia, Padhagala, Waesao, Lekolanga, Waemeze, Bari, Sangankonkon, dan Kekonzuan.

Cekungan Air Tanah (CAT) merupakan kawasan sumber daya air tanah yang banyak tersimpan di wilayah Kabupaten Ngada. Salah satu CAT yang terdapat di wilayah ini adalah CAT Ruteng. CAT Ruteng merupakan CAT lintas kabupaten yang merupakan potensi air tanah yang pemanfaatannya harus efisien dan diatur dengan mengutamakan air permukaan serta pemantauan dengan jaringan monitoring muka air tanah.

Mengingat Kabupaten Ngada yang berbukit-bukit dengan intensitas curah hujan sedang - tinggi menjadikan wilayah ini memiliki sumber daya air yang melimpah. Beberapa lahan cukup potensial untuk pengembangan pertanian yang perlu didukung dengan pembangunan prasarana irigasi. Daerah-daerah irigasi (DI) di wilayah Kabupaten Ngada perlu dikelola dengan baik agar sumber air untuk kegiatan pertanian dapat berjalan secara optimal.

Kebutuhan akan air bersih untuk wilayah perkotaan/ ibu kota kabupaten maupun ibukota kecamatan belum seluruhnya terlayani oleh PDAM. Sumur gali, sumur bor dan mata air merupakan alternatif dalam pemenuhan kebutuhan air setiap harinya sehingga pemenuhan pelayanan air minum saat ini masih sangat terbatas. Banyaknya potensi sumber daya air dan mata air di wilayah ini perlu dikelola secara optimal mengingat tingkat pengguna air minum terus meningkat. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat persediaan air minum yang ada. Oleh karena itu, penyediaan air minum dimasa yang akan datang perlu adanya pengelolaan sumber-sumber air baru secara optimal dan mengefisienkan ketersediaan sumber air minum yang telah ada serta rencana penyediaan prasarana/jaringan air baku dalam hal ini pembangunan waduk dan embung. Potensi air baku untuk air minum, pertanian dan listrik di Kabupaten Ngada adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Waduk Mukufoka di Kecamatan Bajawa, Waduk Waemeze di Kecamatan Golewa, Waduk Waekoe di Kecamatan Aimere, Waduk Warukia dan Waduk Nampe di Kecamatan Riung Barat;
- 2) Pembangunan Embung Waetale, Embung Waekeo, Embung Mbundai, Embung Waepare, Embung Uluwae I, dan Embung Uluwae II di Kecamatan Bajawa Utara, Embung Waekabe, Embung Alodube, Embung Waekobe II, Embung Pore, Embung Malawatulang, Embung Wongkomunthe dan Embung Podang Kao di Kecamatan Riung Barat, Embung Wulabhara, Embung Mulu, Embung Keja, Embung Poma, Embung Nginamanu dan

Embung Nggurun Dala di Kecamatan Wolomeze, Embung Tasik Terong, Embung Natar Tuak, Embung Lekoleru, Embung Tanalain di Kecamatan Riung, Embung Nunumeo dan Embung Umalelu di Kecamatan Aimere, Embung Waeloga di Kecamatan Bajawa.

Potensi energi listrik di Kabupaten Ngada masih menggunakan PLTD Faobata, PLTP Mataloko dan PLMTH Waeroa dan PLTPb Nage. Kemudian dalam rangka pemerataan pembangunan, maka penerangan ke wilayah terisolasi atau wilayah yang belum terjangkau kebutuhan akan listrik harus dilakukan melalui pengembangan pembangkit tenaga listrik dan jaringan prasarana baru. Untuk mengoptimalkan pelayanan energi listrik pada masa depan, diperlukan adanya peningkatan pelayanan utamanya pada daerah-daerah yang menjadi pusat pertumbuhan wilayah dan wilayah yang menjadi target pengembangan. Pengembangan pembangkit tenaga dan prasarana listrik Kabupaten Ngada meliputi:

1) Rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik :

- Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPb) Mataloko dengan kapasitas terpakai 1 x1,8 MW terdapat di Kecamatan Golewa; dan saat ini sudah memasuki tahap II dokumen ANDAL dan RKL-RPL yaitu untuk Rencana Pembangunan PLTB Mataloko II dengan kapasitas 2x10 MW atau setara 20 MW.
- Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Waeroa kapasitas 60 KW, terdapat di Kecamatan Jerebuu.
- PLTPb Nage dengan luas wilayah 10.410 ha dan Kapasitas diperkirakan sekitar 35 Mega Watt pada kelas cadangan.

2) Rencana jaringan prasarana energi:

- Gardu Induk Bajawa dengan kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV di Kecamatan Bajawa;

- Jaringan Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUT) dengan tegangan 150 KV yaitu menghubungkan kota Bajawa – Ruteng – Labuan Bajo; dan
  - Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan 70 KV yang menghubungkan PLTU Ulumbu Ruteng ke Bajawa, Bajawa ke Ende.
- 3) Pengembangan jaringan listrik energi terbarukan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan pembangkit Listrik Tenaga Microhidro pada lokasi - lokasi yang sulit dijangkau namun memiliki potensi pengembangannya

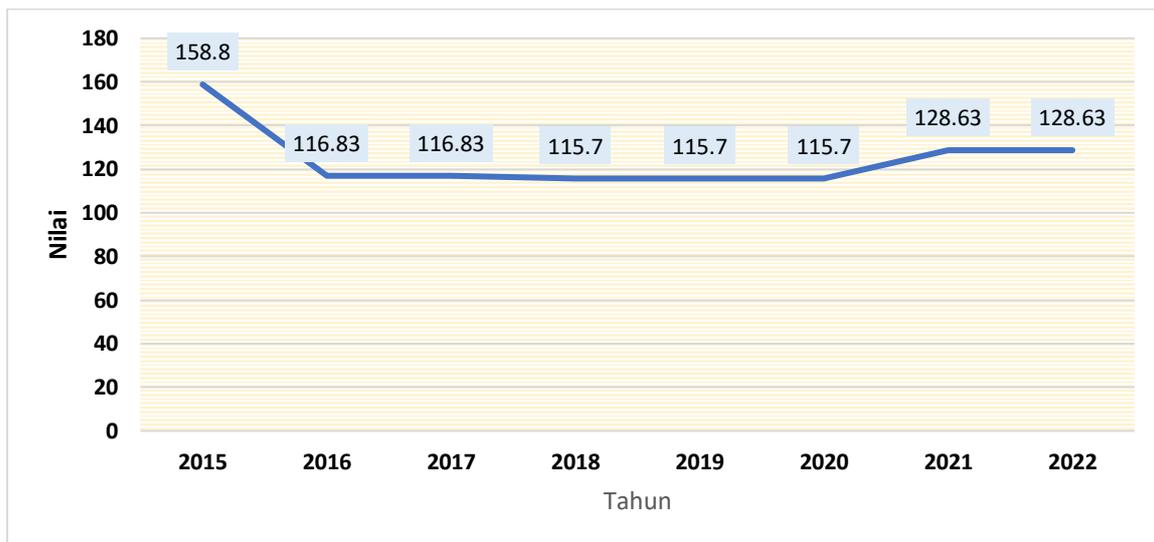
Jumlah penduduk yang setiap tahunnya meningkat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kebutuhan air minum yang perlu dipenuhi. Kabupaten Ngada memiliki potensi sumber daya air yang cukup melimpah, mulai dari air tanah maupun air permukaan. Salah satu yang sangat berpotensi untuk pengembangan sumber air minum masyarakat Kabupaten Ngada adalah mata air.

Sumber mata air di Kabupaten Ngada tersebar di semua kecamatan. Sumber ini dapat dimanfaatkan dengan secara langsung maupun dengan pembuatan jaringan perpipaan yang kemudian dialirkan kepada masyarakat. Adanya perencanaan pendistribusian air minum ini, kebutuhan air minum masyarakat di wilayah-wilayah dapat terjangkau dan bisa memenuhi kebutuhannya. Namun, penyediaan air minum perpipaan maupun non perpipaan tersebut juga harus direncanakan terkait stakeholder yang mengelola. Pihak Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat harus menjadi pihak-pihak yang ikut terlibat dalam pengelolaan air minum tersebut.

#### **2.1.1.10 Kawasan Rawan Bencana**

Secara historis, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah terjadi 576 kejadian bencana di NTT. bencana yang paling sering terjadi adalah angin puting beliung, diikuti oleh banjir, tanah longsor dan kekeringan. Berdasarkan Indeks

Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki indeks risiko 139,23 (sedang) dan Kabupaten Ngada memiliki indeks risiko sedang dengan nilai indeks 128,63. Ancaman bencana antara lain gempa bumi, tsunami, gunungapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstrim/abrasi, kebakaran hutan dan lahan serta cuaca ekstrim.



**Gambar 2. 10 Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Ngada Tahun 2015-2022**

*Sumber: Indeks Risiko Bencana Kabupaten Ngada Tahun 2015-2022*

Dalam kurun waktu 2015 hingga tahun 2022, indeks risiko bencana di Kabupaten ngada cenderung mengalami penurunan dari kategori tinggi di tahun 2015 menjadi kategori sedang pada tahun berikutnya hingga tahun 2022. Akan tetapi, pada tahun 2021 dan tahun 2022 Kabupaten Ngada mengalami kenaikan risiko bencana. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa parameter seperti ancaman perubahan iklim, kondisi fisik wilayah, aktivitas manusia dll.

Kondisi kebencanaan di Kabupaten Ngada dapat ditinjau melalui gambaran umum wilayah dari Kabupaten Ngada. Posisi Kabupaten Ngada yang berhadapan langsung dengan dua perairan laut dan berdekatan dengan lempeng tektonik aktif membuat Kabupaten Ngada rentan terhadap bencana alam tsunami, gempa bumi serta abrasi laut akibat pasang surut air laut. Secara umum topografi dari Kabupaten Ngada merupakan pegunungan dan perbukitan, sehingga dengan

topografi yang sangat bervariasi ketinggiannya dapat mempengaruhi karakteristik bencana yang ada di Kabupaten Ngada terutama pada kondisi lahan dan kondisi cuaca.

Terdapat 3 gunung api aktif yang memberikan kesuburan tanah tetapi juga memberikan potensi ancaman bencana letusan gunung api. Iklim di Kabupaten Ngada cenderung kering pada tempat yang relatif datar sehingga memunculkan potensi ancaman bencana kekeringan dan kebakaran lahan, sedangkan pada tempat yang relatif tinggi memiliki curah hujan yang cukup tinggi dan berpotensi terjadinya bencana banjir.

Dilihat dari sejarah kejadian bencananya baik dari DIBI maupun dari data BPBD Kabupaten Ngada diperoleh bahaya dengan dampak tertinggi adalah tanah longsor. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan kelas bahaya pada setiap jenis bahaya dan luasannya.

**Tabel 2. 14. Potensi Bahaya di Kabupaten Ngada**

No.	Jenis Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Banjir	16.887	Tinggi
2	Banjir bandang	1.503	Tinggi
3	Cuaca ekstrim	47.182	Tinggi
4	Gelombang ekstrim dan abrasi	2.323	Tinggi
5	Gempa bumi	166.517	Tinggi
6	Kekeringan	166.517	Tinggi
7	Kebakaran hutan dan lahan	105.813	Tinggi
8	Letusan gunung api ebulobo	794	rendah
9	Letusan gunung api inelika	5.424	sedang
10	Letusan gunung api inerie	14.137	Tinggi
11	Tanah longsor	11.1894	Tinggi
12	Tsunami	2.363	Tinggi

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

Tabel di atas menunjukkan hampir seluruh jenis bahaya yang ada di Kabupaten Ngada memiliki kelas tinggi dengan luas wilayah bahaya yang

bervariasi, sehingga dapat dikatakan Kabupaten Ngada memiliki potensi bahaya terhadap bencana sangat tinggi. Hasil kajian bahaya setiap jenis bahaya lebih rinci sebagai berikut.

### 1. Banjir

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Kabupaten Ngada memiliki indeks risiko ancaman banjir dengan skor 14,40 kelas risiko tinggi. Bahaya banjir disusun atas parameter daerah rawan banjir, kemiringan lereng, jarak dari sungai dan curah hujan. Hasil pengolahan dari beberapa parameter tersebut didapatkan hasil luasan wilayah bahaya dan kelas bahaya yang dapat dilihat melalui tabel berikut.

**Tabel 2. 15. Potensi Bahaya Banjir Per Kecamatan di Kabupaten Ngada**

Kecamatan	Bahaya	
	Luas (Ha)	Kelas
Aimere	1.057	Rendah
Bajawa	2.576	Tinggi
Bajawa Utara	5.624	Tinggi
Golewa	311	Sedang
Golewa Barat	1.199	Tinggi
Inerie	173	Tinggi
Jerebuu	30	Rendah
Riung	7.311	Tinggi
Riung Barat	3.689	Rendah
Soa	5.828	Rendah
Wolomeze	1.005	Rendah
<b>Kabupaten Ngada</b>	<b>28.801</b>	<b>Tinggi</b>

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

Tabel di atas menunjukkan terdapat 5 kecamatan memiliki kelas tinggi, 1 kecamatan dengan kelas sedang, dan 5 kecamatan dengan kelas rendah. Berdasarkan luasannya kelas tinggi lebih mendominasi dibandingkan dengan kelas lainnya sehingga kelas bahaya mayoritas untuk bahaya banjir di Kabupaten Ngada ialah kelas Tinggi dengan total luas wilayah bahaya 28.801 Ha.

## 2. Banjir Bandang

Parameter yang digunakan untuk menyusun bahaya banjir bandang ialah sungai utama, topografi, dan potensi longsor di hulu sungai (longsoran yang memiliki kelas tinggi dan kelas sedang). Hasil pengolahan dari beberapa parameter tersebut menghasilkan luasan wilayah bahaya dan kelas bahaya pada setiap kecamatan yang dapat dilihat melalui tabel berikut.

**Tabel 2. 16. Potensi Bahaya Banjir Bandang Per Kecamatan di Kabupaten Ngada**

Kecamatan	Bahaya	
	Luas (Ha)	Kelas
Aimere	392	Tinggi
Bajawa	512	Tinggi
Bajawa Utara	2.529	Tinggi
Golewa	55	Tinggi
Golewa Barat	368	Tinggi
Golewa Selatan		
Inerie	123	Tinggi
Jerebu'u	226	Tinggi
Riung	627	Tinggi
Riung Barat	830	Tinggi
Soa	139	Tinggi
Wolomeze	324	Tinggi
<b>Kabupaten Ngada</b>	<b>6.125</b>	<b>Tinggi</b>

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

Tabel di atas menunjukkan seluruh kecamatan di Kabupaten Ngada kecuali Kecamatan Golewa Selatan memiliki kelas bahaya tinggi untuk bahaya banjir bandang. Kecamatan Bajawa Utara merupakan kecamatan dengan wilayah bahaya terluas dengan luas 2.529 Ha. Berdasarkan kelas bahaya mayoritas, maka bahaya banjir bandang di Kabupaten Ngada termasuk ke dalam kelas bahaya Tinggi dengan luas wilayah bahaya 6.125 Ha.

## 3. Gempa Bumi

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Kabupaten Ngada memiliki indeks risiko bencana gempa bumi dengan skor 21,60 kelas risiko tinggi. Bahaya gempa bumi disusun atas beberapa parameter fisik yang memiliki

pengaruh terhadap dampak dari gempa bumi. Parameter yang digunakan yaitu kelas topografi, intensitas guncangan di batuan dasar dan intensitas guncangan di permukaan. Parameter tersebut kemudian diolah untuk menghasilkan informasi luasan wilayah bahaya dan kelas bahaya pada setiap kecamatan yang dapat dilihat melalui tabel berikut :

**Tabel 2. 17. Potensi Bahaya Gempabumi Per Kecamatan di Kabupaten Ngada**

Kecamatan	Bahaya	
	Luas (Ha)	Kelas
Aimere	9.240	Tinggi
Bajawa	13.736	Tinggi
Bajawa Utara	16.738	Tinggi
Golewa	7.407	Tinggi
Golewa Barat	9.421	Tinggi
Golewa Selatan	10.206	Sedang
Inerie	8.080	Sedang
Jerebu'u	8.213	Sedang
Riung	32.794	Sedang
Riung Barat	31.249	Tinggi
Soa	9.114	Tinggi
Wolomeze	10.319	Tinggi
<b>Kabupaten Ngada</b>	<b>166.517</b>	<b>Tinggi</b>

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

Hasil analisa menunjukkan terdapat 8 kecamatan yang termasuk ke dalam kelas tinggi dan 4 kecamatan yang termasuk ke dalam kelas sedang. Kecamatan dengan luas wilayah bahaya terluas yaitu Riung dan Riung Barat. Kelas bahaya mayoritas untuk bahaya gempa bumi di Kabupaten Ngada termasuk ke dalam kelas Tinggi dengan luas wilayah bahaya 166.517 Ha.

#### **4. Kekeringan**

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Kabupaten Ngada memiliki indeks risiko bencana kekeringan dengan skor 16,00 kelas risiko tinggi. Penyusunan bahaya kekeringan menggunakan parameter iklim dengan data curah hujan bulanan yang didapatkan melalui *Climate Hazard Group* tahun 1981 – 2016. Hasil analisa dari pengolahan parameter tersebut dihasilkan luas wilayah bahaya dan kelas bahaya yang dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 2. 18. Potensi Bahaya Kekeringan PerKecamatan di Kabupaten Ngada**

Kecamatan	Bahaya	
	Luas (Ha)	Kelas
Aimere	9.240	Tinggi
Bajawa	13.736	Tinggi
Bajawa Utara	16.738	Tinggi
Golewa	7.407	Tinggi
Golewa Barat	9.421	Tinggi
Golewa Selatan	10.206	Tinggi
Inerie	8.080	Tinggi
Jerebuu	8.213	Tinggi
Riung	32.794	Tinggi
Riung Barat	31.249	Tinggi
Soa	9.114	Sedang
Wolomeze	10.319	Sedang
<b>Kabupaten Ngada</b>	<b>166.517</b>	<b>Tinggi</b>

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

Berdasarkan tabel di atas terdapat 10 kecamatan yang termasuk ke dalam kelas tinggi dan hanya terdapat 2 kecamatan yang termasuk ke dalam kelas sedang. Sama seperti bahaya gempa bumi, Kecamatan Riung dan Kecamatan Riung Barat memiliki luas wilayah bahaya terluas dengan kelas tinggi. Hasil tersebut menunjukkan kelas bahaya mayoritas untuk bahaya kekeringan termasuk ke dalam kelas Tinggi dengan luas wilayah bahaya 166.517 Ha.

## 5. Cuaca Ekstrim

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Kabupaten Ngada memiliki indeks risiko bencana cuaca ekstrim dengan skor 20,40 kelas risiko tinggi. Bahaya cuaca ekstrim disusun atas beberapa parameter yang memiliki pengaruh terhadap dampak bahaya tersebut. Parameter yang digunakan meliputi keterbukaan lahan, kemiringan lereng dan curah hujan tahunan. Parameter tersebut kemudian diolah dan dianalisa untuk mendapatkan luas wilayah bahaya dan kelas bahaya. Hasil analisa tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut.

**Tabel 2. 19. Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim Per Kecamatan di Kabupaten Ngada**

Kecamatan	Bahaya	
	Luas (Ha)	Kelas
Aimere	1.834	Tinggi
Bajawa	3.904	Tinggi
Bajawa Utara	10.011	Tinggi
Golewa	2.359	Tinggi
Golewa Barat	2.453	Tinggi
Golewa Selatan	481	Tinggi
Inerie	262	Tinggi
Jerebu'u	119	Tinggi
Riung	9.270	Tinggi
Riung Barat	7.232	Tinggi
Soa	7.772	Tinggi
Wolomeze	1.585	Tinggi
<b>Kabupaten Ngada</b>	<b>47.182</b>	<b>Tinggi</b>

*Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada*

Hasil analisa tersebut menunjukkan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Ngada memiliki kelas bahaya cuaca ekstrim tinggi. Kecamatan Bajawa Utara memiliki luas wilayah bahaya 10.011 Ha dan hal tersebut menjadikan kecamatan terluas disusul oleh Kecamatan Riung dengan potensi tinggi. Kelas bahaya mayoritas untuk bahaya cuaca ekstrim termasuk kedalam kelas Tinggi dengan luas wilayah bahaya 47.182 Ha.

## **6. Tanah Longsor**

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Kabupaten Ngada memiliki indeks risiko bencana tanah longsor dengan skor 24,00 kelas risiko tinggi.

Bahaya tanah longsor disusun atas beberapa parameter fisik yang berkaitan dengan topografi dan karakteristik tanah. Parameter tersebut meliputi kemiringan lereng dan zona kerentanan gerakan tanah yang dijabarkan menjadi beberapa data fisik seperti arah lereng, panjang/bentuk lereng, kelas topografi, tipe tanah, kedalaman tanah dan juga data curah hujan. Parameter tersebut kemudian diolah dan menghasilkan hasil analisa yang berupa luas wilayah bahaya dan kelas bahaya yang dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 2. 20. Potensi Bahaya Tanah Longsor Per Kecamatan di Kabupaten Ngada**

Kecamatan	Bahaya	
	Luas (Ha)	Kelas
Aimere	7.069	Sedang
Bajawa	9.224	Tinggi
Bajawa Utara	6.461	Sedang
Golewa	4.439	Tinggi
Golewa Barat	6.287	Tinggi
Golewa Selatan	8.453	Tinggi
Inerie	7.389	Tinggi
Jerebu'u	7.689	Tinggi
Riung	22.983	Sedang
Riung Barat	22.456	Sedang
Soa	1.247	Sedang
Wolomeze	8.196	Sedang
<b>Kabupaten Ngada</b>	<b>111.894</b>	<b>Tinggi</b>

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

Hasil analisa menunjukkan terdapat 6 kecamatan yang termasuk ke dalam kelas tinggi dan 6 kecamatan yang termasuk ke dalam kelas sedang. Kecamatan Riung dan Kecamatan Riung Barat memiliki wilayah bahaya terluas dengan kelas sedang, sedangkan untuk kelas tinggi dengan wilayah terluas pada Kecamatan Golewa Selatan. Kelas bahaya mayoritas untuk bahaya tanah longsor termasuk ke dalam kelas Tinggi dengan luas wilayah bahaya 111.894 Ha.

## 7. Letusan Gunung Api

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Kabupaten Ngada memiliki indeks risiko bencana letusan gunungapi dengan skor 8,00 kelas risiko sedang. Gunung api aktif yang ada di Kabupaten Ngada meliputi Gunung Inerie, Inielika dan Ebulobo yang tentu memiliki potensi bahaya yang berbeda-beda tergantung dari karakteristik parameter di setiap gunung tersebut. Parameter yang digunakan untuk menyusun bahaya letusan gunung api ialah zona aliran dan zona jatuhan. Hasil analisa dari pengolahan parameter tersebut yang berupa luas wilayah bahaya dan kelas bahaya dapat dilihat melalui tabel berikut.

**Tabel 2. 21. Potensi Bahaya Letusan Gunung Api Ebulobo**

Kecamatan	Bahaya	
	Luas (Ha)	Kelas
Golewa	101	Rendah
Golewa Selatan	691	Rendah
Soa	2	Rendah
Kabupaten Ngada	794	Rendah

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

**Tabel 2. 22. Potensi Bahaya Letusan Gunung Api Inelika**

Kecamatan	Bahaya	
	Luas (Ha)	Kelas
Bajawa	2.704	Rendah
Bajawa Utara	2.133	Sedang
Golewa Barat	21	Rendah
Soa	562	Sedang
Wolomeze	5	Rendah
Kabupaten Ngada	5.425	Sedang

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

**Tabel 2. 23. Potensi Bahaya Letusan Gunung Api Inerie**

Kecamatan	Bahaya	
	Luas (Ha)	Kelas
Aimere	787	Rendah
Bajawa	3.355	Tinggi
Golewa Barat	1.613	Rendah
Inerie	5.597	Rendah
Jerebu'u	2.785	Tinggi
Kabupaten Ngada	14.137	Tinggi

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

Berdasarkan tabel di atas, terlihat besaran luas bahaya letusan Gunung api Inerie, Inelika dan Ebulobo per kecamatan terdampak. Besarnya luas bahaya dipengaruhi kondisi wilayah yang rentan dilihat dari parameter kajian. Untuk kecamatan Bajawa dan Jerebu'u potensi bahaya yang diakibatkan oleh 3 gunung api ini masuk kelas Tinggi disebabkan masyarakatnya cukup dinamis dan banyak yang beraktivitas di sekitar kecamatan tersebut, khususnya Bajawa yang merupakan ibukota dari Kabupaten Ngada ini yang memiliki aktivitas ekonomi yang sangat ramai dan berpopulasi cukup padat dibanding dengan kecamatan lainnya. Rekapitulasi kajian bahaya per kecamatan menentukan total luas bahaya

untuk Kabupaten Ngada. Secara keseluruhan bencana letusan Gunung api Ebulobo memiliki potensi luas bahaya dengan total 794 Ha yang berada pada kelas Rendah. Gunung api Inelika memiliki potensi luas bahaya dengan total 5.425 Ha yang berada pada kelas Sedang. dan Gunung api Inerie memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Ngada dengan total 14.137 Ha yang berada pada kelas Tinggi.

## 8. Kebakaran Hutan dan Lahan

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Kabupaten Ngada memiliki indeks risiko bencana kebakaran hutan dan lahan dengan skor 24,40 kelas risiko tinggi. Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan diketahui dengan memanfaatkan parameter yang berpengaruh. Parameter tersebut meliputi jenis hutan dan lahan, iklim dan jenis tanah. Hasil analisa yang didapatkan dari pengolahan data parameter menghasilkan luasan wilayah bahaya dan kelas bahaya yang dapat dilihat melalui tabel berikut.

**Tabel 2. 24. Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan**

Kecamatan	Bahaya	
	Luas (Ha)	Kelas
Aimere	4.982	Sedang
Bajawa	2.873	Sedang
Bajawa Utara	7.442	Sedang
Golewa	1.908	Sedang
Golewa Barat	4.020	Sedang
Golewa Selatan	5.204	Sedang
Inerie	4.534	Sedang
Jerebu'u	5.036	Sedang
Riung	28.985	Sedang
Riung Barat	30.370	Tinggi
Soa	650	Sedang
Wolomeze	9.810	Sedang
Kabupaten Ngada	105.814	Tinggi

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

Berdasarkan hasil analisa pada tabel di atas, diketahui hampir seluruh kecamatan termasuk kedalam kelas bahaya sedang, kecuali untuk Kecamatan

Riung Barat yang termasuk ke dalam kelas tinggi. Kecamatan Riung Barat yang termasuk ke dalam kelas tinggi memiliki luas wilayah bahaya 30.370 Ha, sehingga meskipun hampir seluruh kecamatan termasuk kelas sedang, kelas bahaya mayoritas tetap masuk ke dalam kelas Tinggi dengan luas wilayah bahaya 105.814 Ha.

## 9. Tsunami

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Kabupaten Ngada memiliki indeks risiko bencana dengan skor 9,60 kelas risiko sedang. Bahaya Tsunami ditinjau melalui beberapa parameter fisik yang berpengaruh terhadap dampak bahaya. Parameter tersebut meliputi penggunaan lahan, kemiringan lereng dan garis pantai. Hasil analisa yang diperoleh dari pengolahan menghasilkan informasi luas wilayah bahaya dan kelas bahaya yang dapat dilihat melalui tabel berikut.

**Tabel 2. 25. Bahaya Tsunami Per Kecamatan di Kabupaten Ngada**

Luas (Ha)	Bahaya	
		Kelas
Aimere	364	Tinggi
Golewa Selatan	168	Tinggi
Inerie	117	Tinggi
Riung	1.714	Tinggi
Kabupaten Ngada	2.363	Tinggi

*Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada*

Hasil analisa pada tabel di atas menunjukkan hanya 4 kecamatan yang termasuk kedalam kelas bahaya tinggi, sedangkan kecamatan lain tidak muncul dalam analisa karena hanya 4 kecamatan tersebut yang berada di pesisir laut. Keempat kecamatan tersebut termasuk kedalam kelas tinggi, sehingga kelas bahaya mayoritas termasuk kedalam kelas Tinggi dengan total luas wilayah bahaya 2.363 Ha.

## 10. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Kabupaten Ngada memiliki indeks risiko gelombang ekstrim dan abrasi dengan skor 20,80 kelas

risiko tinggi. Analisa bahaya gelombang ekstrim dan abrasi menggunakan beberapa parameter yang terkait dengan informasi fisik lahan pesisir dan kelautan. Parameter tersebut meliputi penggunaan lahan, tinggi gelombang, arus dan garis pantai. Hasil analisa yang diperoleh dari pengolahan data parameter menunjukkan luas wilayah bahaya dan kelas bahaya yang dapat dilihat melalui tabel berikut.

**Tabel 2. 26. Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi**

Kecamatan	Bahaya	
	Luas (Ha)	Kelas
Aimere	383	Sedang
Golewa Selatan	429	Sedang
Inerie	426	Sedang
Riung	1.085	Tinggi
Kabupaten Ngada	2.323	Tinggi

*Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada*

Hasil analisa pada tabel di atas menunjukkan 3 kecamatan yang termasuk ke dalam kelas bahaya sedang, dan 1 kecamatan yang termasuk ke dalam kelas bahaya tinggi, sedangkan kecamatan lain tidak muncul dalam analisa karena hanya 4 kecamatan tersebut yang berada di pesisir laut. Ketiga kecamatan tersebut termasuk ke dalam kelas sedang, tetapi Kecamatan Riung termasuk ke dalam kelas tinggi dengan luas bahaya yang cukup luas, sehingga kelas bahaya mayoritas termasuk ke dalam kelas Tinggi dengan total luas wilayah bahaya 2.323 Ha.

#### **2.1.1.11 Ancaman Perubahan Iklim**

Indonesia FoLU Net-Sink 2030 merupakan komitmen penancangan pencapaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Suatu kondisi dimana tingkat serapan sudah berimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi sektor terkait pada tahun 2030. Indonesia's FOLU Net Sink 2030 mendorong kinerja sektor kehutanan menuju target pembangunan yang sama, yaitu tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO<sub>2</sub>e pada tahun 2030. Pijakan dasar utamanya

adalah *sustainable forest management, environmental governance, dan carbon governance*

Adapun 15 ruang lingkup dari FOLU Net Sink 2030, yaitu:

1. Pengurangan laju deforestasi lahan mineral.
2. Pengurangan laju deforestasi lahan gambut dan mangrove.
3. Pengurangan laju degradasi hutan-hutan lahan mineral.
4. Pengurangan laju degradasi hutan lahan gambut dan mangrove.
5. Pembangunan hutan tanaman.
6. Pengelolaan hutan lestari.
7. Rehabilitasi dengan rotasi.
8. Rehabilitasi non-rotasi.
9. Restorasi gambut dan perbaikan tata air gambut.
10. Rehabilitasi mangrove dan aforestasi pada kawasan bekas tambang.
11. Konservasi keanekaragaman hayati.
12. Perhutanan sosial.
13. Introduksi replikasi ekosistem, ruang terbuka hijau, dan ekoriparian.
14. Pengembangan dan konsolidasi hutan adat.
15. Pengawasan dan law enforcement dalam mendukung perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.

Pencapaian Indonesia's FOLU Net Sink 2030 ditentukan oleh pengurangan emisi dari deforestasi dan lahan gambut (dekomposisi gambut dan kebakaran gambut). Terkait dengan kondisi iklim, KLHK telah mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Perubahan Iklim (SIDIK) yang menyajikan data dan informasi kerentanan perubahan iklim dengan satuan unit desa di seluruh Indonesia. Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim ditentukan oleh indikator-indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi.

Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi.

Kemampuan Kabupaten Ngada dalam mengelola dampak dari perubahan iklim (termasuk keragaman dan iklim ekstrem) sangat ditentukan terutama oleh kondisi sosial ekonomi yang merupakan indikator kapasitas adaptif. Dalam analisis ini, Kapasitas Adaptif desa direpresentasikan oleh 13 (tiga belas) indikator, yaitu Fasilitas Listrik, Infrastruktur Jalan, Kelembagaan, Industri Kecil dan Mikro, Fasilitas Pendidikan, Sarana Prasarana Ekonomi, Fasilitas Kesehatan, Lembaga Keuangan, Kegiatan Pelestarian Lingkungan, Fasilitas Kredit yang Diterima Warga, Kegiatan Sosial, Jaminan Kesehatan, dan Komunikasi. Kawasan yang memiliki lebih banyak jumlah kondisi Indikator Kapasitas Adaptif yang bagus, secara relatif memiliki kemampuan adaptif yang lebih tinggi terhadap dampak perubahan iklim.

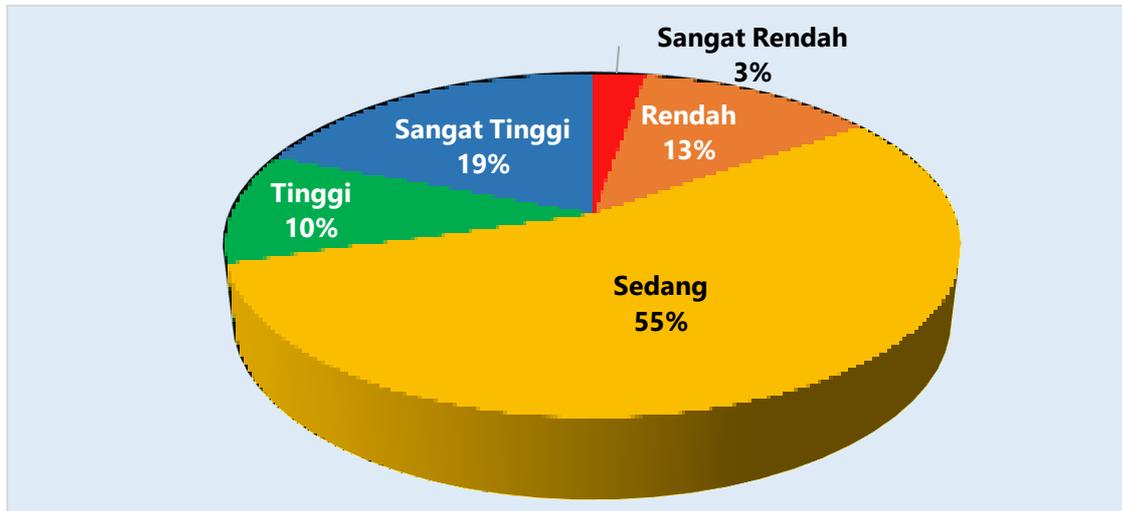
Kabupaten Ngada memiliki tingkat kerentanan perubahan iklim dengan kategori rendah, cukup rendah, cukup tinggi dan tinggi. Sebagian besar wilayah Kabupaten Ngada berada pada kerentanan perubahan iklim kelas sedang dengan luas 96044,57 Ha.

**Tabel 2. 27 Tingkat Adaptif dan Perubahan Iklim Kabupaten Ngada**

No.	Kecamatan	Luas (Ha)					Jumlah
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Aimere		1.018,34	9.899,33	60,37	4.354,30	15.332,33
2	Bajawa	425,05		4.244,40	5.030,97	1.086,27	10.786,69
3	Bajawa Utara	708,70	3.631,51	8.508,05	840,18	1.748,43	15.436,87
4	Golewa	80,66	808,70	4.304,22	3.547,49	1.538,27	10.279,35
5	Golewa Barat	68,48	429,96	3.616,06	2.681,86	59,91	6.856,27
6	Golewa Selatan		1.144,13	1.396,37	1.404,53	4114,23	8.059,27
7	Inerie	279,55	1.294,02	1.689,54	1.028,92	2.282,62	6.574,65
8	Jerebuu		91,46	941,17	1.957,62	1.861,44	4.851,68
9	Riung	2.493,67	7.501,16	21.294,73	468,69	3.443,85	35.202,10
10	Riung Barat	323,85	1.708,96	16.978,51	1.032,17	8.642,32	28.685,81
11	Soa	153,13	29,64	8.531,98		23,08	8.737,83

No.	Kecamatan	Luas (Ha)					Jumlah
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
12	Wolomeze	132,87	3.955,79	14.640,21	18,54	4.202,29	22.949,70
<b>Kabupaten Ngada</b>		<b>4.665,96</b>	<b>21.613,66</b>	<b>96.044,57</b>	<b>18.071,34</b>	<b>33.357,01</b>	<b>173.752,55</b>

Sumber : Overlay Peta JE Ekoregion Bali Nusra dalam KLHS RPJPD Kabupaten Ngada



Gambar 2. 11 Diagram Tingkat Adaptif dan Perubahan Iklim Kabupaten Ngada

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

Terkait kondisi iklim, KLHK telah mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Perubahan Iklim (SIDIK) pada Tahun 2022 yang menyajikan data dan informasi kerentanan perubahan iklim dengan satuan unit desa di seluruh Indonesia. Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim ditentukan oleh indikator-indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi.

Kemampuan Kabupaten Ngada dalam mengelola dampak dari perubahan iklim (termasuk keragaman dan iklim ekstrem) sangat ditentukan terutama oleh kondisi sosial ekonomi yang merupakan indikator kapasitas adaptif. Kabupaten Ngada memiliki tingkat kerentanan perubahan iklim dengan kategori Sangat

Rendah, Sedang, Rendah dan Tinggi. Adapun tingkat kerentanan perubahan iklim di Kabupaten Ngada di dominasi pada Rendah dengan luasan 103.971,89 Ha.

**Tabel 2. 28 Kerentanan Iklim Kabupaten Ngada**

No.	Kecamatan	Kerentanan Iklim (Ha)				Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Aimere		9.248,42	0,28	6.083,63	15.332,33
2	Bajawa		8.370,47	171,68	2.244,54	10.786,69
3	Bajawa Utara		5.834,68	83,40	9.518,79	15.436,87
4	Golewa		8.525,76	0,00	1.753,59	10.279,35
5	Golewa Barat		4.854,59	301,27	1.700,40	6.856,27
6	Golewa Selatan		3.722,13		4.337,14	8.059,27
7	Inerie		5.965,92		608,73	6.574,65
8	Jerebuu		3.442,81	21,34	1.387,53	4.851,68
9	Riung		28.665,24	242,26	6.294,60	35.202,10
10	Riung Barat		3.663,61	19.121,14	5.901,06	28.685,81
11	Soa	0,04	8.259,20		478,59	8.737,83
12	Wolomeze		13.419,07	882,46	8.648,17	22.949,70
<b>Total</b>		<b>0,04</b>	<b>103.971,89</b>	<b>20.823,84</b>	<b>48.956,78</b>	<b>173.752,55</b>

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada



**Gambar 2. 12 Diagram Kerentanan Iklim Kabupaten Ngada**

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

Berdasarkan kondisi Kawasan hutan dan non-hutan, maka Kabupaten Ngada yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi NTT berpotensi untuk terlibat dan berkontribusi dalam pencapaian target penurunan emisi Gas rumah kaca (GRK) nasional terutama dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan

lainnya. Hal ini untuk mendukung kebijakan penyimpanan karbon dengan pendekatan carbon net sink tahun 2030 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Melalui pembahasan dari 4 bidang yaitu pengelolaan hutan lestari, peningkatan cadangan karbon, konservasi serta instrument dan informasi telah ditetapkan 8 rencana aksi mitigasi berbasis spatial pada lokasi yang sudah ditentukan. 8 rencana aksi mitigasi tersebut mencakup mencegah degradasi lahan mineral; degradasi konsesi terencana; pembangunan hutan tanaman; penerapan pengkayaan hutan alam; penerapan RIL-C; peningkatan cadangan karbon dengan rotasi; peningkatan cadangan karbon tanpa rotasi, serta perlindungan areal konservasi tinggi.

Arahan pelaksanaan aksi mitigasi terdiri dari beberapa klasifikasi yaitu RO 1 hingga RO 11 berada pada semua kabupaten/kota, pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Perhutanan Sosial, pada Areal Penggunaan Lain, pada kawasan konservasi, dan pada semua kabupaten/kota untuk RO 3- RO 11. Adapun Kabupaten Ngada berada pada arahan aksi mitigasi RO 11 yaitu Perlindungan Areal Konservasi Tinggi seluas 23.471,699 Ha, dimana konservasi keanekaragaman hayati program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yang mencakup; (1) Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, (2) Pengelolaan Kawasan Konservasi, (3) Konservasi Spesies dan Genetik, dan (4) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, serta juga merupakan bagian dari program peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pembinaan konservasi di luar kawasan hutan negara. Kerangka aksi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan, konservasi keanekaragaman hayati dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dimulai dari konservasi tumbuhan dan satwa liar, pelestarian dan perlindungan habitat, hingga pelibatan masyarakat lokal dan

mengarusutamakan kearifan lokal. Lokasi prioritas untuk perlindungan areal konservasi tinggi pada berbagai fungsi Kawasan hutan. Berikut adalah tabel arahan pelaksanaan aksi mitigasi rencana kerja Indonesia's Folu Netsink 2030 Kabupaten Ngada.

**Tabel 2. 29 Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi Rencana Kerja Indonesia's Folu Netsink 2030 Kabupaten Ngada**

No.	Kecamatan	RO11 (Ha)
1	Aimere	164,664
2	Bajawa	74,726
3	Bajawa Utara	2.745,905
4	Golewa	114,275
5	Inerie	26,957
6	Jerebuu	0,607
7	Riung	10.634,062
8	Riung Barat	5.941,740
9	Wolomeze	3.768,764
<b>Grand Total</b>		<b>23.471,699</b>

*Sumber: Rencana Kerja Indonesia's Folu Netsink 2030 dalam KLHS RPJPD Kabupaten Ngada*

#### **2.1.1.12 Kondisi Lingkungan Hidup**

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Ngada ditunjukkan oleh dua indikator kinerja. Yang pertama adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencakup Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Kemudian yang kedua adalah cakupan penanganan persampahan. Selain itu kondisi lingkungan hidup Kabupaten Ngada juga dapat dianalisis melalui daya dukung daya tampung lingkungan hidup yang telah dikaji melalui dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Ngada.

#### **1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologinya. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Kualitas air seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia

terhadap kebutuhan air bersih. Salah satu sumber air baku bagi penduduk Ngada diperoleh dari sungai dan sumur. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada setiap tahunnya memantau kualitas air dengan melakukan pengujian parameter lapangan menggunakan portable multiparameter. Kondisi Sungai dan sumur yang dipantau mengacu pada standar baku mutu kelas air II sesuai dengan PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang 'Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas:

1. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang memper-syaratkan mutu air yang samadengan kegunaan tersebut;
2. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
3. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; dan
4. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan.

Suatu perairan tercemar atau tidak dapat dikategorikan berdasarkan pada kualitas baku mutu. Baku mutu air adalah batas zat atau kandungan pencemar yang diperbolehkan dalam air (Fardiaz, 1992). Air dikatakan tercemar apabila tidak memenuhi baku mutu yang disyaratkan, dan dikatakan tidak tercemar apabila memenuhi baku mutu. Baku mutu mengenai perairan diatur dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran air. Pemantauan kualitas air sungai dapat menjadi suatu langkah pengawasan atau pengendalian terhadap adanya kandungan pencemar pada air. Dengan demikian timbulnya penyakit akibat air yang tercemar (water borne disease) dapat dihindari. Berikut hasil Indeks Kualitas Air Kabupaten Ngada tahun 2021-2022.

**Tabel 2. 30 Indeks Kualitas Air Kabupaten Ngada Tahun 2021-2022**

No	Tahun	IKA	Kategori
1	2021	66,67	Sedang
2	2022	67,78	Sedang

*Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada*

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Ngada pada tahun 2021 yaitu 66,67 termasuk ke dalam kategori sedang. Sedangkan, pada tahun 2022 nilai Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu 67,78 termasuk ke dalam kategori sedang.

Penurunan kualitas udara ambien akibat dampak negatif dari pembangunan karena adanya peningkatan sumber pencemar udara. Penurunan kualitas udara ambien ini memerlukan upaya pengendalian dan pengelolaan pencemaran udara. Salah satu kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah adalah melakukan pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup termasuk dalam pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan.

Kegiatan pemantauan dan pengendalian kualitas udara ambien memiliki arti penting untuk mengetahui kualitas udara sebagai kebutuhan bagi semua makhluk hidup dan sebagai informasi bagi masyarakat di Kabupaten Ngada tentang kualitas udara yang ada di lingkungan. Berikut adalah data hasil indeks kualitas udara di Kabupaten Ngada.

**Tabel 2. 31 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Ngada Tahun 2021-2022**

No	Tahun	IKU	Kategori
1	2021	88,11	Baik
2	2022	89,62	Baik

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Ngada pada tahun 2021 yaitu 88,11 termasuk ke dalam kategori baik. Sedangkan, pada tahun 2022 nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) yaitu 89,62 termasuk ke dalam kategori baik.

Indeks Kualitas Lahan adalah suatu alat ukur yang mengukur tingkat kualitas penutupan lahan dalam suatu wilayah. Indeks Kualitas Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas ekosistem gambut. Berikut adalah data hasil indeks kualitas Lahan di Kabupaten Ngada.

**Tabel 2. 32 Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Ngada Tahun 2021-2022**

No	Tahun	IKL	Kategori
1	2021	63,15	Sedang
2	2022	63,12	Sedang

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Ngada pada tahun 2021 yaitu 63,15 termasuk ke dalam sedang. Sedangkan, pada tahun 2022 nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) yaitu 63,12 termasuk ke dalam kategori sedang.

Berdasarkan hasil nilai dari masing-masing indeks, yaitu IKA, IKU, dan IKL maka kemudian dapat dihitung untuk dapat mengetahui capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Ngada pada tahun 2021 dan 2022, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2. 33 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada Tahun 2021-2022**

No	Tahun	IKA	IKU	IKL	IKLH
1	2021	66.67	88.11	63.15	74.58
2	2022	67.78	89.62	63.12	75.60

Sumber: Analisis, 2024

Berdasarkan perhitungan dari ketiga komponen pembentuk IKLH, maka diperoleh nilai IKLH Kabupaten Ngada pada tahun 2022 yaitu sebesar 75,60. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,37 persen dan masuk ke dalam kategori BAIK.

## 2. Penanganan Persampahan

Persoalan penanganan persampahan di Kabupaten Ngada menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Ngada. Jumlah sampah yang tertangani terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Tahun 2019 sebesar 12,86 % sampah yang tertangani meningkat ditahun 2021 mencapai 20,37% dan terus meningkat di Tahun 2022 sebesar 21,77 %. Rasio Tempat pembuangan sampah persatuan penduduk dari tahun 2019-2022 tidak mengalami peningkatan yakni sebesar 0,10% TPS/satuan penduduk artinya masih banyak sampah yang belum dibuang pada tempatnya.

**Tabel 2. 34 Capaian Kinerja Penanganan Persampahan Tahun 2019-2022**

Tahun	Jumlah Sampah yang tertangani (m <sup>3</sup> )	Total Timbunan Sampah (M <sup>3</sup> )	% Penanganan sampah
2019	27.740 m <sup>3</sup>	147.091,4 M <sup>3</sup>	18,86%
2020	27.740 m <sup>3</sup>	150.794,3 M <sup>3</sup>	18,39%
2021	31.390 m <sup>3</sup>	154.128,6 M <sup>3</sup>	20,37%
2022	33.580 M3	154.281,85 M3	21,77%

Sumber: DLH Kabupaten Ngada 2019-2022

Persoalan tersebut disebabkan oleh belum optimalnya penyediaan infrastruktur pengelolaan persampahan, yaitu belum tersedianya TPST di tiap Kecamatan, TPA hanya berada pada satu lokasi di Tanawau Kecamatan Bajawa serta, belum adanya kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Hal ini membutuhkan kerjasama lintas sektor dalam pengolahan dan daur ulang sampah sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan keluarga.

### **3. Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup**

Daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam perencanaan tata ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang berdasarkan tata ruang nantinya tidak sampai melampaui batas-batas kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung dan menampung aktivitas manusia tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan dalam menyediakan ruang, kemampuan dalam menyediakan sumberdaya alam, dan kemampuan untuk melakukan perbaikan kualitas lingkungan apabila terdapat dampak yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Penataan ruang yang mengabaikan daya dukung lingkungan dipastikan akan menimbulkan permasalahan dan degradasi kualitas lingkungan hidup seperti banjir, longsor dan kekeringan, pencemaran dan lain sebagainya. Konsep dan metode pengukuran daya dukung lingkungan memiliki banyak definisi, namun kesamaannya adalah bahwa daya dukung selalu memperhatikan perbandingan dan keseimbangan antara ketersediaan (supply) dan permintaan (demand) dan ke-semuanya disesuaikan dengan tujuan yang diinginkan. Daya dukung lingkungan mengandung pengertian kemampuan suatu tempat dalam menunjang kehidupan makhluk hidup secara optimum dalam periode waktu yang panjang. Daya dukung lingkungan dapat pula diartikan kemampuan lingkungan memberikan kehidupan organisme secara sejahtera dan lestari bagi penduduk yang mendiami suatu kawasan.

Secara umum teknik perhitungan daya dukung dan daya tampung tergantung dari fungsi atau tujuan yang akan diukur apakah menyangkut aspek ekonomi, demografi dan sebagainya. Setiap tujuan ini memiliki formulasi tersendiri karena karakteristik unit dan ukuran yang berbeda. Muta'ali (2014) dalam Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2014 telah merangkum beberapa teknik pengukuran dan penentuan daya dukung berdasarkan fungsi dan tujuannya yang

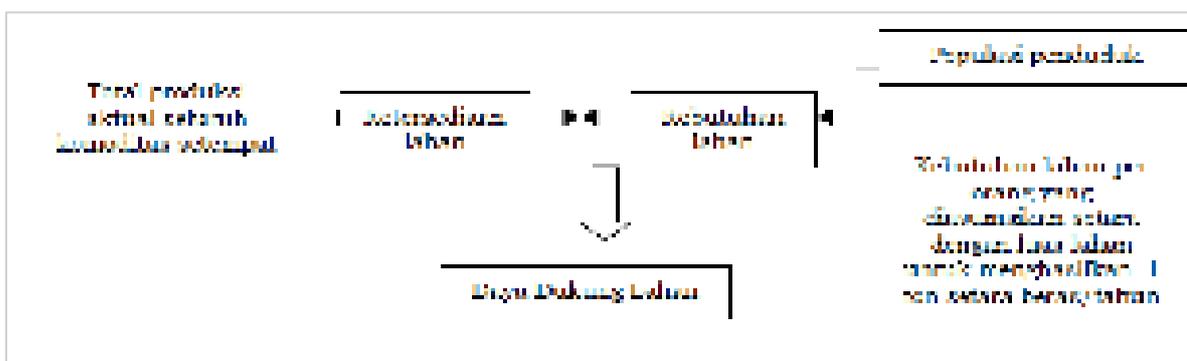
akan digunakan sebagai pendekatan dalam perhitungan daya dukung dan daya tampung di RTRW Kabupaten Ngada.

### a. Daya Dukung Lahan Berdasarkan Kemampuan dan Kesesuaian Lahan

Berdasarkan pada tujuan dari perencanaan yang akan dicapai dapat memberikan perlindungan terhadap lahan potensial dan mencegah pembangunan pada kawasan lindung. Analisa ini dilakukan dengan tujuan mengatur peruntukan tanah yang sesuai dalam pelestarian dan menjaga tingkat bahaya erosi, agar tidak melebihi batas ambang.

### b. Daya Dukung Lahan Berdasarkan Ketersediaan dan Kebutuhan

Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009, Penentuan daya dukung lahan dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan seperti digambarkan dalam diagram di bawah ini.



Gambar 2. 13 Diagram Daya Dukung Lahan

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

## 1) Ketersediaan Lahan

Ketersediaan lahan ditentukan berdasarkan data total produksi aktual setempat dari setiap komoditas di suatu wilayah, dengan menjumlahkan produk dari semua komoditas yang ada di wilayah tersebut. Untuk penjumlahan ini digunakan harga sebagai faktor konversi karena setiap komoditas memiliki

satuan yang beragam. Sementara itu, kebutuhan lahan dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak.

### **Cara Perhitungan:**

Penghitung n dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Penghitungan Ketersediaan (Supply) Lahan

Rumus:

$$S_L = \frac{\sum (P_i \times H_i)}{H_b} \times \frac{1}{P_{tvb}}$$

Keterangan:

SL = Ketersediaan lahan (ha)

Pi= Produksi aktual tiap jenis komoditi (satuan tergantung kepada jenis komoditas) Komoditas yang diperhitungan meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

Hi = Harga satuan tiap jenis komoditas (Rp/satuan) di tingkat produsen

Hb = Harga satuan beras (Rp/kg) di tingkat produsen

Ptvb= Produktivitas beras (kg/ha)

Dalam penghitungan ini, faktor konversi yang digunakan untuk menyetarakan produk non beras dengan beras adalah harga. Untuk memudahkan penghitungan, dapat digunakan tabel berikut ini dalam menghitung total nilai produksi  $\{\sum (P_i \times H_i)\}$ .

## **2) Kebutuhan Lahan**

Rumus:

$$D_L = N \times KHL_L$$

Keterangan:

DL = Total kebutuhan lahan setara beras (ha)

N = Jumlah penduduk (orang)

KHLL = Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk:

Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk merupakan kebutuhan hidup layak per penduduk dibagi produktivitas beras lokal.

Kebutuhan hidup layak per penduduk diasumsikan sebesar 1 ton setara beras/kapita/ tahun.

Daerah yang tidak memiliki data produktivitas beras lokal, dapat menggunakan data rata-rata produktivitas beras nasional sebesar 2400 kg/ha/tahun.

### **3) Status Daya Dukung Lahan**

Status daya dukung lahan diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan lahan (SL) dan kebutuhan lahan (DL). Adapun penjelasannya sebagai berikut

- Bila  $SL > DL$ , daya dukung lahan dinyatakan surplus.
- Bila  $SL < DL$ , daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui.

Pada tabel dibawah ini, terdapat bahwa status daya dukung lahan Kabupaten Ngada pada tahun 2023 dinyatakan Surplus. Adapun terdapat total nilai produksi pertanian sebesar 1,098,304,950,000, produksi perkebunan sebesar 249,209,120,000, dan produksi peternakan sebesar 9,700,151,250,000 agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 35 Daya Dukung Lahan Kabupaten Ngada**

No	Kecamatan	Total Nilai Produksi			total $\Sigma (P_i \times H_i)$	Harga satuan beras (Rp/kg) Hb	Produktivitas beras (kg/ha) Ptvb	Ketersediaan Lahan (Ha) SL	Jumlah penduduk 2023 (jiwa) N	Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk KHLL	Total kebutuhan lahan setara beras (ha) DL	Status daya dukung lahan	Keterangan
		Pertanian	Perkebunan	Peternakan									
1	Aimere	Rp 3,023,300,000	Rp 34,554,000,000	Rp 575,162,550,000	Rp 612,739,850,000	Rp 11,100	2400	23001	10680	0.17	1816	SL>DL	Surplus
2	Jerebuu	Rp 1,320,800,000	Rp 24,744,000,000	Rp 239,080,100,000	Rp 265,144,900,000	Rp 11,100	2400	9953	7609	0.17	1294	SL>DL	Surplus
3	Inerie	Rp 2,210,700,000	Rp 11,018,000,000	Rp 186,037,300,000	Rp 199,266,000,000	Rp 11,100	2400	7480	8419	0.17	1431	SL>DL	Surplus
4	Bajawa	Rp 19,185,900,000	Rp 28,144,000,000	Rp 1,224,146,850,000	Rp 1,271,476,750,000	Rp 11,100	2400	47728	39715	0.17	6752	SL>DL	Surplus
5	Golewa	Rp 43,186,800,000	Rp 40,724,000,000	Rp 590,857,500,000	Rp 674,768,300,000	Rp 11,100	2400	25329	19040	0.17	3237	SL>DL	Surplus
6	Golewa Selatan	Rp 81,333,900,000	Rp 12,506,000,000	Rp 629,259,250,000	Rp 723,099,150,000	Rp 11,100	2400	27143	12464	0.17	2119	SL>DL	Surplus
7	Golewa Barat	Rp 36,477,150,000	Rp 11,710,000,000	Rp 548,562,100,000	Rp 596,749,250,000	Rp 11,100	2400	22400	11454	0.17	1947	SL>DL	Surplus
8	Bajawa Utara	Rp 143,139,000,000	Rp 20,624,000,000	Rp 774,668,100,000	Rp 938,431,100,000	Rp 11,100	2400	35226	10600	0.17	1802	SL>DL	Surplus
9	Soa	Rp 396,417,300,000	Rp 11,690,000,000	Rp 1,092,072,500,000	Rp 1,500,179,800,000	Rp 11,100	2400	56313	14466	0.17	2459	SL>DL	Surplus

No	Kecamatan	Total Nilai Produksi			total $\Sigma (P_i \times H_i)$	Harga satuan beras (Rp/kg) Hb	Produktivitas beras (kg/ha) Ptvb	Ketersediaan Lahan (Ha) SL	Jumlah penduduk 2023 (jiwa) N	Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk KHLL	Total kebutuhan lahan setara beras (ha) DL	Status daya dukung lahan	Keterangan
		Pertanian	Perkebunan	Peternakan									
10	Riung	Rp 94,623,100,000	Rp 37,533,120,000	Rp 2,277,383,200,000	Rp 2,409,539,420,000	Rp 11,100	2400	90448	16873	0.17	2868	SL>DL	Surplus
11	Riung Barat	Rp 135,378,750,000	Rp 6,226,000,000	Rp 1,187,358,550,000	Rp 1,328,963,300,000	Rp 11,100	2400	49886	9362	0.17	1592	SL>DL	Surplus
12	Wolomeze	Rp 142,008,250,000	Rp 9,736,000,000	Rp 375,563,250,000	Rp 527,307,500,000	Rp 11,100	2400	19794	6714	0.17	1141	SL>DL	Surplus
<b>Total</b>		<b>Rp 1,098,304,950,000</b>	<b>Rp 249,209,120,000</b>	<b>Rp 9,700,151,250,000</b>	<b>Rp 8,464,311,840,000</b>	<b>Rp 11,100</b>	<b>2400</b>	<b>31772 9</b>	<b>167396</b>	<b>0.17</b>	<b>28457</b>	<b>SL&gt;DL</b>	<b>Surplus</b>

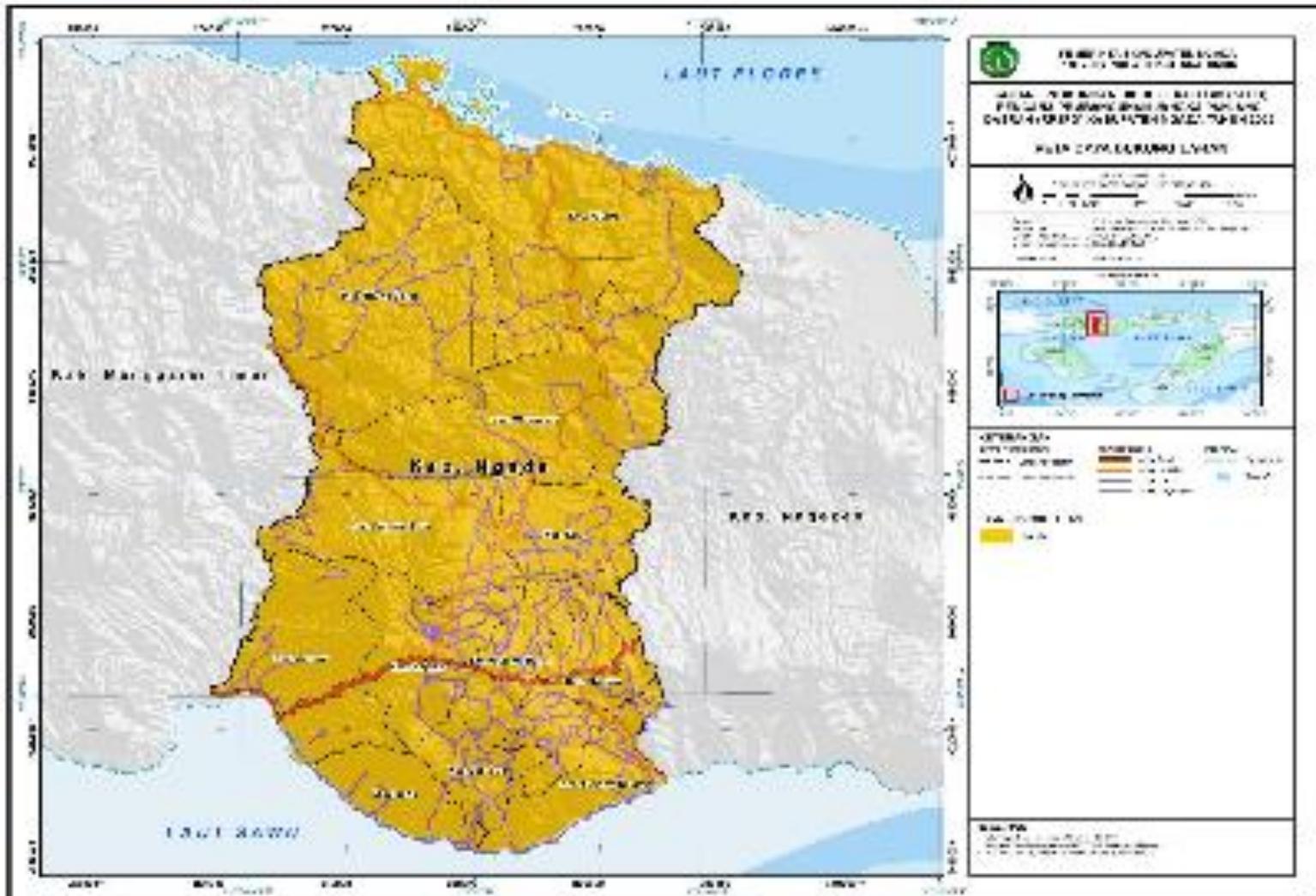
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

**Tabel 2. 36 Proyeksi Daya Dukung Lahan Kabupaten Ngada Tahun 2023-2045**

No.	Kecamatan	Daya Dukung Lahan					Keterangan
		2023	2028	2033	2038	2045	
1	Aimere	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	Surplus
2	Jerebuu	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	Surplus
3	Inerie	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	Surplus
4	Bajawa	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	Surplus
5	Golewa	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	Surplus
6	Golewa Selatan	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	Surplus
7	Golewa Barat	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	Surplus
8	Bajawa Utara	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	Surplus
9	Soa	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	Surplus
10	Riung	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	Surplus
11	Riung Barat	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	Surplus
12	Wolomeze	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	Surplus
<b>Total</b>		<b>SL&gt;DL</b>	<b>SL&gt;DL</b>	<b>SL&gt;DL</b>	<b>SL&gt;DL</b>	<b>SL&gt;DL</b>	<b>Surplus</b>

*Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada*

Pada tabel diatas, dapat terlihat bahwa proyeksi daya dukung lahan Kabupaten Ngada pada tahun 2023 – 2045 dijelaskan bahwa SL (Ketersediaan Lahan) > DL (Kebutuhan Lahan) yang artinya surplus.



Gambar 2. 14 Peta Daya Dukung Lahan

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

➤ **Daya Dukung Lahan Pertanian**

Daya dukung lahan pertanian merupakan ukuran kemampuan produksi tanaman pangan/ padi dan atau tanaman pangan yang lain dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk di suatu wilayah. Tingkat daya dukung lahan pertanian dituliskan dengan simbol  $\tau$  dimana:

$$\tau = \frac{\chi}{\kappa}$$

$$\chi = \text{Luas panen tanaman pangan per kapita} = \frac{\text{Luas panen (ha)}}{\text{Jumlah penduduk (jiwa)}}$$

$$\kappa = \text{Luas lahan untuk swasembada pangan} =$$

$$\frac{\text{Kebutuhan fisik minimum (KFM)}}{\text{Produksi tanaman pangan/ ha/tahun}}$$

Klasifikasi daya dukung lahan pertanian:

$\tau > 1$  : wilayah yang mampu swasembada pangan dan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya

$\tau < 1$  : wilayah yang belum mampu swasembada pangan

Berdasarkan rumus tersebut maka dapat diketahui daya dukung lahan pertanian Kabupaten Ngada sebagaimana diperlihatkan dalam tabel di bawah. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa keseluruhan wilayah di Kabupaten Ngada termasuk dalam lahan yang sesuai untuk swasembada pangan dan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya. Hal ini terbukti pada tabel luas daya dukung lahan pada tahun 2023 – 2045 mengalami penurunan.

**Tabel 2. 37 Luas Panen Tanaman Pangan per kapita Kabupaten Ngada**

No.	Kecamatan	Luas Panen Tanaman Pangan Per Kapaita X					luas lahan swasembada pangan K
		2023	2028	2033	2038	2045	
1	Aimere	0,060581	0,055747	0,0513	0,042725	0,043441	0,01361346
2	Jerebuu	0,021553	0,019839	0,01826	0,015216	0,01547	0,021651163
3	Inerie	0,066279	0,061217	0,056541	0,047474	0,048235	0,016333333
4	Bajawa	0,047413	0,046373	0,045356	0,043197	0,043389	0,006125

No.	Kecamatan	Luas Panen Tanaman Pangan Per Kapaita X					luas lahan swasembada pangan K
		2023	2028	2033	2038	2045	
5	Golewa	0,09396	0,088407	0,083182	0,072749	0,073641	0,006322092
6	Golewa Selatan	0,203626	0,192875	0,182692	0,16214	0,163909	0,006533333
7	Golewa Barat	0,183779	0,173974	0,164693	0,14598	0,147589	0,006125
8	Bajawa Utara	0,567925	0,558149	0,548542	0,527985	0,529821	0,008909091
9	Soa	0,879441	0,831345	0,785879	0,694416	0,702271	0,006125
10	Riung	0,278611	0,212856	0,16262	0,089943	0,094918	0,010946809
11	Riung Barat	0,522752	0,561967	0,604123	0,708335	0,698161	0,007
12	Wolomeze	0,739202	0,702625	0,667858	0,597307	0,603401	0,0196
<b>Total</b>		<b>0,25678</b>	<b>0,24173</b>	<b>0,22756</b>	<b>0,21421</b>	<b>0,19923</b>	<b>0,004738829</b>

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

Tabel 2. 38 Luas Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Ngada

No.	Kecamatan	Daya Dukung Lahan Pertanian T				
		2023	2028	2033	2038	2045
1	Aimere	4,450046	4,095025	3,768328	3,467694	3,138422
2	Jerebuu	0,995486	0,916284	0,843384	0,776284	0,702773
3	Inerie	4,057877	3,747961	3,461715	3,19733	2,906584
4	Bajawa	7,740868	7,571121	7,405097	7,242713	7,052546
5	Golewa	14,86218	13,98384	13,1574	12,37981	11,50712
6	Golewa Selatan	31,16731	29,52171	27,96298	26,48656	24,81739
7	Golewa Barat	30,00467	28,40396	26,88864	25,45417	23,83345
8	Bajawa Utara	63,74663	62,64941	61,57107	60,51129	59,26361
9	Soa	143,5823	135,7298	128,3069	121,2898	113,3741
10	Riung	25,45133	19,44457	14,85547	11,34943	8,216364
11	Riung Barat	74,67879	80,28094	86,30333	92,77751	101,1908
12	Wolomeze	37,71437	35,84822	34,07441	32,38836	30,47487
<b>Total</b>		<b>54,1865</b>	<b>51,0097</b>	<b>48,0193</b>	<b>45,2041</b>	<b>42,0429</b>

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

Selain menghitung daya dukung lahan pertanian dihitung pula nilai rasio kemampuan daya dukung (CCR) yang menunjukkan kemampuan suatu wilayah dalam mendukung kebutuhan pokok penduduknya. Sesuai pedoman D3TLH tahun 2014, nilai CCR dapat dihitung dengan rumus di bawah ini:

$$CCR = \frac{(A \times r)}{(H \times h \times f)}$$

- CCR = rasio kemampuan daya dukung (Carrying Capacity Ratio)
- A = jumlah total area yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian
- R = frekuensi panen per hektar per tahun
- H = jumlah KK (rumah tangga)
- h = prosentase jumlah penduduk yang tinggal (80%)
- F = ukuran lahan pertanian rata-rata yang dimiliki petani (1 ha)

Dengan ketentuan nilai CCR:

CCR > 1 : Wilayah memiliki kemampuan untuk mendukung kebutuhan pokok penduduk

CCR < 1 : Wilayah tidak memiliki kemampuan untuk mendukung kebutuhan pokok penduduk

**Tabel 2. 39 Klasifikasi Kelas Ketersediaan Kebutuhan Beras**

Kelas	Klasifikasi	Angka Rasio
I	Sangat rendah	0 – 0,5
II	Rendah	0,51 – 1
III	Cukup	1,01 – 1,5
IV	Baik	1,51 – 2
V	Sangat baik	>2

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

**Tabel 2. 40 Rasio Kemampuan Daya Dukung (CCR) Kabupaten Ngada Tahun 2023**

No.	Kecamatan	2023						Keterangan
		A	R	H	h	f	CCR	
1	Aimere	555,81	3,00	2.670	0,8	1	0,78	Rendah
2	Jerebuu	14,58	3,00	1.902,25	0,8	1	0,02	Sangat Rendah
3	Inerie	1,13	3,00	2.104,75	0,8	1	0,00	Sangat Rendah
4	Bajawa	1.056,00	3,00	9.928,75	0,8	1	0,39	Sangat Rendah
5	Golewa	1.492,63	3,00	4.760	0,8	1	1,17	Cukup
6	Golewa Selatan	473,00	3,00	3.116	0,8	1	0,56	Rendah
7	Golewa Barat	2.697,06	3,00	2.863,5	0,8	1	3,53	Sangat baik

No.	Kecamatan	2023						Keterangan
		A	R	H	h	f	CCR	
8	Bajawa Utara	2.991,02	3,00	2.650	0,8	1	4,23	Sangat baik
9	Soa	4.331,32	3,00	3.616,5	0,8	1	4,49	Sangat baik
10	Riung	3.944,87	3,00	4.218,25	0,8	1	3,50	Sangat baik
11	Riung Barat	3.173,08	3,00	2.340,5	0,8	1	5,08	Sangat baik
12	Wolomeze	3.323,40	3,00	1.678,5	0,8	1	7,42	Sangat baik
<b>Total</b>		<b>24.053,90</b>	<b>3,00</b>	<b>41.849</b>	<b>0,8</b>	<b>1</b>	<b>2,15</b>	<b>Sangat baik</b>

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

Dari perhitungan rasio kemampuan untuk mendukung kebutuhan pokok penduduk pada tahun perencanaan yaitu tahun 2023 menunjukkan bahwa pada tiap kelurahan bervariasi mulai dari rendah hingga sangat baik.

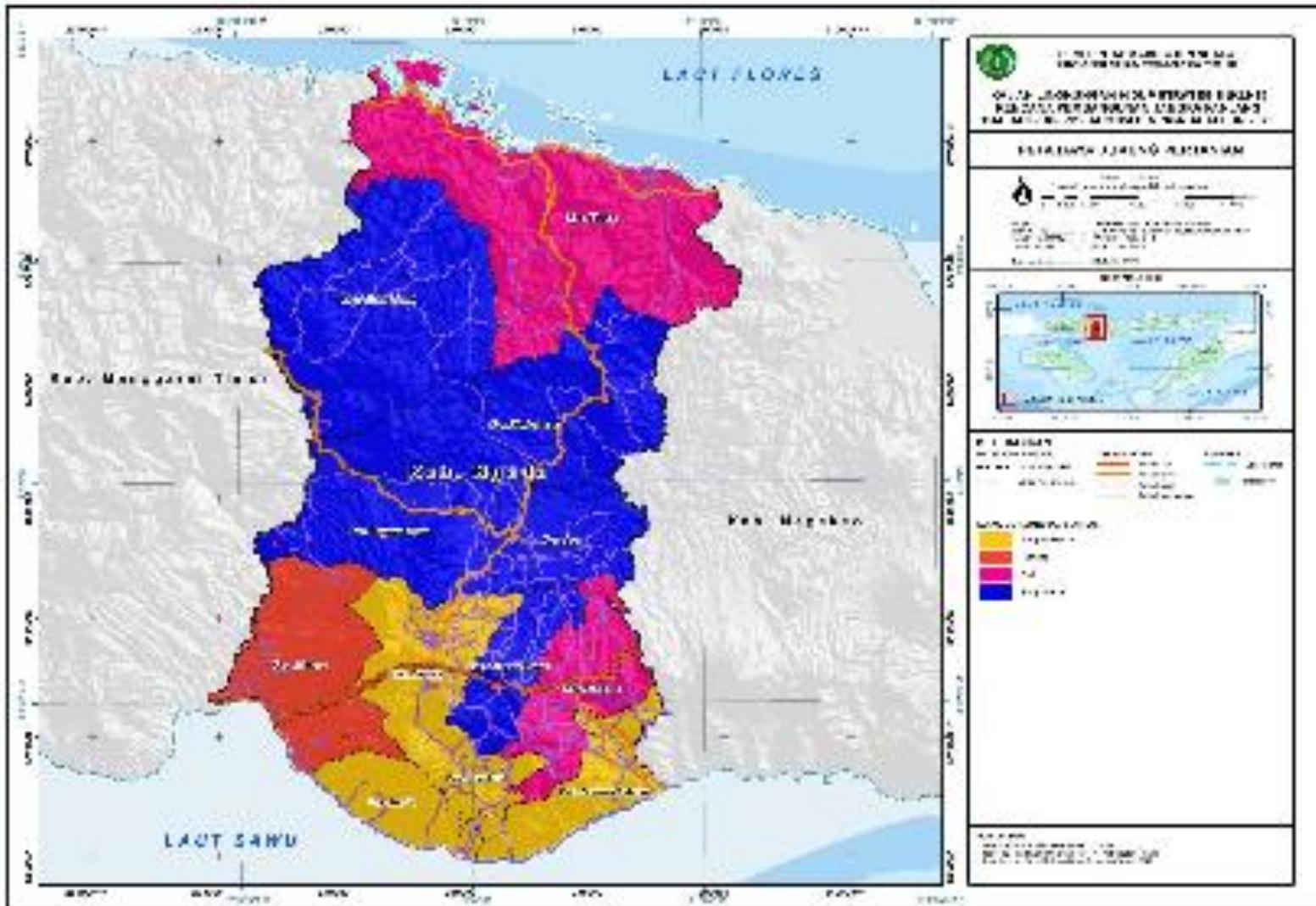
**Tabel 2. 41 Proyeksi Rasio Kemampuan Daya Dukung (CCR) Kabupaten Ngada Tahun 2023-2045**

No.	Kecamatan	CCR					Keterangan	
		2023	2028	2033	2038	2045		
1	Aimere	0,79	0,71	0,66	0,60	0,55	Belum Mampu Swasembada	Rendah
2	Jerebuu	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	Belum Mampu Swasembada	Sangat Rendah
3	Inerie	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	Belum Mampu Swasembada	Sangat Rendah
4	Bajawa	0,40	0,39	0,38	0,37	0,36	Belum Mampu Swasembada	Sangat Rendah
5	Golewa	1,18	1,10	1,04	0,97	0,91	Belum Mampu Swasembada	Rendah
6	Golewa Selatan	0,58	0,53	0,51	0,48	0,45	Belum Mampu Swasembada	Sangat Rendah
7	Golewa Barat	3,58	3,34	3,16	2,99	2,80	Mampu Swasembada	Sangat Baik

No.	Kecamatan	CCR					Keterangan	
		2023	2028	2033	2038	2045		
8	Bajawa Utara	4,30	4,15	4,08	4,01	3,93	Mampu Swasembada	Sangat Baik
9	Soa	4,52	4,24	4,01	3,79	3,54	Mampu Swasembada	Sangat Baik
10	Riung	3,55	2,67	2,04	1,56	1,13	Mampu Swasembada	Cukup
11	Riung Barat	5,15	5,46	5,87	6,31	6,89	Mampu Swasembada	Sangat Baik
12	Wolomeze	7,55	7,05	6,70	6,37	6,00	Mampu Swasembada	Sangat Baik
<b>Total</b>		<b>2,17</b>	<b>2,02</b>	<b>191,01</b>	<b>1,79</b>	<b>1,67</b>	<b>Mampu Swasembada</b>	<b>Sangat Baik</b>

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

Pada tabel diatas, dapat terlihat bahwa proyeksi CCR daya dukung Kabupaten Ngada pada tahun 2023 – 2045 dijelaskan bahwa terdiri dari sangat rendah, rendah, cukup dan sangat baik.



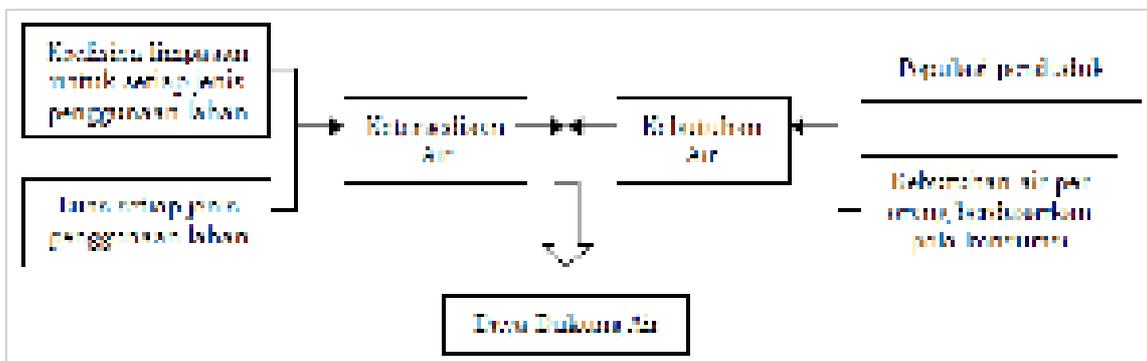
Gambar 2. 15 Peta Daya Dukung Pertanian

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

### ➤ Daya Dukung Air Berdasarkan Ketersediaan dan Kebutuhan

Perbandingan ketersediaan dan kebutuhan air dilakukan untuk menghitung daya dukung air di suatu wilayah, dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan akan sumber daya air bagi penduduk yang hidup di wilayah itu. Dengan metode ini, dapat diketahui secara umum apakah sumber daya air di suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Keadaan surplus menunjukkan bahwa ketersediaan air di suatu wilayah tercukupi, sedangkan keadaan defisit menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan akan air. Guna memenuhi kebutuhan air, fungsi lingkungan yang terkait dengan sistem tata air harus dilestarikan.

Hasil perhitungan dengan metode ini dapat dijadikan bahan masukan/pertimbangan dalam penyusunan rencana tata ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyediaan sumber daya air yang berkelanjutan. Penentuan daya dukung air dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan air seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 16 Penentuan Daya Dukung Air

Ketersediaan air ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Sementara itu, kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak.

Penghitungan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

## 1) Ketersediaan (Supply) Air

Perhitungan dengan menggunakan Metode Koefisien Limpasan yang dimodifikasi dari metode rasional.

$$C = \sum (c_i \times A_i) / \sum A_i$$

$$R = \sum R_i / m$$

$$SA = 10 \times C \times R \times A$$

Keterangan:

SA = ketersediaan air (m<sup>3</sup>/tahun)

C = koefisien limpasan tertimbang

C<sub>i</sub> = Koefisien limpasan penggunaan lahan i

A<sub>i</sub> = luas penggunaan lahan I (ha) dari data BPS atau Daerah Dalam Angka, atau dari data Badan Pertanahan Nasional (BPN)

R = rata-rata aljabar curah hujan tahunan wilayah (mm/tahunan) dari data BPS atau BMG atau dinas terkait setempat.

R<sub>i</sub> = curah hujan tahunan pada stasiun i

m = jumlah stasiun pengamatan curah hujan

A = luas wilayah (ha)

10 = faktor konversi dari mm.ha menjadi m<sup>3</sup>

Untuk mengetahui rata-rata aljabar curah hujan tahunan wilayah (mm/tahunan) dari data BPS atau BMG atau dinas terkait setempat, harus diketahui jumlah curah hujan per tahun dan jumlah stasiun hujan.

## 2) Kebutuhan (Demand) Air

Rumus:

$$DA = N \times KHLA$$

Keterangan:

DA = Total kebutuhan air (m<sup>3</sup>/tahun)

N = Jumlah penduduk (orang)

KHLA = Kebutuhan air untuk hidup layak  
 = 1600 m<sup>3</sup> air/kapita/tahun,  
 = 2 x 800 m<sup>3</sup> air/kapita/tahun, dimana:

800 m<sup>3</sup> air/kapita/tahun merupakan kebutuhan air untuk keperluan domestik dan untuk menghasilkan pangan (kebutuhan air untuk menghasilkan satu satuan produk) di bawah ini. 2.0 merupakan faktor koreksi untuk memperhitungkan kebutuhan hidup layak yang mencakup kebutuhan pangan, domestik dan lainnya.

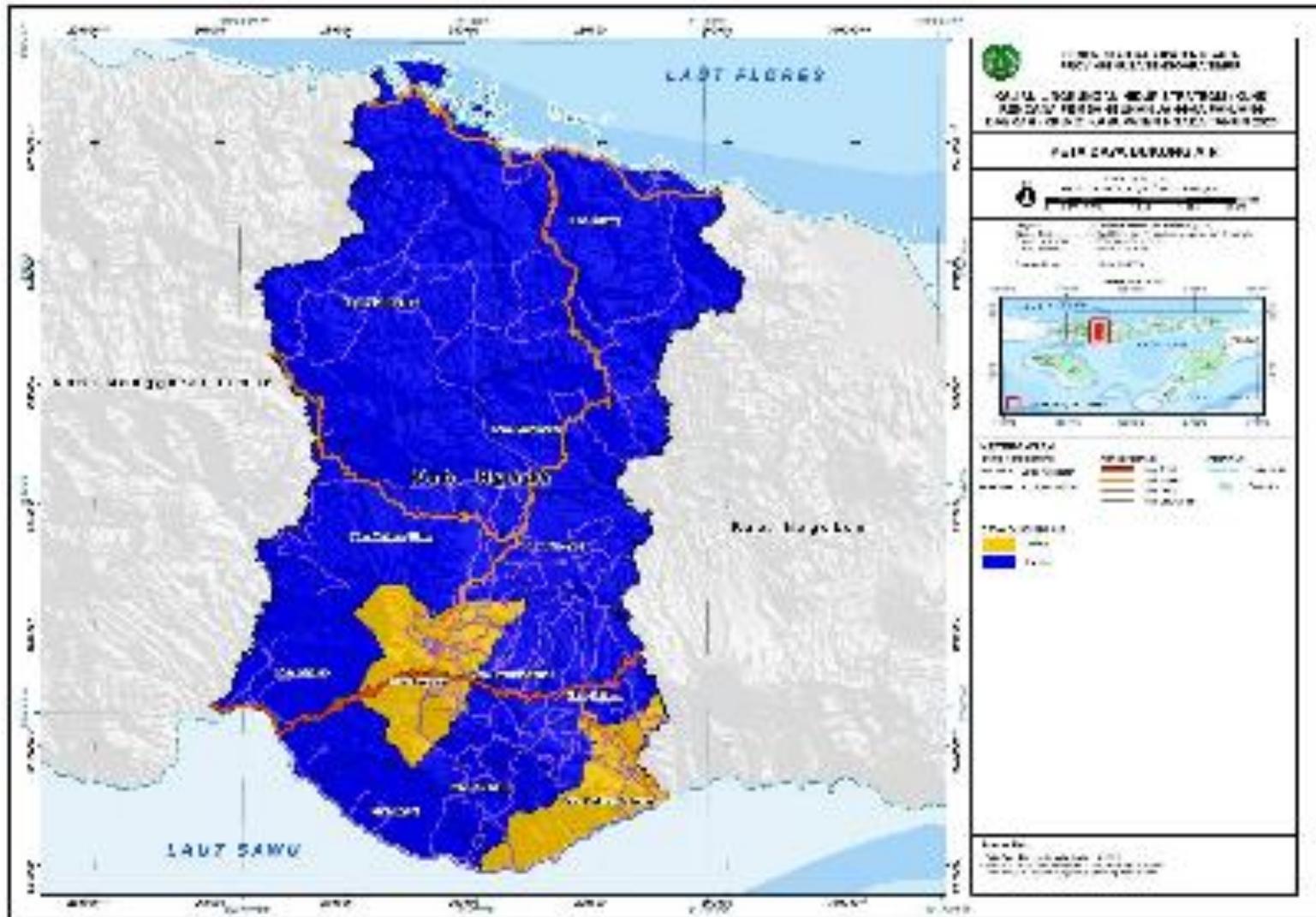
Catatan: Kriteria WHO untuk kebutuhan air total sebesar 1000–2000 m<sup>3</sup>/orang/tahun.

**Tabel 2. 42 Perhitungan Daya Dukung Air Kabupaten Ngada Tahun 2023-2045**

No.	Kecamatan	Status Daya Dukung Air					Keterangan
		2023	2028	2033	2038	2045	
1	Aimere	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	Surplus
2	Bajawa	SA<DA	SA<DA	SA<DA	SA<DA	SA<DA	Defisit
3	Bajawa Utara	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	Surplus
4	Golewa	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA<DA	Surplus
5	Golewa Barat	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA<DA	Surplus
6	Golewa Selatan	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	Surplus
7	Inerie	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	Surplus
8	Jerebuu	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	Surplus
9	Riung	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	Surplus
10	Riung Barat	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	Surplus
11	Soa	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	Surplus
12	Wolomeze	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	Surplus

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

Berdasarkan tabel diatas, pada perhitungan daya dukung air Kabupaten Ngada pada tahun 2023 – 2045 terdapat status daya dukung air yang dinyatakan surplus pada 11 Kecamatan dan defisit pada 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Bajawa.



Gambar 2. 17Peta Daya Dukung Air

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

### ➤ Daya Dukung Air Berdasarkan Sistem Grid

Sistem Grid skala ragam tersebut dibuat dengan memperhatikan datum geodetik, sistem koordinat, titik asal sistem koordinat grid skala ragam, resolusi grid, dan sistem penomoran grid. Sistem grid skala ragam ini dimanfaatkan untuk data lingkungan Indonesia dengan titik asal (origin) sistem koordinat terletak pada koordinat terletak pada koordinat (90° BT, 15° LS); titik batas ujung timur dan ujung utara grid adalah 144° BT dan 10° LU, sama dengan grid penomoran lembar peta rupa bumi Indonesia (RBI) (BAKOSURTANAL, 2005). Titik asal tersebut terletak pada sudut kiri bawah yang menjadi awal dari nomor grid pada sistem grid skala ragam Indonesia.

Ukuran grid yang dibangun berbeda-beda dari mulai ukuran 1°30' x 1° hingga ukuran grid terkecil yaitu 5" x 5" (atau setara dengan ukuran di lapangan sekitar 154 x 154 m). Dalam sistem yang dibuat, data jumlah penduduk, kondisi tutupan lahan dan keberadaan jalan akses akan diintegrasikan melalui nilai tertentu. Distribusi densitas populasi dimodelkan dalam sistem grid melalui persamaan sebagai berikut.

$$P = \sum_{i=1}^n A_i D_i$$

Keterangan:

P = Jumlah penduduk total

A<sub>i</sub> = Luas area setiap tutupan lahan

D<sub>i</sub> = Kepadatan penduduk setiap tipe penggunaan lahan

Dari persamaan diatas, dapat ditambahkan parameter bobot untuk setiap tipe tutupan lahan dan jalan, sehingga persamaan tersebut dapat dituliskan menjadi:

$$P = \sum_{i=1}^n A_{ij} (W_i W_{i1}) D_i$$

Keterangan:

P = Jumlah penduduk total

A<sub>ij</sub> = Luas area setiap tutupan lahan dari data tutupan lahan

D<sub>ij</sub> = Kepadatan penduduk setiap tipe penggunaan lahan dari data tutupan lahan

W<sub>i</sub> = Bobot setiap kelas lahan

W<sub>jl</sub> = Bobot setiap kelas jalan

Untuk menghitung densitas populasi penduduk untuk setiap kelas lahan dalam suatu wilayah administratif (kabupaten, kecamatan atau kelurahan), persamaan diatas dikembangkan menggunakan persamaan tambahan berikut:

$$D_{ij} = \frac{A'_{ij} = A_{ij} (W_i + W_{jl})}{\frac{\left( \frac{A'_{ij}}{\sum A'_{ij}} \times A_{ij} \right)}{\sum \left( \frac{A'_{ij}}{\sum A'_{ij}} \times A_{ij} \right)}} \times P_j$$

Berdasarkan persamaan di atas, dapat diperoleh densitas populasi penduduk per grid untuk tiap kelas lahan di masing-masing wilayah administrasi. Perhitungan densitas dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

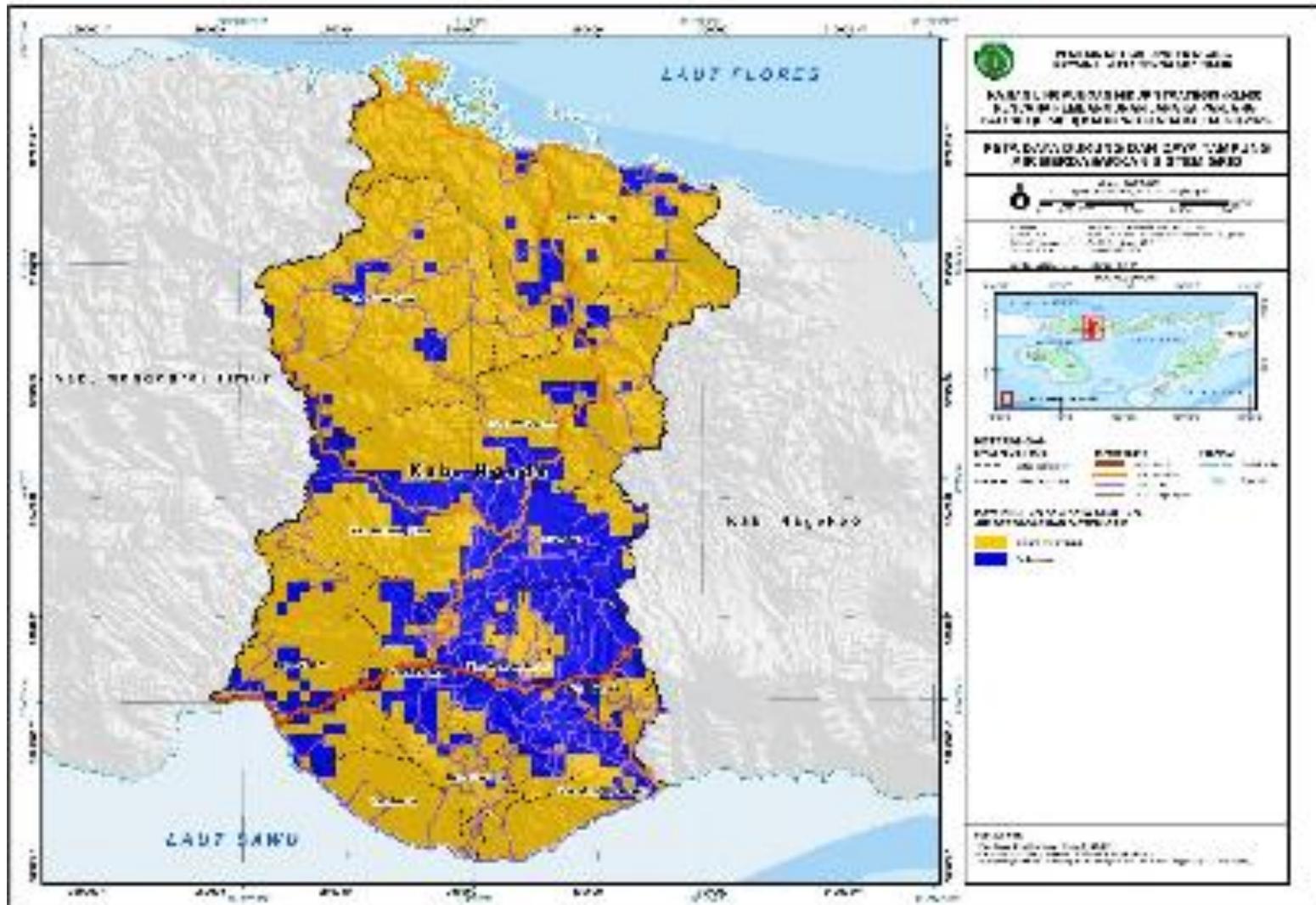
- Memasukkan data tutupan lahan sebagai masukan.
- Memasukkan data tutupan lahan dan jalan sebagai masukan untuk menentukan identitas.

**Tabel 2. 43 Perhitungan Daya Dukung Air Berdasarkan Sistem Grid Kabupaten Ngada**

No.	Kecamatan	Status Daya Dukung Air Grid (Ha)		Total
		Belum Terlampaui	Terlampaui	
1	Aimere	11.976,08	3.356,25	15.332,33
2	Bajawa	4.378,44	6.408,25	10.786,69
3	Bajawa Utara	9.132,09	6.304,78	15.436,87
4	Golewa	2.545,75	7.733,60	10.279,35

No.	Kecamatan	Status Daya Dukung Air Grid (Ha)		Total
		Belum Terlampaui	Terlampaui	
5	Golewa Barat	2.802,67	4.053,60	6.856,27
6	Golewa Selatan	5.790,89	2.268,38	8.059,27
7	Inerie	6.380,13	194,52	6.574,65
8	Jerebuu	4.249,00	602,68	4.851,68
9	Riung	31.649,35	3.552,75	35.202,10
10	Riung Barat	26.348,32	2.337,49	28.685,81
11	Soa	1.862,89	6.874,95	8.737,83
12	Wolomeze	19.066,52	3.883,18	22.949,70
<b>Kabupaten Ngada</b>		<b>126.182,13</b>	<b>47.570,42</b>	<b>173.752,5</b>

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada



Gambar 2. 18 Peta Daya Dukung dan Tampung Air Berdasarkan Sistem Grid

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

➤ **Daya Dukung Fungsi Lindung**

Hutan dengan penyebaran vegetasinya yang luas, dengan struktur dan komposisinya yang sangat beragam merupakan salah satu komponen sumber daya alam terpenting dalam ekosistem. Keberadaan hutan diharapkan mampu memberi manfaat lingkungan yang besar bagi kehidupan manusia, antara lain dalam pengendalian banjir, erosi, sedimentasi, pemeliharaan keanekaragaman hayati, pengendalian daur air dan pemeliharaan kualitas udara.

Tingkat daya dukung fungsi lindung dituliskan dengan simbol DDL, dimana:

$$DDL = \frac{\Sigma(Lgl1. \alpha1 + Lgl2. \alpha2 + Lgl3. \alpha3 + Lglx. \alpha x)}{LW}$$

DDL = daya dukung fungsi lindung

LW = Luas wilayah (ha)

Lgl1 = Luas guna lahan jenis 1 (Ha)

α1 = Koefisien lindung untuk guna lahan jenis 1

Koefisien lindung untuk tata guna lahan adalah:

Cagar Alam	:	1	Hutan produksi	:	0,68
Suaka Margasatwa	:	1	Perkebunan besar	:	0,54
Taman wisata	:	1	Perkebunan rakyat	:	0,42
Taman buru	:	0,82	Persawahan	:	0,46
Hutan lindung	:	1	Ladang/ tegal	:	0,21
Hutan cadangan	:	0,61	Padang rumput	:	0,28
Danau/ tambak	:	0,98	Tanaman kayu	:	0,35
Permukiman	:	0,18	Tanah kosong	:	0,01

**Tabel 2. 44 Klasifikasi Kelas Ketersediaan Daya Dukung Lindung**

Nilai DDL	Kategori
0 – 0,25	Kurang baik
0,26 – 0,5	Cukup baik
0,51 – 0,75	Baik
0,76 – 1	Sangat baik

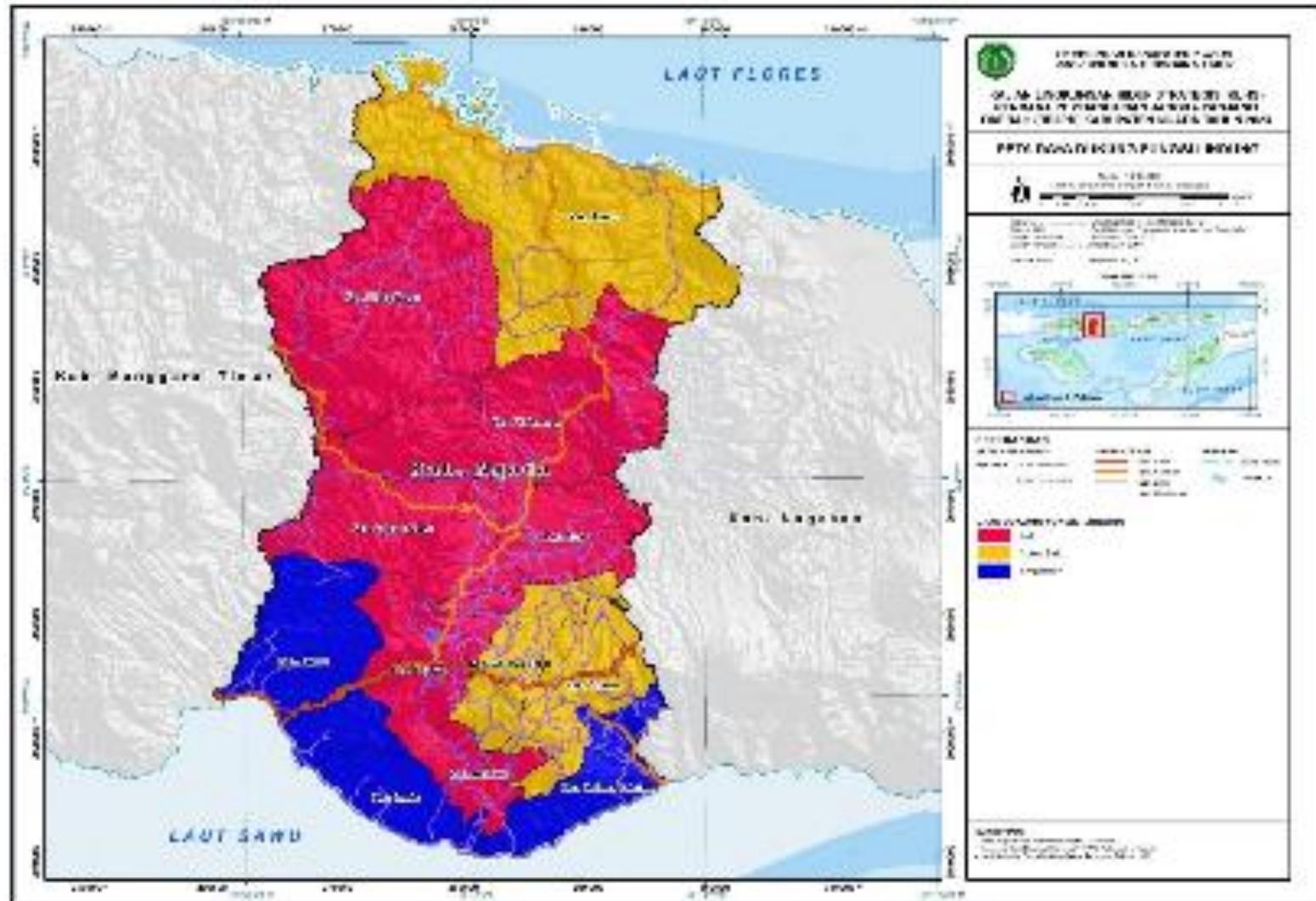
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

**Tabel 2. 45 Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Ngada 2023**

No.	Kecamatan	DDL	Keterangan
1	Aimere	0,77	Sangat Baik
2	Bajawa	0,73	Baik
3	Bajawa Utara	0,66	Baik
4	Golewa	0,73	Baik
5	Golewa Barat	0,70	Baik
6	Golewa Selatan	0,91	Sangat Baik
7	Inerie	0,90	Sangat Baik
8	Jerebuu	0,72	Baik
9	Riung	0,41	Cukup Baik
10	Riung Barat	0,66	Baik
11	Soa	0,61	Baik
12	Wolomeze	0,63	Baik
<b>Total</b>		<b>0,65</b>	<b>Baik</b>

*Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada*

Berdasarkan tabel diatas, daya dukung fungsi lindung Kabupaten Ngada tahun 2023 dikategorikan baik.



Gambar 2. 19 Peta Daya Dukung Fungsi Lindung

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

### ➤ **Daya Tampung Penduduk**

Daya tampung penduduk sangat berkaitan dengan alokasi penggunaan lahan perumahan yaitu dengan mempertimbangkan kondisi eksisting persebaran permukiman dan kebutuhan permukiman sampai akhir tahun perencanaan. Daya tampung penduduk juga berfungsi untuk melihat jumlah kebutuhan ruang untuk perumahan pada tahun perencanaan 2040 dengan membandingkan kesesuaian lahan potensial yang ada.

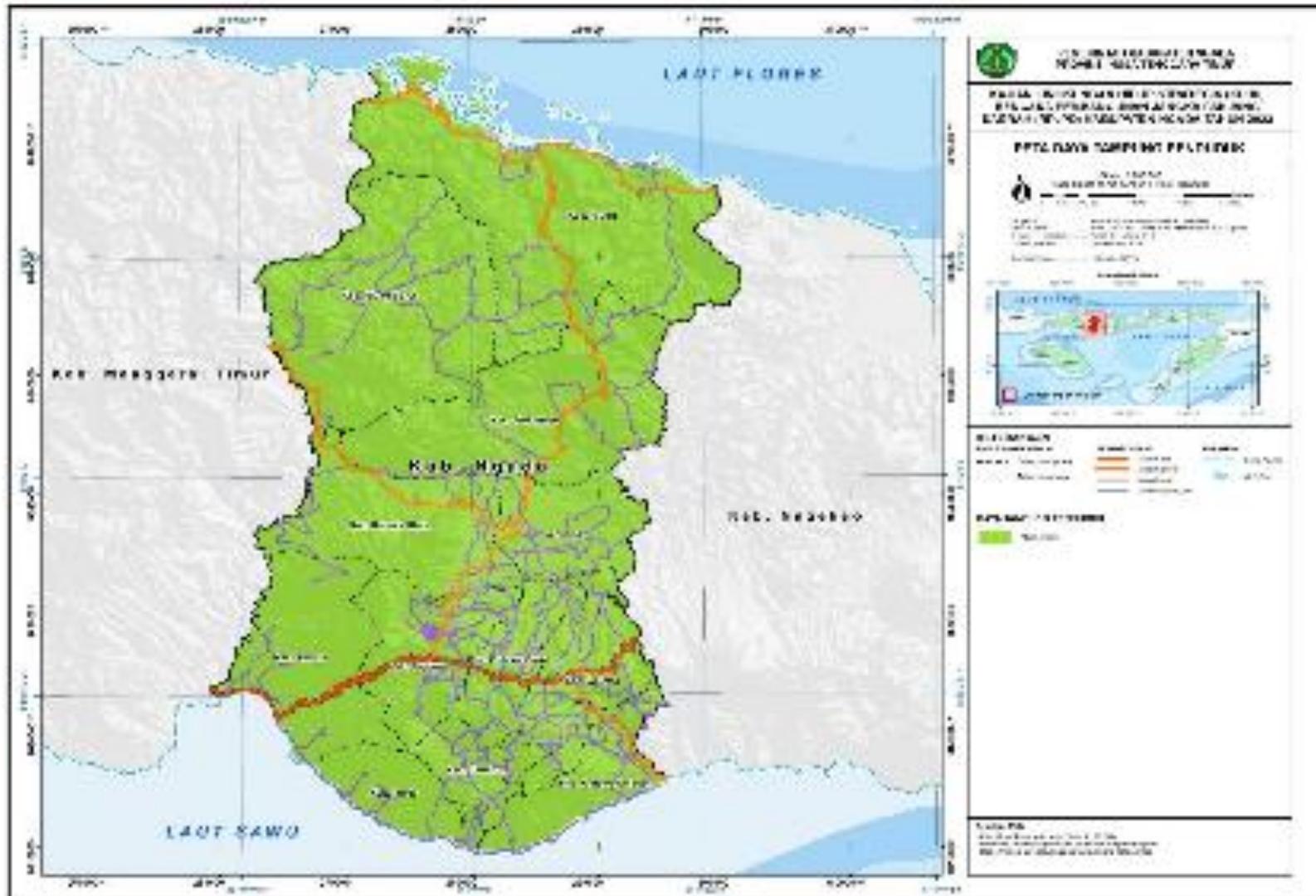
Asumsi yang digunakan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 34 bahwa melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang. Oleh karena itu, lingkungan hunian harus dibangun secara berimbang antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah. Berdasarkan ketentuan hunian berimbang maka perkiraan jumlah dan tipe rumah dilakukan dengan komposisi 3 : 2 : 1 (kavling sederhana : menengah : mewah).

Berdasarkan tabel dibawah ini, daya tampung penduduk Kabupaten Ngada tahun 2045 yaitu 59.827.989 jiwa dengan daya tampung rumah sebesar 11.965.598 unit. Selain itu juga, daya tampung rumah memenuhi daya tampung jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Ngada.

**Tabel 2. 46 Daya Tampung Pemukiman Kabupaten Ngada 2045**

No.	Kecamatan	Penggunaan Lahan Eksisting	PSU (30%)	Perumahan (70%)	Luas Lahan Bagi Perumahan Baru			Jumlah Unit Rumah			Daya Tampung Rumah (unit)	Daya Tampung Penduduk (jiwa)	Jumlah penduduk 2045	Ket
					Tipe Mewah (1)	Tipe Menengah (2)	Tipe Sederhana (3)	Tipe Mewah (1)	Tipe Menengah (2)	Tipe Sederhana (3)				
					A	B = (A x 30%)	C = (A x 70%)	D = (C x 1/3)	E = (C x 2/3)	F = (C x 3/3)				
1	Aimere	15.332,33	4.599,70	10.732,63	1.788,77	3577,54	5.366,32	62.110,15	24.440,60	745.321,80	1.055.873	5.279.363	15.143	Memenuhi
2	Jerebuu	4.851,68	1.455,50	3.396,18	566,03	1132,06	1.698,09	19.653,81	78.615,23	235.845,69	334.115	1.670.574	10.778	Memenuhi
3	Inerie	6.574,65	1.972,40	4.602,26	767,04	1534,09	2.301,13	26.633,43	106.533,70	319.601,10	452.768	2.263.841	11.754	Memenuhi
4	Bajawa	10.786,69	3.236,01	7.550,68	1.258,45	2516,89	3.775,34	43.696,08	174.784,30	524.352,90	742.833	3.714.166	43.591	Memenuhi
5	Golewa	10.279,35	3.083,80	7.195,54	1.199,26	2398,51	3.597,77	41.640,87	166.563,47	499.690,41	707.895	3.539.474	24.591	Memenuhi
6	Golewa Selatan	8.059,27	2.417,78	5.641,49	940,25	1880,50	2.820,74	32.647,50	130.589,99	391.769,96	555.007	2.775.037	15.653	Memenuhi
7	Golewa Barat	6.856,27	2.056,88	4.799,39	799,90	1599,80	2.399,69	27.774,22	111.096,89	333.290,66	472.162	2.360.809	14.420	Memenuhi
8	Bajawa Utara	15.436,87	4.631,06	10.805,81	1.800,97	3601,94	5.402,90	62.533,61	250.134,44	750.403,31	1.063.071	5.315.357	11.402	Memenuhi
9	Soa	8.737,83	2.621,35	6.116,48	1.019,41	2038,83	3.058,24	35.396,32	141.585,28	424.755,85	601.737	3.008.687	18.320	Memenuhi
10	Riung	35.202,09	10.560,63	24.641,47	4.106,91	8213,82	12.320,73	142.601,07	570.404,28	1.711.212,85	2.424.218	12.121.091	52.266	Memenuhi
11	Riung Barat	28.685,81	8.605,74	20.080,07	3.346,68	6693,36	10.040,03	116.204,10	464.816,39	1.394.449,16	1.975.470	9.877.348	6.909	Memenuhi
12	Wolomeze	22.949,70	6.884,91	16.064,79	2.677,47	5354,93	8.032,40	92.967,55	371.870,21	1.115.610,64	1.580.448	7.902.242	8.309	Memenuhi
<b>Total</b>		<b>173.752,55</b>	<b>52.125,76</b>	<b>121.626,78</b>	<b>20.271,13</b>	<b>40542,26</b>	<b>60.813,39</b>	<b>703.858,70</b>	<b>2.815.434,78</b>	<b>8.446.304,34</b>	<b>11.965.598</b>	<b>59.827.989</b>	<b>215.746</b>	<b>Memenuhi</b>

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada



**Gambar 2. 20** Peta Daya Tampung Penduduk

*Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada*

### 2.1.1.13 Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan dilihat dari tiga aspek yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Dari ketiga aspek Ketahanan pangan tersebut sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan ditetapkan empat jenis pelayanan dasar yaitu ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan. Pemerintah Kabupaten Ngada, melalui Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dengan mengembangkan model Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Lumbung Tanah telah mendorong ketersediaan pangan Kabupaten Ngada yang membaik dari tahun ketahun. Kinerja urusan Pangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Ketersediaan pangan

*World Health Organization* mendefinisikan tiga komponen utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional. Jika dilihat dari aspek ketersediaan pangan, maka kondisi capaian Kabupaten Ngada dapat digambarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 47 Capaian Kinerja Urusan Pangan Nabati Tahun 2018-2022**

No	Jumlah Produksi Komoditas Pangan Nabati	Tahun 2018	2019	2020	2021	2022
		Ton/Liter /Kg	Ton/Liter/ Kg	Ton/Liter/ Kg	Ton/Liter /Kg	Ton/Liter/ Kg
1	Beras	50.669	98.564	34.565	32.198	23.875
2	Jagung	27.638	48.593	23.120	18.527	12.868
3	Ubi Kayu	7.638	4.635	4.453	4.351	2.932
4	Ubi Jalar	1.559	237	570	532	344

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada, Tahun 2018 - 2022

Sementara itu, produksi komoditas pangan hewani tahun 2018-2022 Kabupaten Ngada dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 48 Produksi Komoditas Pangan Hewani Tahun 2018-2022**

No	Jumlah produksi Komoditas Pangan Hewani	Tahun 2018	2019	2020	2021	2022
		Ton	Ton	Ton	Ton	Ton
1	Daging sapi dan Kerbau	140,25	142,25	304,95	253,13	258,16
2	Daging Ayam	63,87	64,85	30,28	11,57	33,56
3	Ikan	309,4	297,4	207,6	265,4	1.970,2

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada Tahun 2018-2022

## 2. Konsumsi Pangan

Konsumsi pangan merupakan jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu. Energi konsumsi Kalori Kabupaten Ngada Tahun 2022 sebesar 5.308 Kkal/kapita/hari dan angka ini berada di atas Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.000 Kkal/kapita/hari. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada bahwa data konsumsi pangan yang tersedia hanya tahun 2022 karena ditahun-tahun sebelumnya tidak dilakukan analisa.

### 2.1.2 Aspek Demografi

Aspek demografi sangat erat berkaitan dengan dinamika dan proses kependudukan di suatu wilayah berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti: kelahiran, kematian, dan migrasi. Berkaitan dengan bonus demografi yang akan dialami oleh seluruh daerah di Indonesia, penting untuk pemerintah daerah mengelola kualitas sumber daya manusia secara baik agar dapat menjadi modal yang potensial guna mendukung percepatan pembangunan daerah. Aspek demografi memiliki peran krusial karena sangat berperan dalam perencanaan pembangunan wilayah, karena penduduk/masyarakat merupakan penerima manfaat langsung dari hasil

pembangunan. Aspek demografi di Kabupaten Ngada diuraikan melalui struktur jumlah penduduk dan struktur penduduk secara temporal lima tahun ke belakang.

### 2.1.2.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk menyajikan informasi populasi yang hidup dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Informasi tren jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu sangat berguna untuk melakukan analisis faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah. Jumlah penduduk dalam suatu daerah sangat dipengaruhi oleh fenomena natalitas dan mortalitas yang dinamis berdasarkan faktor waktu. Jumlah penduduk juga menjadi dasar guna melakukan identifikasi kepadatan penduduk yang bermukim dalam satuan luas tertentu. Berikut gambar jumlah penduduk Kabupaten Ngada Tahun 2013-2022.

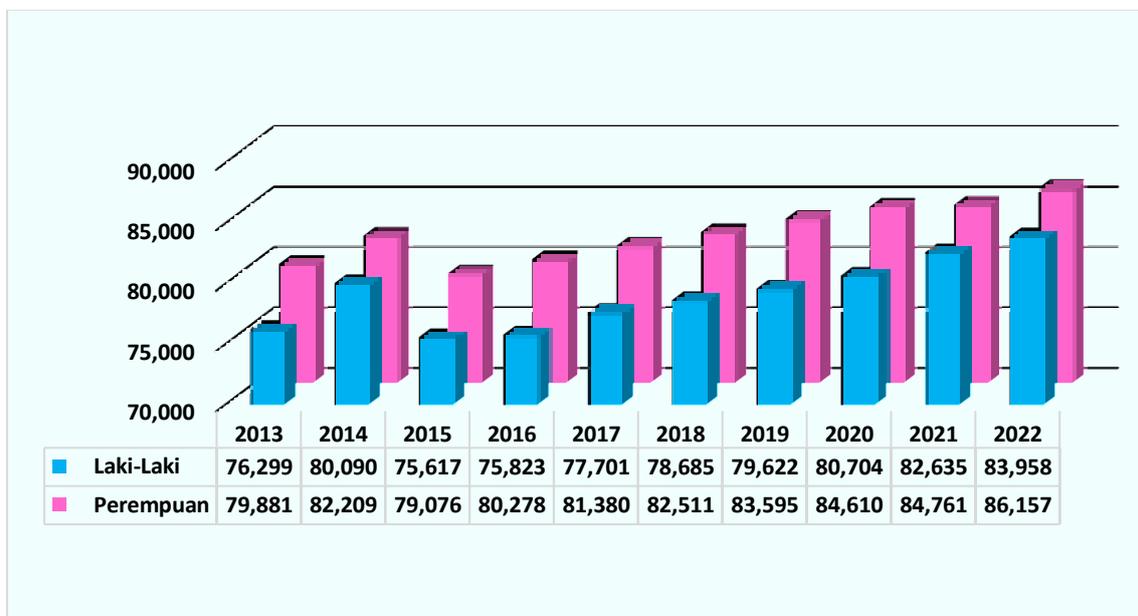


**Gambar 2. 21 Jumlah Penduduk Kabupaten Ngada Tahun 2013-2022 (Jiwa)**

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngada, 2024 (Data diolah)*

Jumlah penduduk Kabupaten Ngada dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang stabil walaupun ada lonjakan yang cukup besar pada tahun 2014. Rata-rata pertumbuhan penduduk selama sepuluh tahun terakhir di Kabupaten Ngada adalah sebesar 0,98 persen. Persentase pertumbuhan paling besar terjadi pada tahun 2014 sebesar 3,92 persen atau ada

kenaikan jumlah penduduk sebanyak 6.119 jiwa. Jumlah penduduk di Kabupaten Ngada yang terus meningkat ini selaras dengan proyeksi bonus demografi yang akan dialami Indonesia hingga tahun 2045. Kondisi ini harus bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada dengan menggenjot pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas SDM, dan memperbaiki pelayanan publik agar bonus demografi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga tidak menjadi beban tetapi menjadi ujung tombak pembangunan di Kabupaten Ngada. Dari keseluruhan jumlah penduduk, mayoritas strukturnya masih didominasi oleh perempuan. Berikut grafik jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Ngada:

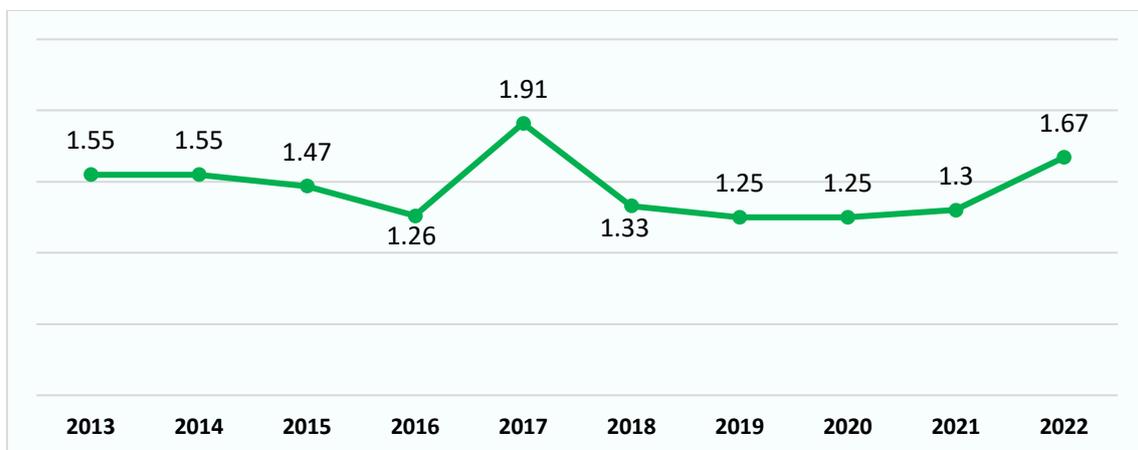


**Gambar 2. 22 Jumlah Penduduk Kabupaten Ngada berdasarkan jenis kelamin**

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngada, 2024 (Data diolah)*

Penduduk Kabupaten Ngada dari tahun 2013 hingga tahun 2022 selalu didominasi oleh jenis kelamin perempuan, dengan gap terbesar ada pada tahun 2016 yaitu sebesar 4.455 jiwa atau 51 persen didominasi oleh perempuan dan sisanya laki-laki. Secara persentase, kondisi ini relatif konstan dan konsisten pada lima tahun terakhir di angka 49 persen laki laki dan 51 persen perempuan, dengan jumlah penduduk yang terus mengecil tiap tahunnya. Selisih antara jumlah

penduduk perempuan dan laki-laki paling kecil terjadi pada tahun 2014 dengan total perbedaan selisih sebesar 2.119 jiwa. Data yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki di Kabupaten Ngada harus dapat direspon oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan yang lebih berkeadilan gender dan inklusif untuk perempuan kedepannya. Selain komposisi jenis kelamin, laju pertumbuhan penduduk (LPP) merupakan aspek penting juga dari analisis demografi. Berikut grafik laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Ngada dari tahun 2013 hingga 2022:

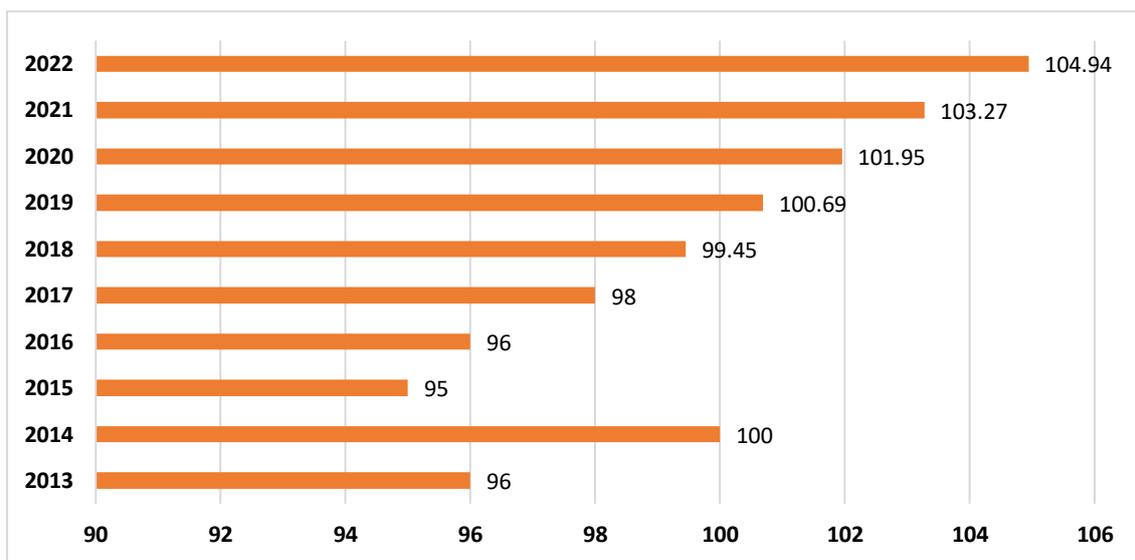


**Gambar 2. 23 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Ngada 2013-2022**

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngada, 2024 (Data diolah)*

Dinamika jumlah penduduk di Kabupaten Ngada diidentifikasi lebih lanjut melalui laju pertumbuhan penduduk selama sepuluh tahun dari tahun 2013 hingga 2022. Laju pertumbuhan penduduk tercatat mengalami penurunan dan stagnasi pada tahun 2018 hingga 2020, penurunan terjadi pada tahun 2018 sebesar 0,58 persen dan stagnan pada tahun 2019 hingga 2020 di angka 1,25. Walaupun sempat terjadi lonjakan yang cukup tinggi sebesar 0,65 persen pada tahun 2017. Baru pada tahun 2021 hingga 2022, mulai ada kenaikan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,08 persen pada tahun 2021 dan 0,37 persen pada tahun 2022. Dengan tren peningkatan mulai tahun 2021 ditambah sudah berakhirnya pandemi covid-19 yang melanda Indonesia, angka laju pertumbuhan penduduk cenderung akan terus naik mengikuti pertumbuhan ekonomi yang ada

di Kabupaten Ngada dan penetapan kawasan Labuan Bajo sebagai kawasan pariwisata super prioritas—efek berantai juga pasti akan sampai ke Kabupaten Ngada. Sebagai bagian dari analisis demografi, kepadatan penduduk juga menjadi aspek penting untuk mengetahui kepadatan penduduk di Kabupaten Ngada, sehingga intervensi kebijakan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Berikut grafik kepadatan penduduk Kabupaten Ngada pada tahun 2013 hingga tahun 2022:



**Gambar 2. 24 Kepadatan Penduduk Kabupaten Ngada tahun 2013-2022**

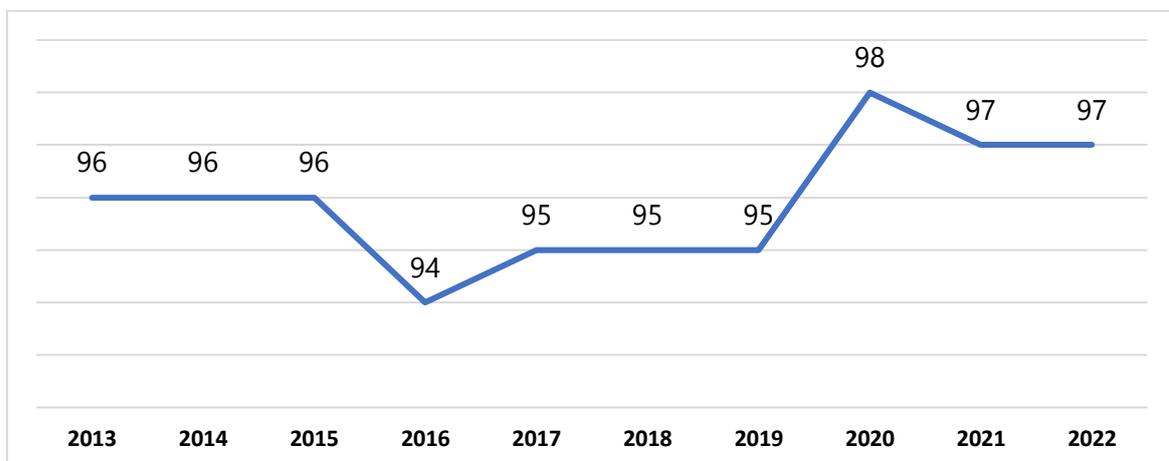
*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngada, 2024 (Data diolah)*

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Ngada pada tahun 2022 adalah 104,94 jiwa dalam suatu luasan satu kilometer persegi. Angka ini menunjukkan setidaknya—rata-rata, ada 105 jiwa dalam tiap kilometer persegi di Kabupaten Ngada. Angka ini menjadi yang paling padat selama sepuluh tahun terakhir. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Ngada pada sepuluh tahun terakhir selalu mengalami peningkatan yang konsisten dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,99 persen. Tingkat kepadatan penduduk yang mengalami peningkatan secara drastis sebesar 4 poin atau 100 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2014 sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk yang tinggi pula pada tahun yang sama. Tingkat kepadatan penduduk tentu akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya

kebutuhan ruang untuk pemukiman dan kegiatan perekonomian yang terus bertumbuh, berupa jasa pariwisata, industri, maupun perdagangan.

### 2.1.2.2 Struktur Penduduk

Struktur penduduk memuat komposisi kependudukan yang berisi demografi kewilayahan di Kabupaten Ngada. Struktur penduduk tentunya memisahkan antara kelompok umur dengan jenis kelamin guna kemudian dianalisis dari aspek kependudukan. Hal ini menjadi penting untuk dipahami karena kebutuhan kebutuhan dasar antar kelompok umur, dan jenis kelamin akan berbeda baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun peluang lapangan pekerjaan. Kategorisasi yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin juga berguna untuk merencanakan pembangunan yang memperhatikan perimbangan gender dan keadilan gender, antara laki-laki dengan perempuan. Berikut grafik rasio jenis kelamin di Kabupaten Ngada pada tahun 2013 hingga 2022:



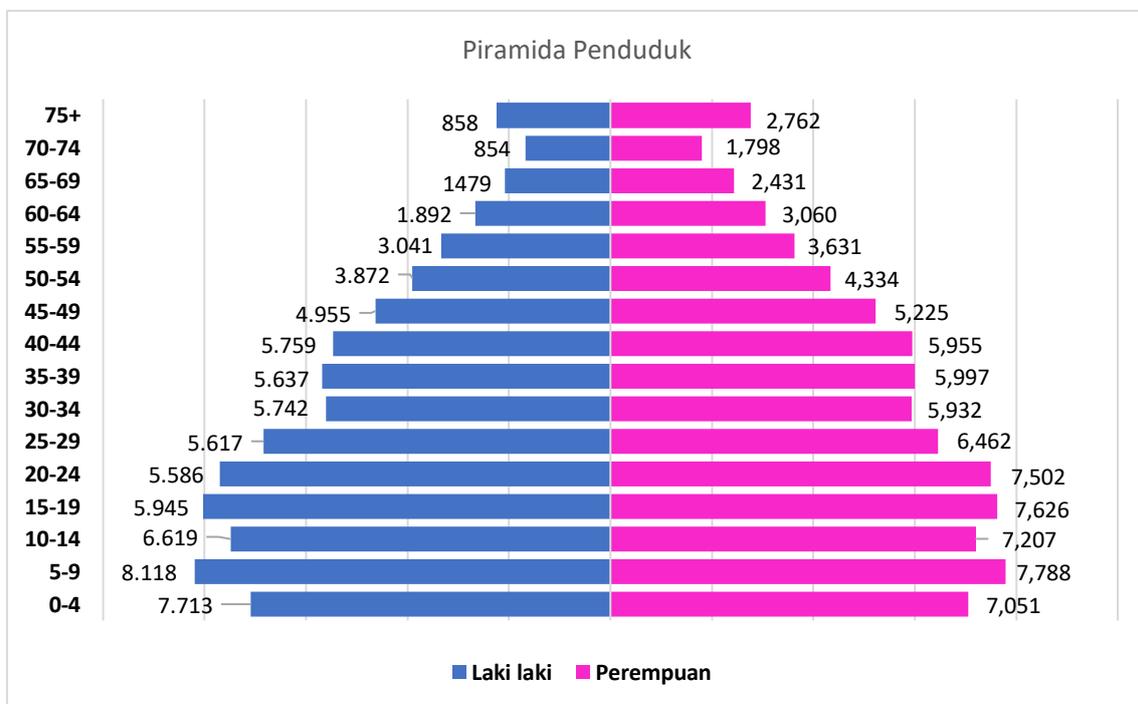
**Gambar 2. 25 Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Ngada tahun 2013-2022**

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngada, 2024 (Data diolah)*

Struktur kependudukan yang memperhatikan jenis kelamin digambarkan dengan indikator nilai *sex ratio* atau rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dengan 100 penduduk perempuan dalam suatu daerah. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Ngada mengalami fluktuasi dengan kecenderungan penurunan pada tahun 2016 sebesar 2 poin dan peningkatan yang drastis pada tahun 2020 sebesar 3 poin, yang kemudian

langsung menurun 1 poin menjadi 97 pada tahun 2021 dan stagnan hingga tahun 2022. Hal ini menunjukkan dominasi jumlah penduduk perempuan masih mendominasi dibandingkan penduduk laki-laki selama lima tahun terakhir. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Terkait komposisi penduduk Kabupaten Ngada tahun 2022 berdasarkan struktur usia didominasi oleh struktur penduduk usia 15 – 64 tahun atau usia produktif. Angka ketergantungan penduduk usia yang belum produktif dan atau dianggap tidak produktif lagi di tahun 2022 sebesar 52,82% . Hal ini berarti di tahun 2022 setiap 100 orang penduduk berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sekitar 53 orang penduduk yang belum produktif dan atau dianggap tidak produktif lagi. Berikut tabel struktur penduduk Kabupaten Ngada tahun 2022 berdasarkan kelompok umur yang digambarkan melalui piramida penduduk:



**Gambar 2. 26 Piramida Penduduk Kabupaten Ngada 2022**

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngada, 2024 (Data diolah)*

Piramida penduduk di Kabupaten Ngada pada tahun 2022 termasuk dalam kategori ekspansif atau piramida dengan struktur penduduk yang didominasi kelompok penduduk muda dan produktif. Lebih detail, struktur penduduk Kabupaten Ngada didominasi oleh kelompok anak umur 5-9 tahun, remaja umur 15-19 tahun, dan kelompok muda produktif umur 20-24. Kondisi ini memberikan peta dan gambaran mengenai adanya potensi bonus demografi di Kabupaten Ngada setidaknya hingga dua puluh tahun kedepan, Ketika para anak-anak, dan remaja tersebut sudah masuk usia produktif angkatan kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah harus dengan baik dan serius menyiapkan SDM agar berkualitas dan memiliki daya saing, sehingga bonus demografi ini dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik agar dapat berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Ngada.

Berdasarkan piramida penduduk di atas, maka dapat dihitung angka ketergantungan atau *dependency ratio*. Angka ketergantungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan golongan umur tidak produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun). Efek yang dapat terjadi apabila rasio ketergantungan di suatu negara terlalu besar adalah dapat mengurangi produktivitas yang tentu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya penduduk yang bukan usia angkatan kerja dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk angkatan kerja. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi jangka panjang akan lambat dan tidak signifikan pertumbuhannya. Daerah yang angka ketergantungannya tinggi juga cenderung kesulitan untuk maju dan berkembang, hal ini disebabkan oleh tingginya angka beban tanggungan yang harus dihadapi oleh penduduk usia produktif atau angkatan kerja.

**Tabel 2. 49 Angka Ketergantungan Kabupaten Ngada, 2018 – 2022**

Wilayah	Angka Beban Ketergantungan Menurut Kabupaten/Kota dan Daerah Tempat Tinggal								
	Perkotaan			Pedesaan			Kota+Desa		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
<b>Ngada</b>	65,44	-	-	66,59	-	-	66,40	55,04	52,18
<b>NTT</b>	54,66	-	-	68,37	-	-	64,89	54,88	55,66

Sumber : NTT dalam angka, BPS 2023

Berdasarkan tabel di atas, rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Ngada tahun 2022 adalah sebesar 52,18 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif atau 15-64 tahun mempunyai beban tanggungan sebanyak 52 orang yang belum atau sudah tidak produktif. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 2,86 poin. Hal ini juga berarti tanggungan penduduk untuk membiayai penduduk yang sudah tidak produktif atau belum produktif juga turut mengalami penurunan. Penurunan yang selalu konsisten sejak tahun 2020 ini patut diapresiasi, karena kondisi ini mengindikasikan bahwasanya beban ketergantungan penduduk produktif atas penduduk yang tidak produktif semakin mengecil, sehingga produktivitas penduduk dapat terus meningkat yang tentu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada secara umum. Angka kebergantungan Kabupaten Ngada juga sudah berhasil berada di bawah angka provinsi pada tahun 2022, capaian ini menunjukkan dari aspek ini, Kabupaten Ngada sudah lebih baik daripada provinsi NTT.

## **2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

### **2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi**

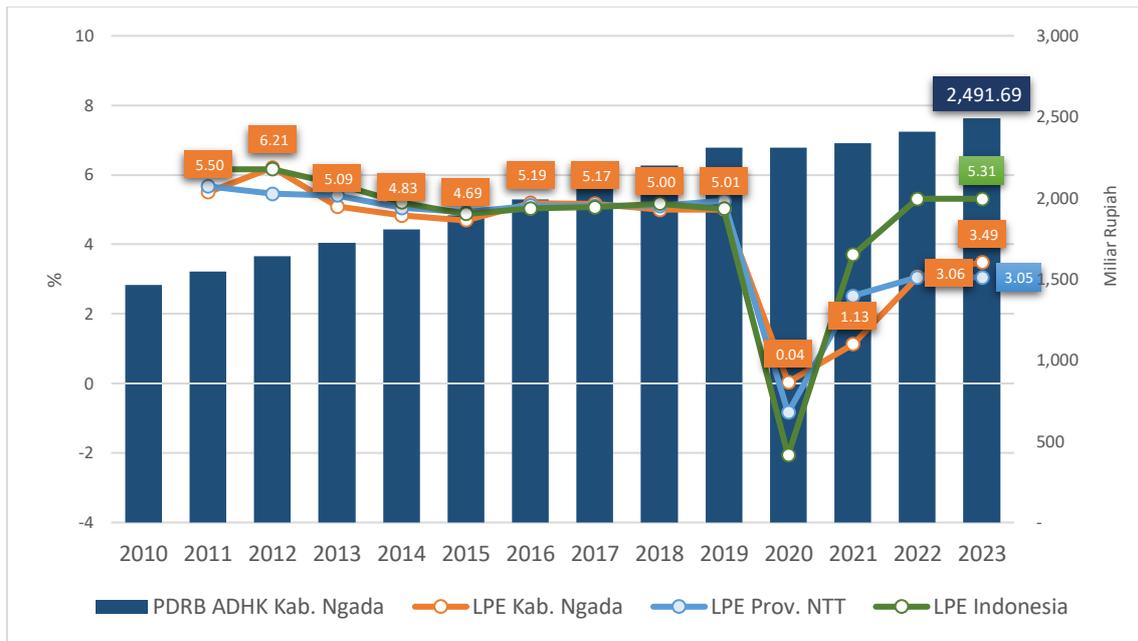
Sub bab ini menjelaskan kondisi kesejahteraan masyarakat yang ditinjau dari sejumlah indikator makro ekonomi. Indikator tersebut meliputi laju pertumbuhan ekonomi, indeks gini, angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka. Berikut adalah kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ngada.

### **2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat di suatu wilayah dapat dilihat dari pergerakan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi didapatkan dengan menghitung pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) atau disebut juga sebagai PDRB riil dari tahun- $i$  terhadap tahun  $i-1$ . Penggunaan harga konstan dipilih karena telah mengeluarkan faktor inflasi. Tahun dasar yang ditetapkan dalam perhitungan PDRB ADHK adalah tahun 2010 sehingga PDRB yang ditampilkan adalah periode 2010-2023.

Perekonomian Kabupaten Ngada terus mengalami pertumbuhan yang positif. Perekonomian daerah rata-rata tumbuh 4,19 persen per tahun selama periode 2011-2023. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada menunjukkan tren yang menurun padahal sebelumnya mampu tumbuh hingga 6,21 persen pada tahun 2012. Melambatnya pertumbuhan PDRB di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai salah satu sektor penggerak perekonomian terbesar sejak 2013 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada cenderung tertahan di kisaran 5 persen hingga tahun 2019. Kondisi tersebut diperburuk dengan terjadinya pandemi Covid-19 dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat ke 0,04 persen pada tahun 2020.

Perekonomian Kabupaten Ngada pasca Covid-19 berangsur pulih seiring dengan diterapkannya berbagai kebijakan penanganan pandemi dan kebijakan ekonomi lainnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi daerah masih tertahan di angka 3,49 persen pada tahun 2023 dan mendorong PDRB riil mencapai 2,49 triliun rupiah. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur tetapi masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh hingga 5,31 persen.



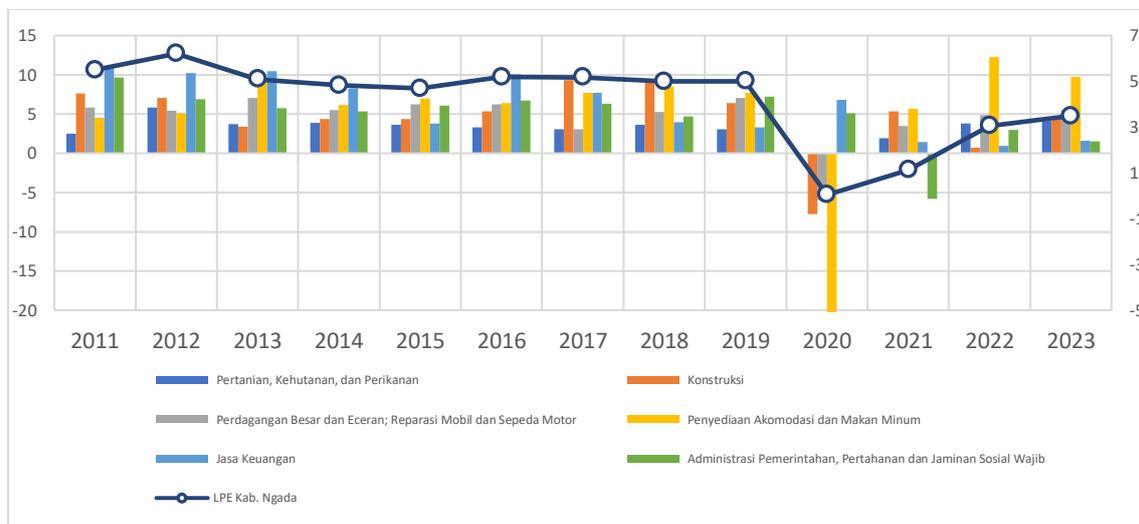
**Gambar 2. 27 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia Tahun 2011-2023 (%)**

Sumber: BPS, 2024

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada didorong oleh kinerja seluruh lapangan usaha dengan kontribusi terbesar diberikan oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (40,2%); sektor konstruksi (18,0%); dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (13,2%) pada tahun 2023. Ketiga sektor tersebut memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada dengan kecenderungan semakin tinggi dibandingkan dengan tahun 2022. PDRB sektor pertanian tercatat tumbuh sebesar 4,14 persen, sektor konstruksi tumbuh sebesar 4,70 persen, dan sektor perdagangan tumbuh sebesar 5,52 persen.

Kondisi yang berbeda ditunjukkan oleh lapangan usaha lainnya yang menunjukkan kontribusi yang sangat kecil tetapi tumbuh pesat. Pada tahun 2023, sektor pengadaan listrik dan gas menunjukkan peningkatan kinerja yang sangat tinggi dengan pertumbuhan mencapai 11,25 persen. Rata-rata pertumbuhan sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 9,86 persen per tahun menjadikan sektor ini sebagai sektor dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi selama periode 2011-

2023. Tingginya pertumbuhan sektor ini didorong oleh pemenuhan penyediaan listrik yang semakin masif dan merata di Kabupaten Ngada.



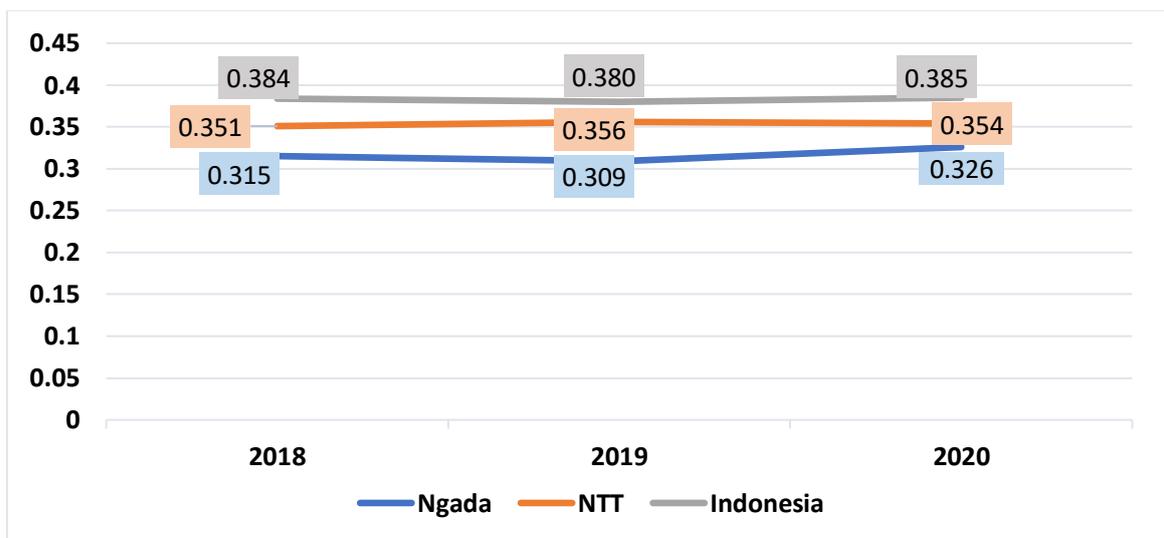
**Gambar 2. 28 Laju Pertumbuhan PDRB Sejumlah Lapangan Usaha di Kabupaten Ngada Tahun 2011-2023 (%)**

Sumber: BPS Kab. Ngada, 2024

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga memiliki pertumbuhan yang tinggi dengan pertumbuhan mencapai 9,70 persen pada tahun 2023, turun 2,59 persen poin dibandingkan tahun 2022. Pada periode 2011-2023, kinerja sektor akomodasi dan makan minum terus menunjukkan pertumbuhan yang tinggi yakni berkisar pada 4,53 – 12,29 persen, terkecuali pada saat pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan kenaikan PDRB sektor pertanian sebagai kontributor terbesar, kenaikan PDRB sektor pengadaan listrik dan gas dan sektor akomodasi dan makan minum tergolong kecil. Namun, pertumbuhan dari tahun ke tahun kedua sektor tersebut tergolong tinggi. Kondisi tersebut mengindikasikan perekonomian Kabupaten Ngada memiliki potensi untuk mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru, khususnya pariwisata, yang sejalan dengan *tagline* daerah yakni “Tante Nela Paris”.

### 2.2.1.2 Indeks Gini

Indeks Gini digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar penduduk di suatu wilayah. Indeks Gini memiliki rentang nilai antara 1 hingga 0. Skor Indeks Gini 0 menunjukkan bahwa penduduk di suatu daerah memiliki distribusi pendapatan yang merata. Dengan kata lain, setiap penduduk di daerah tersebut memiliki pendapatan sama. Sebaliknya, Indeks Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna atau satu orang menguasai seluruh sumber pendapatan. Indeks Gini semakin mendekati angka 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan semakin tinggi di suatu daerah. Indeks Gini perlu diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Ngada, Provinsi NTT, dan Indonesia tahun 2018-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.



**Gambar 2. 29 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Ngada, Provinsi NTT, dan Indonesia Tahun 2018-2020**

*Sumber: BPS dan BPS Kabupaten Ngada, 2023*

Data Indeks Gini Kabupaten Ngada yang tersedia yaitu tahun 2018-2020, sehingga Indeks Gini Provinsi NTT dan Indonesia yang digunakan juga tahun 2018-2020. Indeks Gini Kabupaten Ngada lebih rendah daripada Provinsi NTT dan Indonesia pada tahun 2018-2020. Meskipun demikian, Indeks Gini Kabupaten Ngada tahun 2018-2020 mengalami tren naik dengan rata-rata pertumbuhan

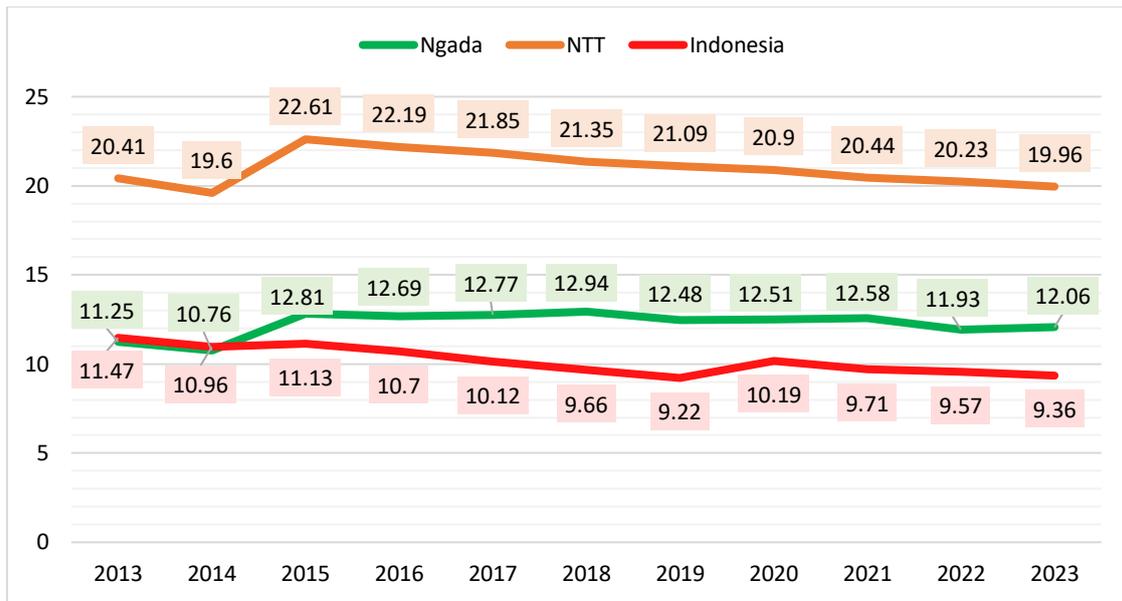
sebesar 1,80%. Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Ngada berhasil diturunkan sebesar -1.90% pada tahun 2018-2019, namun ketimpangan pendapatan kembali naik secara cukup drastis sebesar 5,50% pada tahun 2019-2020.

Hal ini berkebalikan dengan Indeks Gini Indonesia dan Provinsi NTT yang mengalami tren fluktuatif cenderung turun. Rata-rata pertumbuhan Indeks Gini Provinsi NTT sebesar 0,43% pada tahun 2018-2020, di mana lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan Indeks Gini Indonesia sebesar 0,14% pada tahun tersebut.

Indeks Gini Kabupaten Ngada yang mengalami tren naik pada tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk berpendapatan rendah dan tinggi di Kabupaten Ngada cenderung semakin lebar pada tahun tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya untuk pemerataan pendapatan belum berjalan secara optimal.

### **2.2.1.3 Angka Kemiskinan**

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur kemiskinan yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Melalui pendekatan ini, kemiskinan dinilai sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi kemiskinan suatu daerah. Gambaran perbandingan angka kemiskinan Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia tahun 2013-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.



**Gambar 2. 30 Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia Tahun 2013-2023**

*Sumber: BPS dan BPS Kabupaten Ngada, 2024*

Angka kemiskinan Kabupaten Ngada mengalami tren fluktuatif cenderung naik pada tahun 2013-2023 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,89%. Kondisi ini berkebalikan dengan angka kemiskinan Provinsi NTT dan Indonesia yang mengalami tren fluktuatif cenderung turun dalam kurun waktu 2013-2023. Meskipun demikian, angka kemiskinan Kabupaten Ngada lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi NTT selama tahun 2013-2023, namun lebih tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan Indonesia pada tahun yang sama.

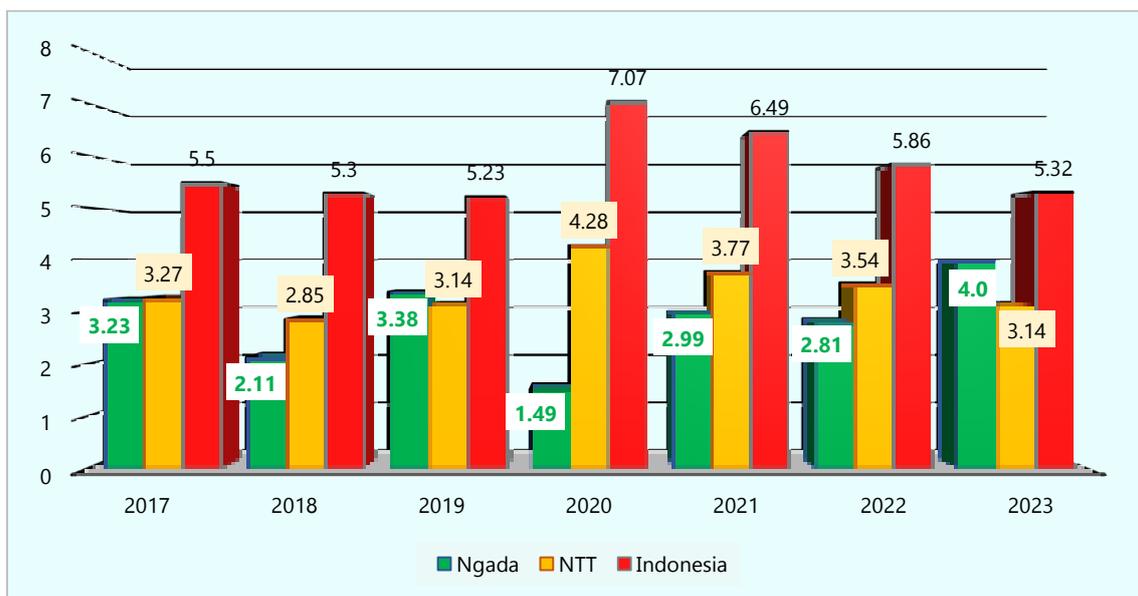
Angka kemiskinan Kabupaten Ngada naik paling drastis sebesar 19,05% pada tahun 2014-2015, di mana pada tahun tersebut angka kemiskinan Provinsi NTT juga melonjak tajam sebesar 15,36%. Sementara itu, angka kemiskinan Indonesia naik sebesar 1,55% pada tahun 2014-2015.

Angka kemiskinan Kabupaten Ngada paling tinggi mencapai 12,94% pada tahun 2018, namun dapat diturunkan sebesar 3,55% pada tahun 2019. Namun demikian, angka kemiskinan naik kembali sebesar 0,24% pada tahun 2020 dan sebesar 0,56% pada tahun 2021. Angka kemiskinan Kabupaten Ngada berhasil diturunkan sebesar 5,17% pada tahun 2022, di mana merupakan penurunan

angka kemiskinan paling tinggi sepanjang tahun 2013-2023. Namun demikian, angka kemiskinan Kabupaten Ngada kembali naik sebesar 1,09% pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan di Kabupaten Ngada perlu lebih dioptimalkan agar angka kemiskinan dapat ditekan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan angka kemiskinan Indonesia.

#### 2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT biasanya digunakan untuk mengetahui angkatan kerja yang belum atau tidak bekerja di suatu daerah. Semakin tinggi TPT, maka semakin banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Gambaran perbandingan TPT Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia tahun 2017-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.



**Gambar 2. 31 Perbandingan TPT Kabupaten Ngada, Provinsi NTT, dan Indonesia Tahun 2017-2023**

*Sumber: BPS 2023, BPS Kabupaten Ngada 2024*

TPT Kabupaten Ngada mengalami tren fluktuatif cenderung naik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,77% selama tahun 2017-2023. Demikian halnya dengan TPT Provinsi NTT dan Indonesia yang juga mengalami tren pertumbuhan fluktuatif cenderung naik pada tahun 2017-2023. TPT Kabupaten

Ngada lebih rendah dibandingkan dengan TPT Provinsi NTT dan Indonesia dalam kurun waktu 2017-2022, namun TPT Kabupaten Ngada lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi NTT dan Indonesia.

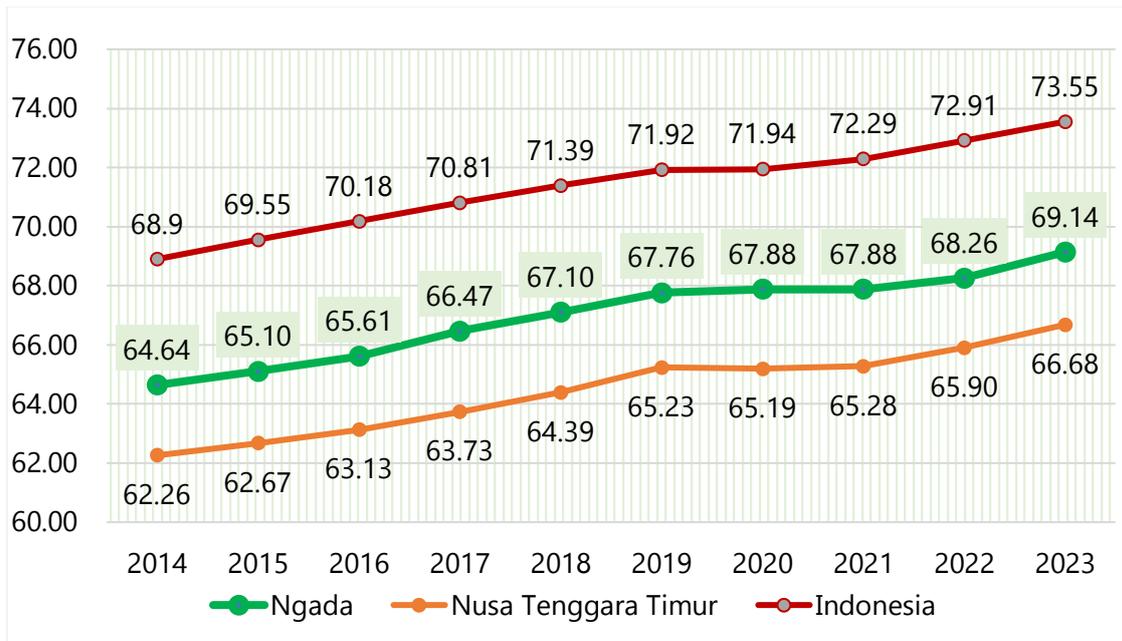
TPT Kabupaten Ngada paling tinggi mencapai 3,38% pada tahun 2019. Namun, TPT dapat diturunkan secara drastis ke angka 1,49% atau turun sebesar 55,92% pada tahun 2020. Meskipun demikian, TPT Kabupaten Ngada melonjak tajam hingga menjadi 2,99% atau naik sebesar 100,67% pada tahun 2021. Setelah itu, TPT berhasil diturunkan ke angka 2,81% atau turun sebesar 6,02% pada tahun 2022. Namun demikian, TPT Kabupaten Ngada naik secara drastis sebesar 42,35% pada tahun 2023. Kondisi ini disebabkan oleh belum tersedianya lapangan kerja secara memadai bagi angkatan kerja di Kabupaten Ngada. Artinya, pertumbuhan lapangan kerja lebih lambat dibandingkan dengan ketersediaan angkatan kerja. Selain itu, para pencari kerja belum dapat berkompetisi secara optimal dalam dunia kerja dikarenakan kurangnya keterampilan yang dibutuhkan oleh pencari kerja.

## **2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya**

Sub bab ini menjelaskan mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ngada berdasarkan perspektif sosial dan budaya. Analisis kesejahteraan sosial budaya pada sub bab ini meliputi penjabaran mengenai indikator makro terkait kondisi sosial budaya seperti Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Ketimpangan Gender, dan Indeks Pembangunan Kebudayaan

### **2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

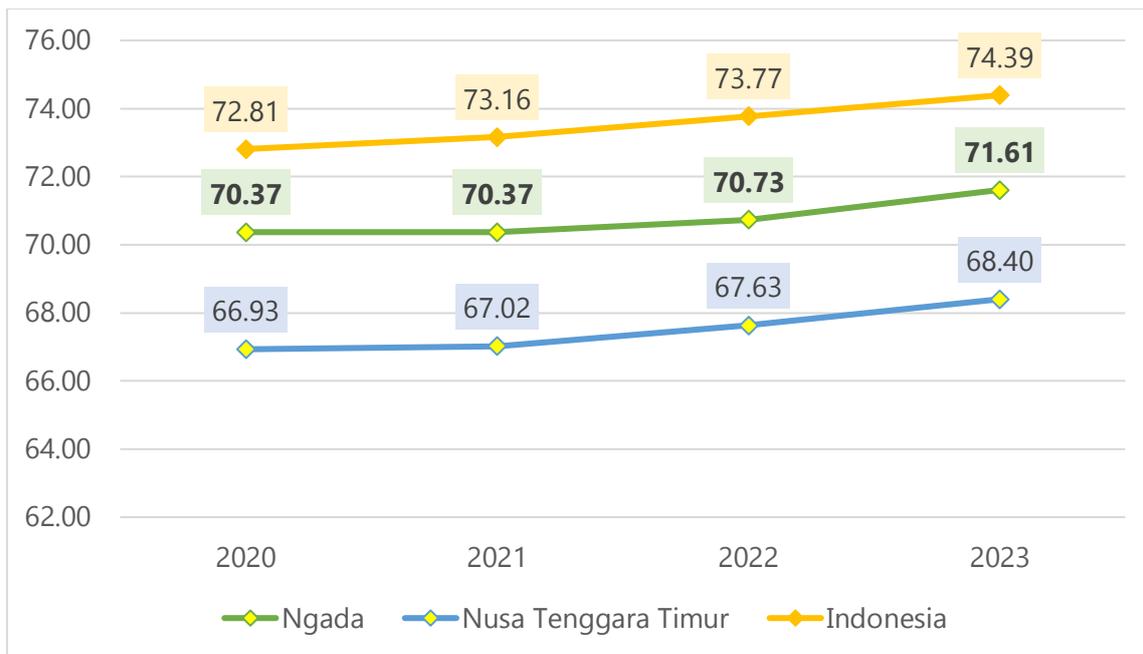
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengindikasikan tingkat capaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang telah dilakukan di suatu wilayah. IPM diukur melalui tiga komponen dasar kualitas hidup yang meliputi umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak. Umur panjang dan sehat diukur melalui angka harapan hidup, tingkat pengetahuan diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta kehidupan layak diukur melalui tingkat pengeluaran per kapita.



**Gambar 2. 32 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ngada Tahun 2014-2023**

*Sumber: BPS Provinsi NTT, 2024*

IPM Kabupaten Ngada mengalami peningkatan sebesar 4,5 poin selama periode 2014 hingga 2023, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,50 persen per tahun. Capaian IPM Kabupaten Ngada telah berada di atas capaian Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun masih di bawah capaian nasional. Secara umum, capaian pada komponen angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita memiliki pola yang sama dengan capaian IPM, yakni berada di atas capaian provinsi dan di bawah capaian nasional. Namun demikian, angka harapan lama sekolah Kabupaten Ngada masih di bawah capaian provinsi dan nasional.



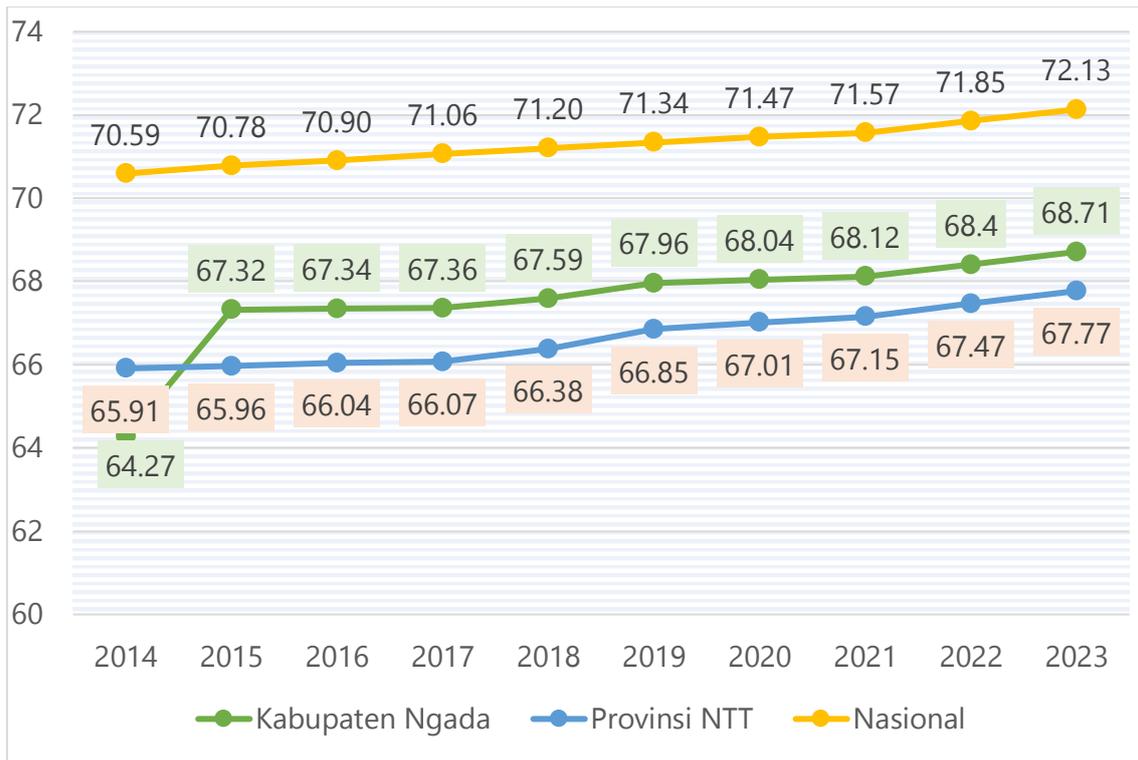
**Gambar 2. 33 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ngada Tahun 2020-2023 Berdasarkan Hasil Survei Penduduk Tahun 2020**

*Sumber: BPS Provinsi NTT, 2024*

Berdasarkan data survei penduduk 2020, capaian IPM Kabupaten Ngada selama periode 2020 hingga 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,85 persen atau sekitar 1,3 poin. Capaian tersebut masih konsisten berada di atas rata-rata capaian Provinsi NTT, namun masih berada di bawah rata-rata IPM Nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan manusia, khususnya yang berkaitan dengan urusan pendidikan, kesehatan dan perekonomian masih perlu ditingkatkan guna mendorong kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Ngada.

### **Angka Harapan Hidup**

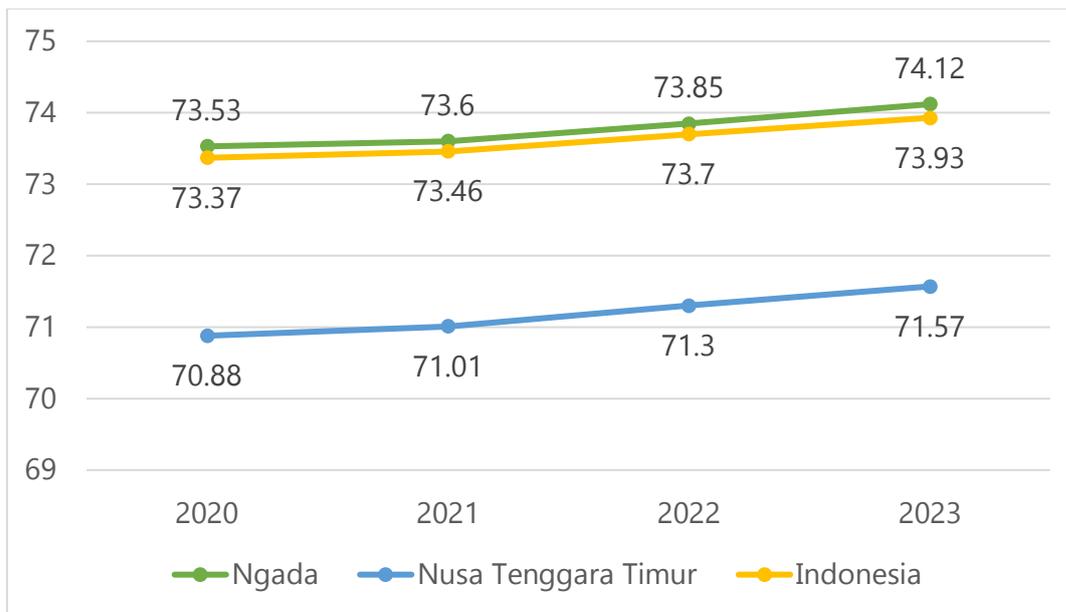
Angka Harapan Hidup saat lahir atau disingkat AHH, merupakan angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang dihitung sejak dilahirkan. AHH yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat di Kabupaten Ngada terus meningkat dari tahun ke tahun.



**Gambar 2. 34 Angka Harapan Hidup Kabupaten Ngada Tahun 2014-2023**

*Sumber: BPS, 2024*

AHH di Kabupaten Ngada mengalami peningkatan sebesar 6,9 persen atau sebesar 4,4 tahun selama periode 2014 hingga 2023. Capaian AHH erat kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan kesehatan. Capaian AHH Kabupaten Ngada sudah berada di atas rata-rata AHH Provinsi NTT. Namun, sejalan dengan kondisi IPM, capaian AHH Kabupaten Ngada masih berada di bawah rata-rata nasional. Secara umum capaian AHH di Kabupaten Ngada dipengaruhi oleh beberapa permasalahan kesehatan seperti ketersediaan tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan yang belum memadai, masih adanya kasus kematian ibu melahirkan dan kasus kematian bayi yang tinggi, perilaku hidup bersih dan sehat belum membudaya di masyarakat.



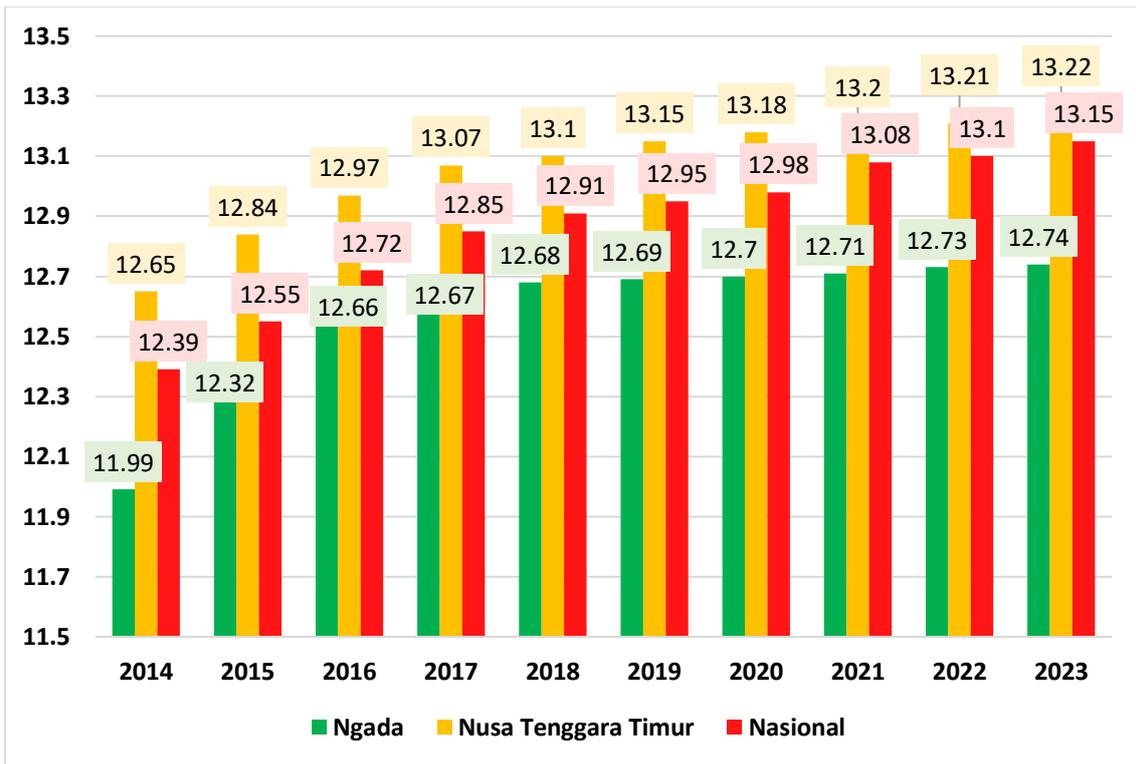
**Gambar 2. 35 Angka Harapan Hidup Kabupaten Ngada Tahun 2020-2023 Berdasarkan Basis Data Survei Penduduk 2020**

*Sumber: BPS Provinsi NTT, 2024*

Berdasarkan data survei penduduk 2020, AHH Kabupaten Ngada mengalami peningkatan sebesar 0,80 persen atau 0,59 tahun dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Kondisi ini mendorong capaian AHH Kabupaten Ngada melampaui capaian AHH Provinsi NTT dan nasional. Selain adanya pembaruan basis data perhitungan, secara umum, langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Ngada terus dilakukan. Hal ini sejalan dengan upaya nasional untuk melakukan transformasi sistem kesehatan, di antaranya adalah dengan melakukan transformasi pada level layanan primer dan layanan rujukan.

### **Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Perkembangan Angka HLS Kabupaten Ngada Tahun 2018 sampai tahun 2023 dapat digambarkan melalui grafik berikut ini.



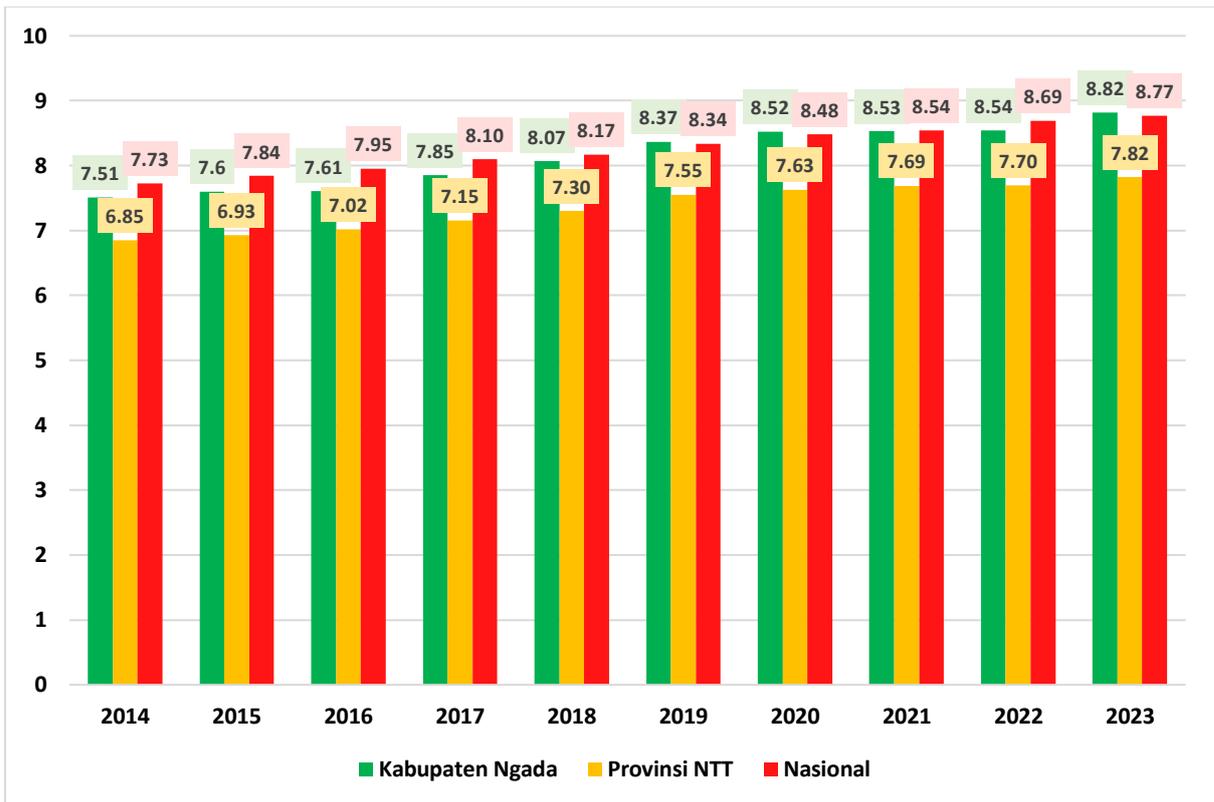
**Gambar 2. 36 Harapan Lama Sekolah**

*Sumber: BPS, 2024*

HLS Kabupaten Ngada mengalami peningkatan sebesar 6,25 persen atau bertambah sekitar 0,75 tahun dalam kurun waktu sepuluh tahun. Pada tahun 2023, HLS Kabupaten Ngada mencapai 12,74 tahun artinya masyarakat Ngada memiliki kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan hingga lulus SMA. Namun demikian capaian ini masih berada di bawah capaian Provinsi NTT dan nasional.

### **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Perkembangan capaian RLS di Kabupaten Ngada pada tahun 2014 hingga 2023 dapat digambarkan melalui grafik berikut ini.



**Gambar 2. 37 Rata-rata Lama Sekolah**

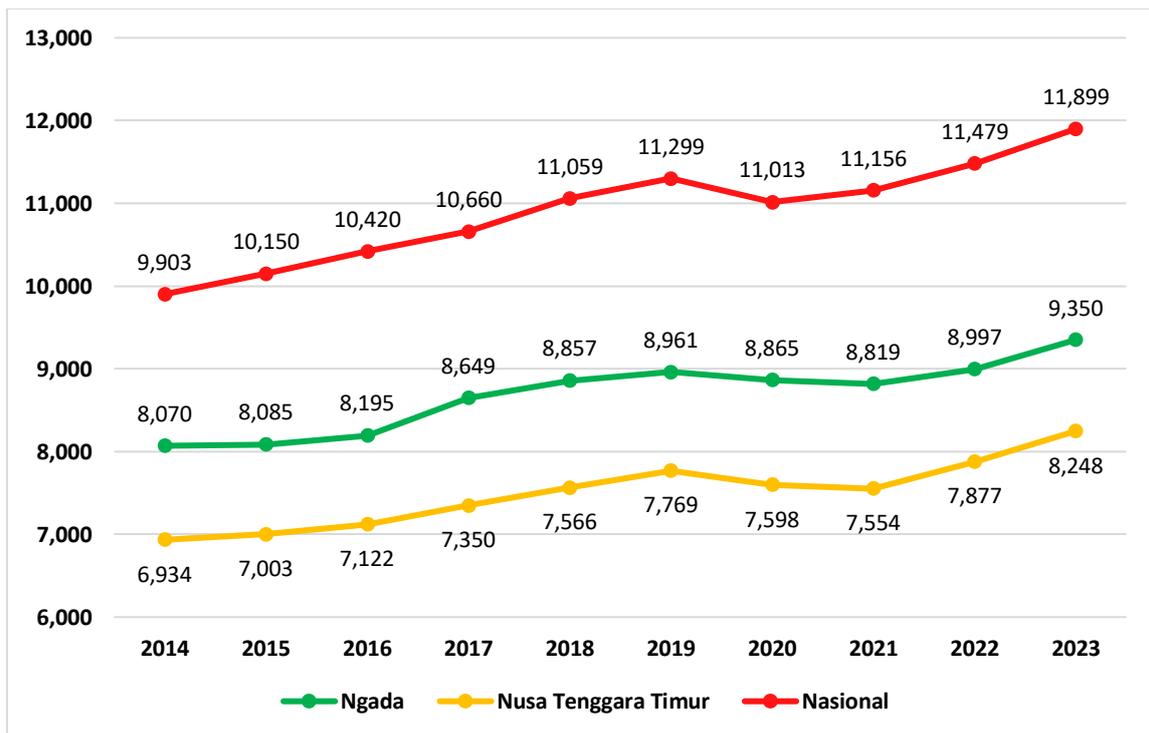
*Sumber: BPS, 2024*

RLS di Kabupaten Ngada mengalami peningkatan sebesar 17,44 persen atau 1,31 tahun selama periode 2014 hingga 2023. Pada tahun 2023, RLS di Kabupaten Ngada telah mencapai 8,82 tahun yang berarti rata-rata penduduk Ngada tahun telah menyelesaikan proses pendidikan hingga kelas VIII (SMP Kelas II) hampir menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun, padahal HLS pada tahun 2023 telah mencapai 12,74 tahun. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Ngada untuk lebih meningkatkan jenjang pendidikan masyarakat.

Capaian RLS yang belum optimal disebabkan oleh masih terdapat anak usia sekolah yang belum tertampung baik di SD dan SMP maupun SMA serta keterbatasan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan lebih tinggi. Di samping itu kualitas guru dan tenaga kependidikan masih belum merata, kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan juga masih terbatas.

## **Pengeluaran per Kapita**

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (harga konstan 2010). Indikator ini digunakan untuk mengukur kemampuan daya beli masyarakat yang didekati dengan kebutuhan standar minimal untuk dapat hidup layak (*Purchasing Power Parity* /PPP dalam rupiah). Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, yakni perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Pengeluaran per kapita masyarakat Ngada pada tahun 2023 sebesar Rp. 9,350 juta per tahun. Pengeluaran per kapita Kabupaten Ngada mengalami peningkatan sebesar 15,86% selama periode 2014 hingga 2023, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,67% per tahun.



**Gambar 2. 38 Pengeluaran per Kapita (dalam Ribuan)**

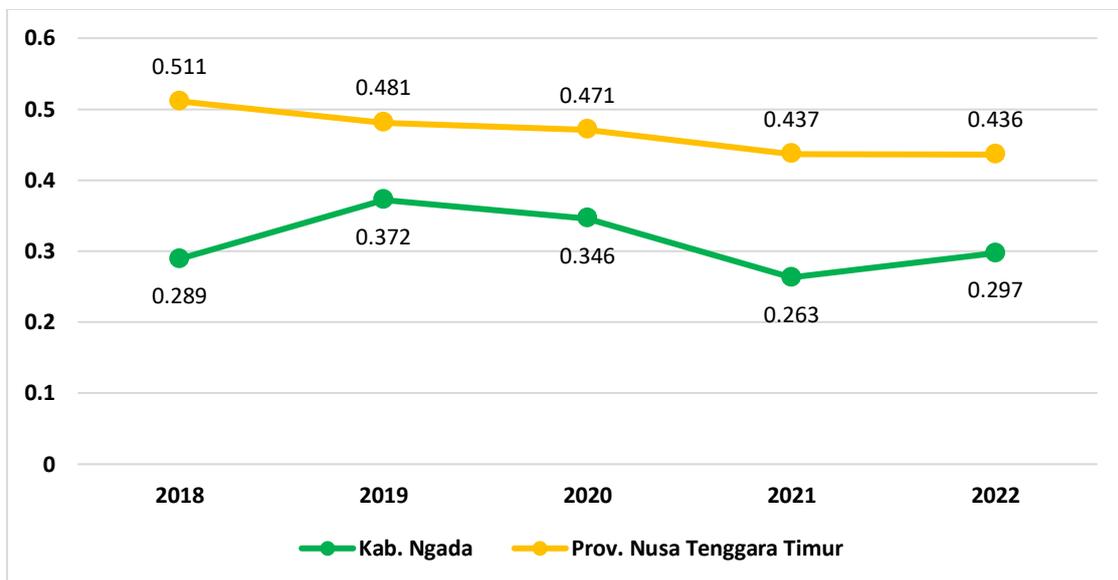
*Sumber: BPS, 2024*

### 2.2.2.2 Indeks Ketimpangan Gender

Kesetaraan gender dalam keluarga memiliki implikasi yang cukup besar terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Kesetaraan gender dapat dilihat melalui capaian beberapa indikator makro seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan salah satu indikator baru dalam bidang pemberdayaan perempuan kaitannya dengan isu kesetaraan gender.

IKG telah mengisi kekurangan dari IDG dan IPG dalam hal melakukan pengukuran ketimpangan gender di suatu daerah. IKG tidak hanya memperhatikan partisipasi perempuan/laki-laki dalam bidang pendidikan dan ekonomi, melainkan turut mempertimbangkan aspek kesehatan reproduksi perempuan seperti kelahiran diluar fasilitas kesehatan sebagai salah satu risiko kematian ibu saat melahirkan, angka kelahiran remaja, pemberdayaan terhadap perempuan dan pasar tenaga kerja bagi perempuan. Berikut merupakan capaian

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Ngada dan Provinsi NTT selama periode 2018 hingga 2022.



**Gambar 2. 39 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Ngada dan Provinsi NTT Tahun 2018-2022**

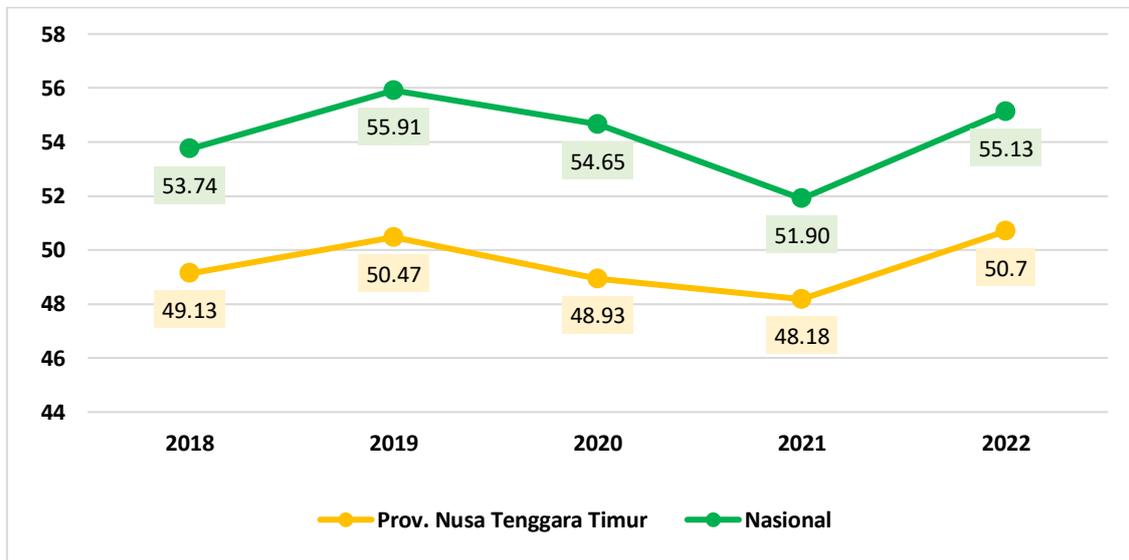
*Sumber: BPS NTT, 2024*

IKG Kabupaten Ngada mengalami tren yang fluktuatif selama periode 2018 hingga 2022. Selama periode tersebut juga, IKG kabupaten Ngada selalu berada di bawah rata-rata capaian IKG Provinsi NTT. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan gender di Kabupaten Ngada lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi NTT. Cukup rendahnya angka ketimpangan di Kabupaten Ngada dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti upaya optimalisasi fasilitas kesehatan terutama untuk ibu hamil dan melahirkan serta pemberdayaan bagi kelompok perempuan yang terus ditingkatkan.

### **2.2.2.3 Indeks Pembangunan Kebudayaan**

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan indikator makro pada urusan kebudayaan yang dapat memberikan gambaran terkait capaian pembangunan dalam bidang kebudayaan. Capaian IPK di suatu daerah dapat dijadikan sebagai acuan untuk merumuskan kebijakan terkait kebudayaan di masa yang akan datang. IPK diukur oleh pemerintah pusat dengan memastikan

bahwa penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan di wilayah terkait. Berikut merupakan IPK di Kabupaten Ngada dengan menggunakan proxy indikator IPK Provinsi Nusa Tenggara Timur.



**Gambar 2. 40 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2022**

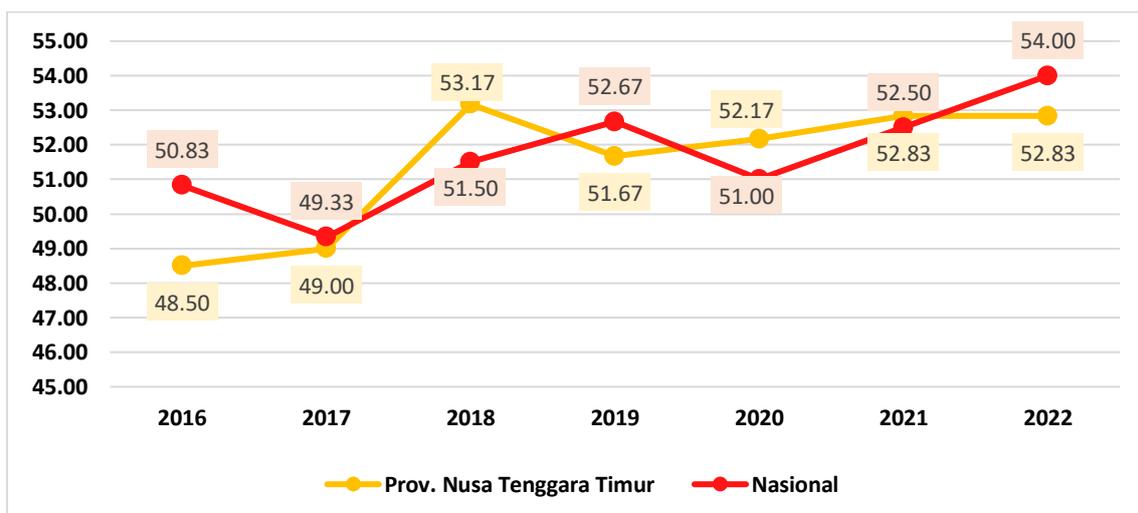
*Sumber: Kemendikbud, Indeks Pembangunan Kebudayaan 2018-2022*

Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Ngada dapat dilihat menggunakan proxy indikator capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. IPK Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami tren yang fluktuatif selama periode 2018 hingga 2022. Selama periode tersebut juga capaian IPK Provinsi Nusa Tenggara Timur masih berada di bawah rata-rata nasional. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi pembangunan kebudayaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk Kabupaten Ngada masih perlu ditingkatkan. Fluktuasi capaian IPK dipengaruhi oleh banyak faktor meliputi ketujuh dimensi penyusun IPK yaitu ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya iterasi dan gender.

#### **2.2.2.4 Indeks Pembangunan Pemuda**

Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan menjadi satu bagian penting dalam pembangunan daerah. Akses dan keterlibatan pemuda untuk

meningkatkan prestasi dan partisipasi dalam pembangunan perlu menjadi perhatian pemerintah karena kualitas pemuda akan turut berdampak pada kualitas dan keberlanjutan pembangunan di daerah. Selain itu, pembangunan kepemudaan juga berupaya untuk meningkatkan *softskill* dan *hardsill* para kelompok muda. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pemuda dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kepemudaan dan keolahragaan. Kemampuan yang dimiliki pemuda di suatu daerah dapat diukur melalui satu indikator makro yaitu Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Indikator ini digunakan untuk mendapatkan gambaran terkait kemajuan pembangunan dalam membangun pemuda. Berikut merupakan capaian IPP di Kabupaten Ngada dengan menggunakan proxy indikator IPP di Provinsi NTT pada tahun 2016 hingga 2022.



**Gambar 2. 41 Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2022**

*Sumber: Kemenpora, Indeks Pembangunan Pemuda 2016-2022*

Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Ngada dilihat dengan menggunakan proxy indikator Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Capaian IPP Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami tren yang fluktuatif dan cenderung meningkat selama periode 2016 hingga 2022. Selama periode tersebut IPP Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan sebesar 4,33 persen. Namun demikian pada tahun 2022 capaian IPP Provinsi Nusa

Tenggara Timur masih berada di Bawah rata-rata IPP nasional. Fluktuasi IPP di Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat dipengaruhi oleh aspek pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi.

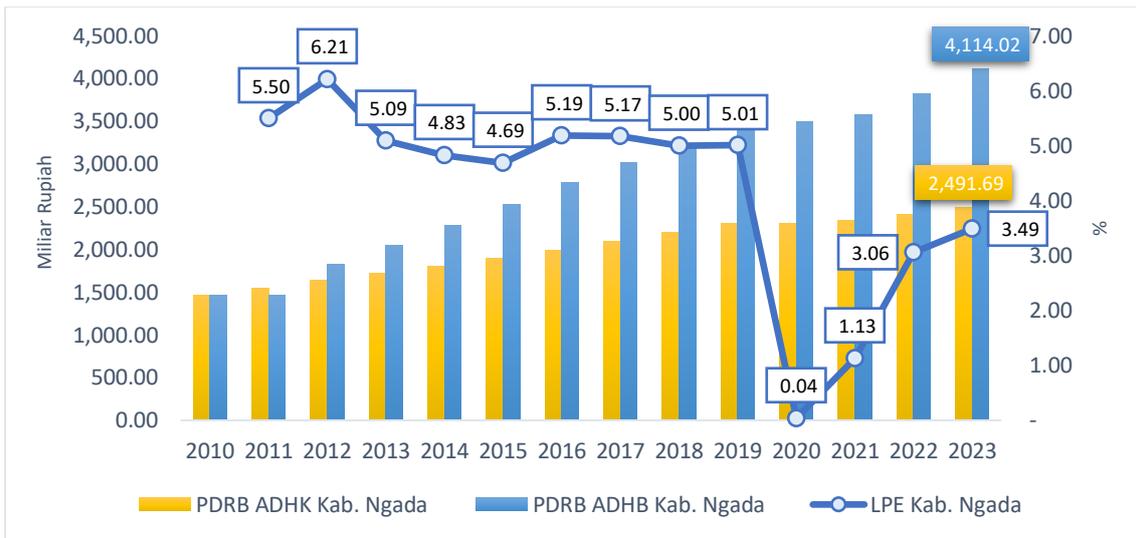
## **2.3 Aspek Daya Saing**

Aspek daya saing dalam yang dijelaskan meliputi daya saing ekonomi, sumber daya manusia, fasilitas/infrastruktur wilayah, serta iklim investasi. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing aspek daya saing.

### **2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah**

#### **2.3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto**

PDRB menggambarkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam kegiatan ekonomi yang beroperasi di suatu wilayah domestik. PDRB sering digunakan sebagai salah satu indikator yang menggambarkan kondisi perekonomian daerah di mana semakin tinggi nilai PDRB yang dihasilkan maka semakin maju daerah tersebut. PDRB dihitung menggunakan dua pendekatan yaitu berdasar harga konstan (ADHK/riil) dan berdasar harga berlaku (nominal). PDRB ADHK dihitung dengan mengeluarkan faktor inflasi sedangkan PDRB ADHB masih memasukkan nilai inflasi ke dalam perhitungan.



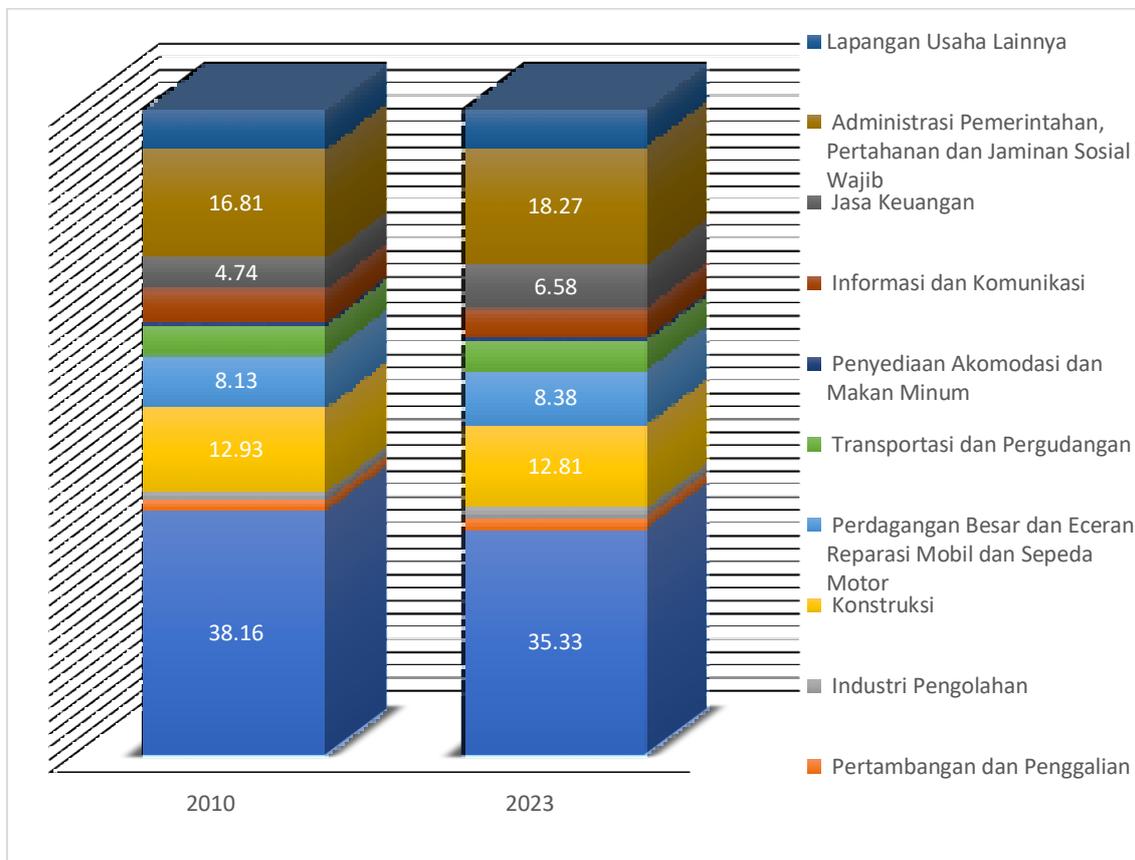
**Gambar 2. 42 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Ngada Tahun 2010-2023 (Miliar Rupiah)**

*Sumber: BPS Kab. Ngada, 2024*

Nilai PDRB Kabupaten Ngada terus mengalami peningkatan selama periode 2010-2023. PDRB Kabupaten Ngada mengalami pertumbuhan sebesar 4,19 persen per tahun mendorong nilai PDRB riil mencapai 2,49 triliun rupiah pada tahun 2023, sedangkan secara nominal mencapai 4,11 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 6,21 persen dengan kecenderungan yang semakin melambat, khususnya sejak pandemi Covid-19 terjadi pada tahun 2020.

PDRB Kabupaten Ngada dibentuk oleh berbagai lapangan usaha dengan kontribusi yang beragam. Hingga tahun 2023, perekonomian Kabupaten Ngada masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan kontribusi mencapai 35,80 persen per tahun. Produksi sejumlah produk pertanian daerah seperti kopi dan bambu menjadi produk unggulan Kabupaten Ngada yang banyak diekspor ke luar daerah. PDRB nominal sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 1,45 triliun rupiah, menyumbang hingga 35,33 persen pada tahun 2023. Meskipun angka tersebut tergolong tinggi, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Ngada justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010. Penurunan kontribusi ini disebabkan oleh

meningkatnya kinerja sektor ekonomi lain yang lebih pesat yaitu sektor jasa keuangan dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.

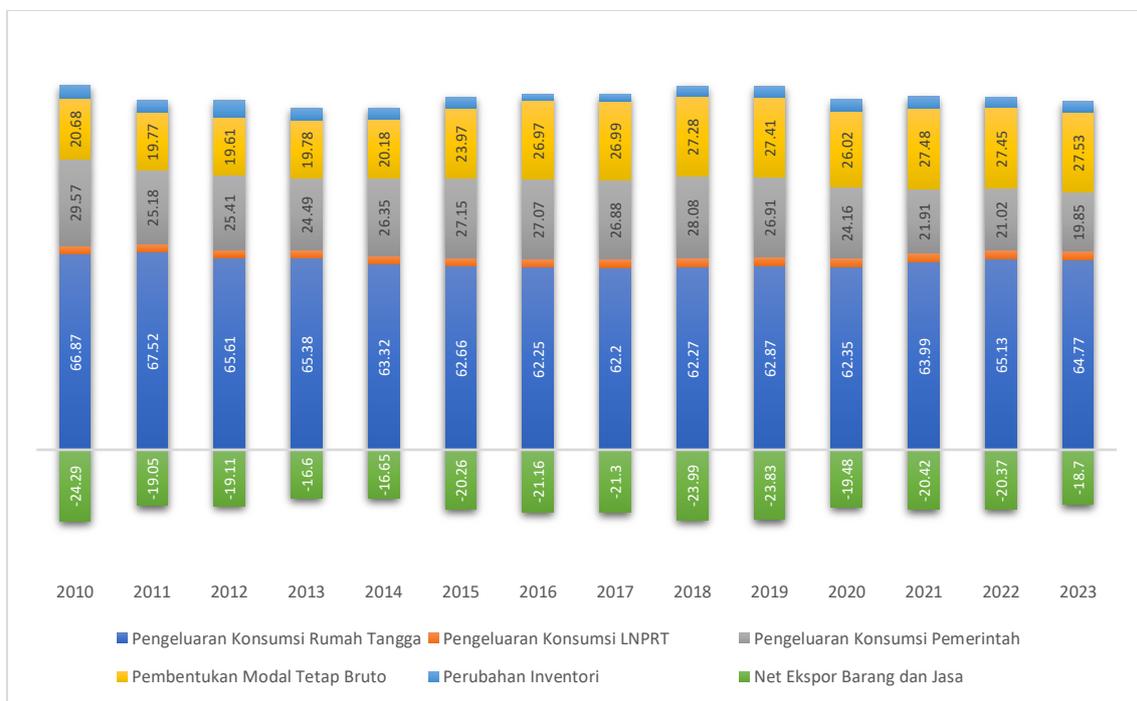


**Gambar 2. 43 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ngada Tahun 2010 dan 2023 (%)**

Sumber: BPS Kab. Ngada, 2024

Pada tahun 2023, kontribusi sektor administrasi pemerintahan mengalami kenaikan sebesar 1,46 persen poin sedangkan sektor jasa keuangan naik 1,84 persen poin dibandingkan tahun 2010. Pertumbuhan PDRB riil kedua sektor tersebut tergolong lebih tinggi jika dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Sektor jasa keuangan mengalami pertumbuhan mencapai 6,31 persen per tahun sedangkan sektor administrasi pemerintahan mencapai 4,80 persen per tahun pada periode 2011-2023. Masifnya pembangunan infrastruktur pendukung perekonomian mendorong kinerja sektor jasa keuangan yang semakin terdigitalisasi.

Perhitungan PDRB tidak hanya dilihat berdasarkan lapangan usaha saja tetapi juga dapat dilihat dari komponen pengeluaran. PDRB pengeluaran menggambarkan hasil akhir dari proses produksi yang berlangsung di dalam suatu wilayah yang digunakan oleh pelaku ekonomi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Komponen PDRB pengeluaran terdiri dari pengeluaran konsumsi agregat (rumah tangga, pemerintah, dan LNPR), pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, dan ekspor dan impor. Berikut adalah gambaran PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Ngada.



**Gambar 2. 44 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2010-2023 (%)**

Sumber: BPS Kab. Ngada, 2024

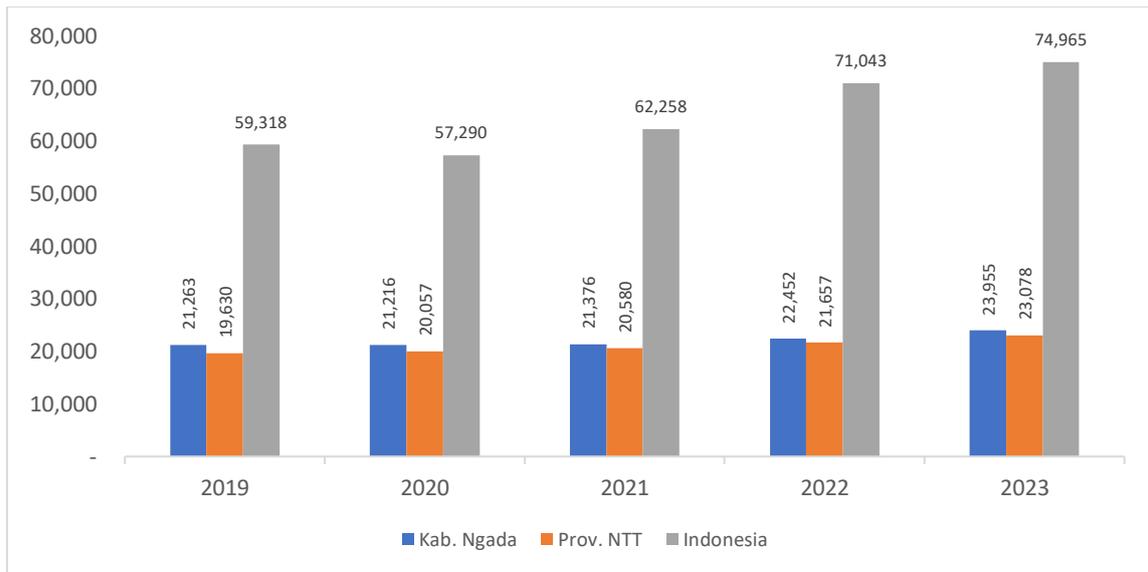
Perekonomian Kabupaten Ngada digerakkan oleh konsumsi agregat khususnya konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga berkontribusi hingga 64,09 persen per tahun pada periode 2010-2023. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,01 persen per tahun pada periode yang sama dengan pertumbuhan sebesar 3,21 persen pada tahun 2023. Pertumbuhan tersebut mendorong PDRB pengeluaran konsumsi rumah tangga mencapai 1,63 triliun rupiah. Meskipun pertumbuhannya cenderung melambat, tumbuhnya konsumsi rumah tangga mengindikasikan kondisi perekonomian masyarakat masih terjaga pada level aman seiring dengan pergerakan harga barang dan jasa yang cenderung

stabil. Selain konsumsi rumah tangga, perekonomian Kabupaten Ngada juga digerakkan oleh konsumsi pemerintah. Pengeluaran konsumsi pemerintah berkontribusi hingga 25,29 persen per tahun meskipun secara riil pertumbuhannya berkontraksi 0,26 persen pada tahun 2023. Pengeluaran konsumsi pemerintah mencapai 457,26 miliar rupiah mengalami penurunan sebesar 1,20 miliar rupiah dibandingkan tahun 2022.

Kontributor terbesar ketiga terhadap perekonomian Kabupaten Ngada adalah komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi fisik. PMTB memiliki kontribusi sebesar 24,37 persen per tahun dengan pertumbuhan sebesar 4,39 persen pada tahun 2023. Pertumbuhan tersebut mendorong PDRB PMTB mencapai 635,05 miliar rupiah. Pembangunan berbagai infrastruktur fisik, baik yang mendukung perekonomian maupun pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mendorong kinerja PMTB dari yang sebelumnya sempat melambat pada tahun 2022.

#### **2.3.1.2 PDRB Per Kapita**

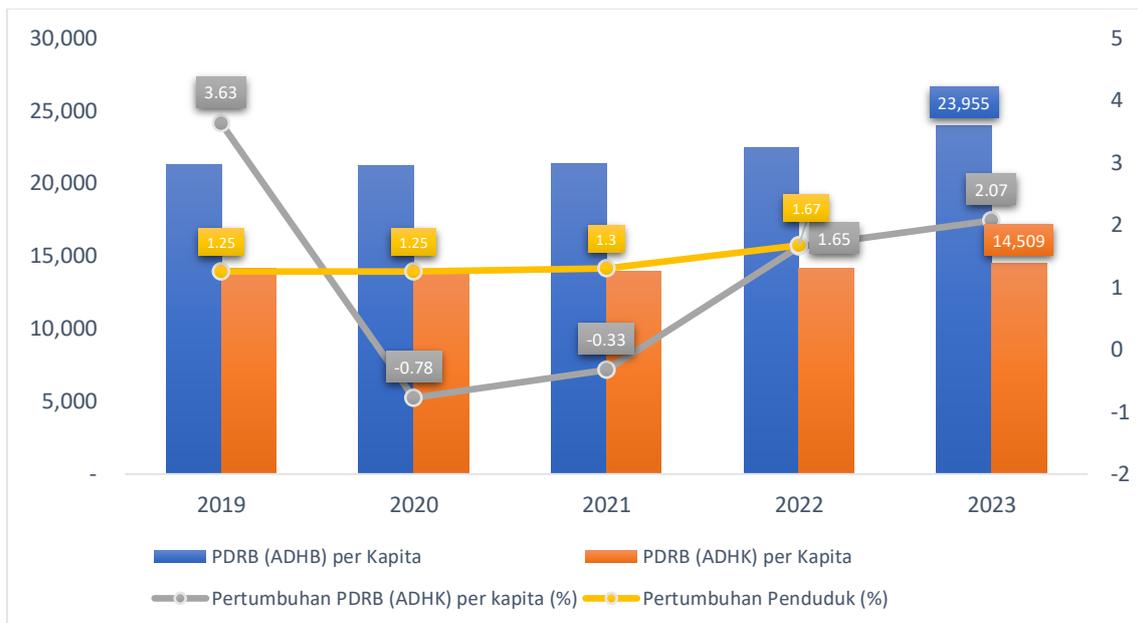
PDRB per kapita sering kali digunakan sebagai salah satu indikator yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat. PDRB per kapita menggambarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu wilayah dengan asumsi nilai yang dihasilkan sama. PDRB per kapita didapatkan dengan membagi PDRB total terhadap jumlah penduduk sehingga tinggi rendahnya PDRB per kapita suatu daerah dipengaruhi oleh nilai dari PDRB itu sendiri dan jumlah penduduk. Berikut adalah PDRB per kapita Kabupaten Ngada dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan PDB per kapita Indonesia.



**Gambar 2. 45 PDRB (ADHB) per Kapita Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan PDB (ADHB) per Kapita Indonesia Tahun 2019-2023 (Ribu Rupiah)**

*Sumber: BPS, 2024*

Pada periode 2019-2023, PDRB nominal per kapita Kabupaten Ngada terus mengalami kenaikan terkecuali pada tahun 2020. PDRB per kapita Kabupaten Ngada berada jauh di bawah PDB per kapita nasional yaitu 23,96 juta rupiah tetapi lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sebesar 23,08 juta rupiah. Kondisi ini mengindikasikan nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap penduduk di Kabupaten Ngada masih lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk di seluruh Indonesia.



**Gambar 2. 46 PDRB ADHB dan ADHK per Kapita Kabupaten Ngada Tahun 2019-2023 (Ribu Rupiah)**

*Sumber: BPS Nusa Tenggara Timur, 2024*

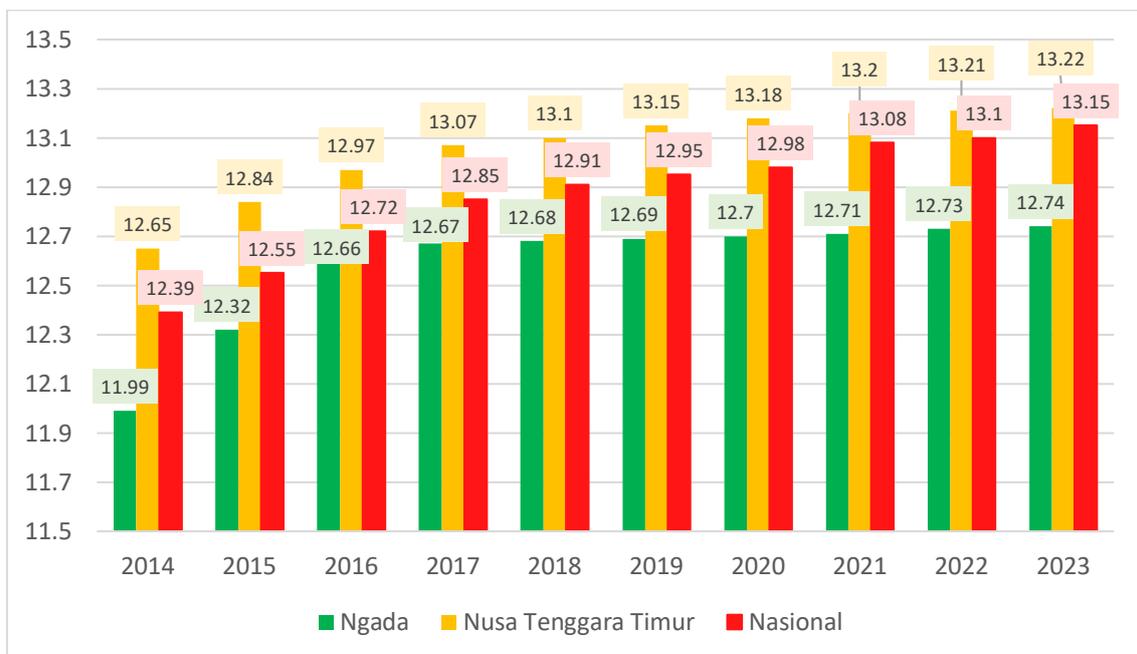
PDRB per kapita Kabupaten Ngada tumbuh 1,47 persen per tahun selama periode 2019-2023, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang selanjutnya berkontraksi pada tahun 2020 dan 2021. Tingginya pertumbuhan PDRB per kapita pada tahun 2019 didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang terjaga di angka 5,01 persen dan diikuti dengan pertumbuhan laju penduduk yang melambat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu di angka 1,25 persen. Namun, melemahnya perekonomian pada tahun 2020, menyebabkan penurunan PDRB per kapita, baik secara riil maupun nominal. Kondisi ini masih terjadi hingga tahun 2021 di mana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada masih mengalami perlambatan di angka 1,13 persen sedangkan laju pertumbuhan penduduk naik ke angka 1,3 persen. PDRB per kapita kembali tumbuh positif pada tahun 2022 dan 2023 seiring dengan perekonomian Kabupaten Ngada yang semakin menguat dan pertumbuhan penduduk yang cenderung stagnan di angka 1,41 persen pada tahun 2023.

## 2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

### 2.3.2.1 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Aspek pendidikan sendiri menjadi salah satu komponen pembentuk Inkes Pembangunan Manusia yang mana merupakan indikator makro yang digunakan untuk melihat gambaran hasil kinerja pembangunan bidang sumber daya manusia. Beberapa hal yang diukur untuk melihat daya saing sumber daya manusia dalam bidang pendidikan antara lain adalah harapan masyarakat dalam menempuh pendidikan dan lama masyarakat usia sekolah dalam menempuh pendidikan formal.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Perkembangan Angka HLS Kabupaten Ngada Tahun 2018 sampai tahun 2023 dapat digambarkan melalui grafik berikut ini.



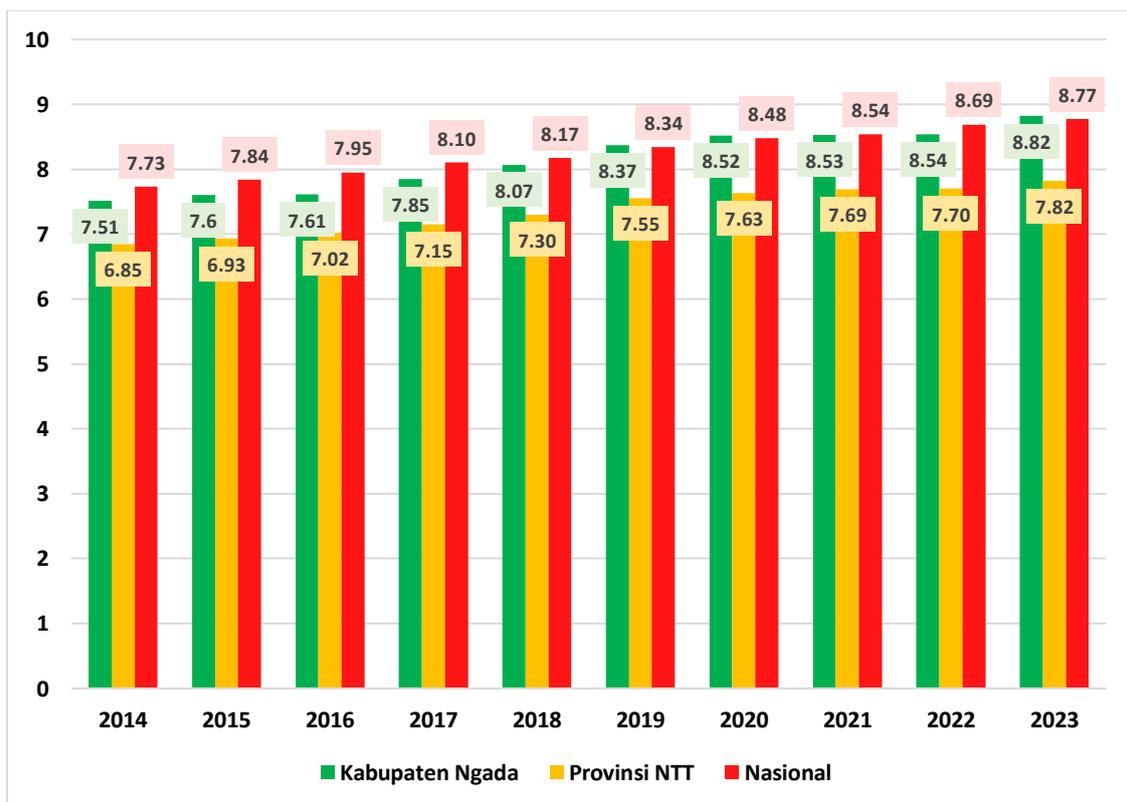
**Gambar 2. 47 Harapan Lama Sekolah**

*Sumber: BPS, 2024*

HLS Kabupaten Ngada mengalami peningkatan sebesar 6,25 persen atau bertambah sekitar 0,75 tahun dalam kurun waktu sepuluh tahun. Pada tahun 2023, HLS Kabupaten Ngada mencapai 12,74 tahun artinya masyarakat Ngada memiliki kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan hingga lulus SMA. Namun demikian capaian ini masih berada di bawah capaian Provinsi NTT dan nasional.

### 2.3.2.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Perkembangan capaian RLS di Kabupaten Ngada pada tahun 2014 hingga 2023 dapat digambarkan melalui grafik berikut ini.



Gambar 2. 48 Rata-rata Lama Sekolah

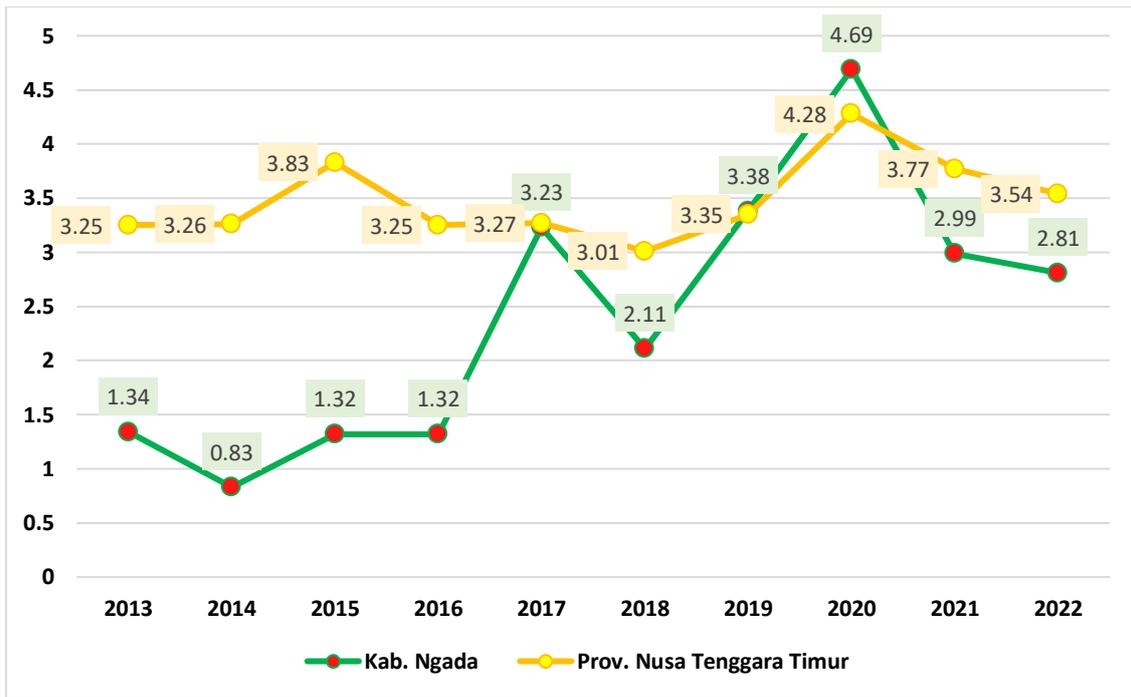
Sumber: BPS, 2024

RLS di Kabupaten Ngada mengalami peningkatan sebesar 17,44 persen atau 1,31 tahun selama periode 2014 hingga 2023. Pada tahun 2023, RLS di Kabupaten Ngada telah mencapai 8,82 tahun yang berarti rata-rata penduduk Ngada tahun telah menyelesaikan proses pendidikan hingga kelas VIII (SMP Kelas II) hampir menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun, padahal HLS pada tahun 2023 telah mencapai 12,74 tahun. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Ngada untuk lebih meningkatkan jenjang pendidikan masyarakat.

Capaian RLS yang belum optimal disebabkan oleh masih terdapat anak usia sekolah yang belum tertampung baik di SD dan SMP maupun SMA serta keterbatasan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan lebih tinggi. Di samping itu kualitas guru dan tenaga kependidikan masih belum merata, kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan juga masih terbatas.

### **2.3.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TP)**

Daya saing sumber daya manusia di suatu daerah juga dapat dilihat dari aspek ketenagakerjaan. Gambaran terkait urusan ketenagakerjaan di suatu daerah dapat dilihat dari capaian beberapa indikator makro seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Secara konseptual TPT merupakan indikator yang menghitung persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) yang bekerja atau memiliki pekerjaan namun untuk sementara waktu tidak sedang bekerja atau pengangguran. Berikut adalah capaian TPT Kabupaten Ngada selama tahun 2013 hingga 2022.



**Gambar 2. 49 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Ngada dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2022**

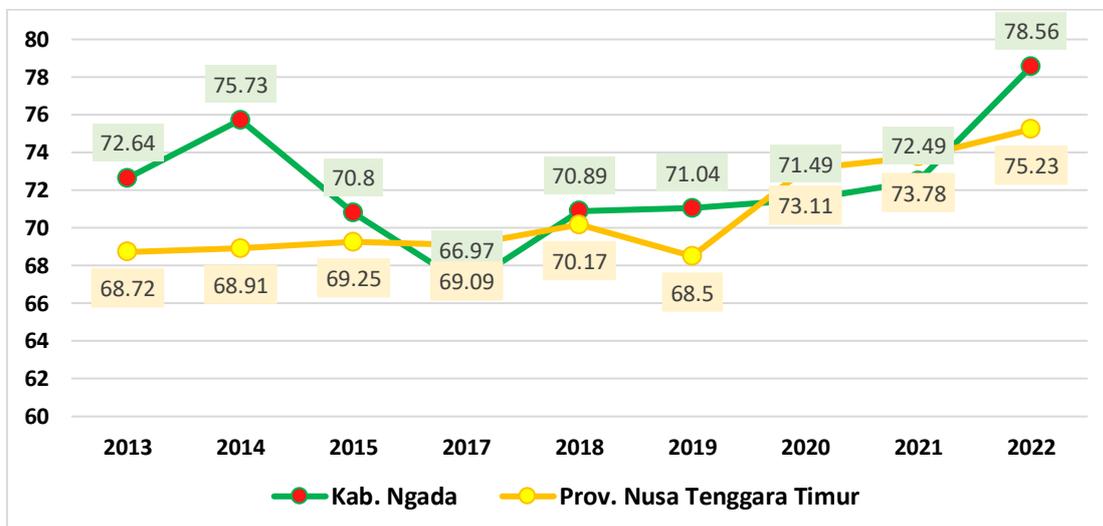
*Sumber: BPS Provinsi NTT, 2024*

TPT Kabupaten Ngada mengalami tren yang fluktuatif dan cenderung meningkat selama periode 2013 hingga 2022. TPT Kabupaten Ngada pada tahun 2022 berada pada angka 2,81. Selama 9 tahun terakhir, tingkat pengangguran di Kabupaten Ngada mengalami peningkatan sebesar 1,47 persen. Namun demikian, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pada tahun 2022 berada pada angka 3,54. Fluktuasinya angka pengangguran di Kabupaten Ngada erat kaitannya dengan mayoritas pekerjaan masyarakat yang bergerak pada bidang pertanian.

Selain itu, hasil pembangunan pada bidang ketenagakerjaan dapat dilihat dari angka partisipasi angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang menghitung persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan

tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Berikut merupakan TPAK kabupaten Ngada selama periode 2013 hingga 2022.



**Gambar 2. 50 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Ngada dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2022**

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2024

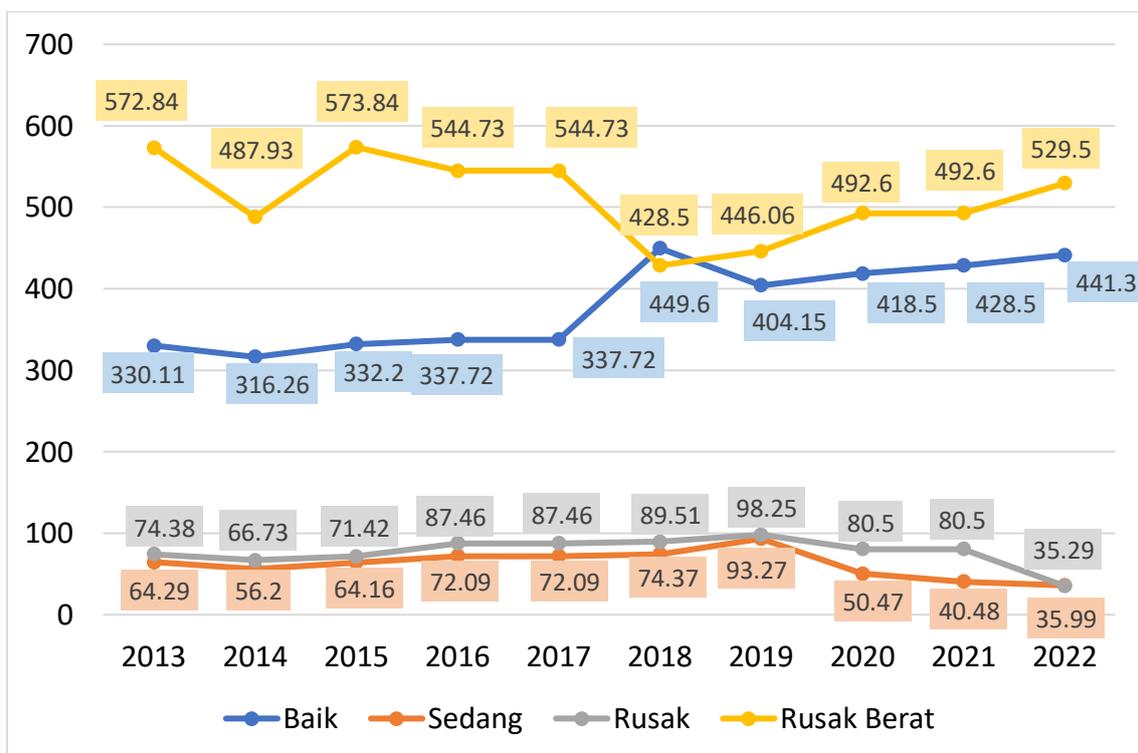
TPAK di Kabupaten Ngada mengalami tren yang fluktuatif dan cenderung meningkat selama periode 2013 hingga 2022. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir TPAK Kabupaten Ngada mengalami peningkatan sebesar 5,92 persen. Pada tahun 2022, TPAK Kabupaten Ngada berada pada angka 78,56 persen atau selisih 3,33 persen dari TPAK Provinsi NTT yang berada pada angka 75,23. tren fluktuatif dan cenderung meningkat ini menunjukkan adanya peningkatan terhadap serapan penduduk usia kerja di dunia kerja. Beberapa faktor yang turut mempengaruhi capaian indikator ini adalah adanya beberapa lapangan kerja baru yang dapat menyerap penduduk usia kerja di Kabupaten Ngada.

### 2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian, menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah. Percepatan pembangunan

infrastruktur secara komprehensif perlu dilakukan untuk menciptakan iklim investasi dan meningkatkan kerjasama. Berikut merupakan gambaran kondisi infrastruktur dasar dan pendukung perekonomian di Kabupaten Ngada, diantaranya jaringan transportasi, perumahan dan permukiman, serta jaringan penyediaan air.

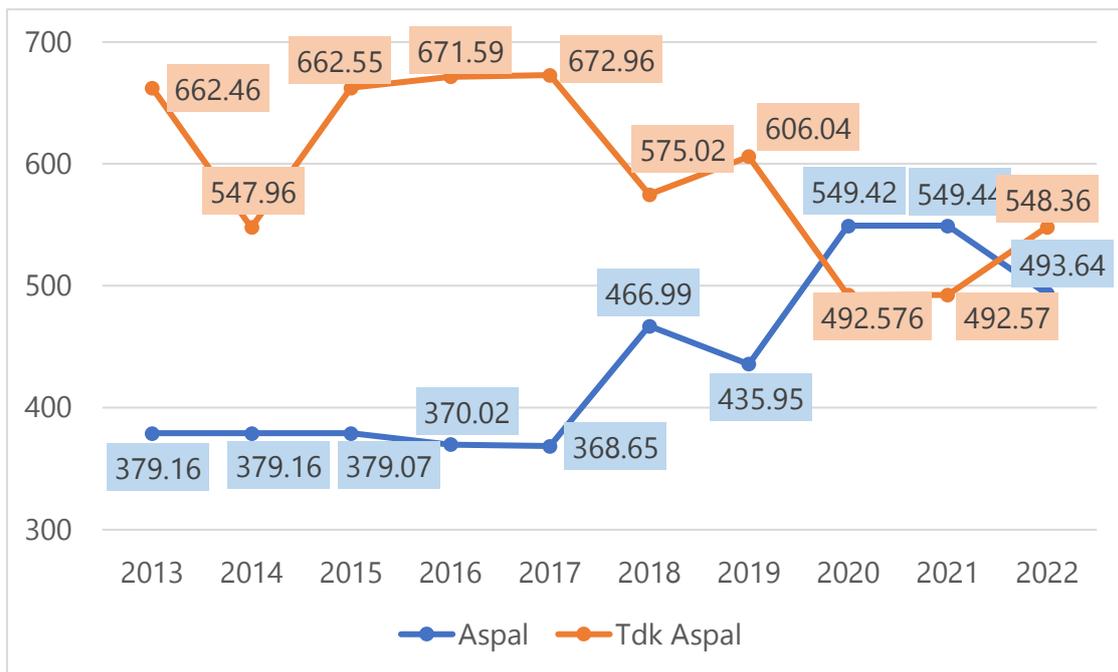
Seluruh wilayah Kabupaten Ngada telah dapat ditempuh melalui jalur darat karena jaringan jalan yang telah terbangun di seluruh wilayah, namun dengan kondisi yang belum baik, dalam artian kondisi jalan yang masih didominasi dengan kondisi rusak dan rusak berat hingga mencapai 50,82% dari keseluruhan jalan yang terbangun pada tahun 2022. Perbaikan kualitas jalan perlu dilakukan mengingat jaringan jalan yang terbangun dengan kondisi mantap dapat memudahkan mobilitas masyarakat dan merupakan salah satu fondasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.



**Gambar 2. 51 Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi**

Sumber: Badan Pusat Statistika, Kabupaten Ngada dalam Angka, tahun 2014-2023

Penyebab kerusakan jalan di Kabupaten Ngada pada umumnya disebabkan pengguna jalan dengan kendaraan yang kelebihan muatan, sehingga beban jalan melebihi kapasitas yang dapat digunakan. Secara perhitungan kuantitatif juga kondisi jalan yang bertambah tidak mempengaruhi panjang dan permukaan jalan karena yang dilakukan adalah peningkatan jalan di titik yang sama dan yang aspalnya rusak, sehingga secara persentase meningkat namun panjang jalan yang terbangun tetap.



**Gambar 2. 52 Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Material**

Sumber: Badan Pusat Statistika, Kabupaten Ngada dalam Angka, tahun 2014-2023

Kondisi jaringan jalan dengan material aspal menunjukkan tren yang terus meningkat jika dilihat dari tahun 2013 hingga tahun 2021, hal tersebut sejalan dengan berkurangnya jaringan jalan dengan material selain aspal. Namun pada tahun 2022 panjang jalan beraspal mengalami penurunan diikuti peningkatan jalan yang non aspal. Kerusakan jalan mengalami peningkatan karena menurunnya jalan dengan material aspal.

Pembangunan wilayah pada sektor perumahan dan kawasan permukiman dapat dilihat dari kondisi tempat tinggal yang layak atau biasa disebut Rumah

Layak Huni (RLH). Rumah dan permukiman layak huni dapat dilihat dari kondisi bangunan ataupun utilitas yang memenuhi kebutuhan di lingkungan rumah tersebut, seperti kondisi sanitasi dan ketersediaan air bersih. Pemenuhan RLH di Kabupaten Ngada selama ini melibatkan masyarakat secara langsung dengan pendanaan yang diperoleh dari APBD Kabupaten maupun Provinsi serta bantuan langsung dari APBN melalui Kementerian Perumahan Rakyat maupun Kementerian Sosial.

**Tabel 2. 50 Capaian Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngada**

NO	INDIKATOR	Capaian kinerja Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Cakupan ketersediaan rumah	77,88%	79,21%	79,76%	77,62%
	- jumlah rumah layak huni	21.239 Unit	21.603 Unit	21.752 Unit	21.190 unit
	- jumlah rumah	27.273 Unit	27.273 Unit	27.273 Unit	27.298 unit
2	Ratio permukiman layak huni				
	- luas permukiman layak huni	15.052,2 M	600 M	12.296 M	266.000 M
	- luas wilayah permukiman	-	-	-	-
3	Luas lingkungan pemukiman kumuh	25.74 Ha	26.17 Ha	26.6 Ha	74.96 Ha
4	Pengguna Air				4630 Jiwa
5	Rumah Tangga pengguna air bersih	9.244 RT	10.566 RT	11.121 RT	10.390 RT
6	Jumlah sambungan rumah tangga				
	- SPAM IKK	602 KK	1045 KK	1312 KK	926 KK
	- PDAM	8642 SR	9521 SR	9809 SR	9464 SR
6	Rumah tangga pengguna listrik	NA			
7	Porsentase Rumah tangga bersanitasi (RT)	73,02	74,69	71,32	75,14

Sumber: Dinas PUPRP Tahun 2022

Capaian kinerja bidang perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Ngada terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 pada pelayanan air bersih maupun sanitasi lingkungan serta pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat. Namun, pada tahun 2022 serentak seluruh layanan mengalami penurunan. Berbeda halnya dengan penanganan kawasan kumuh yang telah tertangani semua pada tahun 2022 sesuai dengan SK tahun 2014, sehingga pada tahun 2022 telah bebas dari kawasan kumuh.

Pelayanan Energi listrik yang digunakan di Kabupaten Ngada bersumber dari pembangkit tenaga listrik mikrohydro (PLTMH Waeroa dengan kapasitas 60 KW yang berlokasi di Kecamatan Jerebuu dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPb) Mataloko dengan kapasitas terpakai 1 X 1,8 MW yang berlokasi di Kecamatan Golewa serta PLTD Faobata dengan daya 5.500 KW yang berlokasi di Kecamatan Bajawa. Gardu Induk Bajawa memiliki kapasitas sebesar 20 MW dan tegangan 70/20 KV yang berlokasi di Kecamatan Bajawa. Energi listrik yang tersedia dihubungkan melalui jaringan Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUT) dengan tegangan sebesar 150 KV yang menghubungkan kota Bajawa-Ruteng-Labuan Bajo kemudian jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan sebesar 70 KV yang menghubungkan PLTU Ulumbu Ruteng-Bajawa dan Bajawa-Ende

#### **2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi**

##### **2.3.4.1 Ketenteraman dan Ketertiban**

Kondisi ketenteraman dan ketertiban di suatu wilayah dapat mempengaruhi keputusan untuk berinvestasi. Apabila suatu daerah kondisinya tertib, tenteram, dan aman maka investor akan merasa aman dan menguntungkan untuk menanamkan modal di daerah tersebut. Untuk menggambarkan kondisi ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kabupaten Ngada, capaian kinerja urusan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat digunakan sebagai

proksi dari Indeks Ketenteraman dan Ketertiban. Berikut adalah capaian urusan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Ngada.

**Tabel 2. 51 Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ngada Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Capaian Kinerja Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Aparat dan Petugas Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman					
1.1	Jumlah POL PP	111	109	108	122	123
a	- ASN	50	48	47	49	50
b	- Kontrak	61	61	61	73	73
1.2	Jumlah aparat dan petugas Linmas	498	493	1676	1676	1676
a	- Aparat Linmas	164	159	166	166	166
b	- Petugas Linmas	334	334	1510	1510	1510
2.1	Jumlah kasus pelanggaran K3	20	144	64	592	89
2.2	Jumlah kasus pelanggaran K3 yang ditangani	20	144	38	592	89
3.1	Jumlah kasus pelanggaran Perda	10	8	12	19	14
3.2	Jumlah kasus pelanggaran Perda yg ditangani	8	7	7	11	14

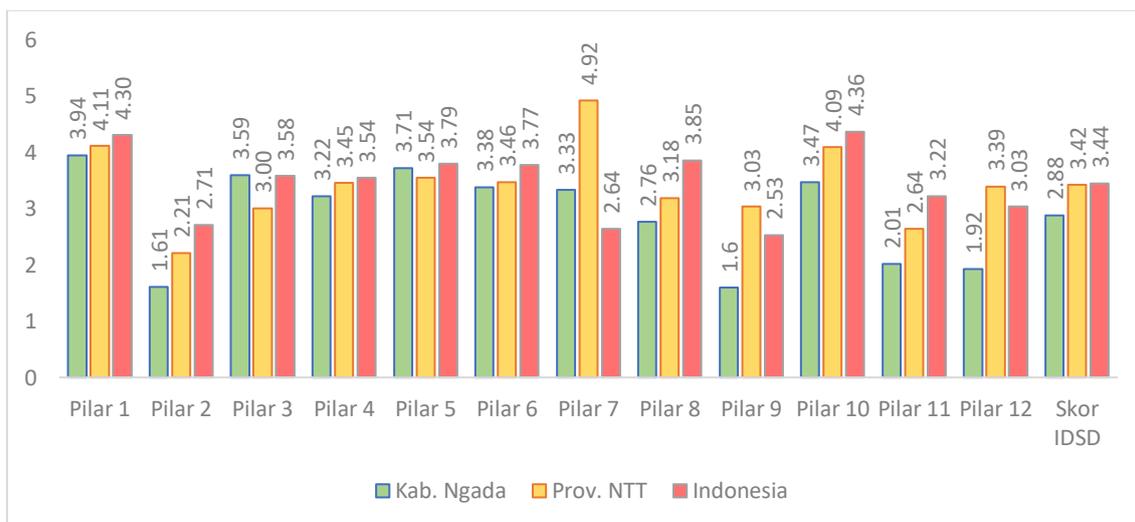
Sumber: Satuan Polisi PP tahun 2022

Secara umum, kondisi ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Ngada mengalami penurunan yang dapat dilihat dari jumlah kasus pelanggaran K3 dan pelanggaran Perda yang semakin bertambah pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2018. Jumlah pelanggaran K3 mengalami peningkatan yang sangat tinggi yakni sebesar 528 kasus pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Kondisi yang sama juga terjadi pada jumlah kasus pelanggaran Perda yang naik sebesar 7 kasus dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2022, tingkat pelanggaran K3 maupun pelanggaran Perda kembali turun meskipun tetap lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah kasus pada tahun 2018. Dari segi penanganan

kasus, kinerja aparat dalam menyelesaikan kasus tergolong sangat baik dengan capaian penyelesaian kasus sebesar 100 persen pada tahun 2022.

### 2.3.4.2 Indeks Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu daerah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaku usaha sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Daya saing daerah dihitung melalui indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). IDSD merupakan sebuah indikator yang diturunkan dari Indeks Daya Saing Global dan disesuaikan kembali dengan karakteristik dan ketersediaan data di daerah. IDSD terdiri dari 4 komponen yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut diturunkan menjadi 12 pilar dan 48 indikator di tingkat kabupaten/kota.



**Gambar 2. 53 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia Tahun 2023**

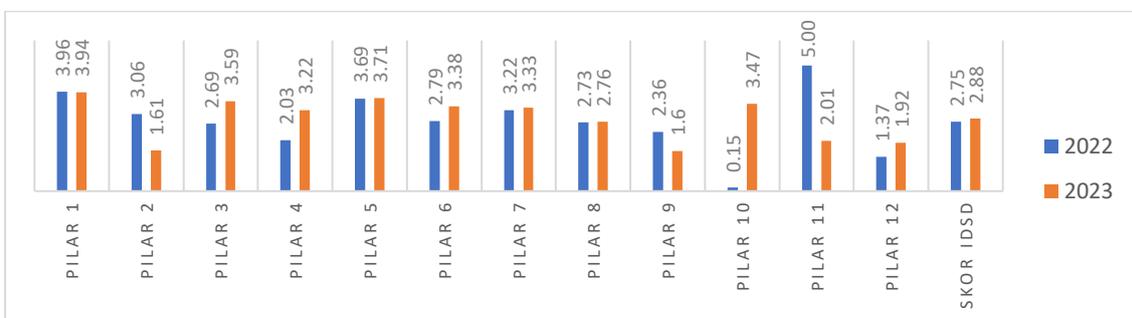
Sumber: Kajian Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah - Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

Keterangan:

Pilar 1	Institusi	Pilar 7	Pasar Produk
Pilar 2	Infrastruktur	Pilar 8	Pasar Tenaga Kerja
Pilar 3	Adopsi TIK	Pilar 9	Sistem Keuangan
Pilar 4	Stabilitas Ekonomi Makro	Pilar 10	Ukuran Pasar
Pilar 5	Kesehatan	Pilar 11	Dinamisme Bisnis
Pilar 6	Keterampilan	Pilar 12	Kapabilitas Inovasi

Skor IDSD Kabupaten Ngada pada tahun 2023 lebih rendah jika dibandingkan dengan skor IDSD di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun nasional. Angka tersebut mengindikasikan daya saing daerah di Kabupaten Ngada masih tergolong rendah dan memerlukan perbaikan atau peningkatan di berbagai pilar. Dari kedua belas pilar yang digunakan dalam perhitungan nilai IDSD, Kabupaten Ngada baru dapat mengungguli 2 pilar dibanding Provinsi Nusa Tenggara Timur atau pun nasional. Jika dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Ngada memiliki skor yang lebih tinggi pada pilar 3 (adopsi TIK) dan pilar 5 (kesehatan). Jika dibandingkan dengan nasional, Kabupaten Ngada memiliki skor yang lebih tinggi pada pilar 3 (adopsi TIK) dan pilar 7 (pasar produk).

Kabupaten Ngada memiliki keunggulan pada pilar adopsi TIK, baik di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Ngada lebih baik dibandingkan dengan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun nasional. Pada pilar kesehatan, nilai Kabupaten Ngada lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengindikasikan harapan hidup masyarakat Kabupaten Ngada lebih tinggi dibandingkan tingkat provinsi. Pada pilar pasar produk, nilai Kabupaten Ngada lebih tinggi dibandingkan nasional yang mengindikasikan persaingan sektor jasa di daerah lebih baik jika dibandingkan dengan lingkup nasional.



**Gambar 2. 54 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2022 dan 2023**

*Sumber: Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2022 dan 2023 - Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024*

Nilai IDSD Kabupaten Ngada pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,13 poin dibandingkan dengan tahun 2022. Di antara kedua belas pilar yang ada, sembilan pilar diantaranya mengalami kenaikan sedangkan keempat lainnya mengalami penurunan nilai. Empat pilar yang mengalami penurunan nilai diantaranya Pilar 1, Pilar 2, Pilar 9, dan Pilar 11. Selain mengalami penurunan, terdapat satu pilar yang mengalami kenaikan nilai yang cukup tinggi mencapai 3,32 poin yaitu Pilar 10. Kondisi tersebut disebabkan oleh penyesuaian indikator yang digunakan dalam perhitungan pada kelima pilar tersebut, misal untuk indikator PDRB per kapita yang sebelumnya masuk ke dalam Pilar 4 dipindah ke Pilar 10.

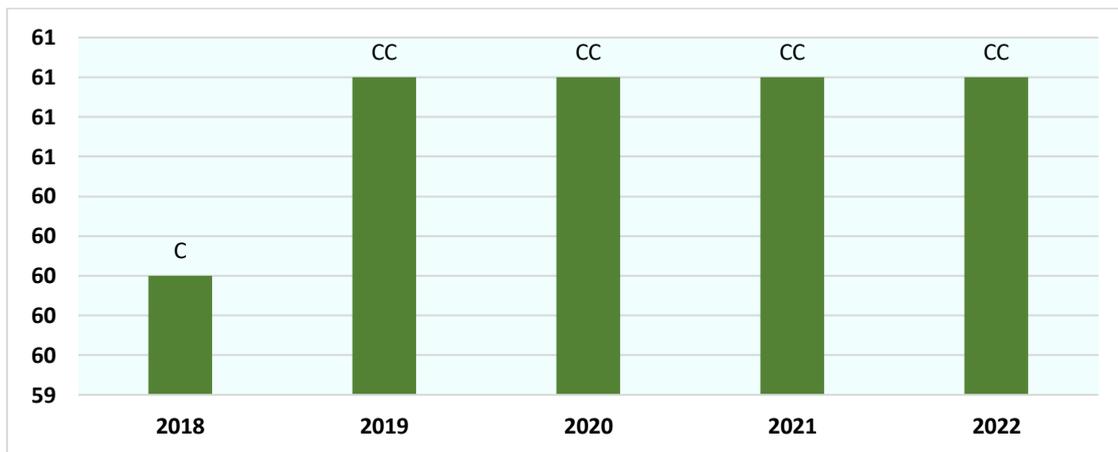
## **2.4 Aspek Pelayanan Umum**

Aspek pelayanan umum memuat informasi capaian kinerja pembangunan di Kabupaten Ngada yang meliputi capaian pembangunan di bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan umum baik dalam bentuk barang dan jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Ngada. Aspek pelayanan umum pada dasarnya memberikan gambaran terkait kinerja pemerintahan di segala sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Aspek pelayanan umum diukur menggunakan beberapa indikator seperti: Indeks Reformasi Birokrasi, Opini BPK, Nilai SAKIP, dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berikut grafik dan tabel rincian capaian beberapa indikator tersebut di Kabupaten Ngada.

### **2.4.1 Indeks Reformasi Birokrasi**

Indeks reformasi birokrasi adalah fondasi dalam mengukur penyelenggaraan tata kelola pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan reformasi birokrasi mencakup delapan area perubahan, antara lain: manajemen perubahan, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan peraturan

perundang-undangan, penguatan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berikut capaian kinerja indeks reformasi birokrasi Kabupaten Ngada pada tahun 2018-2022:



**Gambar 2. 55 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Ngada tahun 2018-2022**

Sumber: Satu Data Kemenpan-RB, 2024 (diolah)

Kinerja penerapan RB di Kabupaten Ngada cenderung meningkat secara pelan tetapi tetap konsisten, pada tahun 2019 predikat IRB naik dari "C" menjadi "CC". Walaupun masih banyak aspek yang masih bisa ditingkatkan dalam penerapan akuntabilitas kinerja tata kelola pemerintahan Kabupaten Ngada, tetapi modal akuntabilitas keuangan dengan opini BPK yang selalu WTP menjadi modal kuat untuk terus meningkatkan capaian RB ini. Capaian indikator akuntabilitas lain berupa SAKIP juga terus meningkat walau pelan selaras dengan capaian RB Kabupaten Ngada, capaian SAKIP juga selalu memperoleh CC sejak tahun 2018. Bagaimanapun, Kabupaten Ngada masih memiliki banyak tugas rumah untuk terus meningkatkan kinerja RB, mulai dari membentuk SDM aparatur yang berkualitas, penguatan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran, penguatan tata laksana sesuai dengan prinsip *good governance*, serta penguatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang dapat berdampak pada pelayanan publik yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

### 2.4.2 Opini BPK

Opini BPK menjadi salah satu indikator yang sangat penting dalam menentukan akuntabilitas tata kelola pemerintahan sebuah daerah. Opini BPK dapat menjadi acuan mengenai laporan keuangan sebuah daerah yang didasarkan pada beberapa kriteria seperti: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecukupan pengungkapan, dan efektivitas pengendalian internal. Opini BPK Kabupaten Ngada sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 selalu memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” atau WTP sesuai dengan tabel di bawah:

**Tabel 2. 52 Opini BPK Kabupaten Ngada tahun 2018-2022**

Opini BPK	
Tahun	Predikat
2018	WTP
2019	WTP
2020	WTP
2021	WTP
2022	WTP

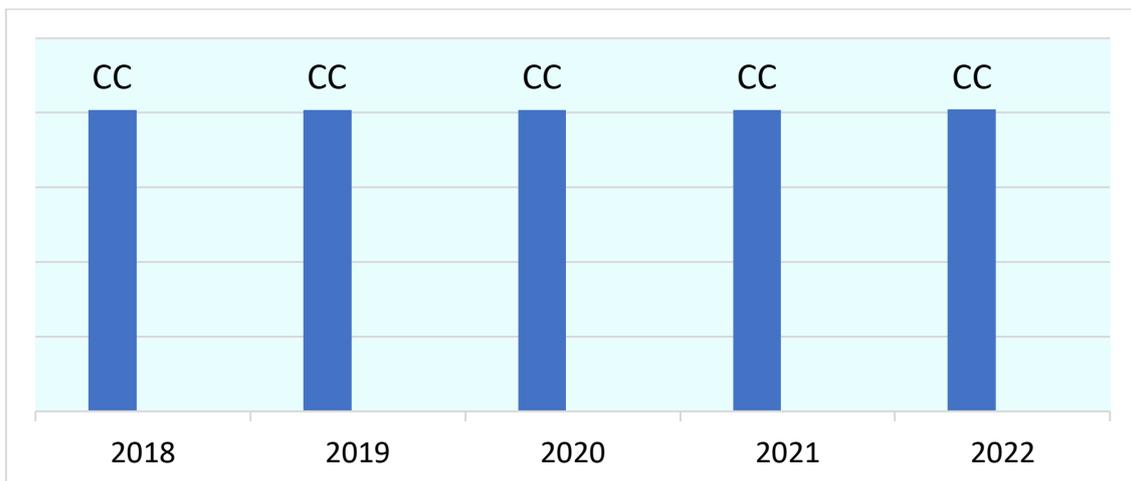
*Sumber: Satu Data Kemenpan-RB, 2024 (diolah)*

Opini BPK Kabupaten Ngada yang selalu secara konsisten memperoleh WTP sejak tahun 2018 menjadi modal yang sangat penting dalam rangka menjaga akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah daerah yang baik dan wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia dapat menjadi modal yang sangat kuat untuk menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Ngada secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

### 2.4.3 Nilai SAKIP

Indikator tata kelola pemerintahan yang dapat menjadi indikator akuntabilitas sebuah pemerintahan selanjutnya adalah nilai SAKIP yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB. Implementasi SAKIP adalah bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui implementasi di bidang manajemen

kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. Seluruh instansi pemerintah, mulai dari pusat hingga kabupaten/kota dituntut untuk terus bisa mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja mereka, sehingga dapat berkinerja dengan tepat sasaran juga berorientasi hasil. Berikut pencapaian nilai SAKIP Kabupaten Ngada dari tahun 2018 hingga 2022:



**Gambar 2. 56 Nilai SAKIP Kabupaten Ngada tahun 2018-2022**

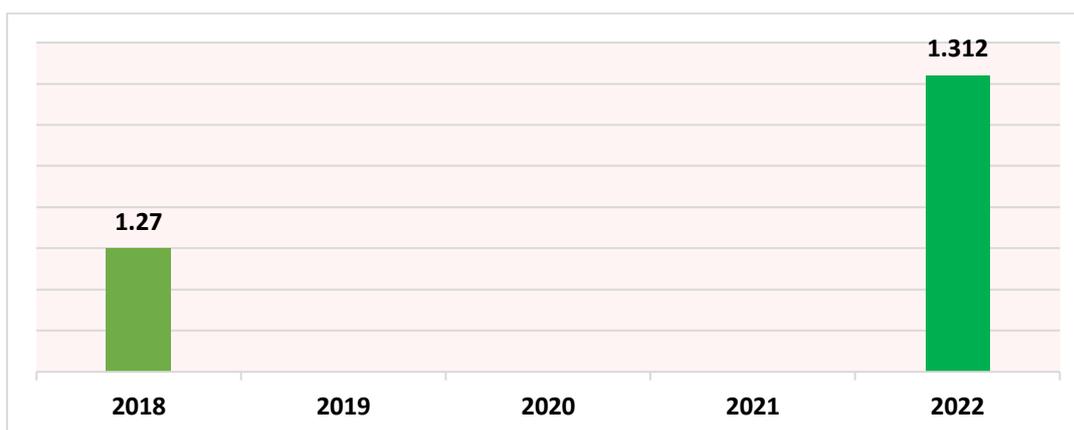
*Sumber: Satu Data Kemenpan-RB, 2024 (diolah)*

Nilai SAKIP Kabupaten Ngada secara konsisten sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 selalu memperoleh predikat CC. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada banyak aspek yang perlu diperbaiki dari akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Ngada, mulai dari komitmen dalam manajemen kinerja, perbaikan unit kerja, perbaikan perencanaan dan pelaporan kinerja, perbaikan pengukuran kinerja, dan perbaikan keseluruhan akuntabilitas kinerja Pemerintahan Kabupaten Ngada. Pemerintah Ngada perlu secara serius memperbaiki kinerja tata kelola pemerintahannya di periode perencanaan selanjutnya. Dengan adanya perbaikan kinerja tata kelola pemerintahan yang ditunjukkan dengan perbaikan akuntabilitas kinerja, maka tentu hal ini akan diikuti oleh pertumbuhan ekonomi daerah, serta perbaikan kualitas SDM. Hal ini dikarenakan akuntabilitas kinerja pemerintahan yang baik akan membuat investor semakin percaya dengan pemerintah sehingga pertumbuhan ekonomi

akan turut meningkat. Kualitas akuntabilitas pemerintah yang semakin membaik juga akan pemerintah dengan baik meningkatkan kualitas SDM melalui program-program pemerintah daerah.

#### 2.4.4 Indeks Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah indikator yang mengukur penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Implementasi SPBE ditunjukkan dengan mewujudkan proses kerja yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berikut adalah nilai nilai indeks SPBE Kabupaten Ngada tahun 2018-2022.



**Gambar 2. 57** Indeks SPBE Kabupaten Ngada tahun 2018-2022

Sumber: Satu Data Kemenpan-RB, 2024 (diolah)

Sejak tahun 2018 hingga tahun 2022, nilai Indeks SPBE Kabupaten Ngada selalu memperoleh predikat "kurang". Walaupun ada kenaikan secara signifikan pada tahun 2022 dari tahun 2018 sebesar 0,042 poin. Akan tetapi, data indeks SPBE Kabupaten Ngada pada tahun 2019 hingga 2021 tidak tersedia. Predikat "kurang" dari penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik ini dapat dimaknai dengan kematangan prosesnya. Kabupaten Ngada dapat dikategorisasikan ke dalam tingkat rintisan, yang berarti pelaksanaan kebutuhan proses tata kelola SPBE masih bersifat *ad-hoc* atau dilaksanakan berdasarkan kepentingan sesaat atau sewaktu-waktu, tidak terorganisir dengan baik, tidak

dipantau, dan hasilnya tidak dapat diprediksi. Pemerintah Kabupaten Ngada harus secara serius memperbaiki capaian SPBE nya untuk naik hingga ke level di atasnya, yaitu terkelola yang ditandai dengan telah dilaksanakannya dasar-dasar manajemen, serta sudah disesuaikan dengan standar masing-masing unit organisasi. Capaian indek SPBE ini perlu ditingkatkan dengan melakukan integrasi antar perangkat daerah, memperkuat arsitektur SPBE, sehingga digitalisasi tata kelola pemerintahan Kabupaten Ngada dapat berjalan dengan optimal.

## **2.5 Evaluasi Hasil RPJPD**

Hasil evaluasi RPJPD periode 2026-2026 menjadi salah satu dokumen yang digunakan untuk merumuskan kebijakan selama 20 tahun ke depan. Penyusunan dokumen perencanaan yang dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian periode sebelumnya diharapkan dapat menjadikan rencana pembangunan ke depan lebih relevan dan berkelanjutan sesuai dengan kondisi-kondisi yang sudah dicapai pada periode pembangunan sebelumnya. Berikut merupakan hasil evaluasi capaian kinerja indikator makro pada RPJPD Kabupaten Ngada Periode 2006-2026.

**Tabel 2. 53 Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Makro Kabupaten Ngada Tahun 2006-2026**

No.	Indikator Kinerja Makro	Periode 1 (2006-2011)		Pertumbuhan	Periode 2 (2011-2016)		Pertumbuhan	Periode 3 (2016-2021)		Pertumbuhan	Periode 4 (2021-2026)		Pertumbuhan
		Realisasi awal periode (2006)	Realisasi akhir periode (2011)		Realisasi awal periode (2010)	Realisasi akhir periode (2016)		Realisasi awal periode (2015)	Realisasi akhir periode (2021)		Realisasi awal periode (2020)	Realisasi (2022)	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,97	62,8	-4,81	61,84	65,10	5,27	65,10	67,88	4,27	67,88	68,26	0,56
2	Angka Kemiskinan (Tingkat Kemiskinan)	16,78	11,36	-32,30	12,05	12,69	5,31	12,69	12,58	-0,87	12,58	11,93	-5,17
3	Angka Pengangguran (Tingkat Pengangguran Terbuka)	4,71	0,74	-84,29	2,21	1,32	-40,27	1,32	4,69	255,30	4,69	2,81	-40,09
4	Pertumbuhan Ekonomi (Laju Pertumbuhan Ekonomi)	5,13	5,12	-0,19	5,11	5,19	1,57	4,69	0,04	-99,15	0,04	3,05	7525,00
5	Pendapatan per Kapita	3.665.460,00	6.929.940,00	89,06	7.536.000,00	8.095.000,00	7,42	8.095.000,00	8.865.000,00	9,51	8.865.000,00	8.997.000,00	1,49
6	Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	PDRB per Kapita (ADHB)	5.966.300,00	7.613.000,00	27,60	7.613.000,00	17.870.000,00	134,73	16.320.000,00	21.220.000,00	30,02	21.220.000,00	22.450.000,00	5,80

Secara umum, capaian kinerja indikator makro Kabupaten Ngada tahun 2006-2026 mengalami tren meningkat. Artinya, pembangunan daerah di Kabupaten Ngada yang dilihat berdasarkan capaian kinerja indikator makro pada periode pertama hingga periode keempat RPJPD menunjukkan adanya peningkatan yang cukup baik. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngada pada periode tersebut cenderung mengalami perlambatan. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya percepatan transformasi ekonomi yang selaras dengan mandat RPJPD di level nasional dan provinsi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngada. Selain itu, upaya penanganan kemiskinan juga perlu ditingkatkan karena angka kemiskinan di Kabupaten Ngada cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan nasional selama periode RPJPD 2006-2026. Secara keseluruhan, diperlukan perencanaan yang lebih progresif dan kontekstual serta berbagai upaya akselerasi pembangunan untuk meningkatkan capaian pembangunan daerah seiring dengan upaya perwujudan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Ngada 2025-2045.

Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Ngada 2006-2026, berikut rekomendasi perbaikan kinerja indikator makro untuk periode RPJPD mendatang:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk menilai kualitas hidup manusia di Kabupaten Ngada berdasarkan tiga dimensi utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Oleh karena itu, diperlukan beberapa strategi untuk meningkatkan IPM. *Pertama*, peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan melalui pembangunan infrastruktur kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan gizi masyarakat. *Kedua*, peningkatan akses dan kualitas pendidikan di antaranya melalui pemerataan dan perbaikan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pengajar, pemenuhan rasio tenaga pengajar (guru), penyediaan beasiswa bagi masyarakat tidak mampu. *Ketiga*, meningkatkan standar hidup masyarakat di Kabupaten Ngada melalui penciptaan lapangan kerja yang bervariasi dan

sesuai dengan kapasitas pencari kerja, perluasan akses terhadap lapangan pekerjaan, peningkatan upah minimum, peningkatan akses terhadap air bersih, sanitasi, listrik, dan transportasi yang memadai. *Keempat*, mendorong berbagai upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. *Kelima*, peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan mengelola SDA secara berkelanjutan dan mengimplementasikan rehabilitasi lingkungan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan mencegah bencana alam.

2. Angka kemiskinan. Untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Ngada diperlukan beberapa strategi. *Pertama*, peningkatan akses terhadap pendidikan misalnya dengan memberikan beasiswa pendidikan untuk sekolah formal jenjang SD-SMA/SMK, menyediakan program pelatihan keterampilan bagi warga usia pencari kerja (usia produktif) terutama yang tidak memiliki ijazah pendidikan formal atau yang memerlukan keterampilan baru untuk mendapatkan pekerjaan. *Kedua*, penciptaan dan perluasan akses terhadap lapangan kerja. *Ketiga*, pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) misalnya dengan memberikan akses terhadap bantuan permodalan, pelatihan tentang pengelolaan keuangan usaha dan pemasaran produk. *Keempat*, perluasan cakupan penerima manfaat jaringan pengaman sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. *Kelima*, peningkatan kesejahteraan petani misalnya memberikan bantuan alat pertanian (alsintan) berbasis teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga stabilitas harga hasil pertanian terutama yang belum diolah, meningkatkan kualitas akses jalan dari lokasi pertanian ke pasar/konsumen.
3. Angka pengangguran. Untuk menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Ngada diperlukan beberapa strategi. *Pertama*, penciptaan lapangan kerja misalnya dengan mengembangkan sektor industri (terutama padat karya) yang menyerap banyak tenaga kerja, meningkatkan pembangunan kawasan perdesaan dengan mengembangkan sektor

pertanian dan UMKM dan atau IKM untuk menciptakan lapangan kerja di perdesaan, meningkatkan kualitas infrastruktur (jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya) sebagai daya dukung terciptanya lapangan kerja yang lebih bervariasi. *Kedua*, peningkatan keterampilan bagi angkatan kerja misalnya menginisiasi kerja sama dengan sektor industri untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan menyiapkan lulusan pelatihan tersebut siap kerja, menyediakan pelatihan keterampilan dan kejuruan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. *Ketiga*, dukungan terhadap kewirausahaan dan pengembangan UMKM melalui pendampingan, bimbingan, dan pelatihan inkubasi bisnis bagi para pemilik usaha baru, menyediakan akses permodalan/pembiayaan bagi pelaku usaha melalui kredit mikro dan insentif pajak, membantu UMKM dan IKM untuk mendapatkan akses ke pasar nasional dan internasional, dan memperbaiki rantai distribusi untuk meningkatkan daya saing produk UMKM/IKM.

4. Laju pertumbuhan ekonomi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngada diperlukan beberapa strategi. *Pertama*, pengembangan Sumber Daya Manusia melalui akses dan kualitas pendidikan, pelatihan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal, peningkatan inisiasi kerja sama antara lembaga pendidikan (misalnya SMK dan BLK) dengan industri untuk memastikan angkatan kerja terserap di dunia kerja. *Kedua*, pengembangan infrastruktur bidang transportasi (meningkatkan kualitas jalan, jembatan, bandara dan fasilitas umum lainnya) untuk meningkatkan konektivitas antar daerah. Selain itu, pengembangan infrastruktur telekomunikasi dengan memperluas jangkauan internet hingga ke pelosok. Peningkatan infrastruktur bidang energi melalui perluasan akses terhadap listrik dan sumber energi untuk mendukung pengembangan industri lokal. *Ketiga*, pemanfaatan potensi lokal dengan optimalisasi pengembangan sektor pertanian, UMKM dan IKM, dan pariwisata. *Keempat*, penyiapan regulasi atau kebijakan yang mendukung peningkatan investasi daerah. *Kelima*,

peningkatan kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai pemangku kebijakan (pemerintah, swasta, dan lembaga internasional). *Keenam*, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

## **2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik**

Perencanaan pembangunan perlu ditunjang dengan informasi terkait besaran dan komposisi kependudukan yang lengkap dan berkesinambungan. Hasil sensus, survei, dan data administratif menyediakan informasi penduduk untuk kondisi saat pendataan tersebut dilakukan. Namun, penyusunan perencanaan dan kebijakan sesuai dinamika waktu di masa mendatang membutuhkan informasi proyeksi penduduk di masa depan. Proyeksi penduduk akan membantu pembuat kebijakan untuk memonitor dan mengevaluasi program, mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi, serta merancang kebijakan selanjutnya.

Perencanaan pembangunan harus didukung oleh data dan informasi yang akurat, termasuk data dan informasi kependudukan terkini serta prakiraannya pada masa yang akan datang sebagai dasar untuk mengevaluasi pembangunan yang telah berjalan dan menentukan kebijakan pembangunan di masa depan. Selain jumlah penduduk, informasi mengenai parameter demografi seperti struktur umur penduduk, angka kelahiran, angka kematian, dan umur harapan hidup saat lahir sangat menunjang untuk perencanaan pembangunan yang akurat. Informasi tersebut dapat dihitung melalui proyeksi penduduk.

Salah satu kebutuhan pembangunan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan adalah penyediaan sarana dan prasarana yang akan melayani penduduk sebagaimana karakteristik demografi yang ada. Penyediaan

sarana dan prasarana mencakup pembangunan dan penyediaan fasilitas dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, rumah sakit, sekolah, dan transportasi umum.

Kebutuhan akan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik memerlukan proyeksi demografi untuk dapat menangkap dinamika perkembangan kebutuhan yang perlu direncanakan pada masa-masa mendatang. Aspek demografi serta kebutuhan akan sarana dan prasarana memiliki hubungan yang erat dan menjadi salah satu pemikiran dalam kebutuhan perumusan kebijakan dan rencana pembangunan. Kedua aspek ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi suatu negara atau wilayah, sebagaimana diuraikan berikut:

a. Manfaat Proyeksi Demografi, diantaranya:

- Dalam Perencanaan Ekonomi: Proyeksi demografi membantu pemerintah dan lembaga lainnya merencanakan kebijakan ekonomi jangka panjang. Dengan mengetahui perkiraan jumlah penduduk, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan lebih efisien.
- Dalam Perencanaan Pendidikan: Proyeksi demografi membantu dalam merencanakan kebutuhan pendidikan di masa depan. Hal ini membantu lembaga-lembaga pendidikan mempersiapkan diri untuk meningkatkan atau menurunkan kapasitas berdasarkan perkiraan jumlah siswa.
- Dalam Perencanaan Kesehatan: Proyeksi demografi dapat membantu sektor kesehatan merencanakan kapasitas fasilitas kesehatan, memperkirakan kebutuhan layanan kesehatan, dan mengidentifikasi kelompok-kelompok risiko.
- Dalam Perencanaan Pasar Tenaga Kerja: Dengan memahami proyeksi demografi, perencanaan pasar tenaga kerja menjadi lebih efisien. Pemerintah dan bisnis dapat merencanakan pelatihan, pendidikan, dan kebijakan penyerapan tenaga kerja.

- b. Manfaat Pemenuhan Sarana Prasarana / Infrastruktur Publik, diantaranya:
- Peningkatan Kualitas Hidup: Infrastruktur yang memadai meningkatkan kualitas hidup penduduk. Akses mudah ke air bersih, sanitasi, pendidikan, dan layanan kesehatan mendasar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - Pendorong Pertumbuhan Ekonomi: Infrastruktur yang baik meningkatkan produktivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Jalan yang baik, transportasi umum, dan konektivitas internet memudahkan perdagangan dan bisnis.
  - Peningkatan Aksesibilitas: Infrastruktur yang memadai meningkatkan aksesibilitas ke pasar, peluang pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan
  - Ketahanan Terhadap Bencana: Infrastruktur yang kuat dan tahan bencana membantu komunitas mengatasi dampak bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau badai dengan lebih baik.

### **2.6.1 Proyeksi Demografi**

Analisis proyeksi kependudukan Kabupaten Ngada didasarkan pada hasil proyeksi penduduk kabupaten/kota untuk tahun 2020-2035 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil proyeksi BPS mengacu pada hasil kuesioner sensus penduduk yang lebih rinci yang disebut sebagai Long Form Sensus Penduduk 2020. Penyajian hasil proyeksi tersebut menggunakan metode komponen kohort dengan pendekatan deterministik yang menghasilkan estimasi titik, serta dihitung dengan aplikasi Rural Urban Projection (RUP). Beberapa asumsi yang digunakan dalam metode ini meliputi asumsi kelahiran dengan menggunakan indikator Total Fertility Rate (TFR); asumsi kematian dengan menggunakan Infant Mortality Rate dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir; serta migrasi dengan menggunakan indikator Age-Specific Net Migration Rate (ASNMR) yang disusun berdasarkan umur dan jenis kelamin bersumber dari hasil SP2020.

Hasil proyeksi penduduk Kabupaten Ngada pada tahun 2020-2035 yang dirilis oleh BPS digunakan sebagai rujukan dalam memproyeksi penduduk Kabupaten Ngada pada tahun 2036-2045. Adapun proyeksi penduduk Kabupaten Ngada pada tahun 2036-2045 dianalisis dengan menggunakan aplikasi spectrum. proyeksi yang diperoleh dari aplikasi tersebut mengacu pada modul DemProj (Demography Project) serta dampak yang dihasilkan dari pertumbuhan penduduk melalui modul RAPID (Resources for the Awareness of Population Impacts on Development).

#### **2.6.1.1 Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Jumlah Penduduk**

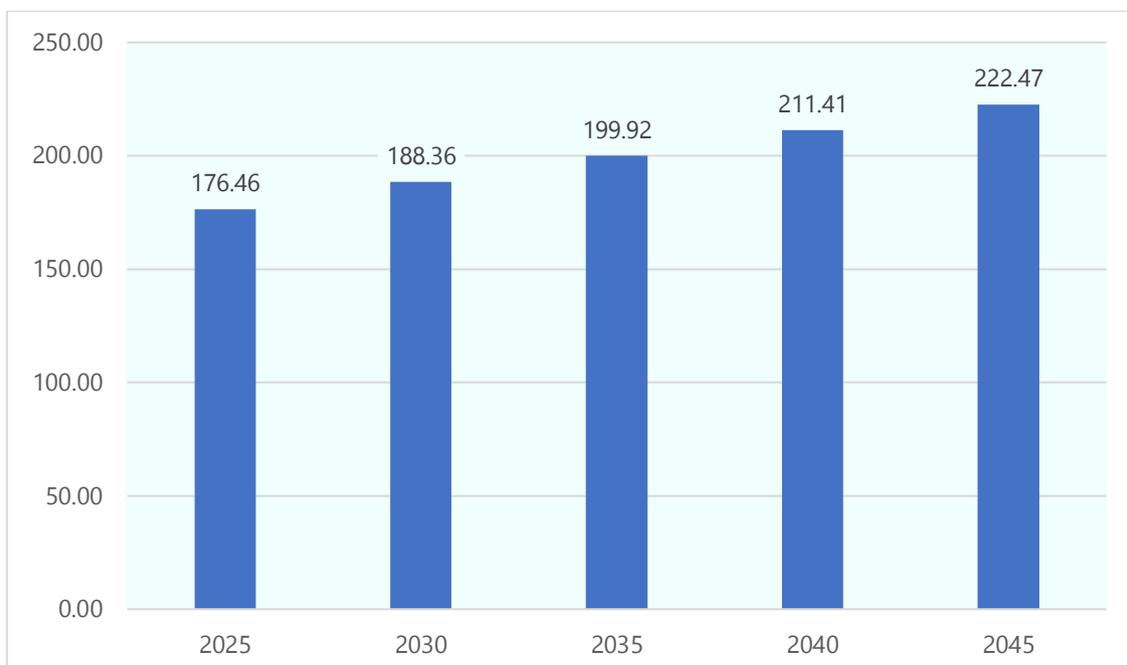
Proyeksi demografi dan kebutuhan sarana dan prasarana memiliki beberapa asumsi dasar yang dapat mempengaruhi perubahan jumlah penduduk. Perlu dijadikan dasar asumsi bahwa proyeksi demografi Kabupaten Ngada didasarkan pada proyeksi penduduk yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk level Kabupaten/Kota. Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan jumlah penduduk adalah indikator Total Fertility Rate (TFR), asumsi kematian dengan indikator Infant Mortality Rate (IMR) dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, dan asumsi migrasi dengan indikator Age-Specific Net Migration rate (ASNMR) yang disusun berdasarkan umur serta jenis kelamin yang bersumber dari jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk 2020.

Hasil proyeksi penduduk Kabupaten Ngada tahun 2020-2035 yang diterbitkan BPS ini yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam melakukan proyeksi penduduk untuk tahun 2036-2045. Aplikasi yang digunakan untuk membantu proyeksi adalah Spectrum yang dikembangkan oleh Avenir Health. Proyeksi menggunakan aplikasi Spectrum ini akan menghasilkan proyeksi penduduk Kabupaten Ngada dari tahun 2025-2045 melalui modul DemProj (*Demography Project*) serta dampak-dampak yang dihasilkan dari pertumbuhan penduduk tersebut melalui modul RAPID (Resources for the Awareness of Population Impacts on Development). Hasil dari proyeksi penduduk ini yang akan digunakan sebagai basis bagi analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana

yang akan mengacu kepada standar-standar terkait yang telah ditetapkan oleh badan yang berwenang, dalam hal ini adalah Badan Standar Nasional melalui Standar Nasional Indonesia.

### 2.6.1.2 Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Proyeksi jumlah penduduk menghasilkan jumlah penduduk di Kabupaten Ngada pada tahun 2025, 2030, 2035, 2040, dan 2045. Secara umum, jumlah penduduk Kabupaten Ngada akan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2045. Hal ini berarti pertumbuhan penduduk akan terus berlangsung di Kabupaten Ngada sampai tahun 2045. Rincian hasil proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Ngada selama tahun 2025-2045 disajikan sebagai berikut:



**Gambar 2. 58 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Ngada (Ribuan Jiwa) Tahun 2025-2045**

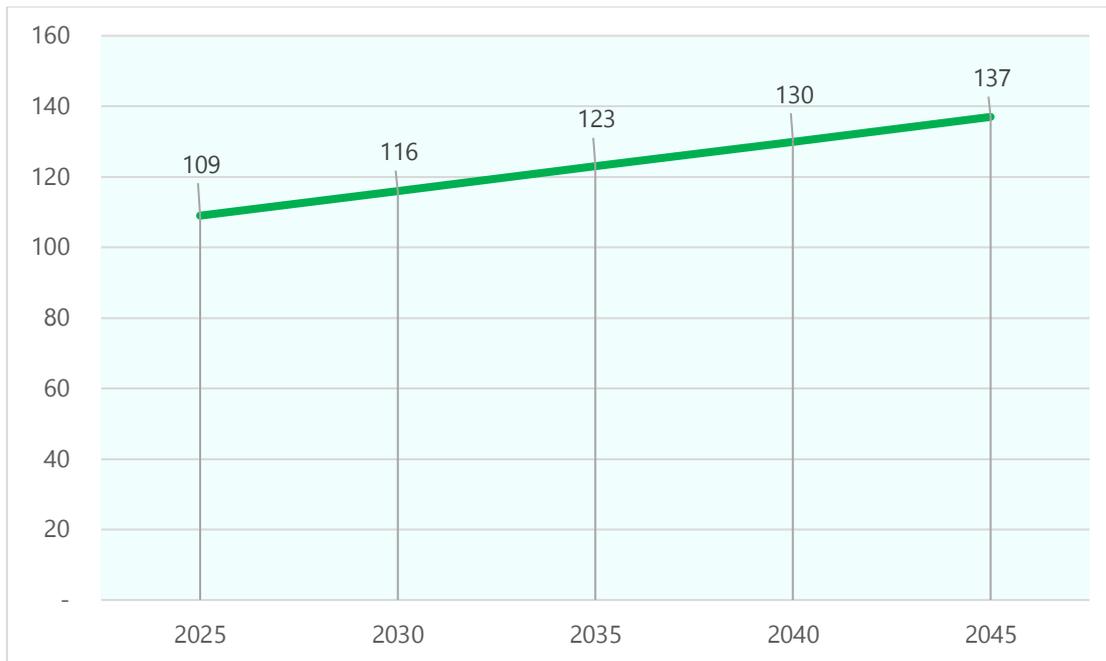
*Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi NTT 2020-2035 hasil sensus penduduk 2020; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020*

Proyeksi laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Ngada diprediksi akan berkisar pada angka 5 hingga 6 persen per tahunnya. Pertumbuhan penduduk yang pesat akan terkonsentrasi pada 10 tahun pertama sejak 2025 dan baru akan melandai pada tahun 2040. Hal ini mengindikasikan adanya potensi bonus

demografi di Kabupaten Ngada. Meningkatnya jumlah penduduk yang terjadi di Kabupaten Ngada akan memberikan dampak terhadap peningkatan kebutuhan lahan untuk permukiman, peningkatan pemanfaatan lahan, dan heterogenitas kegiatan penduduk yang tentunya akan berdampak lanjut terhadap kualitas jasa lingkungan.

Pertumbuhan penduduk yang terus berlanjut harus disikapi secara tepat, dengan merumuskan kebijakan yang tepat dalam peningkatan layanan fasilitas dasar maupun mengoptimalkan manajemen tata guna lahan melalui penataan ruang. Bonus demografi yang dikelola secara tepat akan berdampak pada peningkatan kualitas SDM Kabupaten Ngada yang secara otomatis akan berdampak juga pada seluruh sektor mulai dari perekonomian, tata ruang, lingkungan, hingga tata kelola pemerintahan.

Selain proyeksi jumlah penduduk, proyeksi kepadatan penduduk juga penting untuk dijadikan bahan acuan dalam membuat kebijakan. Hal ini bertujuan agar pemerintah menjadi sadar mengenai wilayah-wilayah mana saja dalam suatu kabupaten/kota yang memiliki penduduk lebih banyak dan lebih sedikit, sehingga intervensi kebijakan pun dapat dilakukan dengan tepat sasaran. Kepadatan penduduk berguna untuk merepresentasikan jumlah penduduk yang menempati sebuah ruang dalam satu luasan tertentu. Hal ini berguna untuk mengetahui perbandingan ketersediaan ruang dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Berikut disajikan proyeksi kepadatan penduduk Kabupaten Ngada tahun 2025-2045.



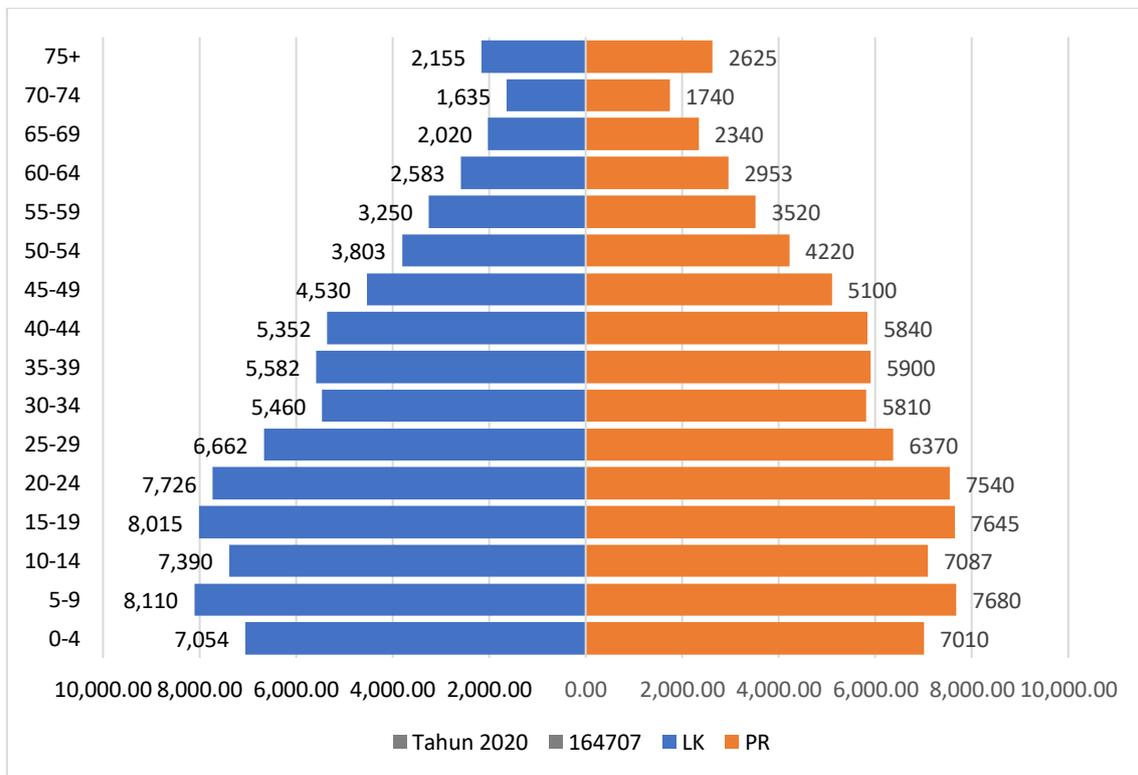
**Gambar 2. 59 Proyeksi Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km<sup>2</sup>) Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045**

*Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi NTT 2020-2035 hasil sensus penduduk 2020; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020*

Proyeksi kepadatan penduduk di Kabupaten Ngada terus mengalami peningkatan secara konstan sejak tahun 2025 hingga 2045. Tumbuhnya beberapa sektor industri secara pelan juga berpotensi menumbuhkan konsentrasi penduduk di Kabupaten Ngada. Pertumbuhan ekonomi tentu menjadi efek yang tidak dapat dipisahkan dari peningkatan kepadatan penduduk, yang kemudian menuntut kebutuhan lahan untuk permukiman. Meningkatnya kebutuhan lahan harus dapat diantisipasi melalui tata guna lahan yang bijak dan berkeadilan guna mencegah timbulnya dampak negatif terutama bagi kualitas lingkungan hidup. Kepadatan penduduk juga secara selaras akan berpengaruh pada kualitas lingkungan hidup, volume timbulan sampah, alih fungsi lahan, juga pencemaran lingkungan. Pengendalian dampak negatif terhadap lingkungan ini perlu dibarengi dengan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di berbagai daerah. Harapannya, semua usaha tersebut dapat mengontrol tingkat kepadatan penduduk serta mendorong meratanya persebaran penduduk di seluruh wilayah Kabupaten Ngada.

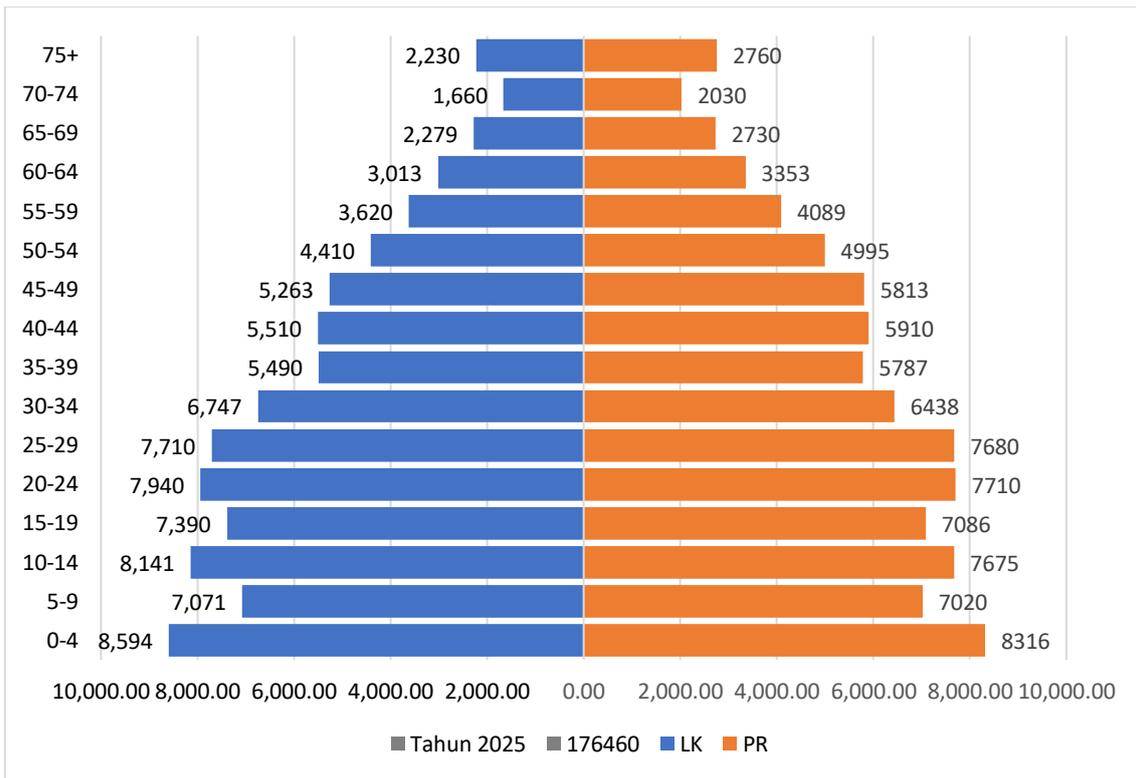
### 2.6.1.3 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Proyeksi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat digambarkan menggunakan piramida penduduk. Kategorisasi ini menjadi bagian dari komposisi penduduk yang bertujuan untuk mengelompokkan struktur penduduk suatu daerah berdasarkan kategori tertentu. Sub bab ini akan membahas komposisi penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin yang direpresentasikan oleh piramida penduduk. Model pertumbuhan penduduk direpresentasikan pada setiap kelompok umur dengan tujuan agar dapat diketahui perbandingan pergeseran jumlah penduduk pada setiap kelompok umur. Proyeksi perubahan piramida penduduk Kabupaten Ngada pada tahun 2025-2045 disajikan sebagai berikut:



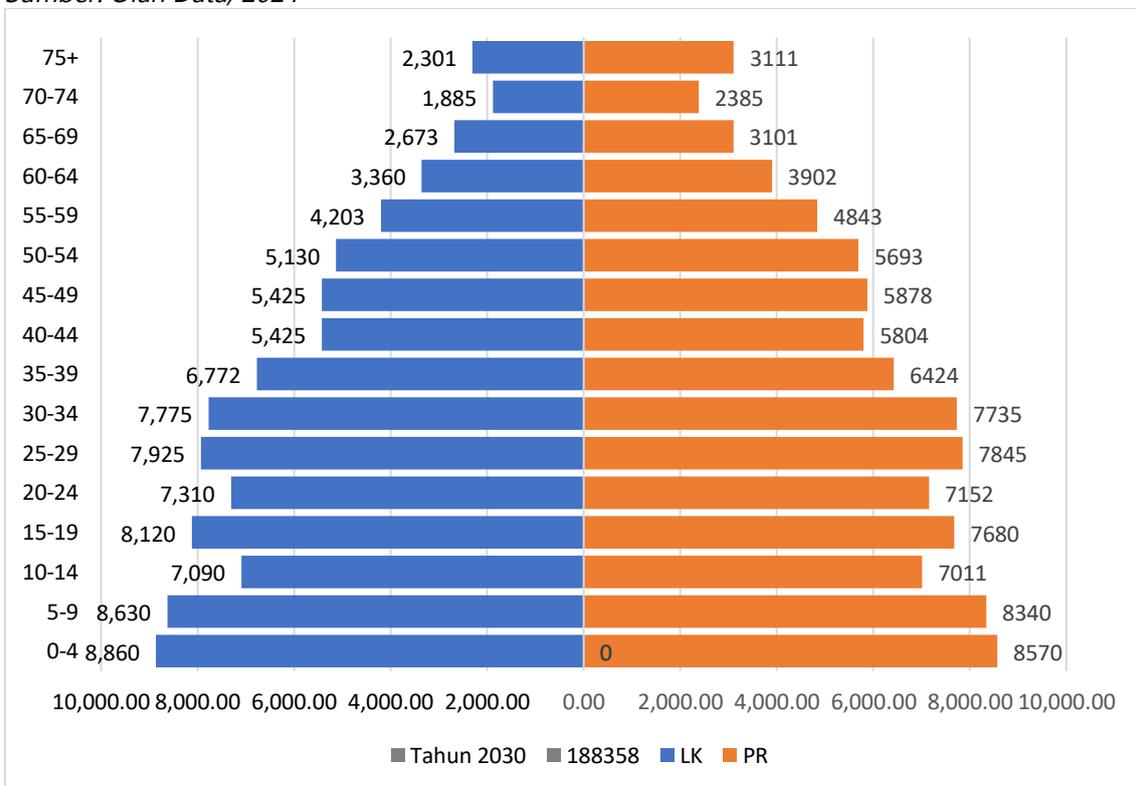
Gambar 2. 60 Piramida Penduduk Kabupaten Ngada Tahun 2020

Sumber: Olah Data, 2024



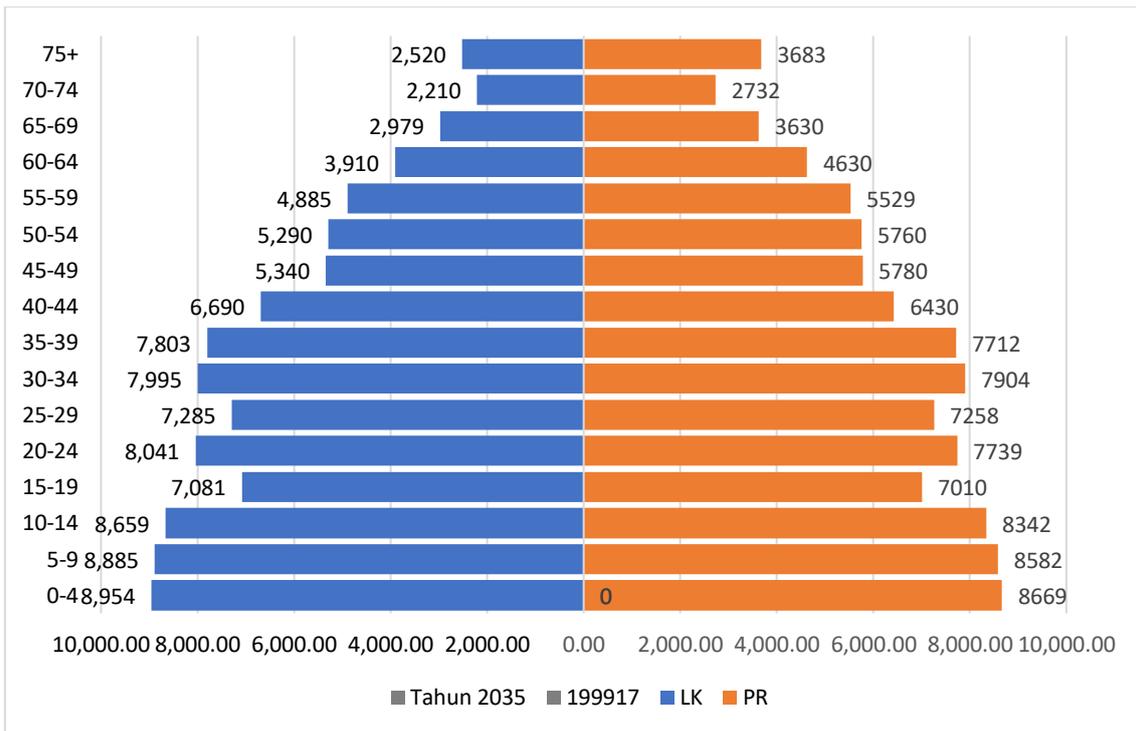
**Gambar 2. 61 Piramida Penduduk Kabupaten Ngada Tahun 2025**

Sumber: Olah Data, 2024



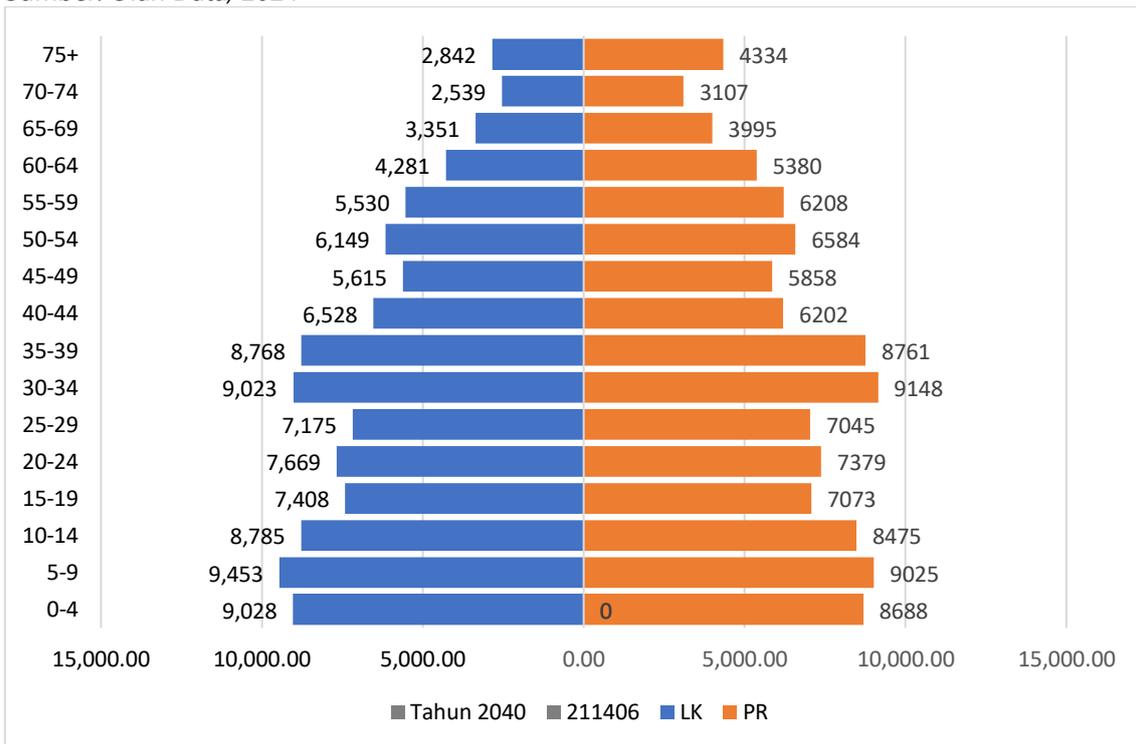
**Gambar 2. 62 Piramida Penduduk Kabupaten Ngada Tahun 2030**

Sumber: Olah Data, 2024



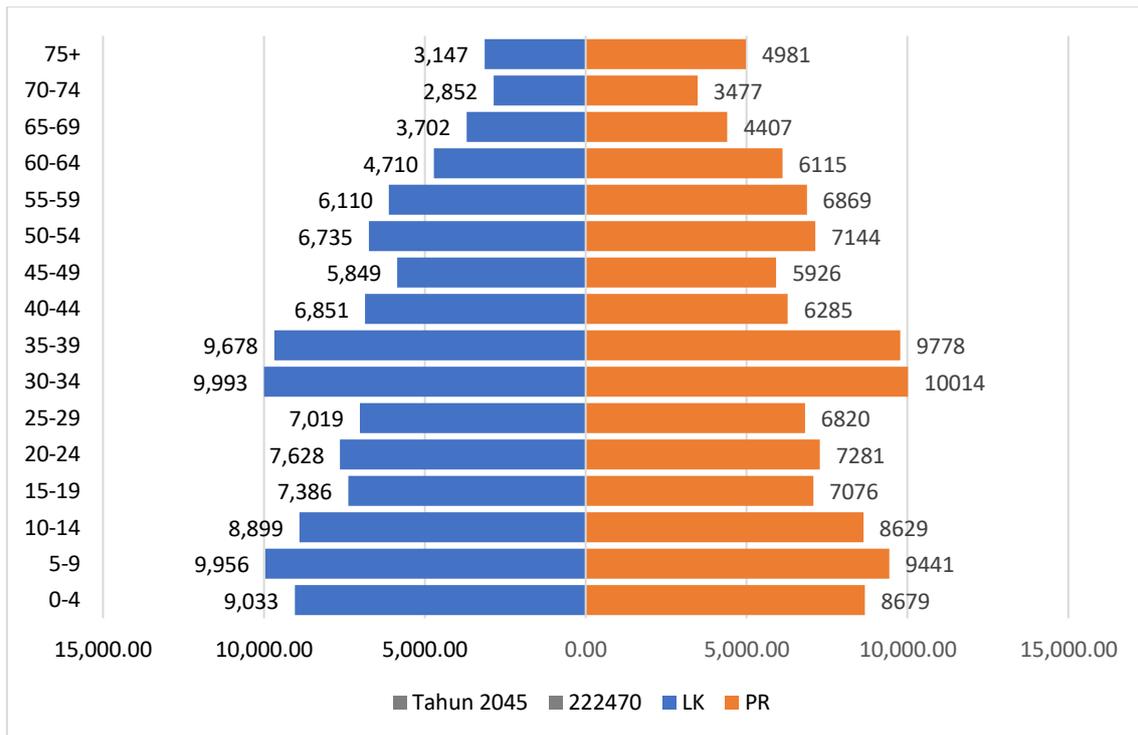
**Gambar 2. 63 Piramida Penduduk Kabupaten Ngada Tahun 2035**

Sumber: Olah Data, 2024



**Gambar 2. 64 Piramida Penduduk Kabupaten Ngada tahun 2040**

Sumber: Olah Data, 2024



**Gambar 2. 65 Piramida Penduduk Kabupaten Ngada Tahun 2045**

*Sumber: Olah Data, 2024*

Piramida penduduk Kabupaten Ngada pada tahun 2020 masih berbentuk piramida ekspansif atau piramida yang masih didominasi oleh penduduk dari kelompok umur yang muda. Kondisi ini menandakan tingkat kelahiran yang tinggi serta jumlah kelompok usia tua yang lebih rendah dibanding kelompok umur lainnya. Hingga tahun 2045, Piramida penduduk Kabupaten Ngada diproyeksi akan secara konsisten mengalami perubahan dan cenderung akan berbentuk piramida konstruktif pada tahun 2045, namun angka kelahiran masih cukup tinggi.

Perubahan bentuk piramida ini diproyeksi sebagai bagian dari dampak jumlah penduduk yang terus meningkat disertai dengan perbaikan fasilitas layanan kesehatan sehingga usia harapan hidup meningkat. Tentunya, kondisi dan proyeksi ini harus dapat diimbangi dengan pengambilan kebijakan yang tepat karena potensi SDM Kabupaten Ngada pada tahun 2045 didominasi oleh kelompok produktif, yaitu penduduk kelompok umur 30-39 tahun. Investasi di

bidang SDM harus makin gencar dilakukan dari sekarang sebagai bentuk persiapan menyambut bonus demografi yang akan datang.

#### 2.6.1.4 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Ngada berdasarkan umur penting dilakukan guna mengetahui klasifikasi penduduk berdasarkan kategorisasi umurnya, yakni umur 0-14 tahun, 15-64 tahun, dan 65 tahun keatas. Dengan pembagian berdasarkan tiga kategori tersebut, maka didapat pula pembagian penduduk berdasarkan tingkat produktivitasnya. Umur 0-14 berarti usia sekolah, 15-64 berarti usia produktif, dan umur 65 ke atas menandakan usia pensiun dan lansia. Berikut tabel proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Ngada berdasarkan usia produktif dan non produktif:

**Gambar 2. 66 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Produktif dan Non Produktif (ribu jiwa) Kabupaten Ngada**

Kelompok Umur	Tahun 2020	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Produktif dan Non Produktif (ribu jiwa) KABUPATEN NGADA				
		2025	2030	2035	2040	2045
Umur 0-14	44,33	46,82	48,50	52,09	53,45	54,64
Umur 15-64	107,86	115,95	124,40	130,07	137,78	145,27
Umur 65+	12,52	13,69	15,46	17,75	20,17	22,57
<b>Jumlah</b>	<b>164,71</b>	<b>176,46</b>	<b>188,36</b>	<b>199,92</b>	<b>211,41</b>	<b>222,47</b>

Sumber: Olah Data, 2024

Usia penduduk produktif di Kabupaten Ngada (15-64 Tahun) selalu mendominasi struktur kependudukan dengan rata-rata dari tahun 2020 hingga 2045 sebesar 65,46 persen. Proyeksi ini juga mengindikasikan bahwa usia kelahiran yang menurun secara konsisten hingga tahun 2045, tetapi angka kematian yang juga menurun. Sehingga, kondisi ini terbilang stabil dengan rata-rata jumlah penduduk umur 0-14 tahun dari rentang tahun 2020 hingga 2045 sebesar 25,85 persen. Cukup tingginya persentase proyeksi penduduk umur 0-14 tahun di Kabupaten Ngada menunjukkan bahwa masih akan ada bonus demografi yang akan datang pasca tahun 2045. Proyeksi usia lansia yang terus meningkat setiap tahunnya juga perlu diantisipasi Pemerintah Kabupaten Ngada

dengan pembuatan kebijakan perlindungan sosial yang lebih baik dan inklusif bagi lansia.

### 2.6.1.5 Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Sekolah

Angka proyeksi jumlah penduduk usia sekolah di Kabupaten Ngada berfungsi untuk mengetahui seberapa banyak jumlah penduduk usia sekolah mulai dari jenjang TK, SD/Sederajat, hingga SMP/Sederajat. Proyeksi ini dilakukan mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2045 yang berguna untuk membantu pemerintah Kabupaten Ngada merumuskan kebijakan yang inklusif dan tepat sasaran pada anak usia sekolah. Berikut rincian tabel proyeksi jumlah penduduk usia sekolah mulai dari TK, SD/Sederajat, dan SMP/Sederajat.

**Gambar 2. 67 Tabel Jumlah Proyeksi Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045**

Kecamatan	Proyeksi 2025			Proyeksi 2030			Proyeksi 2035			Proyeksi 2040			Proyeksi 2045		
	TK (Usia 4-6 tahun)	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat												
Kabupaten Ngada	8.865	18.250	8.912	10.528	18.130	9.178	10.585	20.951	9.267	10.975	21.767	9.749	11.312	22.752	9.604

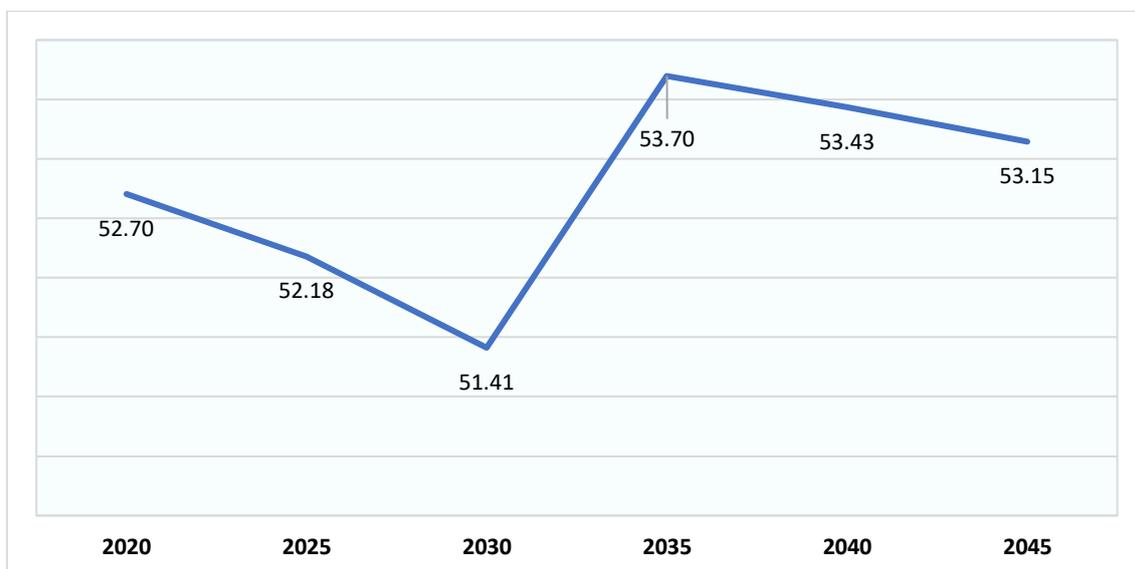
Sumber: Olah Data, 2024

Proyeksi jumlah penduduk usia sekolah mulai dari jenjang TK, SD/Sederajat, hingga SMP/Sederajat di Kabupaten Ngada selalu mengalami peningkatan secara konstan dari tahun 2025 hingga tahun 2045. Untuk penduduk usia TK mengalami jumlah paling banyak pada tahun 2045 dengan tingkat kenaikan sebesar 2.447 jiwa dari tahun 2025. Untuk penduduk usia SD mengalami pemuncakan jumlah pada akhir tahun proyeksi juga di 2045 dengan peningkatan sebesar 4.502 jiwa dari tahun 2020. Sedangkan untuk penduduk usia SMP memiliki jumlah terbanyak pada tahun 2040 dengan total proyeksi penduduk sebesar 9.749 jiwa. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwasanya secara umum jumlah anak usia sekolah di Kabupaten Ngada secara umum terus mengalami

peningkatan. Hal ini perlu direspons dengan pembuatan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan untuk menyiapkan SDM Kabupaten Ngada berdaya saing dan kompetitif menuju Indonesia emas 2045.

#### 2.6.1.6 Proyeksi Rasio Ketergantungan dan Bonus Demografi

Angka ketergantungan merupakan analisis tindak lanjut dari proyeksi kependudukan. Ketergantungan merupakan suatu kondisi dimana penduduk produktif menanggung penduduk yang tidak produktif. Sederhananya, rasio ketergantungan membandingkan 100 penduduk usia produktif dengan seberapa banyak jumlah penduduk usia tidak produktif yang harus ditanggung. Adapun rasio ketergantungan di Kabupaten Ngada dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



**Gambar 2. 68 Rasio Ketergantungan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2045**

*Sumber: Olah Data, 2024*

Rasio ketergantungan di Kabupaten Ngada diproyeksikan akan terus menurun dari tahun 2020 hingga tahun 2030. Hal ini disebabkan adanya bonus demografi sehingga jumlah penduduk usia produktif jauh lebih banyak ketimbang jumlah penduduk usia tidak produktif. Penurunan sejumlah 1,29 persen ini hanya bertahan hingga tahun 2030 dan langsung melonjak naik sebesar 2,29 persen pada tahun 2035. Kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian kelompok usia produktif sudah memasuki usia pensiun pada tahun

2035; tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan penduduk jumlah usia produktif dari penduduk usia 0-14 tahun.

Konsekuensi logis dari hal ini adalah beban penduduk usia produktif akan menjadi meningkat dan tinggi sehingga tentu akan berpengaruh terhadap perekonomian Kabupaten Ngada secara umum. Angka kebergantungan Kabupaten Ngada terus menurun hingga tahun 2045 sebesar 0,55 persen. Angka kebergantungan yang cukup tinggi ini perlu diintervensi melalui pengkajian kebijakan kependudukan yang bertujuan untuk menekan angka ketimpangan serta fokus pada kebijakan yang inklusif terhadap kelompok lansia seperti: akses kesehatan, insentif pensiun, jaring pengaman sosial, serta penanaman pola hidup yang sehat dan aktif guna memperpanjang usia harapan hidup yang baik dan berkualitas.

### **2.6.2 Analisis Kebutuhan Sarana Prasarana**

Sarana Prasarana adalah infrastruktur atau fasilitas yang digunakan dalam pembangunan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Kebutuhan sarana dalam pembangunan dapat sangat bervariasi tergantung pada jenis proyek pembangunan, tujuan, dan konteks geografis. Disajikannya identifikasi kebutuhan Sarana dan Prasarana tentunya juga mempertimbangkan kondisi di Kabupaten Ngada serta perkembangan isu global serta nasional yang memiliki pengaruh pada proyeksi ke depannya sehingga disampaikan bahwa proyeksi kebutuhan sarana prasarana memuat antara lain Kebutuhan Hunian, Air Bersih, Energi/Kelistrikan, Pengelolaan Persampahan, Infrastruktur Pendidikan, dan Infrastruktur Kesehatan. Hal ini juga memerlukan pemantauan dan penyesuaian berkelanjutan seiring berjalannya waktu untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Ngada secara efektif.

Proyeksi kebutuhan sarana prasarana dalam perencanaan jangka panjang Kabupaten Ngada merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan

infrastruktur dan pelayanan publik di Kabupaten Ngada tentunya dengan melalui proses yang kompleks dan membutuhkan kolaborasi yang erat antar berbagai pemangku kepentingan. Sarana dan prasarana yang baik dapat berdampak positif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.

### 2.6.2.1 Proyeksi Kebutuhan Rumah Tinggal

Proyeksi pertumbuhan penduduk Kabupaten Ngada tentu berimbang pada meningkatnya kebutuhan tempat tinggal dan perluasan lahan. Proyeksi kebutuhan tempat tinggal menggunakan asumsi rata-rata setiap rumah ditempati 5 (lima) jiwa yakni ayah, ibu, dan 3 anak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam SNI 03-1733-2004 tentang cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan

**Tabel 2. 54 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal di Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045**

Uraian	Kondisi Tahun 2020	Proyeksi Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	164.71	176.46	188.36	199.92	211.41	222.47
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (unit)	N/A	35,292	37,672	39,983	42,281	44,494

Sumber : Analisis Data, 2024

Kebutuhan akan tempat tinggal terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka diperkirakan pada tahun 2045, ketika jumlah penduduk mencapai 222.470 jiwa, kebutuhan rumah tinggal mencapai 44.494 unit. Perlu adanya respon akan peningkatan kebutuhan tempat tinggal masyarakat dengan pelaksanaan program yang memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan perumahan. Pemenuhan kebutuhan rumah juga merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah kekurangan perumahan (*backlog*) dan pertumbuhan kawasan kumuh. Kebutuhan tempat tinggal juga harus diimbangi dengan peningkatan fasilitas dasar yang sehat dan produktif dari aspek kebutuhan air bersih, sanitasi, sistem drainase, jalan lingkungan, persampahan, dan ruang komunal yang nyaman.

### 2.6.2.2 Proyeksi Timbulan Sampah

Perencanaan infrastruktur persampahan menjadi sangat penting jika dihadapkan pada proyeksi pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Timbulan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan gambaran buruk terhadap wajah suatu kawasan, selain itu juga dapat menurunkan kualitas lingkungan, mengurangi kenyamanan, dan dapat menjadi media penularan penyakit. Permasalahan sampah seharusnya dapat dikelola dengan baik dengan melibatkan lintas sektor, karena permasalahan sampah melibatkan dari hulu sampai hilir, dari masyarakat hingga ke pemerintah yang bertanggung jawab. Proyeksi terkait timbulan sampah di Kabupaten Ngada perlu dilakukan sebagai basis data perencanaan jangka panjang tentang pengelolaan persampahan yang tepat.

**Tabel 2. 55 Standar Acuan Timbulan Sampah**

Klasifikasi Kota	Jumlah Penduduk	Volume (L/Org/hari)	Berat (KG/Org/hari)
Kota Kecil	<100.000	2,75 - 3,00	0,60 – 0,75
Kota Sedang	100.000-500.000		
Kota Besar	500.000-1.000.000	3,00 - 3,60	0,65 – 0,80
Kota Metropolitan	>1.000.000		

*Sumber: SNI 8632-2018 tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan*

Proyeksi timbulan sampah di Kabupaten Ngada menggunakan standar acuan SNI 8632-2018 tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan. Proyeksi timbulan sampah menggunakan dasar hasil proyeksi jumlah penduduk dengan asumsi bahwa Kabupaten Ngada merupakan Kota Sedang karena pada data dasar tahun 2020 jumlah penduduk 164.710 jiwa sehingga setiap penduduk menghasilkan sampah kurang lebih 2,75-3 L/hari.

**Tabel 2. 56 Proyeksi Volume Timbunan Sampah Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045**

Kabupaten	Tahun 2025		Tahun 2030		Tahun 2035		Tahun 2040		Tahun 2045	
	Volume (Liter/hari)	Berat (Ton/hari)								
Kabupaten Ngada	529,380	132.35	565,074	141.27	599,751	149.94	634,218	158.55	667,410	166.85

*Sumber: Analisis Data, 2024*

Hasil proyeksi penduduk beserta timbulan sampah yang mungkin dihasilkan pada tahun 2025 hingga 2045, diketahui bahwa timbulan sampah di Kabupaten Ngada terus mengalami peningkatan seiring dengan penambahan jumlah penduduk setiap periodenya.

**Tabel 2. 57 Standar Kebutuhan Prasarana Persampahan**

Lingkup Prasarana	Prasarana			Keterangan	
	Sarana Pelengkap	Status	Dimensi		
Rumah (5 jiwa)	Tong sampah	<b>Pribadi</b>			
RW (2500 jiwa)	Gerobak sampah	<b>TPS</b>	2 m <sup>3</sup>	Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30m	Gerobak mengangkut 3x seminggu
	Bak sampah kecil		6 m <sup>3</sup>		
Kelurahan (30.000 jiwa)	Gerobak sampah	<b>TPS</b>	2 m <sup>3</sup>		Gerobak mengangkut 3x seminggu
	Bak sampah besar		12 m <sup>3</sup>		
Kecamatan (120.000 jiwa)	Mobil sampah	<b>TPS/TPA Lokal</b>	-	Mobil mengangkut 3x seminggu	
	Bak sampah besar		25 m <sup>3</sup>		
Kota (>480.000 jiwa)	Bak sampah besar	<b>TPA</b>			
	Tempat daur ulang sampah				

Sumber: SNI 19-2454-2002 tentang Tata cara teknik operasional pengolahan sampah perkotaan

Standar kebutuhan Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPAS) per-jumlah penduduk sesuai dengan SNI 19-2454-2002 adalah 1 (satu) unit TPA untuk lebih dari 480.000 penduduk. Namun, terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi jika akan membuka TPA baru, dari daya tampung yang memerlukan lahan cukup luas, sampai dengan jarak lokasi TPA dengan permukiman yang tidak boleh terlalu dekat. Sehingga, skenario yang lebih memungkinkan untuk dilakukan yakni memaksimalkan adanya TPS di setiap kecamatan yang melakukan pemilahan, sehingga meminimalisir penimbunan sampah ke TPA. Jika dilihat dari proyeksi penduduk di Kabupaten Ngada pada tahun 2045 adalah 222.470 jiwa, sehingga cukup menyediakan satu TPA di Kabupaten namun dilengkapi dengan

TPS per tiga atau 4 kecamatan untuk pemilahan, agar tidak semua timbunan sampah tertimbun di TPA.

### 2.6.2.3 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Proyeksi kebutuhan air bersih/minum ini diperhitungkan berdasarkan kebutuhan air per kapita, pertumbuhan dan pengembangan penduduk, serta pengklasifikasian jenis kebutuhan. Air bersih secara luas dibutuhkan untuk kebutuhan sanitasi, pertanian, dan kegiatan industri. Proyeksi kebutuhan air bersih membantu memproyeksikan tren kebutuhan air yang meningkat selaras dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan daerah. Proyeksi kebutuhan air bersih memperhatikan standar yang ditetapkan dalam SNI 6728.1-2015 tentang Penyusunan Neraca Spasial Sumber Daya Alam.

**Tabel 2. 58 Standar Kebutuhan Air Bersih**

<b>Air Bersih</b>	<b>Jumlah Jiwa Penduduk</b>	<b>Kebutuhan air Bersih (L/O/H)</b>
<b>Semi Urban</b>	3.000 - 20.000	60 - 90
<b>Kota Kecil</b>	20.000-100.000	90 - 110
<b>Kota Sedang</b>	100.000 - 500.000	110 - 125
<b>Kota Besar</b>	500.000-1.000.000	125 - 150
<b>Motropolitan</b>	>1.000.000	150 - 200

*Sumber: SNI: 6728.1-2015 tentang Penyusunan Neraca Spasial Sumber Daya Alam*

Kebutuhan air bersih yang terus meningkat perlu direspon dengan peningkatan pelayanan air bersih, menjaga kualitas air, dan melindungi daya dukung sumber daya air. Ketersediaan sumber air baku tergantung oleh kapasitas daya dukung sumberdaya air. Perlindungan kawasan sstem hidrologis menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan daya dukung sumberdaya air di Kabupaten Ngada. Pemanfaatan air juga perlu dikontrol dengan konsep keberlanjutan supaya tidak terjadi eksploitasi air secara berlebihan dan berujung pada kerusakan sistem hidrologis.

**Tabel 2. 59 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Ngada Tahun 2025 s/d 2045**

Kabupaten	TAHUN 2025		TAHUN 2030		TAHUN 2035		TAHUN 2040		TAHUN 2045	
	Jml Penduduk (Ribu jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (M3/hari)	Jml Penduduk (Ribu jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (M3/hari)	Jml Penduduk (Ribu jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (M3/hari)	Jml Penduduk (Ribu jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (M3/hari)	Jml Penduduk (Ribu jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (M3/hari)
Kabupaten Ngada	<b>176.46</b>	<b>19,411</b>	<b>188.36</b>	<b>20,719</b>	<b>199.92</b>	<b>21,991</b>	<b>211.41</b>	<b>23,255</b>	<b>222.47</b>	<b>24,472</b>

*Sumber: Analisis Data, 2024*

#### **2.6.2.4 Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik**

Energi listrik mendukung berlangsungnya berbagai kegiatan baik untuk keperluan domestik, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, maupun industri. Proyeksi kebutuhan energi listrik membantu dalam memperkirakan pasokan energi listrik yang diperlukan hasil dari dampak pertumbuhan penduduk. Proyeksi kebutuhan energi listrik mengacu pada standar Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur kelistrikan, perlu dilakukan perhitungan dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi/kelistrikan. Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan energi listrik yang memadai bagi masyarakat.

Perhitungan proyeksi kebutuhan energi/kelistrikan perlu memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, jumlah rumah tangga, dan tingkat konsumsi energi listrik per kapita. Peningkatan kebutuhan listrik menandakan semakin besarnya sumber daya yang dibutuhkan sebagai pembangkit energi listrik di Kabupaten Ngada. Diharapkan di masa depan, kebutuhan Listrik dipasok oleh sumber energi bersih dan ramah lingkungan. Konsumsi energi Listrik daerah juga perlu dikontrol dengan inovasi pembangunan yang mengedepankan efisiensi penggunaan energi untuk menghemat cadangan pasokan energi daerah.

**Tabel 2. 60 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Ngada Tahun 2025 s/d 2045**

KABUPATEN	TAHUN 2025		TAHUN 2030		TAHUN 2035		TAHUN 2040		TAHUN 2045	
	Jml Penduduk (Ribu jiwa)	MWh								
Kabupaten Ngada	115.52	161,725.2	122.07	170,898.0	128.05	179,268.6	133.06	186,282.6	136.68	191,353.4

*Sumber: Analisis Data, 2024*

### 2.6.2.5 Proyeksi Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau

Keberadaan ruang terbuka hijau berfungsi untuk mengatur kualitas udara, limpasan air permukaan, dan *cooling area* pada kawasan perkotaan, sekaligus berfungsi sebagai ruang komunal bagi masyarakat. Penghitungan proyeksi ruang terbuka hijau untuk unit RT dan unit RW didasarkan pada SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

**Tabel 2. 61 Proyeksi Kebutuhan Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga di Kabupaten Ngada Tahun 2025 - 2045**

Uraian	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olah Raga				
	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	176.46	188.36	199.92	211.41	222.47
Proyeksi Sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga					
1. Taman untuk unit RT (unit)	706	753	800	846	890
2. Taman untuk unit RW (unit)	71	75	80	85	89
3. Taman dan lapangan olah raga untuk unit Kelurahan (unit)	6	6	7	7	7
4. Taman dan lapangan olah raga untuk unit Kecamatan (unit)	1	2	2	2	2
5. Kuburan/TPU (unit)	1	2	2	2	2

Sumber: Analisis Data, 2024

Proyeksi jumlah ruang terbuka hijau bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk, jumlah taman yang dibutuhkan pada tahun 2045 ketika jumlah penduduk diperkirakan mencapai 222.470 jiwa, kebutuhan taman pada tingkat RT adalah 890 dan pada tingkat RW membutuhkan 89 unit. Pemenuhan sarana ruang terbuka hijau harus diimbangi dengan fasilitas yang aman dan inklusif agar seluruh masyarakat dapat memanfaatkannya secara nyaman dan produktif. Selain RTH, kebutuhan ruang komunal masyarakat yang perlu

diakomodir adalah sarana taman dan lapangan olah raga pada tingkat kelurahan dan kecamatan. Kebutuhan sarana lapangan olah raga pada tahun 2045 sebanyak 7 unit. Kemudian setingkat kecamatan dibutuhkan 2 unit sarana olahraga. Kepadatan penduduk yang terus meningkat mempengaruhi kebutuhan akan lahan pemakaman umum atau TPU. Proyeksi kebutuhan sarana TPU diasumsikan untuk menyediakan lahan bagi kepentingan pemakaman. Kebutuhan sarana TPU pada tahun 2045 sebanyak 2 unit.

### **2.6.3 Proyeksi Kebutuhan Guru dan Fasilitas Pendidikan**

Proyeksi jumlah murid menurut jenjang pendidikan didasarkan pada hasil proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Ngada tahun 2025-2045 dengan asumsi Angka Partisipasi Kasar mencapai 100 persen. Jumlah murid pada jenjang TK didasarkan pada proyeksi jumlah penduduk usia 4 hingga 6 tahun pada tahun berkenaan; jumlah murid pada jenjang SD didasarkan pada proyeksi jumlah penduduk pada usia 7 hingga 12 tahun; dan jumlah murid pada jenjang SMP didasarkan pada proyeksi jumlah penduduk usia 13 hingga 15 tahun.

**Tabel 2. 62 Proyeksi Kebutuhan Guru dan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045**

No	Proyeksi Kebutuhan	Proyeksi 2025			Proyeksi 2030			Proyeksi 2035			Proyeksi 2040			Proyeksi 2045		
		TK (Usia 4-6)	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	TK (Usia 4-6)	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	TK (Usia 4-6)	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	TK (Usia 4-6)	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	TK (Usia 4-6)	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat
1	Jumlah Siswa/Murid	8,865	18,250	8,912	10,528	18,130	9,178	10,585	20,951	9,267	10,975	21,767	9,749	11,312	22,752	9,604
2	Jumlah Guru	591	652	279	702	648	287	706	748	290	732	777	305	754	813	300
3	Jumlah Sekolah (Unit)	98	109	31	117	108	32	118	125	32	122	130	34	126	135	33

Sumber: Analisis Data, 2024

Proyeksi kebutuhan jumlah gedung sekolah selaras dengan tren jumlah murid yakni terjadi tren peningkatan pada jenjang SD dan SMP serta tren menurun pada jenjang TK/PAUD. Namun demikian proyeksi jumlah kebutuhan gedung sekolah perlu dianalisis lebih lanjut dengan memperhatikan jarak serta kondisi gedung sekolah eksisting. Peningkatan kebutuhan jumlah gedung sekolah berdasarkan hasil proyeksi ini tidak selalu harus direspon dengan pembangunan gedung sekolah baru namun juga dapat direspon dengan menambah jumlah ruang kelas atau penyesuaian rombongan belajar.

#### 2.6.4 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Upaya membentuk sumber daya manusia yang berkualitas salah satunya dengan meningkatkan derajat kesehatan hidup masyarakat dengan menjamin hak yang sama untuk semua penduduk dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Untuk memenuhi akses pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat yang diproyeksi bertambah setiap tahunnya, diperlukan rencana proyeksi kebutuhan infrastruktur kesehatan.

**Tabel 2. 63 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045**

No	Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
1	Tempat Tidur RS (unit)	176	188	200	211	222
2	Puskesmas/Pustu (unit)	12	12	12	12	12
3	Posyandu (unit)	141	151	160	169	178
4	BKIA/Klinik Bersalin (unit)	6	6	7	7	7
5	Apotik/Rumah Obat (unit)	6	6	7	7	7
6	Tempat Praktek Dokter	35	38	40	42	44
7	Dokter (orang)	176	188	200	211	222
8	Perawat (orang)	424	452	480	507	534

*Sumber: Analisis Data, 2024*

##### a. Rumah Sakit

Rasio antara jumlah daya tampung rumah sakit dengan jumlah penduduk sebesar 1:1.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk, pada tahun 2025 jumlah tempat tidur rumah sakit yang dibutuhkan mencapai 176 unit. Kebutuhan tempat tidur rumah sakit diproyeksikan terus meningkat seiring dengan

pertambahan jumlah penduduk. Hingga pada tahun 2045 dibutuhkan sekitar 222 unit. Penambahan fasilitas ini sangat penting untuk memastikan kualitas layanan rumah sakit terutama untuk layanan rawat inap dapat memenuhi kebutuhan pasien.

b. Puskesmas

Perhitungan kebutuhan Puskesmas perlu memperhatikan pertumbuhan dan sebaran penduduk, jika merujuk pada proyeksi pertumbuhan penduduk, dibutuhkan sekitar 12 puskesmas/pustu pada tahun 2025 hingga tahun 2024, sesuai dengan kebutuhan penduduk. Hasil proyeksi ini mempertimbangkan hasil proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Ngada dan standar rasio puskesmas/pustu yakni 1:30.000 jumlah penduduk serta setiap kecamatan minimal harus memiliki satu puskesmas.

c. Posyandu

Proyeksi mengenai kebutuhan posyandu dilakukan dengan mempertimbangkan hasil proyeksi jumlah penduduk dan SNI 03-1733-2004 yang mensyaratkan Rasio Posyandu 1:1.250 penduduk. Jumlah kebutuhan posyandu diproyeksikan terus meningkat selama kurun waktu 2025-2045. Pada tahun 2025 jumlah posyandu yang dibutuhkan mencapai 141 unit. Hingga pada tahun 2045, kebutuhan posyandu diprediksi mencapai 178 unit

d. BKIA/Klinik Bersalin

Proyeksi BKIA (Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak)/ klinik bersalin didasarkan pada hasil proyeksi jumlah penduduk dan SNI 03-1733-2004 Rasio BKIA/Klinik Bersalin 1:30.000 penduduk. Dalam kurun waktu 2025-2045 kebutuhan klinik bersalin terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2025 jumlah kebutuhan klinik bersalin mencapai 6 unit dan bertambah 1 kebutuhan pada tahun 2045 menjadi 7 unit.

e. Apotik/Rumah Obat

Proyeksi jumlah apotik/rumah obat dilakukan dengan merujuk data hasil proyeksi jumlah penduduk dan SNI 03-1733-2004 Rasio Apotik/Rumah Obat 1:30.000 penduduk. Pada tahun 2025 jumlah kebutuhan apotik/rumah obat mencapai 6 unit dan bertambah 1 kebutuhan pada tahun 2045 menjadi 7 unit.

f. Tempat Praktek Dokter

Tempat praktek dokter diproyeksi dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah penduduk dan SNI 03-1733-2004 Rasio Tempat Praktek Dokter 1:5.000 penduduk. Pada tahun 2025, kebutuhan jumlah tempat praktek dokter mencapai 35 unit dan diproyeksi terus meningkat mencapai 44 unit pada tahun 2045.

g. Dokter

Kebutuhan jumlah dokter diproyeksi dengan mempertimbangkan hasil proyeksi jumlah penduduk dan standar rasio 1 dokter untuk 1.000 penduduk. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah dokter yang dibutuhkan pada tahun 2025 mencapai 176 orang dan diproyeksi terus meningkat hingga tahun 2045 mencapai 222 orang.

h. Perawat

Proyeksi mengenai kebutuhan jumlah perawat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil proyeksi jumlah penduduk dan standar rasio jumlah perawat yakni 2,4 perawat untuk 1.000 penduduk. Kebutuhan jumlah perawat diproyeksi mencapai 424 orang pada tahun 2025 dan terus meningkat hingga tahun 2045 mencapai 534 orang.

## **2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah**

### **2.7.1 Pengembangan Produk Unggulan Pertanian**

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Ngada. Tingginya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah didorong oleh produksi sejumlah produk unggulan daerah yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan di dalam dan luar daerah. Produk pertanian tersebut di antaranya adalah kopi, jahe, tanaman hortikultura, kelapa, kemiri, dan bambu. Selain hasil pertanian, Kabupaten Ngada juga memiliki produk unggulan berupa kerajinan tenun. Tenun Ikat Ngada merupakan sebuah produk budaya yang telah memiliki Sertifikat Indikasi Geografis (SIG) dan diakui tidak hanya di Indonesia tetapi juga telah diakui oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO).

Untuk mendorong perekonomian daerah yang lebih maju dan tumbuh tinggi, peningkatan nilai tambah produk-produk unggulan perlu dilakukan melalui proses hilirisasi. Sejalan dengan agenda pengembangan industri dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Ngada Tahun 2021-2040, pengembangan industri diprioritaskan pada pengembangan produk berikut ini:

1. Kerajinan tenun;
2. Industri pengolahan kopi;
3. Anyaman bambu;
4. Industri pengolahan jahe; dan
5. Industri minuman tradisional dari lontar.

Pengembangan industri dilakukan dengan melakukan pengembangan perwilayahan industri yakni melalui pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Sentra Industri Kecil Menengah (Sentra IKM). Pengembangan Sentra IKM di Kabupaten Ngada tidak hanya diarahkan sebagai tempat pengolahan saja tetapi juga sebagai *showroom* untuk memamerkan, memasarkan, dan menjual produk. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pengembangan Sentra IKM juga diarahkan pada pengembangan desa wisata industri.

**Tabel 2. 64 Rencana Desa Wisata Industri Pengolahan Kabupaten Ngada**

No	Industri Unggulan	Kecamatan	Desa Wisata
1	Kerajinan Tenun Ikat/ Tenun Songket	Bajawa	Wisata edukasi pembuatan tenun, mulai dari proses pembuatan, pewarnaan, dan finishing
2	Industri Pengolahan Kopi	Bajawa	Agrowisata kopi yang memungkinkan bagi wisatawan dapat memanen kopi langsung dari kebun dan juga melihat langsung proses pengolahan kopi dari biji hingga menjadi bubuk kopi
3	Anyaman Bambu	Golewa Barat	Wisata edukasi pembuatan anyaman bambu, mulai dari proses pemilihan bambu yang baik, penganyaman, dan finishing
4	Industri Pengolahan Jahe	Bajawa	Agrowisata jahe yang memungkinkan bagi wisatawan dapat memanen jahe langsung dari kebun dan juga melihat langsung proses pengolahan jahe menjadi serbuk minuman
5	Industri Minuman Tradisional	Aimire	Agrowisata lontar yang memungkinkan bagi wisatawan dapat melihat proses pengambilan sari pati lontar dan juga melihat langsung proses pengolahannya menjadi arak

Sumber: Dokumen RPIK Kab. Ngada Tahun 2021-2040

Pengembangan desa wisata industri diharapkan dapat mendorong kinerja industri pengolahan dan pariwisata daerah. Peningkatan kinerja kedua sektor tersebut akan mendorong kenaikan kontribusi terhadap perekonomian yang diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada ke depannya. Pengembangan industri tersebut tidak hanya terbatas pada pemenuhan permintaan di dalam daerah saja tetapi juga untuk memenuhi

permintaan dari luar daerah, baik permintaan global maupun secara khusus dalam mendukung pemenuhan kebutuhan wisatawan di Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo. Peningkatan produksi dan nilai tambah produk unggulan lainnya juga dilakukan pada komoditas hortikultura, kelapa, dan kemiri. Seperti halnya pengembangan industri, peningkatan produksi komoditas unggulan juga ditujukan untuk memenuhi permintaan dari luar daerah, khususnya DPP Labuan Bajo.

### **2.7.2 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah dalam Mendukung NTT sebagai “Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara”**

RPJPN 2025-2045 menetapkan wilayah Bali dan Nusa Tenggara dalam koridor ekonomi *Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional*. Kabupaten Ngada memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi NTT, secara khusus di Pulau Flores. Pembangunan pariwisata diarahkan pada upaya meningkatkan koneksi dan integrasi antar destinasi wisata di Pulau Flores serta peningkatan diversifikasi komoditas unggulan daerah.

Berbagai potensi wisata di Kabupaten Ngada telah terakomodasi ke dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Ngada. Selain itu, dalam PP 50 tahun 2011 Rencana Induk Pariwisata Nasional 2010-2025, Bajawa dan sekitarnya ditetapkan menjadi KPPN yang merupakan bagian dari DPPN Kelimutu-Maumere.



**Gambar 2. 69** Peta Destinasi Pariwisata Nasional Kelimutu-Maumere

Sumber: PP 50 tahun 2011 Rencana Induk Pariwisata Nasional 2010-2025

Jika dilihat dari sisi konektivitas, akses menuju Kabupaten Ngada telah semakin mudah dengan adanya Bandara Soa yang telah memiliki rute penerbangan Soa-Labuan Bajo dan Soa-Kupang. Lebih dari itu, adanya jalur trans flores yang membentang sejauh 664 kilometer dari Labuan Bajo di Manggarai Barat, sampai Larantuka di Flores Timur juga telah mempermudah koneksi antar destinasi pariwisata. Melalui jalur ini, wisatawan dapat melakukan wisata jelajah di pulau Flores melalui jalur darat.

Di samping konektivitas wilayah yang semakin mudah, pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas juga menjadi peluang yang harus dimanfaatkan Kabupaten Ngada dalam mengembangkan sektor pariwisata. Peningkatan diversifikasi destinasi dan daya tarik wisata menjadi agenda penting untuk dapat menarik wisatawan Labuan Bajo melanjutkan perjalanan wisata ke Kabupaten Ngada.

Peran Kabupaten Ngada dalam meningkatkan koneksi dan integrasi pariwisata di Pulau Flores tidak hanya diarahkan pada peningkatan koneksi dari sisi destinasi pariwisata, potensi pertanian yang dimiliki Kabupaten Ngada juga dapat dikembangkan untuk mendukung kebutuhan pangan destinasi pariwisata super prioritas. Upaya ini dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas komoditas unggulan pertanian dan industri kreatif seperti kopi, jahe, hortikultura, kelapa, kemiri, kopi dan bambu.

### **2.7.3 Pengembangan Kawasan Strategis Berdasarkan RTRW Kabupaten Ngada**

Kawasan strategis di Kabupaten Ngada, merupakan wilayah yang dianggap perlu diperhatikan dalam pengembangan kawasan, penanganan masalah, serta memerlukan dukungan penataan ruang dan pembangunan sesegera mungkin dalam kurun waktu perencanaan yang ditetapkan. Rencana kawasan strategis merupakan bagian implementasi dari rencana tata ruang yang lebih detail dan terinci, sehingga dapat berfungsi sesuai dengan apa yang diemban oleh masing-masing kawasan tersebut. Penentuan kawasan strategis di Kabupaten Ngada ditetapkan berdasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain:

- a. Pengembangannya tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga mempunyai pengaruh terhadap wilayah yang lebih luas (provinsi bahkan nasional).
- b. Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan tersebut akan membutuhkan lahan dalam skala besar.
- c. Pengembangannya mempunyai prospek ekonomi yang cerah.
- d. Pengembangannya dapat memacu perkembangan wilayah yang miskin dan terbelakang.
- e. Adanya minat dan kecenderungan investasi swasta dan pemerintah yang cukup tinggi.

Berdasarkan analisis dari berbagai sektor, kondisi ekonomi Kabupaten Ngada adalah salah satu sektor dengan peranan tertinggi dan merupakan sektor basis atau unggulan adalah sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Demikian pula dengan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Ngada yang sebagian besar adalah pekerja pada sektor pertanian dan perikanan. Terlebih lagi adanya kondisi geografis pesisir dan sebagian besar lahan cocok untuk pengembangan sektor tersebut. Untuk itu pengembangan kawasan strategis kedepannya tidak jauh dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi khususnya terkait dengan *leading* sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat mendorong perkembangan ekonomi dan pembangunan wilayah. Selain itu perkotaan yang maju dan berkembang di Kabupaten Ngada juga merupakan kawasan strategis yang perlu diarahkan guna meningkatkan pelayanan beberapa kecamatan.

#### **2.7.3.1 Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**

Kawasan ekonomi potensial berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan di sekitarnya dan dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang. Kawasan tersebut ditentukan berdasarkan potensi yang ada, serta memiliki aglomerasi terhadap pusat permukiman perkotaan dan pusat-pusat kegiatan dengan pertimbangan dapat memberikan dampak perkembangan pada suatu wilayah. Kawasan strategis Kabupaten Ngada dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:

1. Kawasan Pariwisata Pesisir Riung di Kecamatan Riung;
2. Kawasan Cepat Tumbuh Soa terdapat di Kecamatan Soa;
3. Kawasan Cepat Tumbuh Aimere terdapat di Kecamatan Aimere;
4. Kawasan Agrowisata Kopi Arabika terdapat di Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, dan Kecamatan Bajawa.

### **2.7.3.2 Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Sosial Budaya**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya di Kabupaten Ngada berupa situs-situs masa lalu yang terdapat di wilayah Kabupaten Ngada. Kawasan strategis yang dimaksud adalah Kawasan Lokasi Fosil Matamenge di Kecamatan Soa.

Pada kawasan strategis sosial budaya diperlukan pembatasan penggunaan lahan yang lainnya, sehingga diharapkan upaya pelestarian kawasan cagar budaya dapat diterapkan. Rencana kawasan strategis sosial budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi:

- Pada kawasan sekitar cagar budaya harus di konservasi untuk kelestarian dan keserasian benda cagar budaya, berupa pembatasan pembangunan, pembatasan ketinggian, dan menjadikan benda cagar budaya tetap terlihat dari berbagai sudut pandang;
- Cagar budaya juga memiliki nilai wisata dan penelitian/pendidikan, sehingga diperlukan pengembangan jalur wisata yang menjadikan lokasi benda cagar budaya sebagai salah satu obyek wisata yang menarik dan menjadi salah satu tujuan atau obyek penelitian Budaya dan tujuan pendidikan dasar-menengah;
- Benda cagar budaya berupa bangunan yang fungsional, seperti: perumahan dan berbagai bangunan peninggalan Belanda (yang ada disekitar bandar udara) harus di konservasi dan di rehabilitasi untuk bangunan yang sudah mulai rusak;
- Penerapan sistem insentif bagi bangunan yang dilestarikan dan pemberlakuan sistem disinsentif bagi bangunan yang mengalami perubahan fungsi.



**Gambar 2. 70 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Ngada**  
*Sumber: Laporan Rencana Revisi RTRW Kabupaten Ngada 2023-2042*

# BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

### 3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan pernyataan kondisi atau realita yang disimpulkan berdasarkan kesenjangan antara capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya. Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Ngada didasarkan pada hasil identifikasi gambaran umum kondisi daerah yang telah dijabarkan dalam Bab II. Berikut adalah identifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Ngada yang perlu mendapatkan perhatian selama pembangunan 20 tahun mendatang.

#### 3.1.1 Permasalahan Ekonomi

Permasalahan Pembangunan jangka panjang yang dihadapi oleh Kabupaten Ngada dalam bidang ekonomi adalah aktivitas ekonomi masyarakat di daerah belum memberikan nilai tambah yang tinggi. Kondisi ini dapat dilihat dari nilai PDRB yang cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan 11 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ngada, yang digambarkan melalui PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, indeks gini, dan tingkat pengangguran terbuka, masih tergolong rendah. Hal tersebut mengindikasikan kegiatan ekonomi daerah belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Permasalahan ekonomi lainnya yang juga dihadapi oleh Kabupaten Ngada adalah pembangunan ekonomi yang belum berkelanjutan di mana kegiatan ekonomi masih berjalan secara tradisional dan bersifat ekstraktif. Berikut adalah rincian

masalah pembangunan dan penyebab masalah pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi.

**Tabel 3. 1 Permasalahan Ekonomi di Kabupaten Ngada**

No.	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
1.	Perekonomian daerah yang masih bernilai tambah rendah dan belum menyejahterakan	Dominasi sektor pertanian yang tidak diikuti dengan peningkatan nilai tambah
		Kegiatan hilirisasi yang belum berjalan dengan optimal
		Iklim investasi belum kondusif
		Belum optimalnya <i>link and match</i> pencari kerja dengan permintaan tenaga kerja
		Pengembangan pariwisata belum optimal
2.	Pembangunan ekonomi yang belum berkelanjutan	Belum optimalnya keberlanjutan sistem pangan
		Belum optimalnya penerapan ekonomi hijau dan biru

### 3.1.2 Permasalahan Sosial dan SDM

Permasalahan pembangunan jangka panjang pada rumpun sosial dan Sumber Daya Manusia yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Ngada adalah terkait Sumber Daya Manusia yang produktif dan berdaya saing serta perlindungan sosial yang adaptif. Terdapat beberapa faktor utama yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan SDM di Kabupaten Ngada diantaranya berkaitan dengan pemenuhan akses dan kualitas pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar serta pembangunan dan perlindungan sosial yang adaptif. Secara lebih detail, permasalahan pada rumpun sosial dan SDM adalah sebagai berikut.

**Tabel 3. 2 Permasalahan Sosial dan SDM di Kabupaten Ngada**

No.	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
1	Pemenuhan akses dan kualitas pendidikan belum optimal	Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang memadai belum merata
		Belum optimalnya kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan

No.	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
		Belum optimalnya penguatan pendidikan karakter pada anak
		Belum optimalnya peran keluarga dalam membentuk karakter anak
2	Belum meratanya pelayanan kesehatan yang berkualitas	Akses layanan kesehatan yang berkualitas masih belum merata
		Pemenuhanan <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) masih perlu ditingkatkan baik secara data maupun kondisi di lapangan
		Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB) perlu ditekan ke angka yang paling minimal
		Penanganan prevalensi stunting perlu ditingkatkan
		Belum optimalnya gerakan PHBS
		Jumlah tenaga medis dan non medis masih belum memenuhi standar
3	Belum optimalnya perlindungan Sosial yang adaptif	Masih tingginya pernikahan dini/anak
		Masih tingginya angka PPKS khususnya ODGJ, orang terlantar, lansia dan anak yang bermasalah dengan hukum, pengemis
		Belum memiliki layanan rumah singgah dan penampungan yang representatif
		Pemenuhan ruang dan hak anak masih belum optimal
		Pemberdayaan dan bantuan sosial masih belum tepat sasaran

### 3.1.3 Permasalahan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan merupakan kebutuhan mendesak sebagai kerangka pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian, menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah dengan tidak mengorbankan generasi yang akan datang. Melalui pendekatan tersebut, diperlukan pengelolaan lingkungan yang kolaboratif, terintegrasi dan terpadu dari hulu ke hilir baik dalam

upaya penguatan perencanaan perubahan iklim, konservasi sumber daya alam, dan pengelolaan persampahan.

**Tabel 3. 3 Permasalahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Ngada**

No.	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
1	Belum terwujudnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Belum optimalnya konservasi sumber daya alam
		Adanya potensi pencemaran dan degradasi lingkungan
		Belum optimalnya adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim sebagai basis perencanaan
2.	Belum optimalnya pengelolaan persampahan	Belum optimalnya pengelolaan sampah di TPA dan TPS
		Belum terlaksananya pengelolaan sampah 3R
		Belum adanya kelompok masyarakat pengelola persampahan
		Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah
		Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah

### 3.1.4 Permasalahan Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur yang memadai, merata, dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian, menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah. Pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi tantangan Kabupaten Ngada untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 3. 4 Permasalahan Infrastruktur di Kabupaten Ngada**

No.	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
1	Rendahnya kualitas infrastruktur dasar permukiman	Belum optimalnya ketersediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
		Belum optimalnya ketersediaan utilitas lingkungan permukiman (drainase, sanitasi komunal)
2.		Belum optimalnya kualitas konstruksi jalan beserta utilitasnya

No.	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
	Belum terwujudnya konektivitas antar wilayah dan kualitas jaringan jalan	Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi jalan beserta utilitasnya Kurangnya fasilitas transportasi umum penghubung pusat-pusat pertumbuhan
3.	Belum optimalnya pemanfaatan sumber air baku	Banyaknya sumber air tanah yang belum dimanfaatkan Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan SPAM Luasan lahan pertanian yang belum terfasilitasi jaringan irigasi
4.	Belum optimalnya penyelenggaraan penataan & pemanfaatan ruang	Tingginya potensi alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan Belum optimalnya kualitas bangunan Belum optimalnya tindak lanjut terhadap penyimpangan peraturan tata ruang

### 3.1.5 Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

Transformasi tata kelola pemerintahan sangat urgen di tengah tingginya tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Bidang ini berfungsi sebagai landasan dalam pembangunan daerah terutama merespon kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Hasil analisis data bidang tata kelola menunjukkan terdapat dua permasalahan mendasar di Kabupaten Ngada, yaitu penerapan reformasi birokrasi belum optimal dan kualitas pelayanan publik belum optimal. Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3. 5 Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Ngada**

No.	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
1.	Belum optimalnya penerapan reformasi birokrasi	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja tata kelola pemerintah daerah Belum optimalnya penguatan integritas kelembagaan dan aparatur Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik belum optimal
2.	Belum optimalnya kualitas pelayanan masyarakat	Digitalisasi pelayanan publik belum optimal

### 3.2 Isu Strategis Daerah

Penentuan isu strategis Kabupaten Ngada dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan hasil telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional yang relevan untuk pembangunan Kabupaten Ngada tahun 2025-2045. Berikut ini penjabaran lebih detail mengenai telaah isu strategis pada level internasional, nasional, dan regional serta rumusan isu strategis Kabupaten Ngada.

#### 3.2.1 Isu Strategis Global

Isu strategis internasional atau global adalah isu pada level makro yang memiliki dampak secara global yang perlu direspon dengan baik oleh pemerintah baik pada level nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Isu internasional tersebut seringkali disebut sebagai megatren global karena menggambarkan terjadinya pergeseran isu dan tantangan global di masa mendatang dan memiliki dampak pada sistem global dalam berbagai aspek. Berikut merupakan gambaran mengenai megatren global 2045.



Gambar 3. 1 Megatren Global

Sumber: RPJPN 2025-2045

Tren global tersebut perlu direspon dengan bijak dan cermat oleh seluruh *stakeholder* pembangunan baik masyarakat, pemerintah, maupun sektor swasta. Proses perencanaan perlu disusun dengan komprehensif, kontekstual dan berkelanjutan agar pergeseran tersebut dapat direspon dengan baik melalui berbagai arah kebijakan pembangunan sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

### **3.2.2 Isu Strategis Nasional**

Isu strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJPN 2025-2025 perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan isu strategis di Kabupaten Ngada. Hal ini menjadi penting sebagai upaya mendorong sinergitas perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah. Berikut ini merupakan isu strategis yang termuat dalam RPJPN 2025-2045:

1. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat;
2. Lemahnya kapasitas Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN);
3. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah;
4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata;
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut;
6. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam penciptaan nilai tambah ekonomi;
7. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif rendah;
8. Masih rendahnya penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi;
9. Pencemaran dan kerusakan lingkungan;
10. Infrastruktur dan literasi digital masih terbatas;
11. Integrasi ekonomi domestik masih terbatas;

12. Akses dan kualitas yang belum merata pada sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
13. Kepastian dan penegakkan hukum masih rendah;
14. Tata kelolala pemerintahan belum optimal;
15. Demokratisasi belum optimal; dan
16. Kesenjangan Pembangunan sarana dan prasarana dasar antara Jawa dan luar Jawa.

### **3.2.3 Isu Strategis Regional**

Isu strategis regional perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan isu strategis di Kabupaten Ngada. Isu Regional tersebut dapat meliputi isu regional yang berkembang di wilayah Bali-Nusa Tenggara dan Provinsi NTT. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai kedua isu regional tersebut

#### **3.2.3.1 Regional Bali - Nusa Tenggara**

Dalam kerangka pembangunan nasional, Kabupaten Ngada termasuk dalam koridor pembangunan Bali -Nusa Tenggara. Dengan demikian, isu strategis pada wilayah regional Bali-Nusa Tenggara memiliki keterkaitan dengan pembangunan Kabupaten Ngada di masa yang akan datang. Berdasarkan Dokumen RPJPN 2025-2045 beberapa isu strategis yang menjadi tantangan untuk Wilayah Bali-Nusa Tenggara adalah sebagai berikut:

##### **1. Pengembangan Pariwisata Wilayah Bali-Nusa Tenggara**

Pengembangan pariwisata wilayah Bali-Nusa Tenggara masih belum optimal. Kondisi ini diindikasikan melalui jumlah wisatawan di Wilayah Nusa Tenggara yang masih belum optimal. Terbatasnya kapasitas masyarakat menjadi salah satu penyebab pengembangan pariwisata yang belum optimal

##### **2. Kinerja Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Kinerja desentralisasi dan otonomi daerah masih belum optimal. Kondisi ini ditandai dengan Indeks integritas di Provinsi NTB dan NTT masih berada

di bawah capaian nasional. Capaian SPM terutama di Provinsi NTT juga masih perlu untuk ditingkatkan.

### **3. Kualitas Lingkungan Hidup dan Potensi Bencana**

Potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan berupa limbah dan sampah serta berbagai aktivitas pembangunan lainnya menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup menjadi agenda penting untuk menjaga kelestarian lingkungan agar dapat diwariskan untuk generasi mendatang. Lebih dari itu, Wilayah Nusa Tenggara memiliki potensi bencana geologi yang terdiri dari gempa tektonik di jalur patahan Flores yang tersebar sepanjang sisi utara. Di samping itu, sarana dan prasarana mitigasi bencana masih terbatas, khususnya di daerah tertinggal bagian selatan dan Timur Wilayah Nusa Tenggara.

### **4. Sosial**

Angka Kemiskinan Provinsi NTT berada pada peringkat tertinggi ke-3 secara nasional. Di Provinsi NTT juga masih terdapat daerah tertinggal. Lebih dari itu, IPM Provinsi NTT masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh Angka Harapan Hidup dan Rata-rata Lama Sekolah yang masih berada di bawah rata-rata capaian nasional. Prevalensi stunting di Provinsi NTT masih tergolong tinggi yakni mencapai 35,3 persen pada tahun 2022.

### **5. Akses dan Kualitas Sarana dan Prasarana**

Konektivitas laut dan penyeberangan di Bali Nusa-Tenggara masih belum optimal. Pembangunan Jalan Trans Flores dan jalan trans lainnya belum tuntas. Lebih dari itu, ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan daerah masih rendah. Masalah akses air baku untuk kebutuhan rumah tangga, industri, dan pariwisata juga masih perlu menjadi perhatian.

## **6. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan**

Masih banyak terjadi kasus *illegal fishing* di perairan Wilayah Bali-Nusa Tenggara terutama di daerah-daerah perbatasan laut negara dengan Timor Leste dan Australia (WPP 573) yang menghambat optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam sehingga perlu dijaga kedaulatannya.

### **3.2.3.2 Regional Nusa Tenggara Timur**

Isu strategis pada regional Nusa Tenggara Timur merupakan isu strategis di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga perlu diperhatikan dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam perumusan isu strategis di Kabupaten Ngada. Berikut ini merupakan isu strategis Provinsi NTT berdasarkan dokumen RPJPD Provinsi NTT 2025-2045:

#### **1. Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan isu global yang juga masih menjadi isu strategis di Provinsi NTT. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 maka, pemerintah pusat telah menargetkan tingkat kemiskinan semakin menurun hingga pada tahun 2045. Angka kemiskinan Provinsi NTT mencapai 19,96 persen per Maret 2023. Secara nasional, Provinsi NTT menempati peringkat ke tiga sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi isu strategis yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan di Provinsi NTT.

#### **2. Kesenjangan dan Ketertinggalan Daerah**

Pembangunan wilayah di Provinsi NTT masih belum merata. Hal ini diindikasikan dengan nilai Indeks Williamson yang mencapai 0,632. Lebih dari itu, berdasarkan Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 terdapat 13 kabupaten di Provinsi NTT merupakan daerah tertinggal yang tersebar di berbagai gugus pulau.

### **3. Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerosotan Nilai-nilai Budaya**

IPM Provinsi NTT pada tahun 2023 mencapai 68,40. Capaian ini masih berada di bawah rata-rata nasional dan berada pada peringkat 32 secara nasional. Capaian IPM Provinsi NTT disebabkan oleh permasalahan pada aspek kesehatan dan pendidikan yang masih rendah. Ancaman terhadap sumber daya manusia lainnya yang saat ini tengah menggejala secara nasional adalah melemahnya pemahaman budaya bangsa, dan sendi “kebhinekatunggalikaan”, serta banyaknya kasus kekerasan karena tumbuhnya paham radikalisme dan terorisme yang memungkinkan akan merambah ke Provinsi NTT.

### **4. Tingginya Ketergantungan pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Rendahnya Pemanfaatan Teknologi (Hilirisasi)**

Struktur perekonomian NTT selama ini didominasi oleh sektor dengan nilai tambah rendah yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 29,60 persen terhadap perekonomian NTT pada tahun 2022 dan sebesar 29,31 persen pada tahun 2023. Provinsi NTT belum memiliki kawasan industri yang akan dikembangkan. Sektor industri di NTT saat ini didominasi oleh industri kecil yang jumlahnya masih sedikit sehingga kontribusinya tidak dominan dalam perekonomian. Hilirisasi menjadi penting untuk dilakukan guna meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan.

### **5. Belum Optimalnya Pengembangan Pariwisata**

Pengembangan pariwisata di Provinsi NTT belum optimal dalam menarik Wisatawan Nusantara dan Mancanegara. Kawasan pariwisata yang dikembangkan yaitu Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo belum mampu meningkatkan jumlah wisatawan. Jumlah wisatawan di NTT hanya 744 ribu Wisatawan Nusantara dan 58 ribu Wisatawan Mancanegara, jauh lebih rendah dibandingkan Bali yang jumlah

Wisatawan Nusantara mencapai 8,1 juta dan 2,2 juta Wisatawan Mancanegara. Pengembangan pariwisata di Provinsi NTT menjadi agenda penting untuk mendorong pembangunan ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara.

#### **6. Belum Optimalnya Pembangunan Berkelanjutan melalui Penerapan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau**

Pembangunan berkelanjutan menitikberatkan pada pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang. Konsep pembangunan ekonomi biru dan ekonomi hijau yang menitikberatkan pada pemanfaatan potensi alam NTT perlu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.

#### **7. Perubahan Iklim, Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Bencana**

Perubahan iklim menjadi tantangan yang sangat serius di masa yang akan datang. Kenaikan suhu global pada tahun 2022 telah mencapai 0,89 derajat celsius dibandingkan dengan suhu pada tahun 1990 (NOAA, 2023). Perubahan iklim yang cukup ekstrim berpotensi mengakibatkan gagal panen atau puso semakin luas. Kondisi ini berkaitan dengan ketahanan pangan lebih dari itu prevalensi ketidakcukupan pangan di NTT sebesar 13,74 persen, lebih tinggi dari nasional dan wilayah Nusa Tenggara (Bali dan NTB). Di samping itu, penanggulangan bencana juga perlu menjadi perhatian. Indeks Risiko Bencana Provinsi NTT mencapai 139,23 dan termasuk dalam kategori sedang.

#### **8. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan**

Isu tata kelola pemerintahan di NTT berkaitan dengan akuntabilitas kinerja, kemandirian fiskal yang masih perlu untuk ditingkatkan, ASN yang berkualitas dan profesional, penguatan kelembagaan pemerintahan baik dari level pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa.

### **3.2.4 Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memanfaatkan sumberdaya secara bijak dalam pembangunan, tanpa mengorbankan kebutuhan sumberdaya bagi generasi mendatang. Pola pendekatan pembangunan berkelanjutan mengarahkan bahwa perencanaan pembangunan diselaraskan dengan dimensi ekonomi, dimensi sosial masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan diukur melalui pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022. Untuk memastikan dokumen perencanaan pembangunan telah selaras dengan pembangunan berkelanjutan maka penyusunan dokumen RPJPD perlu diselaraskan dengan dokumen KLHS RPJPD yang memuat tentang capaian pembangunan berkelanjutan. Salah satu bentuk keselarasan ini tercermin dalam perumusan isu strategis RPJPD yang perlu untuk merujuk kepada hasil identifikasi isu strategis KLHS RPJPD yang didasarkan pada capaian pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Ngada. Berikut ini merupakan hasil identifikasi isu strategis Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Ngada.

1. Ketimpangan sosial ekonomi;
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum optimal;
3. Belum terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat;
4. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
5. Penanggulangan bencana alam yang belum optimal; dan
6. Tata kelola dan sistem penyelenggaraan pemerintahan belum optimal.

### **3.2.5 Isu Strategis Kabupaten Ngada**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan daerah di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian dalam hal tidak

dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis merupakan hasil analisis lingkungan eksternal dan internal Kabupaten Ngada sebagai berikut :

## **1. Pengurangan Angka Kemiskinan**

Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terkoordinasi lintas sektor maupun koordinasi lintas tingkatan pemerintahan dan koordinasi lintas sumber dana. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, peran serta aktif masyarakat menjadi hal yang mutlak, tanpa dukungan peran serta aktif masyarakat untuk menolong dirinya sendiri, maka apapun upaya pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, tidak akan efektif. Pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan usahanya. Iklim usaha yang kondusif akan mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang berorientasi pasar (berdaya saing) dengan tingkat pertumbuhan yang memadai, namun yang juga peka terhadap pemecahan masalah-masalah sosial dalam kerangka memadukan prinsip-prinsip pasar bebas dan persaingan yang efisien, serta jaminan kehidupan bermartabat bagi semua warga masyarakat termasuk kelompok masyarakat dengan kemampuan yang terbatas dan terpinggirkan; tersedianya kesempatan yang merata dan adil di dalam mengakses sumber daya demi peningkatan kualitas hidup masyarakat, sehingga manfaat pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, sekaligus mengurangi ketimpangan antar wilayah, antar golongan dan antar gender.

## **2. Pertumbuhan Ekonomi Hijau**

Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang kuat, namun juga ramah lingkungan, serta inklusif secara sosial. Berbeda dengan model pembangunan konvensional yang mengandalkan praktik yang tidak berkelanjutan seperti pengurasan dan penghancuran sumber daya alam,

pertumbuhan hijau merupakan suatu gerakan terkoordinir yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, penurunan tingkat kemiskinan dan keterlibatan sosial yang didorong oleh pengembangan dan pemanfaatan sumber daya global secara berkelanjutan. Pertumbuhan Ekonomi hijau harus menjadi konsep pembangunan berkelanjutan yang harus dilaksanakan oleh masing – masing daerah termasuk Kabupaten Ngada untuk memberikan dampak sosial dan ekonomi yang berwawasan lingkungan.

### **3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Pengembangan Sumber daya manusia diwujudkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas maka diperlukan penyelenggaraan sistem pendidikan yang bermutu dan berkarakter budaya. Partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi anak usia sekolah, wajib belajar 9 tahun dari tingkat SD sampai SMP dan pengembangan sekolah unggul. Hal ini tentunya didukung oleh peningkatan aksesibilitas menuju sarana pendidikan, peningkatan sarana pendidikan yang representatif, pengembangan manajemen berbasis sekolah, penataan kurikulum pendidikan, dan peningkatan kualitas guru. Pendidikan merupakan kebutuhan pelayanan dasar yaitu fasilitas, sarana dan prasarananya harus mampu disediakan oleh pemerintah. Selain itu partisipasi masyarakat, khususnya orang tua murid, sangat dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kualitas anak didik. Permasalahan pendidikan tidak semata pada ketersediaan sarana dan prasarananya saja tetapi lebih dari itu adalah kualitas sarana dan prasarana dan ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas serta tata kelola pendidikan yang baik. Penyediaan dan pemerataan sarana prasarana Pendidikan pada hampir semua wilayah dan peningkatan kualitas manajemen diharapkan juga dapat menekan angka *drop-out* siswa usia sekolah.

Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk segala usia merupakan tujuan yang ingin dicapai bersama. Untuk mewujudkan tujuan itu diperlukan partisipasi aktif dari semua pihak yaitu Pemerintah, Swasta (Organisasi Non-Pemerintah) dan Masyarakat. Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana kesehatan serta program-program inovatif dibidang kesehatan, pihak organisasi non-pemerintahan diperlukan untuk bersama-sama pemerintah memotivasi masyarakat agar berkontribusi dalam pembangunan kesehatan. Keaktifan masyarakat perlu ditingkatkan dalam upaya peningkatan kesehatan lingkungan, pemeriksaan kesehatan secara berkala, aktifitas fisik secara teratur, kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kehamilan, asupan gizi, dan deteksi tumbuh kembang anak, serta pemberantasan penyakit menular, dan ikut serta program pembangunan kesehatan yang ada. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa menjadi lebih representative, peningkatan sarana prasarana kesehatan pada puskesmas dan jaringannya serta peningkatan jumlah dan kualitas tenaga dokter, dokter spesialis, tenaga medis dan paramedis. Peningkatan kualitas Tenaga kesehatan baik melalui jenjang pendidikan formal maupun melalui diklat-diklat teknis dan fungsional, merupakan hal yang paling mendasar dalam upaya menyediakan tenaga kesehatan yang berkualitas.

#### **4. Pembangunan Infrastruktur Wilayah**

Tantangan pengembangan wilayah Kabupaten Ngada adalah aksesibilitas dan konektifitas antar wilayah dalam rangka mengembangkan potensi pertanian, pariwisata dan industri berbasis agro dan maritim di Pesisir Utara dan Selatan, belum didukung dengan ketersediaan akses ke pelabuhan barang dan bandara. Pada penyediaan infrastruktur sumber daya air adalah percepatan pembangunan waduk dan tampungan air baku skala besar sebagai upaya penyediaan air baku untuk kegiatan pertanian, industri maupun rumah tangga. Infrastruktur sumber daya air merupakan bagian penting dalam upaya mendukung ketahanan pangan,

sehingga perlu integrasi pengelolaan sumber air permukaan dari hulu sampai dengan hilir yang meliputi jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier pada semua kewenangan Daerah Irigasi (DI). Sementara itu, pemenuhan cakupan pelayanan infrastruktur dalam rangka mengurangi kemiskinan dan ketimpangan wilayah terkendala oleh keterbatasan sumber pendanaan pemerintah, untuk itu diperlukan upaya alternative dalam penyediaan sumber pendanaan non APBD.

## **5. Ketersediaan Pangan, Ketersediaan Air dan Energi Sumber Daya Mineral**

Kemandirian dan ketahanan pangan perlu dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga. Kemandirian dan ketahanan pangan juga harus didukung dengan kebijakan pengendalian penggunaan lahan. Untuk mendukung sektor pertanian, pengelolaan jaringan irigasi perlu ditingkatkan dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu. Ketersediaan air merupakan kondisi yang mutlak dibutuhkan oleh masyarakat karena merupakan kebutuhan dasar (*basic need*). Pemerintah bertekad untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat melalui manajemen pengelolaan air dari hulu sampai kehilir. Pola kemitraan menjadi hal yang harus dilakukan dalam konteks penyediaan air secara menyeluruh bagi masyarakat. Upaya mempertahankan kondisi kualitas air serta pemulihan air yang tercemar diwujudkan melalui pendekatan pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi. Demikian juga, akses terhadap air minum juga masih merupakan masalah penting di Kabupaten Ngada.

## **6. Penanggulangan Bencana dan Pelestarian Lingkungan**

Tujuan pembangunan di samping membentuk manusia seutuhnya juga mengatasi dan menjaga agar sumber daya alam dan lingkungan tetap lestari, sehingga bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pembangunan harus tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemanfaatan sumber daya diarahkan menuju keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaannya. Pemanfaatan sumber daya yang seimbang, selain mendukung

pembangunan berkelanjutan, juga mampu mencegah terjadinya bencana baik alam maupun non alam. Oleh karena itu upaya pelestarian lingkungan tetap diikuti dengan upaya mitigasi bencana, sehingga setiap hasil pembangunan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

## **7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel**

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel merupakan prasyarat mutlak dalam Era Otonomi Daerah. Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bukan semata dalam hal memperbaiki kondisi institusi pemerintah, akan tetapi yang lebih penting adalah persoalan etika, sikap dan perilaku. Dalam *good governance*, tidak saja unsur pemerintah, tetapi juga sektor usaha/swasta dan masyarakat semestinya dapat berjalan secara efektif dan efisien melalui koordinasi yang sinergi dalam manajemen sektor publik, sektor swasta dan masyarakat. Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan lapangan kerja dan pendapatan, sementara masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah perlu dioptimalkan berdasarkan tingkat kompetensi, kemampuan teknis dan mekanisme birokrasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Penguatan system pelayanan birokrasi yang cepat dan tepat dengan memanfaatkan teknologi yang adaptif bisa mendorong menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

# BAB IV

## VISI DAN MISI DAERAH

Bab IV memuat rumusan visi dan misi RPJPD Kabupaten Ngada tahun 2025-2045. Visi dan misi RPJPD merupakan visi dan misi daerah hasil dari konsensus bersama pemangku kepentingan pembangunan. Visi dan misi harus memiliki akar yang kuat dan terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Rumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang oleh karena itu perlu berpijak dan mengacu pada rumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional, provinsi, nilai kearifan masyarakat Ngada dan isu-isu strategis.

### 4.1 Visi Daerah

Visi merupakan kondisi ideal yang akan dicapai sampai tahun 2045. Visi secara substansi mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam ikatan NKRI. Visi RPJPD Kabupaten Ngada mengacu dan mendukung pencapaian Visi RPJPN tahun 2025-2045, yaitu **“Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”**. Visi RPJPD Kabupaten Ngada juga menopang pencapaian visi RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025-2045, yaitu **“Nusa Tenggara Timur Mandiri, Maju dan Berkelanjutan guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045”**. Berdasarkan rumusan visi RPJPN, RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, nilai dan budaya masyarakat Ngada serta respon atas berbagai isu strategis, maka rumusan Visi RPJPD Kabupaten Ngada tahun 2025-2045, yaitu **“Ngada yang Maju, Berbudaya, Sejahtera dan Berkelanjutan”**.



**Gambar 4. 1** Visi dan Penjelasan Pokok Visi RPJPD Kabupaten Ngada

**Ngada** merupakan wilayah daerah otonom Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta seluruh masyarakatnya. Ngada juga merupakan bumi bersama yang mengandung makna sebagai ruang bagi kehidupan, sumber penghidupan dan keberagaman budaya. Dengan demikian, interaksi sosial-ekonomi antar masyarakat dan antara masyarakat dengan alamnya dapat mewujudkan kesejahteraan dan menjaga kelestarian.

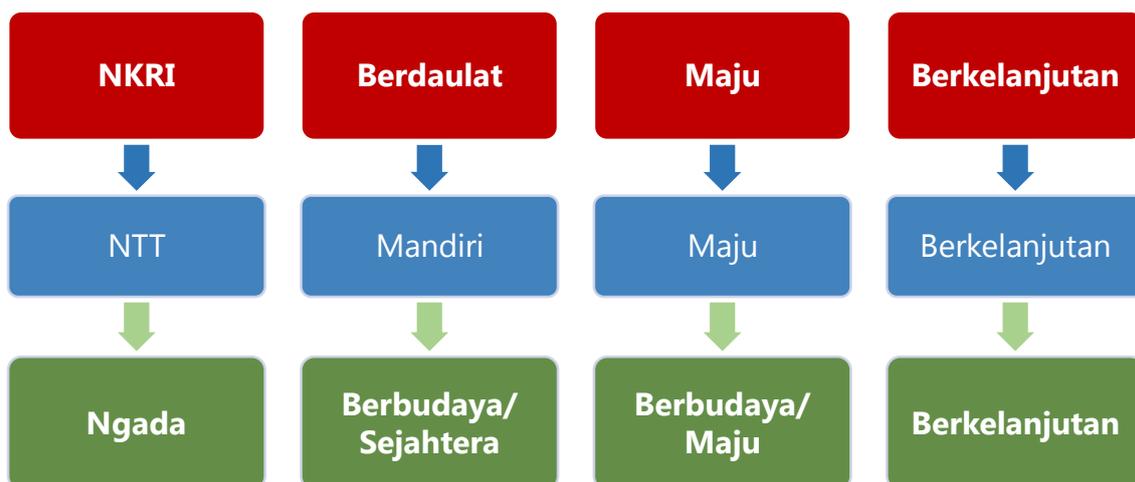
Kondisi **Maju** mendukung pencapaian kondisi maju pada RPJPN serta maju dan mandiri pada RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maju mencerminkan kondisi pembangunan Kabupaten Ngada yang semakin progresif dari periode ke periode, serta Ngada yang berdaya saing, mandiri, tangguh dan inovatif. Kondisi maju tidak hanya mencerminkan pembangunan yang progresif, tetapi juga tangguh dalam menghadapi berbagai dinamika pada masa depan. Seluruh

pemangku kepentingan pembangunan mampu adaptif dan berketahanan dalam menghadapi berbagai situasi. Kondisi maju menjadikan Kabupaten Ngada memiliki peran penting di kawasan Flores dan Nusa Tenggara Timur secara umum. Ngada menjadi sentra ekonomi pertanian dan destinasi wisata alternatif yang berdaya saing, serta pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin maju dan modern berorientasi kawasan.

**Berbudaya** diartikan sebagai masyarakat yang berkarakter kuat dan selalu menjaga moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Berbudaya dalam masyarakat Ngada mencerminkan pemikiran maju sekaligus selalu menjaga persatuan dan kesatuan Ngada di tengah keberagaman suku dan budaya demi mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan. Berbudaya juga menandakan bahwa pembangunan di segala bidang harus selaras dengan nilai-nilai lokal atau kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat, terutama dalam merespon arus globalisasi dan modernisasi yang begitu pesat.

**Sejahtera** merupakan kondisi ideal yang diharapkan oleh masyarakat. Sejahtera mencerminkan kecukupan kebutuhan ekonomi dan sosial. Dalam hal ini masyarakat memiliki sumber penghidupan yang berkelanjutan dan memiliki keberdayaan untuk mengaksesnya, serta didukung oleh kehidupan sosial harmonis yang berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya. Sejahtera sekaligus sebagai kondisi kehidupan masyarakat yang bahagia secara lahir dan batin.

**Berkelanjutan** merupakan kondisi yang mencerminkan komitmen Ngada dalam menjalankan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kondisi berkelanjutan tercapai ketika pembangunan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi dapat selaras yang ditopang oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Kondisi berkelanjutan menjadikan hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh generasi saat ini, tetapi juga masa depan.



Gambar 4. 2 Keterkaitan Pokok Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan RPJPD Kabupaten Ngada

Rumusan visi sebagai kondisi ideal yang akan diwujudkan memiliki sasaran visi sebagai kinerja dan indikator kinerja yang akan dicapai di akhir periode. Sasaran visi selaras dengan sasaran visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Ngada sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Ngada

No	Sasaran Visi	Baseline 2025	Target 2045
1	<b>Peningkatan Pendapatan per Kapita</b>		
	PDRB per Kapita (Rp Juta)	25,96	160,60
	Kontribusi PDRB industri pengolahan	1,52	2,78
2	<b>Kemiskinan dan ketimpangan menurun</b>		
	Tingkat kemiskinan (%)	11,03	0,76
	Rasio gini (Indeks)	0,307	0,276
	Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	3,27	3,70
3	<b>Kepemimpinan dan pengaruh regional meningkat</b>		
	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	CC	A
	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3 - 3,25	4 - 4,5
4	<b>Peningkatan daya saing sumber daya manusia</b>		
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,91	80,36
5	<b>Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i></b>		
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	78,46	87,55

Sumber: SEB Buku 2 Provinsi Nusa Tenggara Timur, diolah

Lima sasaran visi merupakan representasi dari kondisi maju, sejahtera dan berkelanjutan yang memiliki sifat *cross-cutting* atau tidak linier satu pokok visi dengan satu sasaran visi. Sifat *cross-cutting* ini pula yang akan kemudian akan diturunkan ke dalam berbagai agenda-agenda pembangunan berupa misi dan arah kebijakan. seluruh misi dan arah kebijakan saling memiliki keterkaitan dan berkolaborasi untuk mencapai visi dan sasaran visi.

## 4.2 Misi Daerah

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan misi RPJPD merujuk kepada pokok visi RPJPD yang akan diwujudkan, respon atas isu strategis dan permasalahan pembangunan, selaras dengan misi atau agenda pembangunan pada RPJPN, serta sejalan dengan misi yang termuat dalam RPJPD Provinsi NTT.

**Tabel 4. 2 Keterkaitan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan RPJPD Kabupaten Ngada**

Agenda	Misi RPJPN 2025-2045	Misi RPJPD Provinsi NTT 2025-2045	Misi RPJPD Kabupaten Ngada 2025-2045
<b>Transformasi Indonesia</b>	Mewujudkan transformasi sosial	Sumber Daya Manusia NTT yang Berdaya Saing dan Terlindungi Hak Dasarnya	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing
	Mewujudkan transformasi ekonomi	Membangun Ekonomi NTT yang maju dan berdaya saing berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Mewujudkan Perekonomian yang Inklusif dan Menyejahterakan
	Mewujudkan transformasi tata kelola	Mengembangkan tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif dan adaptif.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif
<b>Landasan Transformasi</b>	Memantapkan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia	Meningkatkan supremasi hukum yang menjamin keadilan, kepastian, stabilitas ekonomi dan demokrasi	

Agenda	Misi RPJPN 2025-2045	Misi RPJPD Provinsi NTT 2025-2045	Misi RPJPD Kabupaten Ngada 2025-2045
	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi	Pembangunan yang inklusif dan berketahanan sosial budaya dan ekologi	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan
<b>Kerangka Implementasi Transformasi</b>	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Merata, Berkeadilan, dan Berkesinambungan
	Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	
	Mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk mengawal Indonesia Emas	Kesinambungan Pembangunan daerah	

Di samping merujuk kepada pokok-pokok visi dan juga sinergitas terhadap pelaksanaan misi pembangunan jangka panjang pada level nasional dan regional Provinsi NTT, penyusunan misi Kabupaten Ngada juga telah memperhatikan isu strategis jangka panjang yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Keselarasan antara misi dengan isu strategis jangka panjang dapat dilihat melalui matriks keselarasan berikut:

**Tabel 4. 3 Keterkaitan Isu Strategis dengan Misi RPJPD Kabupaten Ngada**

<i>Isu Strategis Kabupaten Ngada</i>	<i>Misi RPJPD Kabupaten Ngada 2025-2045</i>
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing
Pengurangan Angka Kemiskinan	Mewujudkan Perekonomian yang Inklusif dan Menyejahterakan
Pertumbuhan Ekonomi Hijau	
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif

<i>Isu Strategis Kabupaten Ngada</i>	<i>Misi RPJPD Kabupaten Ngada 2025-2045</i>
Penanggulangan Bencana dan Pelestarian Lingkungan	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan
Ketersediaan Pangan, Ketersediaan Air dan Energi Sumber Daya Mineral	
Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Merata, Berkeadilan, dan Berkesinambungan

#### **4.2.1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing**

Misi mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing merupakan upaya yang diarahkan untuk membangun kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Ngada yang berkualitas dan mampu bersaing di tengah perkembangan zaman sehingga dapat memiliki tingkat kehidupan yang layak dan sejahtera. Kondisi SDM yang unggul dan berdaya saing perlu ditopang oleh kondisi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai. Kondisi masyarakat sehat dan cerdas sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan termasuk produktivitas kerja di masa yang akan datang. Sementara itu, kondisi masyarakat sejahtera diarahkan untuk meningkatkan perlindungan sosial di masyarakat agar lebih menyeluruh mencakup seluruh siklus kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial juga perlu didukung oleh perwujudan lingkungan yang inklusif bagi kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, perempuan dan anak serta kelompok pemuda.

Penguatan pada aspek layanan dasar pendidikan dan kesehatan merujuk pada upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar. Pada aspek pendidikan, peningkatan ketersediaan dan pemerataan akses pendidikan menjadi salah satu fondasi guna mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat usia sekolah untuk dapat merasakan pendidikan formal yang memadai. Selain itu, upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta pengembangan kurikulum yang diarahkan pada

pendidikan karakter dan budaya dengan tetap memperhatikan peningkatan keterampilan interpersonal, analitis dan digital.

Hal yang sama menjadi fokus pada bidang kesehatan, pemenuhan dan pemerataan akses pelayanan menjadi fondasi awal untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Ngada yang sehat. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan yang memadai di seluruh wilayah Kabupaten Ngada. Selain itu, peningkatan mutu pelayanan juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Dalam upaya transformasi kesehatan terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan seperti peningkatan layanan kesehatan pada semua fasilitas kesehatan baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan kualitas SDM kesehatan, serta digitalisasi pelayanan kesehatan dan sistem informasi kesehatan. Aspek pencegahan dalam bentuk upaya pelayanan promotive dan preventif perlu terus ditingkatkan guna mencegah dan meminimalisir tangka kesakitan di Kabupaten Ngada.

Dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dapat difokuskan pada penurunan angka kemiskinan, kesenjangan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, perempuan dan anak serta kelompok pemuda. Perlindungan sosial juga diwujudkan dalam upaya merespon perubahan iklim dan potensi terjadinya bencana melalui sistem perlindungan sosial yang adaptif. Upaya peningkatak Kerjasama lintas sektor dalam pengelolaan perlindungan sosial menjadi kunci utama mewujudkan kesejahteraan sosial di masyarakat. Selain itu, upaya pemberdayaan dan pendampingan menjadi hal yang perlu dilakukan guna menciptakan masyarakat sejahtera yang berkelanjutan.

#### **4.2.2 Mewujudkan Perekonomian yang Inklusif dan Menyejahterakan**

Pembangunan ekonomi saat ini tidak lagi mengejar pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya yang sering kali mengabaikan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ngada

saat ini menunjukkan perlunya perubahan pendekatan pembangunan ekonomi di mana inklusifitas dan keberlanjutan menjadi kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka “mewujudkan perekonomian yang inklusif dan menyejahterakan” menjadi misi yang harus dipegang dan diwujudkan oleh Kabupaten Ngada demi memastikan manfaat dari pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

*World Economic Forum* (WEF) mendefinisikan ekonomi inklusif sebagai sebuah strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat. Ekonomi inklusif diharapkan dapat membawa perubahan di mana Pemerintah Kabupaten Ngada dapat mengupayakan perluasan akses lapangan kerja yang disertai dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, penumbuhan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh kelompok masyarakat, perluasan akses pasar, dan kebijakan ekonomi lainnya sehingga manfaat dari pembangunan ekonomi tidak lagi hanya dirasakan oleh sekelompok orang tertentu. Dengan berjalannya pembangunan ekonomi yang inklusif, seluruh kelompok masyarakat diharapkan dapat mengakses sumber penghidupan yang layak dan menciptakan sumber penghidupan itu sendiri. Ketika perluasan akses terjadi, seluruh kelompok masyarakat menjadi memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraannya.

#### **4.2.3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif**

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif menjadi sangat penting guna menopang pembangunan dalam rangka mencapai Ngada menjadi bumi Bersama yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Misi kedua RPJP Kabupaten Ngada ini juga secara simultan mendorong perwujudan transformasi tata Kelola pemerintahan sebagaimana tertuang dalam RPJPN. Misi tata kelola pemerintahan memiliki fokus untuk meningkatkan kualitas SDM dan

kelembagaan birokrasi, meningkatkan berbagai partisipasi bermakna dan ruang kolaborasi bagi pemerintah, masyarakat, swasta dan seluruh aspek pendukung berjalannya roda pemerintahan Kabupaten Ngada. Tata kelola yang adaptif dituntut untuk terus dapat merespons berbagai kebutuhan dan kondisi dinamis yang berkembang di publik. Hal ini juga berarti bahwa pemerintah harus dapat beradaptasi terhadap berbagai situasi—baik normal maupun tidak normal karena terdapat berbagai guncangan dan perubahan; baik secara horizontal yang bersifat lokal, maupun vertikal yang berasal dari pusat.

Reformasi Birokrasi berdampak secara menyeluruh juga harus dilakukan guna mencapai misi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif. Agar reformasi birokrasi dapat berjalan dan terimplementasi secara baik, perlu dimulai dengan membenahi akuntabilitas kinerja, pembangunan sistem integritas, serta ditopang melalui arsitektur SPBE yang mengarah pada digitalisasi tata kelola pemerintahan. Pemantapan implementasi sistem merit guna mendukung aparatur birokrasi (ASN) juga harus dilakukan bersamaan supaya birokrasi dapat memiliki kinerja yang tinggi. Tentu dengan demikian, reformasi birokrasi akan semakin memberikan dampak nyata pada kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Reformasi birokrasi yang sudah dapat memberikan dampak nyata, ditopang oleh kebijakan publik yang efektif, berbasis data, dan inklusif akan mempercepat tata kelola Pemerintahan Kabupaten Ngada menjadi adaptif dan kolaboratif.

Transformasi tata kelola pemerintahan menjadi kolaboratif dan adaptif dapat diakselerasi menggunakan penggunaan teknologi dan digitalisasi. Digitalisasi tidak hanya memudahkan hubungan antar perangkat daerah dalam pemerintahan, tetapi juga sekaligus hubungan antar pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat. Digitalisasi juga berorientasi untuk memudahkan aspek-aspek dalam pelayanan publik, meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas, serta menjaga integritas pemerintahan. Birokrasi yang kolaboratif ditandai dengan pengelolaan pembangunan yang *cross-cutting* akan semakin mudah

terimplementasi apabila digitalisasi sudah diterapkan dengan baik di Pemerintah Kabupaten Ngada. Maka dari itu, tahapan pertama yang dapat dilakukan pada arah pembangunan periode pertama guna menyokong digitalisasi tata kelola pemerintahan adalah dengan penguatan arsitektur SPBE dan SDM yang andal dalam menggunakan teknologi secara efektif dan tepat sasaran.

Penguatan ruang partisipasi publik yang bermakna dibarengi dengan sinergi lintas aktor dan sektor juga menjadi prioritas dalam transformasi tata kelola pemerintah. Ruang partisipasi ini bukan semata-mata bersifat formalitas, namun lebih daripada itu; partisipasi yang mampu mengawal kebijakan dan proses-proses pembangunan sehingga dapat membawa manfaat kepada kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Ngada secara umum. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa juga menjadi penopang utama transformasi tata kelola pemerintahan sebagai perwujudan desa sebagai basis utama sumber ketahanan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas tata kelola desa dilakukan melalui beberapa hal seperti: peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa, pengarusutamaan proses pembangunan desa yang bersifat inklusif dan inovatif, serta peningkatan kolaborasi desa melalui penguatan pembangunan kawasan perdesaan. Dengan ini, desa diharapkan semakin berdaya melalui kewenangan dan sumber daya yang dimilikinya. Ditambah dengan otonomi yang semakin utuh dan luas, perhatian dari pemerintah pusat melalui dana desa; desa diharapkan dapat menjadi ujung tombak kemajuan peradaban Kabupaten Ngada.

#### **4.2.4 Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan**

Misi mewujudkan ketahanan sosial budaya dan lingkungan merupakan upaya yang penting untuk merespon berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis di Kabupaten Ngada. Kesatuan sosial budaya dan lingkungan di dalam misi ini ditujukan untuk mengintegrasikan pembangunan masyarakat baik secara individu, keluarga maupun komunitas dalam mengelola sumber daya alam

dan lingkungan, sehingga dapat mewujudkan ketahanan wilayah yang berkelanjutan.

Ketahanan sosial budaya diwujudkan dengan meningkatkan ketangguhan manusia, keluarga, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan perubahan wilayah yang dinamis. Selain itu, misi ini juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Ngada. Selain itu, Kabupaten Ngada juga merupakan wilayah yang memiliki kepentingan besar dalam menjaga sumber daya alam yang potensial sebagai daerah pertanian dan pariwisata. Sehingga ketangguhan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan menjadi krusial. Melalui berbagai tantangan tersebut, perlu adanya sinergi perencanaan wilayah yang berketahanan sosial budaya dan lingkungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perwujudan misi ini dapat dilakukan melalui pengintegrasian beberapa kebijakan strategis, seperti penguatan peran keluarga, pembangunan karakter, peningkatan pemberdayaan gender, penguatan peran komunitas lokal, perlindungan lingkungan alam, mitigasi perubahan iklim, pemulihan dan konservasi ekosistem penyangga, pengelolaan sampah terpadu, dan berbagai hal lain yang berkontribusi pada ketangguhan sosial budaya, dan lingkungan. Dalam rangka mewujudkan lingkungan berketahanan sosial budaya dan lingkungan yang berkelanjutan, diperlukan upaya jangka panjang yang melibatkan kerja sama dan komitmen dari semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, pihak swasta, lembaga non-pemerintah maupun masyarakat.

Ketahanan terhadap bencana juga perlu direncanakan sebaik mungkin, mengingat Kabupaten Ngada Kabupaten Ngada memiliki indeks risiko bencana sedang dengan nilai indeks 128,63. Ancaman bencana di Kabupaten Ngada memiliki kelas tinggi dengan luas wilayah bahaya yang bervariasi, sehingga dapat dikatakan Kabupaten Ngada memiliki potensi bahaya terhadap bencana sangat

tinggi. Jenis ancaman bencana di Kabupaten Ngada antara lain gempa bumi, tsunami, gunungapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstrim/abrasi, kebakaran hutan dan lahan, serta cuaca ekstrim. Selain itu, Kabupaten Ngada memiliki tingkat kerentanan perubahan iklim dengan kategori sedang di sebagian besar wilayah. Kemampuan Kabupaten Ngada dalam mengelola dampak dari perubahan iklim sangat dipengaruhi dengan kondisi sosial ekonomi yang merupakan indikator kapasitas adaptif.

#### **4.2.5 Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Merata, Berkeadilan, dan Berkesinambungan**

Prinsip berkesinambungan dalam pembangunan di Kabupaten Ngada diperlukan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur wilayah yang merata sesuai dengan kebutuhan daerah. Prinsip berkesinambungan diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang dilakukan terus menerus sepanjang tahun, sehingga pembangunan tidak terputus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Perlu adanya upaya-upaya strategis dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang dirancang untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapan prinsip etika lingkungan dalam pembangunan perlu menjadi kesadaran seluruh *stakeholders* yang bertanggung jawab.

Penataan ruang dimaksudkan untuk meminimalkan potensi alih fungsi lahan namun tetap mendukung pembangunan infrastruktur wilayah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan ketersediaan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata. Infrastruktur dasar yang dimaksud meliputi jalan, jaringan listrik, air bersih, telekomunikasi, sarana prasarana pendidikan, kesehatan, perekonomian, serta sarana prasarana lingkungan seperti ruang terbuka hijau, dan fasilitas pengelolaan sampah.

Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Labuan Bajo, Manggarai Barat memberikan dampak tidak langsung kepada Kabupaten Ngada sebagai wilayah yang berdekatan, seperti meningkatnya pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan infrastruktur wilayah penunjang aksesibilitas dan konektivitas wilayah perlu ditingkatkan. Penyediaan infrastruktur wilayah di Kabupaten Ngada diarahkan dapat mendukung pencapaian visi pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip pembangunan provinsi maupun nasional yang mendukung adanya kawasan strategis nasional di Labuan Bajo.

Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Ngada juga perlu diperhatikan mengingat prinsip keadilan menjadi fondasi dalam pemenuhan pelayanan publik bagi masyarakat agar kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Pembangunan infrastruktur bukan hanya tentang kualitas yang dapat meningkatkan kenyamanan tinggal, namun pemerataan pembangunan di seluruh wilayah juga penting agar tidak terjadi ketimpangan. Kondisi geografis Kabupaten Ngada menjadi tantangan untuk mewujudkan keterhubungan antar wilayah, sehingga perlu upaya lebih lanjut agar konektivitas dan aksesibilitas wilayah menjadi lebih berkualitas.

# BAB V

## ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

### 5.1 Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan merupakan kerangka kerja dan penahapan pembangunan dalam mencapai visi dan melaksanakan misi. Rumusan arah kebijakan sebagai tahapan pembangunan diharapkan dapat menjadi pedoman dan kerangka dasar intervensi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dan mewujudkan cita-cita Kabupaten Ngada. Secara substansi, arah kebijakan lima tahunan ini akan menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Ngada. Perumusan tahapan pembangunan Kabupaten Ngada merujuk kepada tahapan pembangunan RPJPN yang terdiri dari penguatan fondasi transformasi pada tahap I; akselerasi transformasi pada tahap II; ekspansi global pada tahap III; dan perwujudan Indonesia Emas pada tahap IV.



Gambar 5. 1 Penahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045

Tabel 5. 1 Arah Kebijakan Berdasarkan Misi

Visi	Misi	Arah Kebijakan Setiap Periode			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Penguatan Fondasi Transformasi Pembangunan	Akselerasi Transformasi Pembangunan	Perwujudan Daya Saing dan Peningkatan Peran Ngada di Kawasan FLOBAMORATA	Perwujudan Kabupaten Ngada yang Maju, Berbudaya, Sejahtera dan Berkelanjutan
<b>Ngada yang Maju, Berbudaya, Sejahtera dan Berkelanjutan</b>	<b>Misi 1: Mewujudkan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing</b>	Penguatan akses dan kualitas pelayanan dasar	Percepatan pembangunan sistem dan sarana pendukung pelayanan dasar	Penguatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Perwujudan SDM Ngada yang inklusif dan berdaya saing
	<b>Misi 2: Mewujudkan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan</b>	Penguatan sumber daya ekonomi berbasis pertanian dan ekonomi kreatif	Peningkatan produktivitas sektor potensial dan unggulan daerah	Perluasan jaringan distribusi dan rantai pasok pemasaran produk unggulan daerah	Perwujudan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan
	<b>Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif</b>	Penguatan fondasi tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, responsif, dan adaptif.	Akselerasi tata kelola pemerintahan daerah yang kolaboratif dan inovatif serta masyarakat partisipatif.	Penguatan tata kelola berkinerja tinggi dan berintegritas	Perwujudan tata kelola daerah yang efektif menopang pembangunan berkelanjutan
	<b>Misi 4: Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan</b>	Penguatan fondasi ketangguhan sosial budaya dan lingkungan	Percepatan ketangguhan sosial budaya dan lingkungan	Memantapkan stabilitas wilayah dan ekonomi sebagai modal daya saing daerah	Perwujudan ketahanan sosial budaya dan lingkungan
	<b>Misi 5: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Merata, Berkeadilan, dan Berkesinambungan</b>	Peningkatan pemerataan infrastruktur wilayah	Akselerasi pemerataan infrastruktur wilayah yang berkualitas	Pemantapan pemerataan infrastruktur wilayah yang andal dan berwawasan lingkungan	Perwujudan infrastruktur wilayah yang merata, berkeadilan, dan berkesinambungan

**Tahap pertama (2025-2029)** merupakan tahapan **penguatan fondasi transformasi pembangunan**. Tahap penguatan fondasi transformasi untuk mendukung Misi I: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing memiliki prioritas pada penguatan akses dan kualitas pelayanan dasar. Pelaksanaan Misi II: Mewujudkan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan akan difokuskan pada penguatan sumber daya ekonomi berbasis pertanian dan ekonomi kreatif. Pelaksanaan Misi III: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif akan diarahkan pada penguatan fondasi tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, responsif, dan adaptif. Pada tahap ini pelaksanaan Misi IV: Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan akan fokus kepada upaya memperkuat fondasi ketangguhan sosial budaya dan lingkungan. Pelaksanaan pembangunan akan didukung oleh Misi V: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Merata, Berkeadilan, dan Berkesinambungan yang akan berfokus pada peningkatan pemerataan infrastruktur wilayah.

**Tahap Kedua (2030-2034)** merupakan tahapan **akselerasi transformasi pembangunan**. Fondasi pembangunan yang telah diperkuat pada periode I membutuhkan akselerasi atau percepatan agar terwujud pembangunan yang progresif. Dalam rangka mendukung akselerasi transformasi pembangunan, pelaksanaan Misi I: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing diarahkan pada percepatan pembangunan sistem dan sarana pendukung pelayanan dasar. Pelaksanaan Misi II: Mewujudkan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas sektor potensial dan unggulan daerah. Implementasi Misi III: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif difokuskan pada akselerasi tata kelola pemerintahan daerah yang kolaboratif dan inovatif serta masyarakat partisipatif. Pelaksanaan Misi IV: Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan diarahkan pada percepatan ketangguhan sosial budaya dan lingkungan. Upaya akselerasi transformasi pembangunan juga didukung dengan pelaksanaan Misi V: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Merata, Berkeadilan, dan

Berkesinambungan yang diprioritaskan pada akselerasi pemerataan infrastruktur wilayah yang berkualitas.

**Tahap Ketiga (2035-2039)** memiliki tema pembangunan perwujudan daya saing dan peningkatan peran Ngada di Kawasan TA. Pada periode ini pelaksanaan Misi I: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing akan diarahkan pada Penguatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Pada tahapan perwujudan daya saing, pembangunan ekonomi melalui Misi II: Mewujudkan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan akan diprioritaskan pada perluasan jaringan distribusi dan rantai pasok pemasaran produk unggulan daerah. Upaya perwujudan daya saing juga ditopang dengan pelaksanaan Misi III: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif yang difokuskan pada penguatan tata kelola berkinerja tinggi dan berintegritas. Pelaksanaan Misi IV: Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan akan diarahkan pada pemantapan stabilitas wilayah dan ekonomi sebagai modal daya saing daerah. Adapun pelaksanaan Misi V: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Merata, Berkeadilan, dan Berkesinambungan difokuskan pada pemantapan pemerataan infrastruktur wilayah yang andal dan berwawasan lingkungan.

**Tahap Keempat (2040-2045)** merupakan tahapan **Perwujudan Kabupaten Ngada yang Maju, Berbudaya, Sejahtera dan Berkelanjutan**. Daya saing Kabupaten Ngada yang telah dioptimalkan pada periode ketiga diharapkan dapat diperkuat dengan pembangunan yang berkelanjutan sehingga terwujud Kabupaten Ngada yang Maju, Berbudaya, Sejahtera dan Berkelanjutan. Pelaksanaan Misi I: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing pada periode keempat diprioritaskan pada perwujudan SDM Ngada yang inklusif dan berdaya saing. Pembangunan ekonomi pada tahap IV diharapkan telah dapat menyejahterakan masyarakat. Pelaksanaan Misi II: Mewujudkan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan difokuskan pada perwujudan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya mewujudkan Ngada yang maju, berbudaya, sejahtera, dan berkelanjutan perlu untuk terus

ditopang dengan pembangunan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif. Pelaksanaan Misi III: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif difokuskan pada perwujudan tata kelola daerah yang efektif menopang pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan Misi IV: Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan diarahkan pada perwujudan ketahanan sosial budaya dan lingkungan. Adapun pelaksanaan Misi V: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Merata, Berkeadilan, dan Berkesinambungan diarahkan pada upaya mewujudkan infrastruktur Kabupaten Ngada yang semakin merata, berkeadilan, serta berkesinambungan sehingga dapat memberikan dorongan yang besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **5.2 Sasaran Pokok**

Rincian pernyataan kinerja yang diturunkan dari visi dan menggambarkan pencapaian pembangunan dirumuskan ke dalam sasaran pokok. Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Ngada disusun dengan merujuk kepada 17 arah pembangunan serta indikator utama pembangunan yang dimuat dalam RPJPN 2025-2045. Pada sub bab berikut akan disampaikan rincian mengenai sasaran pokok dan arah kebijakan transformatif serta keselarasannya dengan program penataan ruang, kebijakan penataan ruang, dan strategi penataan ruang yang dimuat dalam dokumen RTRW Kabupaten Ngada. Di samping itu, sub bab ini juga memuat indikator utama pembangunan Kabupaten Ngada tahun 2025-2045

**Tabel 5. 2 Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok**

Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
Misi 1: Mewujudkan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Kesehatan untuk semua	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,31	78,61	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	52/10000 KH	26/1000 0 KH	
		Pencegahan dan pengendalian penyakit, serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	6,84%	1,63%	
		Penuntasan stunting dan pencegahan ATM (Aids, Tuberculosis, dan Malaria)	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberculosis (treatment coverage) (%)	62,79%	100%	
		Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak serta pemenuhan SPM kesehatan	Angka keberhasilan pengobatan Tuberculosis (treatment success rate) (%)	63,34%	100%	
		Peningkatan kesehatan jiwa masyarakat	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	88%	100%	

Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		<p>Peningkatan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi</p> <p>Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis.</p> <p>Peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan dan penguatan telemedicine serta sistem sister hospital dengan RS di wilayah lain.</p> <p>Pengembangan RS Bajawa menjadi pusat rujukan di wilayah Flores</p>				
	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesment nasional untuk:			Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata
		Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan negeri dan swasta dan antar wilayah untuk memastikan	i) Literasi Membaca	75,76	94,96	

Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanjaan tinggi.				
		Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta fasilitasi pengadaan prodi perguruan tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah.	ii). Numerasi	56,37	72,17	
		Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas, kompetensi dan kesejahteraan pendidik yang modern dan adaptif.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,02	10,95	
		Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta keterkaitan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)	Harapan lama Sekolah (tahun)	12,98	14,96	
		Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui implementasi Program Prioritas Pendidikan Nasional dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pendidikan	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	10,53	12,11	

Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		Penyediaan afirmasi akses pendidikan, melalui pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh, pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, penyediaan beasiswa bagi anak-anak pendidikan formal maupun non formal atau pendidikan kesetaraan.				
	Perlindungan sosial yang adaptif	Pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif.	Tingkat Kemiskinan (%)	11,03	0,76	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan dan miskin
		Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan bagi lansia miskin, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	6%	50,33%	

Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		Pemanfaatan dan pemutakhiran data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) secara berkala untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	0,23%	0,61	
		Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.				
		Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial				

Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		<p>daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program untuk merespons dampak perubahan iklim.</p> <p>Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus</p> <p>Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif.</p>				
Misi 2: Mewujudkan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata unggulan dan pengembangan ekonomi kreatif sesuai dengan tata ruang dan dokumen perencanaan lainnya,	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	1,52	2,78	Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah yang inovatif berbasis IPTEK

Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2025	
		sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan, sentra-sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan.				
		Peningkatan diversifikasi ekonomi dan integrasi pembangunan jangka panjang kepariwisataan Wilayah Bali-Nusa Tenggara dengan menekankan pada destinasi wisata unggulan dan potensial Ngada.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,92	2,03	
		Pengembangan kawasan strategis pariwisata daerah serta pengembangan ekonomi kreatif .	Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Menginap	23.441	56.878	
		Pengembangan komoditas unggulan daerah berupa kopi, jahe, tenun, dan bambu.	Proporsi usaha ekonomi kreatif pada level kabupaten	4,66	8,55	
		Pengembangan kawasan pariwisata massal ( <i>mass tourism</i> ) untuk meningkatkan jumlah dan minat wisatawan lokal, serta sebagai kawasan penyangga bagi kawasan pariwisata premium yang berfokus pada pemecahan konsentrasi dan	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	0,9	3,32	

Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2025	
		perpanjangan lama tinggal wisatawan.				
		Pengembangan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan dan perubahan iklim, kemudahan investasi, serta pertumbuhan industri pariwisata dan industri kreatif lainnya.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	0,15	0,92	
		Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	0,05	0,70	
		Peningkatan produktivitas BUMD	Rasio Omzet Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,2	2,60	
		Industrialisasi koperasi melalui penguatan kemitraan usaha, proses bisnis, dan kelembagaan serta adopsi teknologi dan inovasi.	Persentase Peningkatan Kontribusi BUMD terhadap PAD (%)	15,51%	46.53 %	
		Penguatan BLK, penelitian, dan inovasi daerah dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,8	2,04	

Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		Revitalisasi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	75,47	100	
		Peningkatan anggaran IPTEKIN daerah menuju komersialisasi oleh industri.	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Sangat inovatif	
		Dukungan pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan				

Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.				

Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
	Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan pertanian organik dan pengembangan sistem pertanian regeneratif dengan penguatan kelembagaan petani dan korporasi petani.	Persentase luasan area pertanian organik	68,33	93,80	Meningkatnya ekonomi hijau
		Penerapan transportasi ramah lingkungan Electric Vehicle (EV).	Persentase produksi pertanian organik	68,33	88	
		Penguatan sistem pagar ganda pertanian untuk peningkatan produktivitas dan pengurangan alih fungsi lahan				
		Penguatan iklim investasi dan investasi hijau				
	Transformasi Digital	Penguatan TIK untuk memperluas akses pasar pada skala nasional hingga global, salah satunya dengan pemanfaatan e-commerce dan penguatan branding produk.	Persentase titik <i>blankspot</i>	0,4	0	Terwujudnya transformasi digital yang inklusif
		Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan				

Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2025	
		dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). serta peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.				
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	28,9	32,13	Meningkatnya integrasi ekonomi daerah di dalam dan luar negeri
		Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan berbasis masyarakat yang dikembangkan secara klaster melalui peningkatan produktivitas	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	5,04	6,40	

Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		dan nilai tambah (added value) tinggi yang berorientasi ekspor.				
		Peningkatan kualitas pemasaran yang menyejahterakan pelaku ekonomi daerah				
	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan konektivitas antara sentra produksi, pengolahan, dan pasar baik dalam dan luar negeri.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	87,4	100	Terwujudnya perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan sebagai pusat pertumbuhan
		Peningkatan peran kawasan perkotaan sebagai kawasan penyangga pariwisata.	Persentase Desa Mandiri (%)	0,54	1,35	
		Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.				
		Penguatan produktivitas dan kemandirian BUMDes, BUMDesMa dan lembaga ekonomi desa				
		Penguatan kelembagaan dan daya saing desa wisata				
		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau				

Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan rumah.				
		Penguatan peran lembaga adat di desa dan lembaga masyarakat desa sebagai agen pemberdayaan masyarakat				
		Penerapan teknologi tepat guna dalam peningkatan produktivitas ekonomi desa				
	Stabilitas Ekonomi Daerah	Peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan pinggiran/terpencil.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,38	0,89	Meningkatnya stabilitas ekonomi daerah
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif terutama KPBU, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Tingkat Inflasi (%)	3±1	3±1	

Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		Penguatan pengendalian inflasi daerah.				
Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah.	Indeks Reformasi Hukum	42,17	85,43	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif
		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,31	5	
		Peningkatan respon terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.	Indeks Pelayanan Publik	NA	5	
		Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.				
		Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.				
		Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui				

Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		<p>pendidikan anti korupsi. transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.</p> <p>Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.</p> <p>Penguatan regulasi penataan jalur lalu lintas laut dan penangkapan ikan serta peningkatan kapasitas masyarakat.</p> <p>Peningkatan kapasitas Partai Politik dalam penguatan demokrasi lokal.</p> <p>Penguatan kualitas tata kelola dan inovasi desa</p> <p>Penguatan peran kecamatan dalam pelayanan publik serta fasilitasi pemberdayaan dan pembangunan kewilayahan</p>				
	Stabilitas Daerah, Hukum Berkeadilan	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal.	Angka Kriminalitas	0,12	0	Terwujudnya stabilitas wilayah dan demokrasi substansial

Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
	dan Demokrasi Substansial	Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.				berbasis supremasi hukum
		Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.				
		Penguatan ruang-ruang partisipasi masyarakat yang bermakna dalam perumusan kebijakan dan proses pembangunan				
	Penguatan Kemitraan Strategis Daerah	Pengembangan tourism hub Bali-Nusa Tenggara melalui kerja sama multipihak	Persentase kemitraan strategis yang ditindaklanjuti	NA	100	Meningkatnya Kemitraan Strategis
		Penguatan kerja sama antar daerah, dengan mengoptimalkan kembali kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya.				
		Pelaksanaan kerja sama antardaerah khususnya antar kabupaten/kota dalam menopang pembangunan pariwisata dan penggerak ekonomi lainnya serta meningkatkan kerja sama perdagangan antardaerah.				

Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
Misi 4: Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	51,11	62,79	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang beragama maslahat dan berkebudayaan maju
		Peningkatan upaya pelestarian adat, tradisi, budaya, dan lingkungan sebagai identitas dan citra daerah dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata kebudayaan yang dapat menggerakkan perekonomian lokal dan pendidikan karakter.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	86,51	95,15	
		Penguatan kerja sama dan pelibatan tokoh adat/agama sebagai penggerak masyarakat dan mitra utama pemerintah dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan.				
		Penjangkauan terhadap masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran.				
		Penguatan karakter dan jati diri bangsa.				

Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		Penguatan peran Mosalaki dalam transformasi budaya				
	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Penguatan pengarusutamaan GEDSI (kesetaraan gender, disabilitas, inklusi sosial)	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	60,14	64,47	Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif
		Penguatan ketahanan keluarga	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,4	0,17	
		Penguatan perlindungan anak dan perempuan	Total Fertility Rate	2,51	2,22	
		Peningkatan ruang publik inklusif dan ramah anak				
		Optimalisasi penerapan kebijakan keluarga berencana				
		Peningkatan kesehatan reproduksi				
		Lingkungan Hidup Berkualitas	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	78,46	
	Penguatan konservasi air berbasis desa		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)	77,21	100	
			Pengelolaan Sampah			
			- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	4,64	73,87	
			- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan	15,26	81,36	

Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
			Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)			
	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Pengembangan pangan lokal untuk mendukung diversifikasi pangan (padi, jagung, dan sorgum) di sentra-sentra produksi pangan/food estate termasuk kawasan transmigrasi lokal yang didukung penyediaan sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi pertanian dan irigasi yang berbasis teknologi termasuk pertanian regeneratif sebagai penopang kegiatan ekonomi wilayah serta mendukung kemandirian pangan lokal.	Rasio elektrifikasi	94,66	100	Meningkatnya ketahanan energi, air dan ketahanan pangan
		Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air melalui pengembangan infrastruktur penyimpanan, distribusi (seperti embung, bendungan, dll), konservasi air seperti rainwater harvesting, diversifikasi pangan,	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> ) (%)	10,92	5,94	

Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		riset dan inovasi sistem dan teknologi pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan khususnya lokasi prioritas kekeringan.				
		Modernisasi irigasi	Kapasitas Air Baku (m <sup>3</sup> /detik)*	3,59	8,15	
			Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Perpipaan (%)	53,1	87	
Misi 5: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Merata, Berkeadilan, dan Berkesinambungan	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menerapkan prinsip rendah karbon dan berketahanan iklim, untuk mewujudkan masyarakat tangguh iklim dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam mendukung ketahanan energi dan air.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	113,81	91,47	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim
		Pengelolaan risiko bencana melibatkan multiaktor pentahelix dalam pembangunan dengan memperkuat kesadaran masyarakat akan potensi bahaya dan pengembangan mitigasi struktural				

Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		<p>dan non-struktural di wilayah rawan bencana tinggi.</p> <p>Perlindungan pulau-pulau kecil dari risiko bencana.</p> <p>Pengendalian banjir secara terpadu.</p> <p>Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.</p> <p>Peningkatan kegiatan ekonomi dan keamanan di kawasan pinggiran dan terpencil.</p> <p>Penuntasan RDTR kabupaten serta dukungan kewenangan tata ruang laut.</p> <p>Dukungan pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi secara terpadu.</p>				

Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		Dukungan peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut dan penyeberangan antarpulau untuk penumpang dan logistik serta pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang untuk mengangkut komoditas perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai bagian transportasi multimoda yang menjangkau seluruh daerah.				
		Dukungan pengembangan bandara yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah				
		Dukungan penyelesaian dan peningkatan Trans Flores (NTT), serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah dan desa.				
		Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem				

Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		<p>angkutan umum massal perkotaan yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang.</p> <p>Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air masyarakat sehari-hari.</p> <p>Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.</p> <p>Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah</p> <p>Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.</p> <p>Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.</p>				

Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		<p>Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.</p> <p>Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal.</p> <p>Penerapn STBM (Sanitasi Total berbasis Masyarakat) yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.</p> <p>Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).</p> <p>Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.</p>				

Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		<p>Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.</p> <p>Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau yang sesuai dengan karakteristik wilayah.</p> <p>Meningkatkan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengadaan perumahan.</p> <p>Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.</p> <p>Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan kabupaten dengan pusat dan provinsi, serta sinkronisasi substansi dengan dokumen perencanaan desa.</p>				

Misi RPJPD	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		Sinkronisasi perodesasi RPJPD dengan RTRW				
		Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.				
		Penguatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.				

### 5.2.1 Arah Pembangunan RPJPN dan Sasaran Pokok Kabupaten Ngada

Penyusunan sasaran pokok RPJPD perlu merujuk kepada arah pembangunan yang telah tertuang dalam RPJPN 2025-2045. Di samping itu untuk memastikan integrasi antara RPJPD dan RTRW perlu adanya persandingan antara sasaran pokok RPJPD dengan program penataan ruang yang dimuat dalam dokumen RTRW. Berikut ini merupakan rincian keterkaitan arah pembangunan RPJPN, sasaran pokok Kabupaten Ngada tahun 2025-2045, dan program RTRW.

**Tabel 5. 3 Keselarasan Sasaran Pokok Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045 dengan Arah Pembangunan RPJPN dan Program RTRW Kabupaten Ngada**

Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Program RTRW
Kesehatan untuk Semua	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	
Pendidikan Berkualitas yang Merata	Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	
Perlindungan Sosial yang Adaptif	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan dan miskin	
Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah yang inovatif berbasis IPTEK	Meningkatkan kegiatan pariwisata alam (misalnya <i>outbond, camping</i> ).
		Pengembangan kawasan pariwisata
		Rencana pembangunan kawasan peruntukan industri
Penerapan Ekonomi Hijau	Meningkatnya ekonomi hijau	
Transformasi Digital	Terwujudnya transformasi digital yang inklusif	Pengembangan jaringan telekomunikasi tetap
		Pemeliharaan Jaringan telekomunikasi bergerak seluler
Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Meningkatnya integrasi ekonomi daerah di dalam dan luar negeri	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalan
		Peningkatan fungsi terminal

Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Program RTRW
		Pembangunan dan pemeliharaan terminal Pemeliharaan Jembatan Pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan Pengembangan dan pemeliharaan Bandar Udara Perwujudan Kawasan Transportasi Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten
Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan sebagai pusat pertumbuhan	Program pengembangan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Program Pengembangan perkotaan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Program Pengembangan perkotaan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan Perwujudan Kawasan Permukiman
Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	
Stabilitas Daerah, Hukum Berkeadilan dan Demokrasi Substansial	Terwujudnya stabilitas wilayah dan demokrasi substansial berbasis supremasi hukum	
Stabilitas Ekonomi Daerah	Meningkatnya stabilitas ekonomi daerah	
Penguatan Kemitraan Strategis Daerah	Meningkatnya kemitraan strategis	
Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Perwujudan Kawasan Cagar Budaya
Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender,	Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan	

Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Program RTRW
dan Masyarakat Inklusif	gender dan masyarakat inklusif	
Lingkungan Hidup Berkualitas	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pembangunan rencana infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik Pemeliharaan dan pengembangan Tempat Pemeliharaan dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Pemeliharaan dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Pengembalian berbagai rona awal sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan Pelepasan <i>holding zone</i> hutan lindung menjadi kawasan hutan lindung dengan kode HL menjadi kawasan perkebunan dengan kode P-3 dengan luas kurang lebih 466 ha (tujuh hektare) Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat Perwujudan Kawasan Konservasi Perwujudan Kawasan Lindung Geologi Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove (EM)
Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya ketahanan energi, air dan ketahanan pangan	Pemantapan kawasan hutan lindung dengan kode HL pada area yang telah mengalami ahli fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air Pengembangan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air

Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Program RTRW
		Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Pemeliharaan dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Rencana Pengembangan dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik listrik lainnya Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Pengembangan dan Pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik berupa saluran distribusi lainnya Pemeliharaan Gardu listrik Pemeliharaan Jaringan irigasi berupa pengembangan dan pemeliharaan jaringan sekunder Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan Perwujudan Kawasan Hortikultura Perwujudan Kawasan perkebunan Perwujudan Kawasan Peternakan
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim	Pengembangan Jalur evakuasi bencana Pengembangan dan pemeliharaan Tempat evakuasi bencana Pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase

### 5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

Dalam rangka mencapai visi dan sasaran pokok, serta menjalankan misi maka dirumuskan arah kebijakan transformasi Kabupaten Ngada. Arah kebijakan transformasi merupakan agenda kerja selama 20 tahun yang pelaksanaannya dikerangkai oleh tema pembangunan pada setiap periode pembangunan jangka

menengah. Arah kebijakan ini menjadi instrumen mewujudkan transformasi atau lompatan pembangunan yang akan mengubah kondisi Ngada yang semakin progresif dan baik. Arah kebijakan transformasi mengacu pada tema pembangunan wilayah Bali-Nusa Tenggara pada RPJPN, yaitu Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional, serta arah kebijakan transformasi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Kabupaten Ngada.

**Tabel 5. 4 Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045 serta Penyelarasan terhadap Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang**

Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
Kesehatan untuk semua	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.	mengoptimalkan tingkat layanan prasarana lainnya guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih	mengoptimalkan tingkat penanganan dan pemanfaatan persampahan guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih
		Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal.	mengembangkan pusat-pusat pelayanan secara berhierarkis dan bersinergis	membangun sarana-prasarana pada kawasan pusat pertumbuhan baru untuk menarik mobilitas penduduk
		Pencegahan dan pengendalian penyakit, serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim.	mengoptimalkan tingkat layanan prasarana lainnya guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih	meningkatkan pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan pengendalian dampak lingkungan
		Penuntasan stunting dan pencegahan ATM (Aids, Tuberculosis, dan Malaria)	mengoptimalkan tingkat layanan prasarana lainnya guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih	meningkatkan pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan pengendalian dampak lingkungan
		Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak serta pemenuhan SPM kesehatan	mengoptimalkan tingkat layanan prasarana lainnya guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih	meningkatkan pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan pengendalian dampak lingkungan
		Peningkatan kesehatan jiwa masyarakat	mengoptimalkan tingkat layanan prasarana lainnya guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih	meningkatkan pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan pengendalian dampak lingkungan

Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
		Peningkatan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi	identifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	mengidentifikasi potensi sumber-sumber ekonomi dalam rangka mendorong pengembangan kawasan strategis ekonomi
		Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis.	mengoptimalkan tingkat layanan prasarana lainnya guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih	mengoptimalkan tingkat penanganan dan pemanfaatan persampahan guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih
			mengembangkan sistem transportasi secara intermoda	meningkatkan aksesibilitas dalam menghubungkan pusat permukiman yang ada
		Peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan dan penguatan telemedicine serta sistem sister hospital dengan RS di wilayah lain.	mengembangkan pusat-pusat pelayanan secara berhierarkis dan bersinergis	membangun sarana-prasarana pada kawasan pusat pertumbuhan baru untuk menarik mobilitas penduduk
		Pengembangan RS Bajawa menjadi pusat rujukan di wilayah Flores	mengembangkan pusat-pusat pelayanan secara berhierarkis dan bersinergis	membangun sarana-prasarana pada kawasan pusat pertumbuhan baru untuk menarik mobilitas penduduk
Pendidikan Berkualitas yang Merata	Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	mengembangkan pusat-pusat pelayanan secara berhierarkis dan bersinergis	membangun sarana-prasarana pada kawasan pusat pertumbuhan baru untuk menarik mobilitas penduduk
		Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan negeri dan swasta dan antar wilayah untuk	mengembangkan pusat-pusat pelayanan secara berhierarkis dan bersinergis	membangun sarana-prasarana pada kawasan pusat

Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
		memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi		pertumbuhan baru untuk menarik mobilitas penduduk
		Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta fasilitasi pengadaan prodi perguruan tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah.	mengembangkan pusat-pusat pelayanan secara berhierarkis dan bersinergis	membangun sarana-prasarana pada kawasan pusat pertumbuhan baru untuk menarik mobilitas penduduk
		Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas, kompetensi dan kesejahteraan pendidik yang modern dan adaptif.	mengembangkan pusat-pusat pelayanan secara berhierarkis dan bersinergis	membangun sarana-prasarana pada kawasan pusat pertumbuhan baru untuk menarik mobilitas penduduk
		Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta keterkaitan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)	mengembangkan pusat-pusat pelayanan secara berhierarkis dan bersinergis	membangun sarana-prasarana pada kawasan pusat pertumbuhan baru untuk menarik mobilitas penduduk
		Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui implementasi Program Prioritas Pendidikan Nasional dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pendidikan	mengembangkan pusat-pusat pelayanan secara berhierarkis dan bersinergis	membangun sarana-prasarana pada kawasan pusat pertumbuhan baru untuk menarik mobilitas penduduk

Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
		Penyediaan afirmasi akses pendidikan, melalui pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh, pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, penyediaan beasiswa bagi anak-anak pendidikan formal maupun non formal atau pendidikan kesetaraan.	meningkatkan pelayanan telekomunikasi secara merata di seluruh Wilayah	meningkatkan jaringan pelayanan telekomunikasi jaringan tetap secara merata di seluruh wilayah
Perlindungan sosial yang adaptif	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan dan miskin	Pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif.	identifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	mengembangkan kawasan strategis sosial budaya sebagai upaya pelestarian potensi alam
		Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan bagi lansia miskin, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.	identifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	mengembangkan kawasan strategis sosial budaya sebagai upaya pelestarian potensi alam
		Pemanfaatan dan pemutakhiran data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) secara berkala untuk	mengembangkan pusat-pusat pelayanan secara berhierarkis dan bersinergis	meningkatkan interaksi desa-kota dalam meningkatkan efisiensi pengembangan potensi ekonomi unggulan

Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
		program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.		
		Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.	identifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	mengembangkan kawasan strategis sosial budaya sebagai upaya pelestarian potensi alam
		Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana,	mengoptimalkan tingkat layanan prasarana lainnya guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih	mengembangkan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana sebagai pencegahan bencana secara dini

Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
		serta program untuk merespons dampak perubahan iklim.		
		Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus	mengembangkan pusat-pusat pelayanan secara berhierarkis dan bersinergis	meningkatkan interaksi desa-kota dalam meningkatkan efisiensi pengembangan potensi ekonomi unggulan
		Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif.	mengembangkan pusat-pusat pelayanan secara berhierarkis dan bersinergis	meningkatkan interaksi desa-kota dalam meningkatkan efisiensi pengembangan potensi ekonomi unggulan
Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah yang inovatif berbasis IPTEK	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata unggulan dan pengembangan ekonomi kreatif sesuai dengan tata ruang dan dokumen perencanaan lainnya, sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan, sentra-sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan.	mengembangkan pusat-pusat pelayanan secara berhierarkis dan bersinergis	membangun sarana-prasarana pada kawasan pusat pertumbuhan baru untuk menarik mobilitas penduduk

Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
		Peningkatan diversifikasi ekonomi dan integrasi pembangunan jangka panjang kepariwisataan Wilayah Bali-Nusa Tenggara dengan menekankan pada destinasi wisata unggulan dan potensial Ngada.	mengembangkan pusat-pusat pelayanan secara berhierarkis dan bersinergis	meningkatkan interaksi desa-kota dalam meningkatkan efisiensi pengembangan potensi ekonomi unggulan
		Pengembangan kawasan strategis pariwisata daerah serta pengembangan ekonomi kreatif .	mengembangkan pusat-pusat pelayanan secara berhierarkis dan bersinergis	meningkatkan interaksi desa-kota dalam meningkatkan efisiensi pengembangan potensi ekonomi unggulan
		Pengembangan komoditas unggulan daerah berupa kopi, jahe, tenun, dan bambu.	identifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	mengembangkan kawasan strategis sosial budaya sebagai upaya pelestarian potensi alam
		Pengembangan kawasan pariwisata massal ( <i>mass tourism</i> ) untuk meningkatkan jumlah dan minat wisatawan lokal, serta sebagai kawasan penyangga bagi kawasan pariwisata premium yang berfokus pada pemecahan konsentrasi dan perpanjangan lama tinggal wisatawan.	mengembangkan pusat-pusat pelayanan secara berhierarkis dan bersinergis	membangun sarana-prasarana pada kawasan pusat pertumbuhan baru untuk menarik mobilitas penduduk
		Pengembangan tourism hub Bali-Nusa Tenggara melalui kerja sama multipihak yang didukung pengembangan paket	mengembangkan pusat-pusat pelayanan secara berhierarkis dan bersinergis	membangun sarana-prasarana pada kawasan pusat pertumbuhan baru untuk menarik mobilitas penduduk

Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
		perjalanan dan penambahan rute penerbangan domestik dan internasional.		
		Pengembangan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan dan perubahan iklim, kemudahan investasi, serta pertumbuhan industri pariwisata dan industri kreatif lainnya.	mengembangkan pusat-pusat pelayanan secara berhierarkis dan bersinergis	membangun sarana-prasarana pada kawasan pusat pertumbuhan baru untuk menarik mobilitas penduduk
			mengoptimalkan tingkat layanan prasarana lainnya guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih	mengembangkan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana sebagai pencegahan bencana secara dini
		Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri.	identifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	mengembangkan kawasan strategis sosial budaya sebagai upaya pelestarian potensi alam
		Peningkatan produktivitas BUMD.	mengembangkan kawasan budi daya guna mendukung pemantapan sistem pertanian unggulan	mengembangkan kawasan peruntukan industri sebagai sektor pendukung pengembangan perekonomian wilayah
		Industrialisasi koperasi melalui penguatan kemitraan usaha, proses bisnis, dan kelembagaan serta adopsi teknologi dan inovasi.	meningkatkan pelayanan telekomunikasi secara merata di seluruh Wilayah	meningkatkan jaringan pelayanan telekomunikasi jaringan tetap secara merata di seluruh wilayah
		Penguatan BLK, penelitian, dan inovasi daerah dalam	identifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	mengembangkan kawasan strategis sosial budaya sebagai upaya pelestarian potensi alam

Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
		mempersiapkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.		
		Revitalisasi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja.	identifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	mengembangkan kawasan strategis sosial budaya sebagai upaya pelestarian potensi alam
		Peningkatan anggaran IPTEKIN daerah menuju komersialisasi oleh industri.	meningkatkan pelayanan telekomunikasi secara merata di seluruh Wilayah	meningkatkan jaringan pelayanan telekomunikasi jaringan tetap secara merata di seluruh wilayah
		Dukungan pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv)	meningkatkan pelayanan energi secara merata di seluruh Wilayah	meningkatkan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung

Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
		<p>pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.</p>		
Penerapan Ekonomi Hijau	Meningkatnya ekonomi hijau	Penerapan pertanian organik dan pengembangan sistem pertanian regeneratif dengan penguatan kelembagaan petani dan korporasi petani.	identifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	mengembangkan kawasan strategis sosial budaya sebagai upaya pelestarian potensi alam

Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
		Penerapan transportasi ramah lingkungan Electric Vehicle (EV).	meningkatkan pelayanan energi secara merata di seluruh Wilayah	meningkatkan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung
		Penguatan sistem pagar ganda pertanian untuk peningkatan produktivitas dan pengurangan alih fungsi lahan	identifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	mengembangkan kawasan strategis sosial budaya sebagai upaya pelestarian potensi alam
		Penguatan iklim investasi dan investasi hijau	mengembangkan pusat-pusat pelayanan secara berhierarkis dan bersinergis	mengembangkan kegiatan perekonomian untuk menarik mobilitas penduduk
Transformasi Digital	Terwujudnya transformasi digital yang inklusif	Penguatan TIK untuk memperluas akses pasar pada skala nasional hingga global, salah satunya dengan pemanfaatan e-commerce dan penguatan branding produk.	meningkatkan pelayanan telekomunikasi secara merata di seluruh Wilayah	meningkatkan jaringan pelayanan telekomunikasi jaringan tetap secara merata di seluruh wilayah
		Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). serta peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan	meningkatkan pelayanan telekomunikasi secara merata di seluruh Wilayah	mengembangkan teknologi telekomunikasi berbasis teknologi modern

Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
		keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.		
Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Meningkatnya integrasi ekonomi daerah di dalam dan luar negeri	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	meningkatkan pelayanan telekomunikasi secara merata di seluruh Wilayah	meningkatkan jaringan pelayanan telekomunikasi jaringan tetap secara merata di seluruh wilayah
		Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan berbasis masyarakat yang dikembangkan secara klaster melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah ( <i>added value</i> ) tinggi yang berorientasi ekspor.	mengembangkan pusat-pusat pelayanan secara berhierarkis dan bersinergis	mengembangkan kegiatan perekonomian untuk menarik mobilitas penduduk
		Peningkatan kualitas pemasaran yang menyejahterakan pelaku ekonomi daerah	meningkatkan pelayanan telekomunikasi secara merata di seluruh Wilayah	meningkatkan jaringan pelayanan telekomunikasi jaringan tetap secara merata di seluruh wilayah
Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya perdesaan dan perkotaan yang	Penguatan konektivitas antara sentra produksi, pengolahan,	mengembangkan sistem transportasi secara intermoda	mengembangkan jaringan jalan untuk menghubungkan kawasan-kawasan pusat

Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
	terintegrasi dan sebagai pusat pertumbuhan	dan pasar baik dalam dan luar negeri.		pertumbuhan ekonomi serta pengembangan jalan penghubung ke semua sentra produksi pertanian
		Peningkatan peran kawasan perkotaan sebagai kawasan penyangga pariwisata.	mengembangkan pusat-pusat pelayanan secara berhierarkis dan bersinergis	menetapkan hierarki simpul-simpul pusat pertumbuhan ekonomi wilayah
		Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.	mengembangkan pusat-pusat pelayanan secara berhierarkis dan bersinergis	menetapkan hierarki simpul-simpul pusat pertumbuhan ekonomi wilayah
		Penguatan produktivitas dan kemandirian BUMDes dan BUMDesMa dan Lembaga ekonomi desa	mengembangkan pusat-pusat pelayanan secara berhierarkis dan bersinergis	menetapkan hierarki simpul-simpul pusat pertumbuhan ekonomi wilayah
		Penguatan kelembagaan dan daya saing desa wisata	mengembangkan pusat-pusat pelayanan secara berhierarkis dan bersinergis	menetapkan hierarki simpul-simpul pusat pertumbuhan ekonomi wilayah
		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau	mengembangkan kawasan budi daya guna mendukung pemantapan sistem pertanian unggulan	mengembangkan dan mengendalikan pertumbuhan permukiman yang aman, nyaman, serta seimbang dengan mempertimbangkan kemampuan daya dukung lingkungan
		Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan rumah.	mengembangkan kawasan budi daya guna mendukung	mengembangkan dan mengendalikan pertumbuhan

Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
			pemantapan sistem pertanian unggulan	permukiman yang aman, nyaman, serta seimbang dengan mempertimbangkan kemampuan daya dukung lingkungan
		Penguatan peran lembaga adat di desa dan lembaga masyarakat desa sebagai agen pemberdayaan masyarakat	memantapkan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna menjaga kualitas lingkungan	melibatkan masyarakat dalam pelestarian kawasan lindung
		Penerapan teknologi tepat guna dalam peningkatan produktivitas ekonomi desa	meningkatkan pelayanan telekomunikasi secara merata di seluruh Wilayah	mengembangkan teknologi telekomunikasi berbasis teknologi modern
Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah.	megidentifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	mengembangkan kawasan strategis sosial budaya sebagai upaya pelestarian potensi alam
		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.	megidentifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	mengembangkan kawasan strategis sosial budaya sebagai upaya pelestarian potensi alam
		Peningkatan respon terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.	megidentifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	mengembangkan kawasan strategis sosial budaya sebagai upaya pelestarian potensi alam
		Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM	megidentifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	mengembangkan kawasan strategis sosial budaya sebagai upaya pelestarian potensi alam

Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
		ASN, dan pengelolaan aset daerah.		
		Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.	megidentifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	mengembangkan kawasan strategis sosial budaya sebagai upaya pelestarian potensi alam
		Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.	megidentifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	mengembangkan kawasan strategis sosial budaya sebagai upaya pelestarian potensi alam
		Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.	megidentifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	mengembangkan kawasan strategis sosial budaya sebagai upaya pelestarian potensi alam
		Penguatan kerja sama antar daerah, dengan mengoptimalkan kembali kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya.	megidentifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	mengembangkan kawasan strategis sosial budaya sebagai upaya pelestarian potensi alam
		Penguatan regulasi penataan jalur lalu lintas laut dan penangkapan ikan serta peningkatan kapasitas masyarakat.	megidentifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	mengembangkan kawasan strategis sosial budaya sebagai upaya pelestarian potensi alam

Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
		Peningkatan kapasitas Partai Politik dalam penguatan demokrasi lokal.	megidentifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	mengembangkan kawasan strategis sosial budaya sebagai upaya pelestarian potensi alam
		Penguatan kualitas tata kelola dan inovasi desa	memantapkan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna menjaga kualitas lingkungan	melibatkan masyarakat dalam pelestarian kawasan lindung
		Penguatan peran kecamatan dalam pelayanan publik serta fasilitasi pemberdayaan dan pembangunan kewilayahan	megidentifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	mengembangkan kawasan strategis sosial budaya sebagai upaya pelestarian potensi alam
Stabilitas Daerah, Hukum Berkeadilan dan Demokrasi Substansial	Terwujudnya stabilitas wilayah dan demokrasi substansial berbasis supremasi hukum	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal.	mengembangkan kawasan budi daya guna mendukung pemantapan sistem pertanian unggulan	mengembangkan kawasan untuk pertahanan dan keamanan dengan turut serta memelihara dan menjaga aset pertahanan dan keamanan
		Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.	mengembangkan kawasan budi daya guna mendukung pemantapan sistem pertanian unggulan	mengembangkan kawasan untuk pertahanan dan keamanan dengan turut serta memelihara dan menjaga aset pertahanan dan keamanan
		Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.	mengembangkan kawasan budi daya guna mendukung pemantapan sistem pertanian unggulan	mengembangkan kawasan untuk pertahanan dan keamanan dengan turut serta memelihara dan menjaga aset pertahanan dan keamanan
		Penguatan ruang-ruang partisipasi masyarakat yang bermakna dalam perumusan	memantapkan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung	melibatkan masyarakat dalam pelestarian kawasan lindung

Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
		kebijakan dan proses pembangunan	guna menjaga kualitas lingkungan	
Stabilitas Ekonomi Daerah	Meningkatnya stabilitas ekonomi daerah	Peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan pinggiran/terpencil.	mengembangkan pusat-pusat pelayanan secara berhierarkis dan bersinergis	meningkatkan interaksi desa-kota dalam meningkatkan efisiensi pengembangan potensi ekonomi unggulan
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif terutama KPBU, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	mengembangkan kawasan budi daya guna mendukung pemantapan sistem pertanian unggulan	mengembangkan kawasan peruntukan industri sebagai sektor pendukung pengembangan perekonomian wilayah
		Penguatan pengendalian inflasi daerah.	mengembangkan kawasan budi daya guna mendukung pemantapan sistem pertanian unggulan	mengembangkan kawasan peruntukan industri sebagai sektor pendukung pengembangan perekonomian wilayah
Penguatan Kemitraan Strategis Daerah	Meningkatnya kemitraan Strategis	Pengembangan tourism hub Bali-Nusa Tenggara melalui kerja sama multipihak	mengidentifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	

Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
		Penguatan kerja sama antar daerah, dengan mengoptimalkan kembali kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya.	mengidentifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	
		Pelaksanaan kerja sama antardaerah khususnya antar kabupaten/kota dalam menopang pembangunan pariwisata dan penggerak ekonomi lainnya serta meningkatkan kerja sama perdagangan antardaerah.	megidentifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	
Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.	memantapkan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna menjaga kualitas lingkungan	melibatkan masyarakat dalam pelestarian kawasan lindung
		Peningkatan upaya pelestarian adat, tradisi, budaya, dan lingkungan sebagai identitas dan citra daerah dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata kebudayaan yang dapat menggerakkan perekonomian lokal dan pendidikan karakter.	memantapkan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna menjaga kualitas lingkungan	melibatkan masyarakat dalam pelestarian kawasan lindung
		Penguatan kerja sama dan pelibatan tokoh adat/agama sebagai penggerak masyarakat	memantapkan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung	melibatkan masyarakat dalam pelestarian kawasan lindung

Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
		dan mitra utama pemerintah dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan.	guna menjaga kualitas lingkungan	
		Penjangkauan terhadap masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran.	megidentifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	mengembangkan kawasan strategis sosial budaya sebagai upaya pelestarian potensi alam
		Penguatan karakter dan jati diri bangsa.	megidentifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	mengembangkan kawasan strategis sosial budaya sebagai upaya pelestarian potensi alam
		Penguatan peran Mosalaki dalam transformasi budaya	megidentifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	mengembangkan kawasan strategis sosial budaya sebagai upaya pelestarian potensi alam
Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	Penguatan pengarusutamaan GEDSI (kesetaraan gender, disabilitas, inklusi sosial)	megidentifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	mengembangkan kawasan strategis sosial budaya sebagai upaya pelestarian potensi alam
		Penguatan ketahanan keluarga	megidentifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	mengembangkan kawasan strategis sosial budaya sebagai upaya pelestarian potensi alam
		Penguatan perlindungan anak dan perempuan	megidentifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	mengembangkan kawasan strategis sosial budaya sebagai upaya pelestarian potensi alam
		Peningkatan ruang publik inklusif dan ramah anak	megidentifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	mengembangkan kawasan strategis sosial budaya sebagai upaya pelestarian potensi alam
		Optimalisasi penerapan kebijakan keluarga berencana	mengidentifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan	mengembangkan kawasan strategis sosial budaya sebagai upaya pelestarian potensi alam

Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
			sosial budaya pada kawasan strategis	
		Peningkatan kesehatan reproduksi	mengidentifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	mengembangkan kawasan strategis sosial budaya sebagai upaya pelestarian potensi alam
Lingkungan Hidup Berkualitas	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.	mengoptimalkan tingkat layanan prasarana lainnya guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih	mengoptimalkan tingkat penanganan dan pemanfaatan persampahan guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih
		Penguatan konservasi air berbasis desa	mengoptimalkan tingkat layanan prasarana lainnya guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih	meningkatkan dan mengembangkan cakupan pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		Peningkatan sistem distribusi air bersih dan air minum	mengoptimalkan tingkat layanan prasarana lainnya guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih	meningkatkan dan mengembangkan cakupan pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		Pelibatan masyarakat dan lembaga adat dalam pengelolaan lingkungan	memantapkan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna menjaga kualitas lingkungan	melibatkan masyarakat dalam pelestarian kawasan lindung
		Pencegahan alih fungsi lahan terbangun	memantapkan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna menjaga kualitas lingkungan	melibatkan masyarakat dalam pelestarian kawasan lindung
		Peningkatan pengamanan kawasan lindung dan konservasi	mengoptimalkan tingkat layanan prasarana lainnya guna	mengembangkan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi

Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
		untuk mitigasi bencana dan antisipasi perubahan iklim	menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih	bencana sebagai pencegahan bencana secara dini
Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya ketahanan energi, air dan ketahanan pangan	Pengembangan pangan lokal untuk mendukung diversifikasi pangan (padi, jagung, dan sorgum) di sentra-sentra produksi pangan/food estate termasuk kawasan transmigrasi lokal yang didukung penyediaan sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi pertanian dan irigasi yang berbasis teknologi termasuk pertanian regeneratif sebagai penopang kegiatan ekonomi wilayah serta mendukung kemandirian pangan lokal.	mengembangkan kawasan budi daya guna mendukung pemantapan sistem pertanian unggulan	mengembangkan kawasan pertanian dengan meningkatkan peran, efisiensi, produktivitas yang berkelanjutan
		Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air melalui pengembangan infrastruktur penyimpanan, distribusi (seperti embung, bendungan, dll), konservasi air seperti rainwater harvesting, diversifikasi pangan, riset dan inovasi sistem dan teknologi pertanian dengan memperhatikan kelestarian	meningkatkan pelayanan sumber daya air secara merata di seluruh wilayah	meningkatkan sarana dan prasarana bangunan sumber daya air

Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
		lingkungan khususnya lokasi prioritas kekeringan.		
		Modernisasi irigasi	meningkatkan pelayanan sumber daya air secara merata di seluruh wilayah	meningkatkan sarana dan prasarana bangunan sumber daya air
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim	Pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menerapkan prinsip rendah karbon dan berketahanan iklim, untuk mewujudkan masyarakat tangguh iklim dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam mendukung ketahanan energi dan air.	memantapkan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna menjaga kualitas lingkungan	meningkatkan fungsi lindung untuk mendukung keberlanjutan kualitas lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim global
		Pengelolaan risiko bencana melibatkan multiaktor pentahelix dalam pembangunan dengan memperkuat kesadaran masyarakat akan potensi bahaya dan pengembangan mitigasi struktural dan non-struktural di wilayah rawan bencana tinggi.	mengoptimalkan tingkat layanan prasarana lainnya guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih	mengembangkan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana sebagai pencegahan bencana secara dini
		Perlindungan pulau-pulau kecil dari risiko bencana.	mengoptimalkan tingkat layanan prasarana lainnya guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih	mengembangkan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana secara dini
		Pengendalian banjir secara terpadu.	mengoptimalkan tingkat layanan prasarana lainnya guna	mengembangkan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi

Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
			menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih	bencana sebagai pencegahan bencana secara dini
		Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.	megidentifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	mengidentifikasi potensi sumber-sumber ekonomi dalam rangka mendorong pengembangan kawasan strategis ekonomi
		Peningkatan kegiatan ekonomi dan keamanan di kawasan pinggiran dan terpencil.	mengembangkan pusat-pusat pelayanan secara berhierarkis dan bersinergis	menetapkan hierarki simpul-simpul pusat pertumbuhan ekonomi wilayah
			mengembangkan kawasan budi daya guna mendukung pemantapan sistem pertanian unggulan	mengembangkan kawasan untuk pertahanan dan keamanan dengan turut serta memelihara dan menjaga aset pertahanan dan keamanan
		Pelaksanaan kerja sama antardaerah khususnya antar kabupaten/kota dalam menopang pembangunan pariwisata dan penggerak ekonomi lainnya serta meningkatkan kerja sama perdagangan antardaerah.	mengembangkan pusat-pusat pelayanan secara berhierarkis dan bersinergis	menetapkan hierarki simpul-simpul pusat pertumbuhan ekonomi wilayah
		Penuntasan RDTR kabupaten serta dukungan kewenangan tata ruang laut.	memantapkan pelestaian dan perlindungan kawasan lindung guna menjaga kualitas lingkungan	meningkatkan fungsi lindung untuk mendukung keberlanjutan kualitas lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim global

Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
		Dukungan pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi secara terpadu.	mengembangkan sistem transportasi secara intermoda	mengembangkan kapasitas tingkat pelayanan pelabuhan penyeberangan antar wilayah mengembangkan sarana pendukung pelabuhan umum dan upaya komersialisasi untuk ekspor-impor hasil pertanian
		Dukungan peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut dan penyeberangan antarpulau untuk penumpang dan logistik serta pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang untuk mengangkut komoditas perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai bagian transportasi multimoda yang menjangkau seluruh daerah.	mengembangkan sistem transportasi secara intermoda	mengembangkan kapasitas tingkat pelayanan pelabuhan penyeberangan antar wilayah mengembangkan sarana pendukung pelabuhan umum dan upaya komersialisasi untuk ekspor-impor hasil pertanian
		Dukungan pengembangan bandara yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah	mengembangkan sistem transportasi secara intermoda	mengembangkan kawasan Bandar Udara sebagai kawasan pendorong pertumbuhan dan perkembangan wilayah dan sebagai pintu gerbang Daerah
		Dukungan penyelesaian dan peningkatan Trans Flores (NTT),	mengembangkan sistem transportasi secara intermoda	mengembangkan jaringan jalan untuk menghubungkan

Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
		serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah dan desa.		kawasan-kawasan pusat pertumbuhan ekonomi serta pengembangan jalan penghubung ke semua sentra produksi pertanian
		Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang.	mengembangkan sistem transportasi secara intermoda	meningkatkan aksesibilitas dalam menghubungkan pusat permukiman yang ada
		Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air masyarakat sehari-hari.	mengoptimalkan tingkat layanan prasarana lainnya guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih	meningkatkan dan mengembangkan cakupan pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.	mengoptimalkan tingkat layanan prasarana lainnya guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih	mengembangkan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana sebagai pencegahan bencana secara dini
		Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah	mengoptimalkan tingkat layanan prasarana lainnya guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih	meningkatkan dan mengembangkan cakupan pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
				meningkatkan pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan pengendalian dampak lingkungan

Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
		Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.	mengoptimalkan tingkat layanan prasarana lainnya guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih	meningkatkan dan mengembangkan cakupan pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.	mengoptimalkan tingkat layanan prasarana lainnya guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih	meningkatkan pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan pengendalian dampak lingkungan
		Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.	mengoptimalkan tingkat layanan prasarana lainnya guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih	meningkatkan dan mengembangkan cakupan pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal.	mengoptimalkan tingkat layanan prasarana lainnya guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih	meningkatkan dan mengembangkan cakupan pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		Penerapan STBM (Sanitasi Total berbasis Masyarakat) yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.	mengoptimalkan tingkat layanan prasarana lainnya guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih	meningkatkan pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan pengendalian dampak lingkungan
		Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas	mengoptimalkan tingkat layanan prasarana lainnya guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih	mengoptimalkan tingkat penanganan dan pemanfaatan persampahan guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih

Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
		pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).		
		Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.	mengembangkan kawasan budi daya guna mendukung pemantapan sistem pertanian unggulan	mengembangkan dan mengendalikan pertumbuhan permukiman yang aman, nyaman, serta seimbang dengan mempertimbangkan kemampuan daya dukung lingkungan
		Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.	mengembangkan kawasan budi daya guna mendukung pemantapan sistem pertanian unggulan	mengembangkan dan mengendalikan pertumbuhan permukiman yang aman, nyaman, serta seimbang dengan mempertimbangkan kemampuan daya dukung lingkungan
		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau yang sesuai dengan karakteristik wilayah.	mengembangkan kawasan budi daya guna mendukung pemantapan sistem pertanian unggulan	mengembangkan dan mengendalikan pertumbuhan permukiman yang aman, nyaman, serta seimbang dengan mempertimbangkan kemampuan daya dukung lingkungan
		Meningkatkan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengadaan perumahan.	mengembangkan kawasan budi daya guna mendukung pemantapan sistem pertanian unggulan	mengembangkan dan mengendalikan pertumbuhan permukiman yang aman, nyaman, serta seimbang dengan mempertimbangkan

Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
				kemampuan daya dukung lingkungan
		Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.	meningkatkan pelayanan telekomunikasi secara merata di seluruh Wilayah	mengembangkan teknologi telekomunikasi berbasis teknologi modern
		Sinkronisasi substansi dan perodesasi dokumen perencanaan kabupaten dengan pusat dan provinsi, serta sinkronisasi substansi dengan dokumen perencanaan desa.	mengidentifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	mengembangkan kawasan strategis sosial budaya sebagai upaya pelestarian potensi alam
		Sinkronisasi perodesasi RPJPD dengan RTRW	mengidentifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	mengembangkan kawasan strategis sosial budaya sebagai upaya pelestarian potensi alam
		Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.	mengidentifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	mengembangkan kawasan strategis sosial budaya sebagai upaya pelestarian potensi alam
		Penguatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.	mengidentifikasi sumber-sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada kawasan strategis	mengembangkan kawasan strategis sosial budaya sebagai upaya pelestarian potensi alam

Sasaran pokok pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Ngada 2025-2045 dilengkapi dengan indikator utama pembangunan daerah. Indikator utama pembangunan daerah merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian pembangunan daerah serta kontribusi terhadap pencapaian pembangunan nasional jangka panjang. Indikator utama pembangunan Kabupaten Ngada 2025-2045 dirumuskan dengan merujuk kepada 45 lima indikator yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045 yang kemudian disesuaikan dengan konteks daerah.

**Tabel 5. 5 Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045**

No	Sasaran Pokok	Indikator Utama	2025	2045
1	<b>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</b>	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,31	78,61
		Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	52/10000 KH	26/10000 KH
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	6,84%	1,63%
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	62,79%	100%
		Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	63,34%	100%
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	88%	100%
2	<b>Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata</b>	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesment nasional untuk:		
		i) Literasi Membaca	75,76	94,96
		ii). Numerasi	56,37	72,17
		Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,02	10,95
		Harapan lama Sekolah (tahun)	12,98	14,96
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	75,76	94,96
3	<b>Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif bagi</b>	Tingkat Kemiskinan (%)	11,03	0,76
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	6%	50,33%

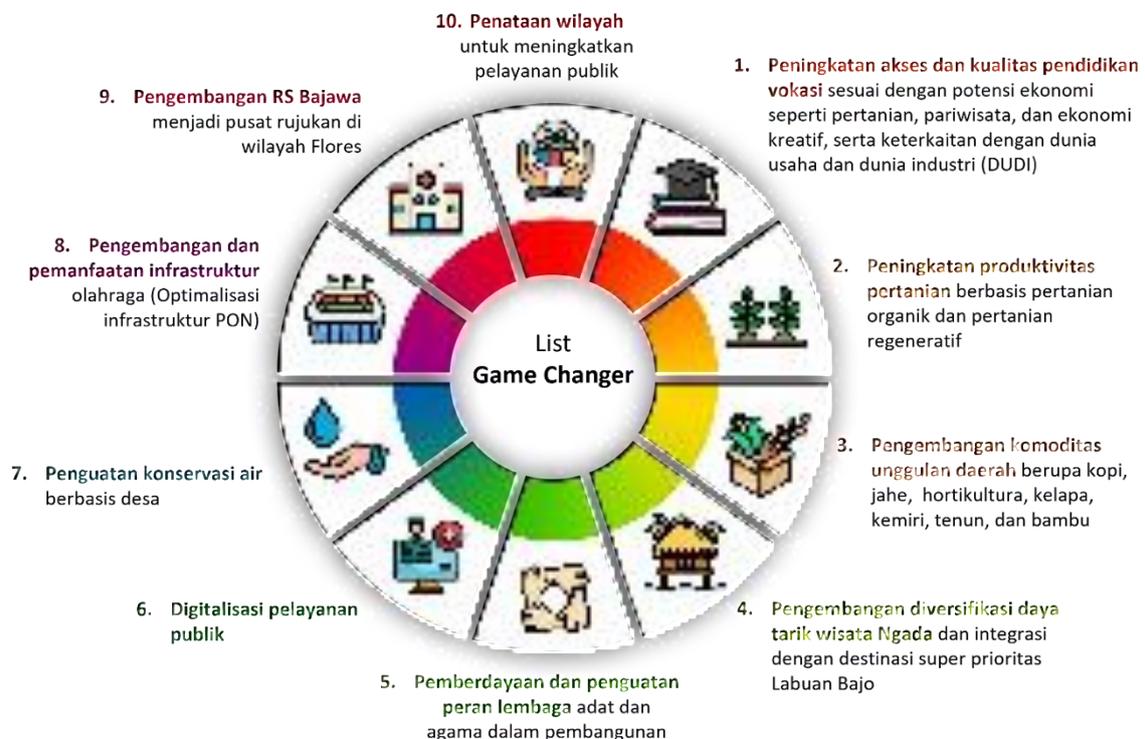
No	Sasaran Pokok	Indikator Utama	2025	2045		
	<b>masyarakat rentan dan miskin</b>	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	0,23%	0,61		
<b>4</b>	<b>Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah yang inovatif berbasis IPTEK</b>	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	1,52	2,78		
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,92	2,03		
		Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Menginap	23.441	56.878		
		Proporsi usaha ekonomi kreatif pada level kabupaten	4,66	8,55		
		Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	0,9	3,32		
		Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	0,15	0,92		
		Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	0,05	0,70		
		Rasio Omzet Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,2	2,60		
		Persentase Peningkatan Kontribusi BUMD terhadap PAD (%)	15,51%	46,53 %		
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,8	2,04		
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	75,47	100		
		Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Sangat inovatif		
		<b>5</b>	<b>Meningkatnya ekonomi hijau</b>	Persentase luasan area pertanian organik (%)	68,33	93,80
				Persentase produksi pertanian organik (%)	68,33	88%
<b>6</b>	<b>Terwujudnya transformasi digital yang inklusif</b>	Persentase titik <i>blankspot</i>	0,4	0		
<b>7</b>	<b>Meningkatnya integrasi ekonomi daerah di dalam dan luar negeri</b>	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	28,9	32,13		
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	5,04%	6,40%		
<b>8</b>	<b>Terwujudnya perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan sebagai pusat pertumbuhan</b>	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	87,4	100		
		Persentase Desa Mandiri (%)	0,54	1,35		
<b>9</b>		Indeks Reformasi Hukum	42,17	85,43		

No	Sasaran Pokok	Indikator Utama	2025	2045
	<b>Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif</b>	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,31	5
		Indeks Pelayanan Publik	3	5
10	<b>Terwujudnya stabilitas wilayah dan demokrasi substansial berbasis supremasi hukum</b>	Angka Kriminalitas	0,12	0
11	<b>Meningkatnya stabilitas ekonomi daerah</b>	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,38%	0,89%
		Tingkat Inflasi (%)	3±1	3±1
12	<b>Meningkatnya Kemitraan Strategis</b>	Persentase kemitraan strategis yang ditindaklanjuti	NA	100
13	<b>Terwujudnya kehidupan masyarakat yang beragama maslahat dan berkebudayaan maju</b>	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	51,11	62,79
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	86,51	95,15
14	<b>Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif</b>	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	60,14	64,47
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,4	0,17
		Total Fertility Rate	2,51	2,22
15	<b>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</b>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	78,46	87,55
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)	77,21	100
		Pengelolaan Sampah		
		- Timbulan Sampah Terolah/terangkut di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	4,64	73,87
		- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	15,26	81,36
16	<b>Meningkatnya ketahanan energi, air dan ketahanan pangan</b>	Rasio elektrifikasi	94,66	100
		Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> ) (%)	10,92	5,94
		Kapasitas Air Baku (m <sup>3</sup> /detik)*	3,59	8,15
		Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Perpipaan (%)	53,1	87

No	Sasaran Pokok	Indikator Utama	2025	2045
17	<b>Meningkatnya ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim</b>	Indeks Risiko Bencana (IRB)	113,81	91,47

### 5.2.3 *Game Changers* (Upaya Transformasi Super Prioritas)

*Game changers* merupakan upaya transformasi super prioritas dalam mendukung pembangunan di daerah. Dalam rangka mewujudkan transformasi Kabupaten Ngada, diperlukan agenda pembangunan yang lebih operasional. Agenda pembangunan ini merupakan upaya transformasi super prioritas yang akan mengakselerasi pembangunan di berbagai bidang dan merupakan agenda utama dari berbagai arah kebijakan transformasi. Upaya transformasi super prioritas ini memiliki sifat operasional, lintas sektor dan membutuhkan kolaborasi serta akan merespon berbagai isu strategis.



*Game changers* Kabupaten Ngada terdiri dari 10 upaya transformasi yang terbagi ke dalam beberapa bidang prioritas. Melalui *game changers* ini

diharapkan jika dilakukan intervensi program dan kegiatan akan menjadi pendorong percepatan atau daya ungkit yang berpengaruh besar untuk pertumbuhan wilayah di Kabupaten Ngada dalam 20 tahun ke depan.

### **1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta keterkaitan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)**

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan sesuai dengan konteks dan kebutuhan daerah menjadi salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada, guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Ngada yang unggul dan berdaya saing. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan melakukan beberapa langkah transformatif sebagai berikut:

- Penyediaan dan pemerataan akses layanan pendidikan yang berkualitas di semua jenjang;
- Penguatan kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan;
- Identifikasi kesesuaian antara pasar kerja dengan kurikulum pembelajaran;
- Pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan layanan pendidikan;
- Menerapkan tata kelola pendidikan yang adaptif dan kolaboratif.

### **2. Peningkatan produktivitas pertanian berbasis pertanian organik dan pertanian regeneratif**

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Ngada. Namun, tingkat produktivitasnya masih perlu ditingkatkan khususnya untuk memenuhi permintaan pasar, baik dari dalam daerah maupun luar daerah. Pendekatan baru dalam bidang pertanian perlu untuk diimplementasikan guna menjamin pertanian yang

berkelanjutan dan membawa dampak baik dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pertanian organik dan regeneratif menjadi sebuah upaya transformasi super prioritas untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mewujudkan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Ngada. Peningkatan produktivitas pertanian berbasis pertanian organik dan regeneratif dapat dilakukan melalui upaya berikut:

- Peningkatan wawasan pertanian organik dan regeneratif bagi SDM pertanian;
- Penguatan manajemen kelembagaan petani;
- Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana pertanian organik dan regeneratif;
- Optimalisasi pemanfaatan hasil riset, inovasi, dan teknologi pertanian organik dan regeneratif;
- Perluasan akses pasar dan jaringan distribusi; dan
- Integrasi antar sub sektor yang mendukung penerapan pertanian organik dan regeneratif.

### **3. Pengembangan komoditas unggulan daerah berupa kopi, jahe, hortikultura, kelapa, kemiri, tenun, dan bambu**

Potensi SDA yang dimiliki Kabupaten Ngada saat ini masih belum dikembangkan secara optimal sehingga membutuhkan upaya transformatif untuk meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan. Komoditas unggulan berupa kopi, jahe, tanaman hortikultura, kelapa, kemiri, tenun, dan bambu masih dijual sebagai barang mentah padahal komoditas-komoditas tersebut dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Selain itu, produk yang telah diolah dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Upaya transformatif untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan Kabupaten Ngada dapat dilakukan melalui upaya berikut ini:

- Peningkatan produktivitas dan kualitas pertanian untuk menjamin ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan;
- Peningkatan iklim investasi hijau dalam rangka menarik investor yang bergerak di bidang industri pengolahan;
- Penguatan kapasitas pelaku industri;
- Peningkatan kualitas dan diversifikasi olahan produk melalui riset dan inovasi;
- Penguatan kerja sama antar sektor dan kolaborasi *penta helix*;
- Penguatan jalur distribusi dan pemasaran berbasis teknologi.

#### **4. Pengembangan diversifikasi daya tarik wisata Ngada dan integrasi dengan destinasi super prioritas Labuan Bajo**

Upaya transformasi prioritas ini dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas Kabupaten Ngada dalam menangkap berbagai peluang pengembangan destinasi wisata super prioritas Labuan Bajo dan mendukung kebijakan nasional dalam pembangunan koridor ekonomi *Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional* di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. *Pertama*, upaya ini diarahkan untuk menarik wisatawan yang berkunjung di Labuan Bajo untuk melanjutkan perjalanan wisata menuju Kabupaten Ngada. *Kedua*, potensi pertanian yang dimiliki Kabupaten Ngada dapat dikembangkan dan dioptimalkan untuk mendukung kebutuhan pangan Labuan Bajo yang berpotensi semakin meningkat seiring dengan peningkatan kunjungan wisatawan. Upaya transformatif ini dilakukan melalui:

- Peningkatan kemudahan akses menuju destinasi wisata melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi;
- Pengembangan kompetensi dan keterampilan SDM pariwisata;
- Pengembangan desa wisata;
- Pengembangan daya tarik terutama wisata budaya, ekowisata, dan agrowisata;

- Pengembangan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek kebencanaan dan perubahan iklim;
- Pemanfaatan TIK untuk memperluas promosi dan pemasaran pariwisata dan produk unggulan daerah.

## **5. Pemberdayaan dan penguatan peran lembaga adat dan agama dalam pembangunan**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah tidak lepas dari adanya partisipasi berbagai *stakeholders* pembangunan. Keterlibatan tersebut harus bermakna atau dengan kata lain partisipasi yang dilakukan tidak hanya formalitas, tetapi juga substantif sehingga mampu mengakselerasi pembangunan daerah. Dalam konteks ini, pemberdayaan dan penguatan peran lembaga adat dan agama dalam pembangunan melalui pelibatan langsung maupun tidak langsung berbagai tokoh masyarakat, adat, dan agama, seperti mosalaki, gereja, perempuan, dan lain-lain sangat penting. Kondisi ini dapat terwujud dengan prasyarat, yaitu peningkatan kapasitas dan dukungan kebijakan pemerintah daerah.

## **6. Digitalisasi pelayanan publik**

Digitalisasi pelayanan publik bagian dari kebijakan transformasi tata kelola yang harus dilakukan di tengah tuntutan masyarakat yang sangat tinggi dan beragam terhadap pelayanan pemerintah. Digitalisasi pelayanan publik dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan responsif. Oleh karena itu, penguatan terhadap kebijakan dan infrastruktur TIK, digital *talent* bagi ASN, dan peningkatan literasi digital kepada masyarakat harus dilakukan oleh pemerintah daerah karena menjadi prasyarat utama terwujudnya digitalisasi pelayanan publik.

## **7. Penguatan konservasi air berbasis desa**

Kebutuhan air bersih masyarakat akan terpenuhi jika kondisi daya dukung air di Kabupaten Ngada mencukupi. Perlu adanya konservasi sumber daya air yang melibatkan masyarakat secara langsung. Lokasi sumber air yang terletak di wilayah desa menjadikan rasa kepemilikan masyarakat lebih tinggi, sehingga upaya konservasi di kawasan sekitar sumber air perlu dilakukan. Konservasi lingkungan selain dapat meningkatkan kuantitas air juga sebagai upaya pengendalian banjir, karena akan lebih banyak air yang terserap dalam tanah daripada yang mengalir di permukaan.

Penguatan tata kelola air melalui kolaborasi berbagai stakeholders perlu dilakukan agar upaya kebutuhan air masyarakat dapat terpenuhi. Distribusi air dari sumber menuju permukiman masyarakat dapat dilakukan dengan memperkuat SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Perdesaan dan PAMSIMAS (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang dikelola langsung oleh desa dengan kelembagaan khusus yang dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan dan konservasi air di kawasan perdesaan.

## **8. Pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur olahraga (Optimalisasi infrastruktur PON)**

Kabupaten Ngada akan menjadi salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) pada tahun 2028. Event olahraga nasional ini merupakan peluang besar untuk semakin mengenalkan potensi Ngada. Tidak kalah penting, gelaran PON tersebut merupakan batu loncatan untuk mengembangkan SDM Ngada secara berkelanjutan. Pengembangan SDM dalam hal ini terutama melalui peningkatan pembangunan keolahragaan baik dalam persiapan, pelaksanaan dan pasca *event*. Pengembangan pasca *event* melalui pemanfaatan secara optimal sarana-prasarana olahraga yang telah terbangun.

Optimalisasi infrastruktur olahraga di Kabupaten Ngada memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan didukung oleh strategi pengelolaan yang profesional. Pemanfaatan *event* olahraga seperti PON dapat menjadi sarana promosi pariwisata untuk menarik pengunjung dan meningkatkan ekonomi lokal. Peningkatan kualitas infrastruktur olahraga dapat menjadikan Kabupaten Ngada menjadi pusat kegiatan yang aktif, sehingga akan berdampak positif pada pengembangan perekonomian daerah.

#### **9. Pengembangan RS Bajawa menjadi pusat rujukan di wilayah Flores**

Peningkatan kualitas layanan kesehatan rujukan menjadi salah satu pilar dalam program transformasi sistem kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk menyediakan layanan kesehatan rujukan yang berkualitas, terutama dalam menangani penyakit katastropik seperti jantung, stroke, kanker dan ginjal di suatu daerah. Langkah transformatif tersebut dapat diwujudkan dengan cara:

- Peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit;
- Peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan, tenaga medis, dan tenaga non medis;
- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung layanan rumah sakit;
- Pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- Transformasi sistem pembiayaan kesehatan secara lebih efektif;
- Penguatan tata kelola penyelenggaraan layanan rumah sakit.

#### **10. Penataan wilayah untuk meningkatkan pelayanan publik**

Seiring dengan dinamika pembangunan yang semakin berkembang, penataan wilayah menjadi salah satu isu pembangunan yang perlu

diantisipasi. Agenda transformatif penataan wilayah diharapkan dapat memperpendek rentang kendali dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik. Penataan wilayah di Kabupaten Ngada lebih diarahkan pada penataan wilayah kecamatan dan desa sesuai kebutuhan dan pengembangan potensi.

# BAB VI

## PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045 merupakan kerangka pembangunan Kabupaten Ngada selama 20 tahun ke depan. Dokumen ini merupakan dokumen milik daerah yang disusun dengan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik masyarakat, swasta dan pemerintah. Visi Kabupaten Ngada Bumi Bersama yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan terwujud melalui partisipasi seluruh pelaku pembangunan. Oleh karena itu, dokumen ini harus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan yang meliputi pemerintah daerah, lembaga dan badan yang merepresentasikan kekuasaan daerah, pihak swasta, dan organisasi masyarakat sipil.

Kaidah pelaksanaan RPJPD yang perlu diperhatikan meliputi konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian dan mekanisme perubahan. Beberapa poin tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan terwujudnya visi RPJPD Kabupaten Ngada 2025-2045.

### **1) Konsistensi perencanaan dan pendanaan**

Konsistensi dan sinkronisasi dokumen rencana menjadi kunci penting dalam mewujudkan perencanaan yang berkualitas yang dapat memberikan pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan. Konsistensi dokumen RPJPD ke dokumen turunannya meliputi:

- a) Sinkronisasi periodisasi dan substansi antara dokumen RPJPD dan RPJMD. Periodisasi dan penahapan pembangunan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD.
- b) RPJPD memberikan arah pembangunan yang bersifat jangka panjang. Hal-hal yang bersifat lebih spesifik akan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Renja Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran pembangunan perlu didukung oleh optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan baik yang bersumber dari, pemerintah maupun non-pemerintah. Partisipasi dan kolaborasi seluruh pelaku pembangunan menjadi agenda penting dalam mewujudkan pendanaan pembangunan yang lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran.

## **2) Kerangka pengendalian**

Kerangka pengendalian meliputi kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko baik pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

## **3) Mekanisme perubahan**

Dokumen perencanaan perlu didesain secara adaptif sehingga memerlukan penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Pemutakhiran target RPJPD dapat dituangkan dalam dokumen RPJMD dengan merujuk pada hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.



Pemerintah  
Kabupaten Ngada

**Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  
Kabupaten Ngada**

---

Tahun 2025 – 2045

